



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 213);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 329);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disebut RPJMD Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Luwu Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
18. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Luwu Utara.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan.
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
25. Kabupaten lainnya adalah kabupaten lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
26. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

RPJMD merupakan :

- a. Penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam:

- a. penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, APBD, dan RKA/DPA; dan
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten yang berbatasan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintahan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5

- (1) Sistematisa RPJMD terdiri atas:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab VI	: Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VII	: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Bab VIII	: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Bab IX	: Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Bab X	: Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Bab XI	: Penutup

- (2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 18 Agustus 2016

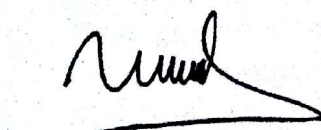
BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.8.80.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD Kabupaten Luwu Utara merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati untuk jangka waktu 5 tahun yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Luwu Utara, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMD dan RTRW Kabupaten lainnya.

RPJMD Kabupaten Luwu Utara ini, memuat arah kebijakan keuangan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas pembangunan daerah dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati dalam pasal ini adalah merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Yang dimaksud dengan arah kebijakan keuangan daerah dalam pasal ini adalah merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Yang dimaksud dengan strategi pembangunan daerah dalam pasal ini adalah merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Yang dimaksud dengan kebijakan umum dalam pasal ini adalah memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah lima tahunan, menjadi acuan dan sebagai arahan dalam pelaksanaan pembangunan. Dokumen RPJMD disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mengamanahkan Penyusunan RPJMD sebagai pedoman pembangunan lima tahunan.

Dalam penyusunan RPJMD ini telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan merupakan konsekuensi dari terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati, juga tetap memperhatikan dan mengacu RPJM-Nasional dengan memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita), RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 serta dokumen perencanaan lainnya.

Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana yang tersebut diatas, pendekatan penyusunan RPJMD harus bersifat teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder.

Dokumen RPJMD ini diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Luwu Utara untuk mencapai Visi "LUWU UTARA YANG RELIGIUS DENGAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN MERATA YANG BERLANDASKAN KEARIFAN LOKAL".



Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan Daerah Kabupaten Luwu Utara guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amin

Masamba, Agustus 2016

BUPATI LUWU UTARA



INDAH PUTRI INDRIANI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
1.5. Maksud dan Tujuan	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-17
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-43
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-93
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1. Kinerja Keuangan 2011-2015	III-2
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-16
3.3. Kerangka Pendanaan	III-22
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2. Isu-Isu Strategis	IV-23
BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi	V-1
5.2. Misi	V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran	V-4
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
6.1. Strategi	VI-1
6.2. Arah Kebijakan	VI-4
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
7.1. Kebijakan Umum	VII-1
7.2. Program Pembangunan Daerah	VII-5



	7.3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan	VII-16
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	VIII-1
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	IX-1
	9.1. Indikator Makro Daerah	IX-1
	9.2. Indikator Kinerja Daerah	IX-3
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	X-1
	10.1. Pedoman Transisi	X-1
	10.2. Kaidah Pelaksanaan	X-1
BAB XI	PENUTUP	XI-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam RPJMD termuat data tentang capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya, gambaran pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan, permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, strategi, kebijakan dan program yang akan dijalankan, serta indikator dan target kinerja pembangunan.

Pengertian pembangunan daerah menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Daerah dalam konteks ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat



setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Utara merupakan pelaksanaan dari amanat regulasi yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan NKRI adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Salah satu dari rencana pembangunan daerah yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

RPJMD memiliki nilai strategis karena ia merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Artinya, RPJMD merupakan dokumen yang mentransformasikan kontrak politik menjadi kontrak kinerja dari kepala daerah terpilih. Selanjutnya, RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rentsra SKPD) yang merupakan rencana lima tahun SKPD serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan rencana tahunan daerah.



Metode penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Utara berbasis pada berbagai pendekatan. Pertama, pendekatan politik, dengan pemahaman bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik, berupa penggunaan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam merumuskan kondisi yang akan diwujudkan (visi, tujuan, sasaran dan hasil), cara mencapai tujuan (misi, strategi, kebijakan dan program), serta indikator kinerja (impact dan outcome). Ketiga, pendekatan partisipatif, berupa pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme konsultasi publik dan musrenbang RPJMD. Keempat, pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) berupa penyelarasan RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya yakni RPJPD, RTRW, RPJMN dan RPJMD Provinsi.

Periode berlakunya RPJMD ini adalah tahun 2016-2021. Periode ini didasarkan pada tanggal pelantikan kepada daerah yakni 17 Februari 2016 yang berarti masa jabatan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021. Masa jabatan Bupati Hj. Indah Putri Indriani, S.IP, M.Si dan Wakil Bupati Muh. Thahar Rum, SH, selama 2016-2021 tersebut sekaligus menjadi periode RPJMD Kabupaten Luwu Utara.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3926);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 213);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik pada skala lokal, regional maupun



Nasional dan dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

(1) Hubungan RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RPJMN

RPJMD Kabupaten Luwu Utara mensinkronkan visi-misi serta program prioritas dengan tiga dimensi pembangunan yang merupakan penjabaran dari Nawacita dalam RPJMN. Dari tiga dimensi pembangunan dalam RPJMN tersebut terjabarkan 18 prioritas nasional yang didalamnya termuat program dan kegiatan. RPJMD Kabupaten Luwu Utara mensinkronkan kebijakan dan programnya dengan prioritas nasional tersebut.

(2) RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

RPJMD Kabupaten Luwu Utara mensinkronkan visi-misi serta program prioritas dengan 11 program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD. Sinkronisasi tersebut mempertimbangkan relevansi isu strategis Kabupaten Luwu Utara dengan program prioritas Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.

(3) RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029

RPJMD Kabupaten Luwu Utara memperhatikan arahan struktur ruang dan pola ruang serta program pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang relevan dengan Kabupaten Luwu Utara pada periode berkenaan dengan RPJMD Luwu Utara 2016-2021.

(4) RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RPJPD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025

RPJMD Kabupaten Luwu Utara mengacu kepada sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Luwu Utara khususnya untuk yang berkenaan pada periode 2016-2021.

(5) RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031

RPJMD Kabupaten Luwu Utara memperhatikan struktur dan pola penataan ruang dalam RTRW sebagai dasar untuk menetapkan lokasi



program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah. Poin utama yang menjadi perhatian adalah kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, dan penetapan kawasan strategis. Selain itu juga diperhatikan arahan program pemanfaatan ruang.

(6) RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Semua program dalam Renstra SKPD sudah termuat dalam RPJMD.

(7) RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Program yang termuat dalam RKPD diambil dari RPJMD sesuai tahun RKPD, termasuk indikator dan target kinerja outcome serta indikasi pendanaannya.

(8) RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan Renja SKPD.

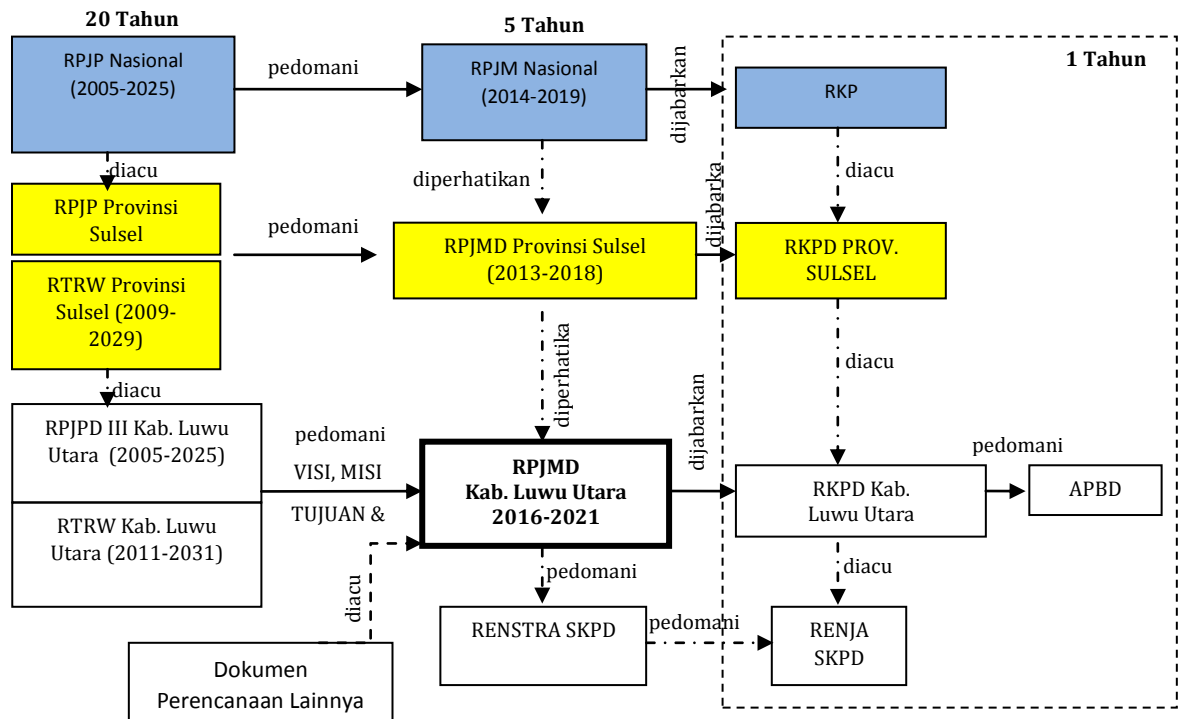
RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD serta pelaksanaan Musrenbang.

(9) RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan Beberapa Dokumen Lainnya

RPJMD juga menjadi acuan dan bersinergi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni: 1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD); 2. Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa); 3. Rencana Aksi Pengurangan Dampak Perubahan Iklim; 4. Rencana Aksi Sustainable Development Goals.



Skema hubungan antar dokumen dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 1.1. Hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW, RPJPD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025, RTRW Kabupaten Luwu Utara 2011-2031, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Dokumen lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri atas latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Luwu Utara lima tahun terakhir yang meliputi empat aspek, yaitu

aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini memaparkan tentang kinerja keuangan tahun 2011-2015 meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2011-2015 meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2016-2021, serta penghitungan kerangka pendanaannya.

BAB IV: ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan Daerah maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Utara di masa yang akan datang.

BAB V: PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.



BAB VII: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisik arah kebijakan pembangunan secara umum dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja outcome dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun program yang disajikan dalam bab ini hanya program yang bersifat prioritas karena terkait dengan penjabaran visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

BAB VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, baik yang bersifat program strategis, program operasional, maupun program rutin.

BAB IX: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator dampak (impact).

BAB X: PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan tentang RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil pemilihan pada periode berikutnya. Selain itu, RPJMD juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan peraturan lainnya (Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati) agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

BAB XI: PENUTUP

Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan arah atau petunjuk dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Luwu Utara khususnya periode tahun 2016-2021 dan periode selanjutnya dalam masa transisi.
- b) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- c) Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder's) pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara;
- d) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dan Kepala SKPD dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- e) Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD;
- f) Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat;
- g) Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (renstra) SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

h) Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya, RKPD tersebut menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan dari penyusunan RPJMD ini adalah terbangunnya konsistensi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga tercapai kinerja pembangunan daerah yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015	II-1
Tabel 2.2.	Kelas Lereng dan Keterangan Fisik Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, 2015	II-3
Tabel 2.3.	Wilayah cakupan kondisi geologi Kabupaten Luwu Utara, 2015.	II-4
Tabel 2.4.	Jenis-Jenis Tanah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.	II-5
Tabel 2.5.	Rata-Rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.	II-6
Tabel 2.6.	Luas Lahan Sawah Kabupaten Luwu Utara Dirinci Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan Tahun 2015.	II-7
Tabel 2.7.	Luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.	II-7
Tabel 2.8.	Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Luwu Utara Dirinci Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan Tahun 2015.	II-8
Tabel 2.9.	Perkembangan Tanaman Pangan (Padi Sawah) Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.	II-8
Tabel 2.10.	Produksi Buah-Buahan Utama Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.	II-9
Tabel 2.11.	Produksi Sayur-Sayuran Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenis Tanaman Tahun 2011-2015.	II-9
Tabel 2.12.	Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenis Tanaman Tahun 2011-2015.	II-10
Tabel 2.13.	Populasi Ternak Besar Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.	II-11
Tabel 2.14.	Populasi Ternak Unggas Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.	II-11
Tabel 2.15.	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.	II-12
Tabel 2.16.	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Luwu Utara Menurut Fungsinya Tahun 2011-2015.	II-12
Tabel 2.17.	Jumlah Potensi Wisata Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015.	II-13
Tabel 2.18.	Potensi Tambang Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.	II-13
Tabel 2.19.	Jumlah Bencana Alam Yang Terjadi Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.	II-14



Tabel 2.20.	Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2015.	II-16
Tabel 2.21.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015.	II-16
Tabel 2.22.	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.....	II-17
Tabel 2.23.	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015 (Juta Rp.)	II-19
Tabel 2.24.	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015 (Juta Rp.)	II-20
Tabel 2.25.	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2011-2015.....	II-21
Tabel 2.26.	Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2011-2015Kabupaten Luwu Utara.	II-21
Tabel 2.27.	PDRB Perkapita Perkecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.....	II-22
Tabel 2.28.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 sd 2015.....	II-23
Tabel 2.29.	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara.	II-23
Tabel 2.30.	Paritas Daya Beli Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 -2015.....	II-23
Tabel 2.31.	Indeks Gini Ratio Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 -2015.....	II-24
Tabel 2.32.	Indeks Ketimpangan Regional (IKR) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.....	II-25
Tabel 2.33.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Utara 2011-2015.....	II-26
Tabel 2.34.	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.....	II-27
Tabel. 2.35.	Angka Melek Huruf Tahun 2015 Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.....	II-27
Tabel 2.36.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu Utara 2011-2015.....	II-28
Tabel 2.37.	Lamanya Bersekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas....	II-29



BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Pulau Sulawesi. Kabupaten Luwu Utara awalnya adalah bagian dari Kabupaten Luwu yang dimekarkan menjadi kabupaten yang otonom. Sampai pada tahun 2015, Kabupaten Luwu Utara telah memiliki 12 wilayah kecamatan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara tercatat 7.502,58 kilometer persegi. Adapun luas wilayah Kabupaten Luwu Utara menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015.

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Sabbang	525,08	7.01
2.	Baebunta	295,25	3.94
3.	Malangke	229,70	3.06
4.	MalangkeBarat	214,05	2.75
5.	Sukamaju	255,48	3.41
6.	Bone-Bone	127,92	1.71
7.	Tanalili	149,41	1.99
8.	Masamba	1.068,85	14.26
9.	Mappedeceng	275,50	3.68
10.	Rampi	1.565,65	20.89
11.	Rongkong	686,50	9.16
12.	Seko	2.109,19	28.14
Jumlah		7.502,58	100.00

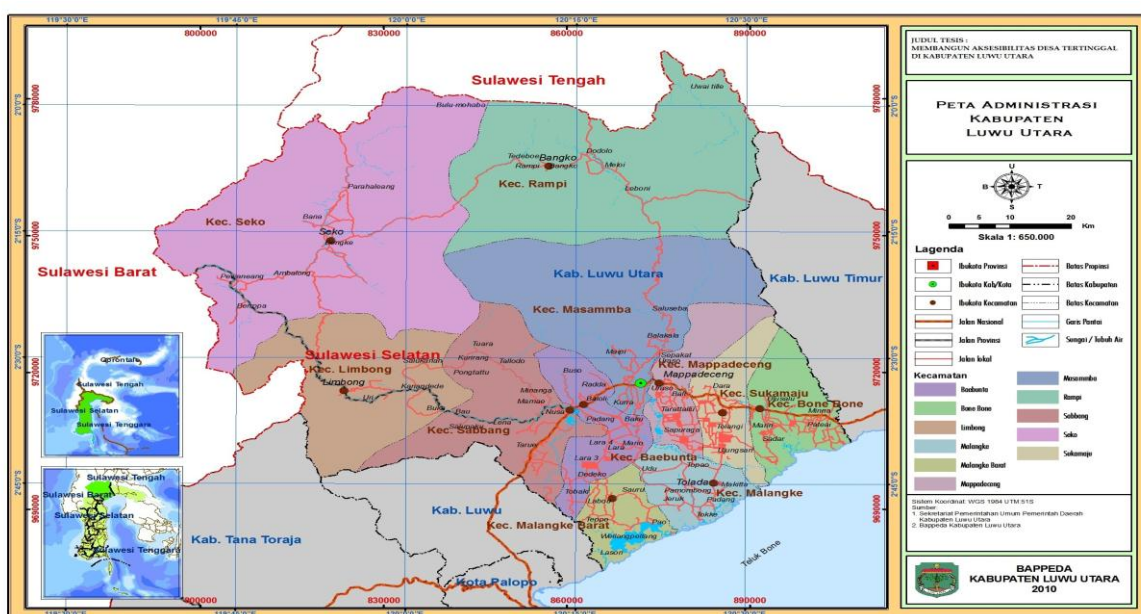
Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015.

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone.



Kabupaten Luwu Utara sampai tahun 2015 terdiri dari 12 kecamatan, 172 desa/kelurahan yang semuanya merupakan definitif. Dari 172 desa/kelurahan tersebut 7 sudah dalam bentuk wilayah kelurahan. Ketujuh kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kappuna, Kelurahan Bone Tua, Kelurahan Kasimbong, Kelurahan Baliase, Kelurahan Marobo, Kelurahan Salassa, dan Kelurahan Bone-Bone. Kecamatan Sukamaju merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 25 desa dan 1 UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). Sedangkan Kecamatan Rampi adalah paling sedikit jumlah desanya, yaitu hanya 6 desa. Di antara 12 kecamatan, Kecamatan Seko merupakan kecamatan yang terluas dengan luas 2.109,19 km² atau 28,14% dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan yang letaknya paling jauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara, yakni berjarak 142 Km. Urutan kedua adalah Kecamatan Rampi (20,89%) dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Bone-Bone (1,71%).



2.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu Utara terletak antara 01° 53' 19" – 02° 55' 36" Lintang Selatan dan 119° 47' 46" – 120° 37' 44" Bujur Timur. Terdapat sekitar 8 sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Baliase dengan panjang 185 Km yang melewati Kecamatan Masamba. Kabupaten Luwu Utara juga dilalui oleh jalan raya TRANS SULAWESI sehingga memiliki posisi amat strategis bagi pergerakan



barang dan jasa, serta merupakan kabupaten penghubung dari provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

2.1.1.3. Topografi Wilayah

Berdasarkan kondisi topografinya Kabupaten Luwu Utara terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui persebaran kelas lereng Kabupaten Luwu Utara. Secara keseluruhan persebaran kelas lereng Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Kelas Lereng dan Keterangan Fisik Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, 2015.

No.	Kecamatan	Kelas lereng (%)	Keterangan Fisik Lahan
1	Sabbang	8 – 15	Bergelombang
2	Baebunta	8 – 15	Bergelombang
3	Malangke	0 – 8	Landai
4	Malangke Barat	0 – 8	Landai
5	Sukamaju	0-15	Landai dan bergelombang
6	Bone-Bone	0 – 8	Landai
7	Tanalili	0 – 8	Landai
8	Masamba	3 – 15	Landai dan bergelombang
9	Mappedeceng	3 – 15	Landai dan bergelombang
10	Rampi	> 30	Curam
11	Rongkong	15 – 30	Berbukit
12	Seko	15 – 30	Berbukit

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara 2015.

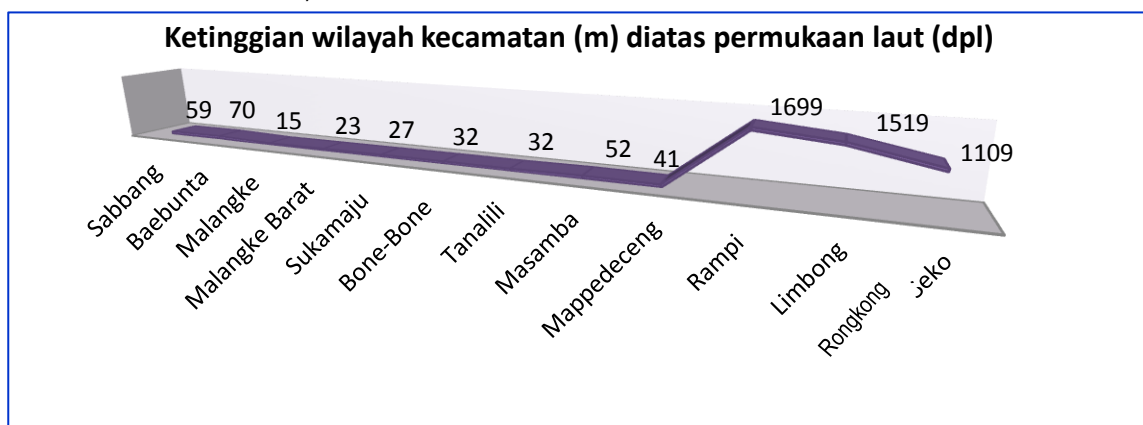
Kondisi fisik/bentuk permukaan lahan di Kabupaten Luwu Utara umumnya landai bergelombang, curam dan berbukit. Kelas lereng Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Bone-bone dan Tanalili berkisar antara 0-8% dengan kondisi fisik lahan landai. Kecamatan Sabbang dan Baebunta memiliki kondisi kelas lereng 8-15 % dengan kondisi fisik lahan bergelombang. Kelas lereng Kecamatan Sukamaju antara 0-15 % dengan kondisi fisik lahan landai dan bergelombang. Kelas lereng Kecamatan Masamba dan Mappedeceng antara 3-15 % dengan kondisi fisik lahan landai dan bergelombang. Kelas lereng Kecamatan Rampi lebih besar 30 % dengan kondisi fisik lahan curam. Kelas lereng Kecamatan Rongkong dan Seko antara 15-30 % dengan kondisi fisik lahan berbukit.

Topografi Kabupaten Luwu Utara dilihat dari ketinggian wilayah dapat dikelompokkan dalam dua kondisi yaitu wilayah dataran rendah dan dataran



tinggi. Beberapa wilayah kecamatan yang termasuk dataran rendah diantaranya adalah Kecamatan Sabbang, Baebunta, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju, Bone-Bone, Tanalili, Masamba dan Mappedeceng. Sedangkan wilayah kecamatan yang dapat digolongkan dataran tinggi adalah Kecamatan Rampi, Rongkong dan Seko. Rata-rata ketinggian tempat di wilayah kecamatan dataran rendah adalah 39 meter diatas permukaan laut sedangkan rata-rata ketinggian tempat di wilayah kecamatan dataran tinggi adalah 1.442 meter diatas permukaan laut. Ketinggian tempat diatas permukaan laut (DPL) masing-masing kecamatan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Ketinggian Tempat Di Atas Permukaan Laut Wilayah Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, 2015.



2.1.1.4. Geologi

1). Struktur dan Karakteristik.

Kondisi geologi Kabupaten Luwu Utara dapat ditelusuri dari batuanannya. Secara spasial kondisi geologi dapat dilihat stratigrafi batuan yang ada di Kabupaten Luwu Utara seperti tabel berikut:

Tabel 2.3. Wilayah cakupan kondisi geologi Kabupaten Luwu Utara, 2015.

No	Jenis Batuan	Wilayah Cakupan	Keterangan
1	Alluvium & Coastal Deposit	Baebunta, Malangke, Malangke Barat, Bone-Bone, Sukamaju	Liatmarin, pasir, kerikil & terumbu karang
2	Batuan Endapan Dana	Rampi, Rongkong & Seko	Pasir, liat dan kerikil
3	Celebes Molasse	Sukamaju & Bone-Bone	Konglomerat, standstone, Claystone & Marl Berkapur
4	Intrusive Rock (Batuan Intrusif)	Mappedeceng dan Rampi	Diorit, porphyry, syenit, trachyte, gabro, adamilit, monzonit, phonolit, dolerit & kentalenit
5	Batuan Vulkanik	Seko	Basaltic spilitic, calc-alkaline, breccia, tuff, lava & pillow lava

*) Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara, 2015



Kondisi lahan di Kabupaten Luwu Utara dipengaruhi oleh jenis batuan pembentuk lahan dan perkembangannya ditentukan oleh pelapukan batuan pada lahan tersebut. Kualitas tanah mempunyai pengaruh besar terhadap jenis tanaman yang akan diusahakan pada lahan tersebut.

Topografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan adalah bentuk wilayah (relief) atau lereng dan ketinggian tempat di atas permukaan laut. Relief erat hubungannya dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi. Sedangkan faktor ketinggian tempat di atas permukaan laut berkaitan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang berhubungan dengan temperatur udara dan radiasi matahari.

2). Jenis Tanah

Karakteristik jenis tanah di Kabupaten Luwu Utara dipengaruhi oleh jenis batuan, iklim dan geomorfologi lokal, sehingga perkembangannya ditentukan oleh tingkat pelapukan batuan kawasan tersebut. Kualitas tanah mempunyai pengaruh besar terhadap intensitas penggunaan lahannya. Tanah-tanah yang sudah berkembang horisonnya akan semakin intensif pemanfaatannya terutama untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kualitas tanah dan penyebarannya ini akan sangat berpengaruh dalam pengembangan wilayah ini, hal mana terkait dengan prinsip pemanfaatan lahan yang berdasarkan kesesuaian daya tampung dan daya dukung lahannya.

Adapun jenis tanah di Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Jenis-Jenis Tanah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.

No.	Jenis Tanah	Wilayah Cakupan	Keterangan
1	Inceptisol	Malangke, Malangke Barat, Bone-bone dan Sukamaju	Liat marin
2	Ultisol	Rongkong dan Seko	Liat, reaksi masam
3	Entisol	Malangke, Malangke Barat dan Bone-bone	Jenuh air

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara 2015.

2.1.1.5. Hidrologi

Aliran air di Kabupaten Luwu Utara ditunjukkan oleh pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah yang mengarah langsung menuju arah laut. Keunggulan dari sistem sungai-sungai di Kabupaten Luwu Utara adalah kondisi airnya yang masih jernih dan bening sehingga sangat baik untuk

dijadikan tempat rekreasi. Sumber daya air khususnya air permukaan sangat melimpah di daerah Kabupaten Luwu Utara dan sebagian kecil dari potensi air permukaan telah dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi, dan budidaya perikanan. Terdapat sekitar 8 sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara diantaranya adalah sungai Rongkong, Baebunta, Masamba, Baliase, Lampuawa, Kanjiro, Bone-bone dan Bungadidi. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Baliase dengan panjang 185 Km yang melewati Kecamatan Masamba (BPS, 2015).

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Luwu Utara beriklim tropis yang terbagi atas 2 (dua) musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan di Kabupaten Luwu Utara hampir merata sepanjang tahun dan curah hujan cukup tinggi kecuali pada bulan September dan Oktober.

Hari hujan tertinggi sebagaimana terlihat pada tabel dibawah terjadi pada bulan Maret dan April sedangkan hari hujan terendah terjadi pada bulan September. Curah hujan di Kabupaten Luwu Utara berkisar antara 34 mm² sampai 431 mm². Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari dan terendah pada bulan September.

Tabel 2.5. Rata-Rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

No.	Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan (mm ²)
1	Januari	18	102
2	Februari	25	431
3	Maret	26	260
4	April	26	263
5	Mei	25	264
6	Juni	28	215
7	Juli	19	210
8	Agustus	16	81
9	September	8	34
10	Oktober	10	75
11	November	17	280
12	Desember	22	421
Luwu Utara		20	219,67

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.



2.1.1.7. Penggunaan lahan

Penggunaan Lahan dibedakan atas Lahan Pertanian dan Bukan pertanian. Sedangkan penggunaan lahan Pertanian dibedakan atas lahan sawah dan lahan bukan sawah (kering).

Tabel 2.6. Luas Lahan Sawah Kabupaten Luwu Utara Dirinci Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan Tahun 2015.

No.	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (Ha)		
		Irigasi	Tadah Hujan	Jumlah
1.	Sabbang	2.091	1.436	3.527
2.	Baebunta	1.138	2.347	3.485
3.	Malangke	-	1.694	1.694
4.	Malangke Barat	312	708	1.020
5.	Sukamaju	3 273	1.247	4.520
6.	Bone-Bone	1.794	103	1.897
7.	Tanalili	1.745	71	1.816
8.	Masamba	1.500	1.376	2.876
9.	Mappedeceng	154	1.071	1.225
10.	Rampi	452	-	452
11.	Rongkong	787	237	1.024
12.	Seko	1.811	2.362	4.173
Luwu Utara		15.057	12.652	27.709

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

Pada Tahun 2015, luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian mencapai 614.029,40 hektar (27.709 hektar lahan sawah dan 586.320,40 hektar lahan bukan sawah). Lahan bukan sawah tersebut terdiri dari lahan untuk tegal/kebun seluas 26.238 hektar, ladang/huma 4.915 hektar, perkebunan 58.735,38 hektar, Hutan Rakyat 488.098,02 hektar, dan lahan sementara tidak diusahakan 8.334 hektar.

Tabel 2.7. Luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

No	Jenis Petanian	Luas (Ha)
1	Lahan sawah	27.709
2	Lahan tegal/kebun	26.238
3	Lahan ladang/huma	4.915
4	Lahan perkebunan	58.735,38
5	Lahan hutan rakyat	488.098,02
6	Lahan tidak diusahakan	8.334
Luwu Utara		614.029,40

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1. Pertanian

Produksi padi sawah pada Tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya yaitu menjadi sebesar 229.095,98 ton dari 245.335 ton pada tahun 2014 namun masih lebih tinggi dibanding tahun 2011 (147.110 ton). Diantara dua belas kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sukamaju merupakan kecamatan penghasil padi sawah yang paling besar. Produksi padi di kecamatan ini sebesar 40.188 ton atau sekitar 17,54 persen dari total produksi padi sawah di Luwu Utara.

Tabel 2.8. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Kabupaten Luwu Utara Dirinci Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan Tahun 2015.

No.	Kecamatan	Padi Sawah		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (Ton/Ha)
1.	Sabbang	5.790	33.836,08	5,84
2.	Baebunta	5.890	31.561,38	5,36
3.	Malangke	295	1.496,25	5,07
4.	MalangkeBarat	962	5.707,03	5,93
5.	Sukamaju	7.175	40.188,39	5,60
6.	Bone-Bone	3.964	23.393,50	5,90
7.	Tanalili	2.931	17.668,28	6,03
8.	Masamba	4.832	27.950,52	5,78
9.	Mappedeceng	2.831	17.358,92	6,13
10.	Rampi	452	2.578,30	5,70
11.	Rongkong	960	4.588,65	4,78
12.	Seko	4.173	22.768,68	5,46
Luwu Utara		40.255	229.095,98	5,69

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

Pada tahun 2015, produktifitas padi mengalami peningkatan kecil dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 5,69 ton/Ha dari 5,68 ton/Ha pada tahun 2014. Dan 4,70 ton/Ha pada tahun 2011.

Tabel 2.9. Perkembangan Tanaman Pangan (Padi Sawah) Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktifitas (ton/Ha)
2011	31.294,00	147.110,00	4.70
2012	34.532,00	152.531,00	4.42
2013	38.265,00	216.963,00	5.67
2014	41.743,00	245.335,90	5.68
2015	40.255,00	229.095,98	5.69

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016.



Kabupaten Luwu Utara juga sangat dikenal dengan produksi buah-buahannya, hal ini terutama didukung oleh iklimnya yang sangat sesuai bagi pengembangan komoditi tersebut. Komoditas buah-buahan yang banyak diusahakan di Kabupaten Luwu Utara adalah durian, rambutan dan pisang. Pada tahun 2015, produksi durian mencapai 17.928,70 ton, rambutan 6.723,40 ton, pisang 2.693,10 ton. Rambutan, durian, jeruk dan pisang mengalami peningkatan produksi bila dibandingkan dengan tahun 2011. Sebaliknya produksi mangga justru mengalami penurunan produksi bila dibandingkan pada tahun 2011. (BPS, 2012-2016).

Tabel 2.10. Produksi Buah-Buahan Utama Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Mangga	2 145.90	1 294.70	916.70	1 044.80	1.401,60
Durian	12 754.10	14.296.60	14.636,00	15 662.20	17.928,70
Jeruk	6 455	3 520.10	667,90	805.40	1.419,50
Pisang	2 624.8	1 694.70	1 990,00	2 281.70	2.693,10
Rambutan	3 215.60	4 502.20	5 893,40	5 784.40	6.723,40

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016.

Selain buah-buahan, di Kabupaten Luwu Utara juga terdapat daerah-daerah yang memiliki produksi sayur-sayuran. Untuk tanaman sayur-sayuran, pada tahun 2015 tanaman kangkung diproduksi terbanyak dengan total produksi 926,20 Ton. Untuk lebih jelasnya mengenai produksi sayuran di Kabupaten Luwu Utara dalam lima tahun terakhir (2011-2015) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11. Produksi Sayur-Sayuran Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenis Tanaman Tahun 2011-2015

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Bawang Merah	28.5	48.50	39.60	23.50	24,00
Cabe	692	293.20	761,50	812.00	654,50
Kangkung	668.9	222.80	625,80	515.70	926,20
Bayam	317.5	224.90	721,40	507.80	781,50
Tomat	724.2	241.10	672.90	564.20	409,40
Kacang Panjang	1221.2	314.80	703,20	536.20	506,10

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016.



2.1.2.2. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang banyak diusahakan dan ditanam petani di Kabupaten Luwu Utara yaitu Kakao dan Kelapa Sawit dengan total areal tanam tahun 2015 seluas 36.212,67 Ha dan 16.534,48 Ha.

Tanaman perkebunan yang produksinya cukup besar yaitu kakao/coklat dan kelapa sawit. Kedua jenis tanaman itu produksinya masing-masing 22.528,67 ton dan 227.407,42 ton pada tahun 2015. Produksi kelapa sawit meningkat dari 88.847,00 ton pada Tahun 2011 menjadi 227.407,42 ton pada Tahun 2015. Untuk tanaman kakao, terjadi penurunan sejak tahun 2012 dari 32.263,54 ton menjadi 22.528,67 ton pada tahun 2015. Penurunan luas tanam tidak selalu diikuti oleh penurunan jumlah produksi. Hal ini disebabkan masih terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat produksi, misalnya produktivitas dari lahan. Tabel berikut menyajikan produksi tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Luwu Utara dalam kurun lima tahun terakhir.

Tabel 2.12. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenis Tanaman Tahun 2011-2015.

No.	Jenis Tanaman	Produksi (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sagu	204,42	1.372,01	1.319,28	1.440,00	1.455,40
2.	Kelapa	919,86	3.068,27	2.722,64	2.660,48	2.710,99
3.	Kelapa Sawit	88.847,00	84.670,32	92.882,40	219.942,22	227.407,42
4.	Kopi Robusta	504,43	1.020,81	683,01	690,98	685,42
5.	Lada	647, 33	52,42	43,29	66,58	82,34
6.	Kakao	682,37	32.263,54	22.788,19	22.362,25	22.528,67
7.	Aren	-	10.430,45	1.701,50	2.040,89	2.128,40

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016.

2.1.2.3. Peternakan dan Perikanan

Jenis ternak besar yang banyak dipelihara di Kabupaten Luwu Utara adalah sapi potong, babi dan kerbau. Jumlah ternak sapi potong di tahun 2015 sebanyak 26.455 ekor mengalami peningkatan dari 24.852 ekor pada tahun 2014. Ternak kerbau dan babi juga mengalami peningkatan dari masing-masing 13.323 ekor dan 32.499 ekor pada tahun 2014 menjadi 14.218 ekor kerbau dan 32.583 ekor babi pada tahun 2015.

Tabel 2.13. Populasi Ternak Besar Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No.	Ternak	Populasi Ternak Besar (Ekor)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sapi	24.320	24.927	23.131	24.852	26.455
2.	Kerbau	12.176	12.659	12.117	13.323	14.218
3.	Kuda	1.717	1.677	1.586	1.614	1.677
4.	Kambing	7.348	13.651	9.030	9.832	10.473
5.	Babi	19.791	25.215	28.745	32.499	32.583

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016.

*) Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, 2016.

Jenis ternak unggas yang banyak dipelihara di Kabupaten Luwu Utara adalah ayam kampung (Buras), ayam ras petelur dan ayam ras pedaging. Populasi ayam kampung meningkat dibandingkan tahun 2011, jumlahnya sekitar 662.398 ekor, meningkat menjadi 798.457 pada tahun 2015. Ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga mengalami peningkatan sejak tahun 2011. Perkembangan populasi ternak unggas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Populasi Ternak Unggas Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No.	Unggas	Populasi Ternak Unggas (Ekor)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ayam Buras	662.398	705.694	655.221	772.831	798.457
2.	Ayam Ras Petelur	72.780	83.900	83.200	86.176	74.526
3.	Ayam Ras Pedaging	244.300	314.350	393.000	427.320	2.492.670
4.	Itik	41.575	61.322	81.604	106.377	104.532

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016.

Jumlah produksi tangkap perikanan laut pada tahun 2015 adalah sebesar 2.094,17 ton dengan produksi terbesar dari Kecamatan Malangke 961,45 ton, sedangkan produksi perikanan Budidaya pada tahun 2015 adalah sebesar 187.742,80 ton dengan produksi terbesar dari Kecamatan Malangke Barat 44.231,50 ton. Dari total hasil produksi perikanan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun terutama pada tahun 2012 sebesar 45.421,05 ton menjadi 165.115,71 ton pada tahun 2013 dan 190.016,71 ton pada tahun 2015.



Tabel 2.15. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.

No.	Unggas	Produksi Ikan (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perikanan Laut	8.287,00	8.291,80	8.012,64	7.612,00	2.094,17
2.	Perikanan Umum	171,24	179,95	182,87	179,74	179,74
3.	Perikanan Budidaya	34.089,56	36.949,60	156.920,20	167.027,80	187.742,80
Total		42.547,80	45.421,05	165.115,71	174.819,54	190.016,71

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016.

2.1.2.4. Kehutanan

Luwu Utara memiliki kawasan hutan yang cukup luas. Pada tahun 2015 tercatat luas hutan Kabupaten Luwu Utara adalah 488.098,02 Hektar dan 69,58 persen kawasan hutan Luwu Utara adalah hutan Lindung. Luas hutan di Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan dari 531.712,15 hektar pada tahun 2011 menjadi 488.098,02 hektar pada tahun 2015 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16. Luas Kawasan Hutan Kabupaten Luwu Utara Menurut Fungsinya Tahun 2011-2015

No.	Fungsi Hutan	Luas Kawasan Hutan (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Hutan Produksi Biasa	12.193,87	13.072,17	8.918,22	8.936,88	8.936,88
2.	Hutan Produksi Terbatas	151.629,03	151.436,98	134.949,59	134.562,50	134.562,50
3.	Hutan Lindung	363.447,81	365.872,42	341.411,61	339.627,66	339.627,66
4.	Hutan Wisata/ PPA	0	0	0	1.682,78	1.682,78
5.	Hutan Produksi Konversi	4.441,44	4.569,11	3.270,88	3.288,97	3.288,20
Total		531.712,15	534.950,68	488.550,30	488.097,79	488.098,02

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2011-2016

2.1.2.5. Pariwisata

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Luwu Utara mempunyai cukup banyak potensi untuk dikembangkan seperti wisata alam, dan wisata budaya. Berikut data potensi wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 2.17. Jumlah Potensi Wisata Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Sabbang	4
2	Baebunta	6
3	Malangke	3
4	Malangke Barat	4
5	Sukamaju	1
6	Bone-Bone	4
7	Tanalili	-
8	Masamba	10
9	Mappedeceng	1
10	Rampi	4
11	Rongkong	5
12	Seko	5
Luwu Utara		47

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

2.1.2.6. Pertambangan dan Energi

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi bahan galian yang cukup besar. Disamping sumber daya alam hayati, Kabupaten Luwu Utara juga memiliki sumber daya mineral dan energi serta bahan galian lainnya. Adapun potensi sumber daya mineral adalah seperti diuraikan berikut : 1. Adanya minyak bumi sebesar 2,4 Milyar BOE, 2. Gas bumi terindikasi di Pongko, 3. Biji Besi 317.451,91 ha (6.812 ha dalam tahap eksplorasi), 4. Emas primer dan emas letakan di Rampi dan Seko dengan kadar 0,9-9,0.ppm, 5. Pasir kuarsa di Sabbang, Baebunta dan Masamba, 6. Granit dengan cadangan 13.700.000.000 ton di Sabbang, 7. Batu lempung di Sukamaju. Disamping itu terdapat pula potensi sungai untuk dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sungai Baliase (10 MW). Gambaran potensi tambang Kabupaten Luwu Utara diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.18. Potensi Tambang Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

No.	Jenis Hasil Tambang	Lokasi (kecamatan)
1	Emas (Primer/Sekunder)	Rongkong, Seko dan Rampi
2	Panas Bumi	Rongkong, Sabbang, Masamba
3	Radioaktif/Uranium	Masamba
4	Biji Besi	Rongkong, Seko dan Rampi
5	Batu Granit	Sabbang, Rongkong, Seko, Masamba, Baebunta
6	Pasir, Batu, Sirtu, Kerikil dan Tanah Urug	Sabbang, Rongkong, Seko, Masamba, Baebunta, Rampi, Bone-Bone, Sukamaju, Mappedeceng, Tanalili

Sumber: Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Luwu Utara 2016.



2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan, menyebabkan daerah ini rentan akan bencana alam. Beberapa kecamatan yang tercatat, rentan terhadap bencana alam tanah longsor, banjir dan gempa bumi. Kawasan di Kabupaten Luwu Utara yang sering mengalami banjir adalah kawasan disekitar sungai Rongkong dan sungai Baliase. Penyebab utama yang terindikasi turut mempengaruhi bencana banjir adalah areal kawasan hijau yang semakin kurang akibat penebangan hutan liar di kawasan hulu. Wilayah Kabupaten Luwu Utara yang diprediksi rawan longsor adalah daerah-daerah yang berada diatas ketinggian 200-400 meter terutama pada wilayah yang kurang hutannya. Peristiwa longsor terutama terjadi pada musim hujan. Kabupaten Luwu Utara juga diduga rawan terhadap bencana Gempa Bumi karena bagian tengah kabupaten ini dilewati Zona Sesar Palu-Koro (ZSPK). Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Riset Unggulan Terpadu tahun 1997, sistem Sesar Palu-Koro berpotensi menghasilkan kegempaan. Jumlah kejadian bencana alam banjir, tanah longsor dan angin puting beliung antara tahun 2011 sampai 2015 di Kabupaten Luwu Utara sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, cenderung tidak berpola dan fluktuatif.

Tabel 2.19. Jumlah Bencana Alam Yang Terjadi Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.

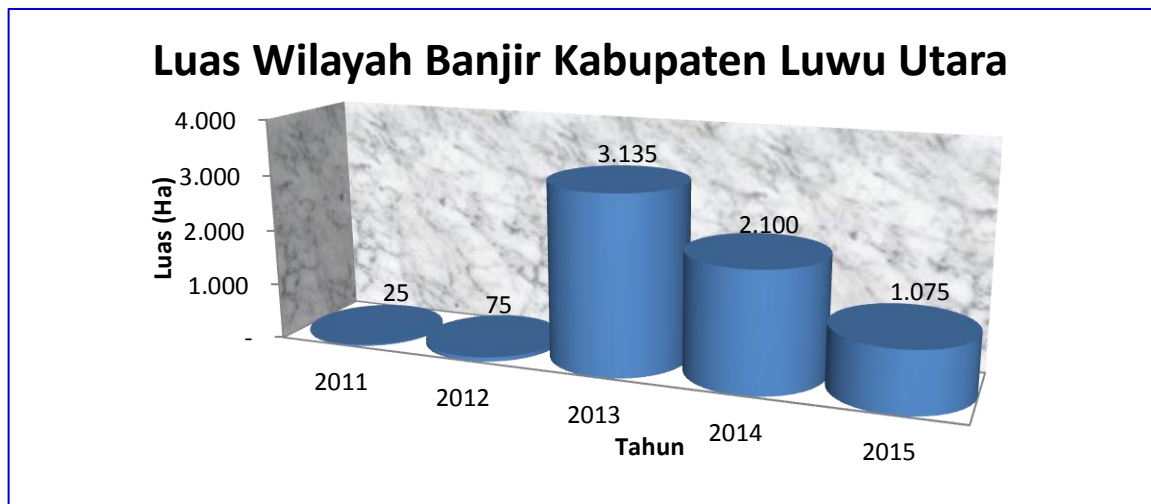
Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Bencana Alam					
- Banjir	4	7	6	7	4
- Longsor	2	1	4	2	2
- Angin Puting Beliung	2	2	0	2	5
- Musibah lainnya (Hanyut / Tenggelam)	3	4	5	3	2
Jumlah Korban Bencana Alam	2.028 KK 8.133 JW	4.320 KK 17.385 JW	5.397 KK 17.546 JW	4.538 KK 16.803 JW	3.435 KK 16.130 JW
Jumlah Lokasi Evakuasi Bencana Alam	5 Kec. 22 Desa	7 Kec. 42 Desa	5 Kec. 38 Desa	6 Kec. 19 Desa	5 Kec. 27 Desa

Sumber: BPBD Kabupaten Luwu Utara 2016.

Luas wilayah banjir di Kabupaten Luwu Utara cenderung meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2013 namun setelah tahun 2013 terus mengalami penurunan sampai tahun 2015. Sejalan dengan kejadian tersebut maka jumlah korban bencana cenderung meningkat sampai tahun 2013 tetapi sejak tahun 2014 terus mengalami penurunan sampai tahun 2015. Luas bencana banjir sebagaimana yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Perkembangan Luas Wilayah Banjir Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011- 2015.



Sumber: BPBD Kabupaten Luwu Utara 2015.

2.1.4. Kondisi Umum Demografi

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah dengan komposisi penduduk yang multi etnis, agama dan budaya yang terdiri dari penduduk asli (Luwu), pendatang (Bugis, Makassar dan Toraja), dan para pendatang atas program pemerintah melalui transmigrasi (Jawa, Bali, dan Lombok). Secara umum, penduduk asli menyebar pada semua kecamatan, sedang para pendatang menyebar pada dataran rendah yang subur dan daerah pesisir. Sementara pendatang dari etnis Jawa, Bali dan Lombok terkonsentrasi pada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bone-Bone, Kecamatan Sukamaju, Kecamatan Tanalili dan Kecamatan Mappedeceng dengan mata pencaharian mayoritas bergerak pada sektor pertanian.

Kemajemukan penduduk ini membawa konsekwensi dengan terjadinya pembauran (Assimilasi) budaya dan sosial antar etnis, termasuk perkawinan, pengalaman usaha perdagangan dan pertanian.

Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2015 adalah 302.687 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun mencapai 0,90 %. Kecamatan Baebunta merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sebesar 45.150 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Rampi, sebesar 3.134 jiwa.

Tabel 2.20. Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2015.

No.	Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Sabbang	18.719	18.665	37.384	100
2.	Baebunta	22.671	22.479	45.150	101
3.	Malangke	13.833	13.702	27.535	101
4.	Malangke Barat	12.094	12.041	24.135	100
5.	Sukamaju	20.881	20.739	41.620	101
6.	Bone-Bone	13.322	12.927	26.249	103
7.	Tanalili	11.254	10.991	22.245	102
8.	Masamba	17.277	17.970	35.247	96
9.	Mappedeceng	11.580	11.509	23.089	101
10.	Rampi	1.672	1.462	3.134	114
11.	Rongkong	2.031	1.863	3.894	109
12.	Seko	6.659	6.346	13.005	105
Luwu Utara		151.993	150.694	302.687	101

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 151.993 jiwa penduduk laki-laki dan 150.694 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) 101, yang berarti bahwa di antara 100 perempuan terdapat 101 laki-laki. Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara 7.502,58 Km² dan dengan jumlah penduduk 302.687 jiwa maka kepadatan penduduk rata-rata di Luwu Utara sebesar 40 jiwa per kilometer persegi. Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Daerah (km ²)	Kepadatan penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Sabbang	37.384	525,08	71
2.	Baebunta	45.150	295,25	15
3.	Malangke	27.535	229,70	120
4.	Malangke Barat	24.135	214,05	113
5.	Sukamaju	41.620	255,48	16
6.	Bone-Bone	26.249	127,92	205
7.	Tanalili	22.245	149,41	149
8.	Masamba	35.247	1.068,85	33
9.	Mappedeceng	23.089	275,50	84
10.	Rampi	3.134	1.565,65	2
11.	Rongkong	3.894	686,50	6
12.	Seko	13.005	2.109,19	6
Luwu Utara		302.687	7.502,58	40

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.



Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan karena penduduk bukan hanya menjadi sasaran pembangunan tetapi juga sebagai pelaku pembangunan. Oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan indikator untuk memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk bidang sosial, ekonomi, dan bidang lainnya. Sedangkan untuk menunjukkan karakteristik penduduk di masa yang akan datang diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dengan data yang lebih rinci. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.22. Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km ²
2011	290.365	146.312	144.053	1,01	39
2012	292.765	147.581	145.184	0,83	39
2013	297.313	149.395	147.918	1,55	40
2014	299.989	150.702	149.287	0,90	40
2015	302.687	151.993	150.694	0,90	40

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dibentuk melalui berbagai sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian kehutanan dan perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan jasa lainnya.



2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara dijelaskan melalui aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta aspek kesejahteraan sosial. Metode yang digunakan untuk menjelaskan kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. Komponen indikator makro tersebut diantaranya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB Perkapita.

Dalam pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.

Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

- 1). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian kehutanan dan perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan jasa lainnya.
- 2). Untuk mengetahui struktur perekonomian.
- 3). Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan.
- 4). Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/perubahan harga produsen.

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Berlaku sejak Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami perkembangan pada semua sektor, namun jika dilihat dari persentase masing masing sektor perkembangannya sangat bervariasi, ada sebagian sektor yang persentase perkembangannya stagnan seperti jasa perusahaan dan jasa lainnya, di satu sisi terdapat sektor yang terus bertumbuh seperti sektor jasa pendidikan, real estate, transportasi dan perdagangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum.

Tabel 2.23. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011- 2015 (Juta Rp.)

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.647.776,0	53,61	2.890.510,09	51,98	3.231.619,42	50,99	3.982.409,64	52,46	4.499.474,22	51,83
2	Pertambangan & Penggalian	53.540,0	1,08	75.588,56	1,36	96.155,85	1,52	131.915,29	1,74	169.718,16	1,95
3	Industri Pengolahan	209.763,1	4,25	240.768,05	4,33	271.116,99	4,28	321.456,38	4,23	370.552,29	4,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.074,4	0,10	5.940,50	0,11	6.094,25	0,10	6.558,95	0,09	5.353,29	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	226,2	0,00	253,42	0,00	280,63	0,00	305,16	0,00	319,32	0,00
6	Konstruksi	509.541,8	10,32	607.746,50	10,93	720.956,69	11,38	834.193,71	10,99	969.873,77	11,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	455.422,6	9,22	520.543,26	9,36	582.622,06	9,19	634.941,16	8,36	742.506,50	8,55
8	Transportasi dan Pergudangan	88.968,8	1,80	101.688,27	1,83	120.145,42	1,90	145.162,29	1,91	170.045,68	1,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43.255,0	0,88	53.237,53	0,96	64.583,17	1,02	78.808,16	1,04	89.673,49	1,03
10	Informasi dan Komunikasi	145.176,5	2,94	170.283,51	3,06	214.518,76	3,38	233.656,39	3,08	255.154,26	2,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	67.817,9	1,37	86.942,54	1,56	97.699,59	1,54	107.297,76	1,41	120.333,26	1,39
12	Real Estate	134.600,6	2,73	164.115,74	2,95	197.374,76	3,11	239.302,26	3,15	281.990,01	3,25
13	Jasa Perusahaan	886,2	0,02	994,76	0,02	1.135,41	0,02	1.352,48	0,02	1.570,58	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	277.409,7	5,62	299.167,41	5,38	334.826,41	5,28	377.538,20	4,97	435.938,34	5,02
15	Jasa Pendidikan	256.817,9	5,20	297.822,04	5,36	346.690,09	5,47	431.748,15	5,69	493.754,48	5,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41.397,9	0,84	43.259,23	0,78	50.642,40	0,80	62.286,07	0,82	73.018,27	0,84
17	Jasa Lainnya	1.286,4	0,03	1.422,08	0,03	1.586,66	0,03	1.900,00	0,03	2.251,01	0,03
PDRB		4.938.961,00	100,0	5.560.283,48	100,0	6.338.048,58	100,0	7.590.832,06	100,0	8.681.527,21	100,00

Sumber: BPS. PDRB Kabupaten Luwu Utara, 2011-2016

Jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Konstan dalam rupiah sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dimana semua sektor mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari persentase PDRB menurut lapangan usaha dimana peningkatannya sangat bervariasi. Terdapat beberapa lapangan



usaha persentasenya stagnan antara lain sektor: Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, jasa perusahaan serta jasa lain-lain, bahkan pada tahun terakhir (2015) terdapat lapangan usaha yang mengalami penurunan antara lain: Informasi dan komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Administrasi Pemerintahan.

Tabel 2.24. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011- 2015(Juta Rp.)

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.459.148,9	53,49	2.550.010,31	51,92	2.668.581,27	50,60	2.931.457,94	51,07	3.068.899,22	50,13
2	Pertambangan & Penggalan	48.371,00	1,05	65.059,71	1,32	73.873,20	1,40	86.866,53	1,51	100.531,39	1,64
3	Industri Pengolahan	195.936,7	4,26	209.647,40	4,27	220.040,98	4,17	238.241,36	4,15	254.270,89	4,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.131,4	0,11	6.238,14	0,13	6.981,51	0,13	7.813,35	0,14	7.194,11	0,12
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	219,7	0,00	239,4	0,00	255,96	0,00	266,74	0,00	272,35	0,00
6	Konstruksi	471.245,6	10,25	515.919,65	10,51	570.438,79	10,82	598.455,30	10,43	647.938,69	10,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	437.809,0	9,52	489.813,02	9,97	537.828,72	10,20	582.349,29	10,15	631.118,23	10,31
8	Transportasi dan Pergudangan	84.425,5	1,84	92.015,73	1,87	101.265,56	1,92	107.253,57	1,87	116.619,32	1,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.575,4	0,86	44.543,10	0,91	50.457,39	0,96	56.072,67	0,98	61.036,33	1,00
10	Informasi dan Komunikasi	143.527,1	3,12	166.158,82	3,38	203.488,38	3,86	216.529,35	3,77	244.004,00	3,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	65.922,3	1,43	77.573,88	1,58	82.555,80	1,57	85.600,81	1,49	91.893,55	1,50
12	Real Estate	121.634,6	2,65	136.692,98	2,78	151.153,57	2,87	164.549,68	2,87	178.440,81	2,91
13	Jasa Perusahaan	823,4	0,02	864,47	0,02	920,91	0,02	1.005,62	0,02	1.082,48	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253.175,9	5,51	260.748,43	5,31	281.338,73	5,33	290.936,52	5,07	307.339,51	5,02
15	Jasa Pendidikan	229.897,9	5,00	254.116,26	5,17	279.476,43	5,30	321.805,04	5,61	356.586,85	5,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39.602,0	0,86	40.044,74	0,82	44.154,43	0,84	49.107,75	0,86	53.674,42	0,88
17	Jasa Lainnya	1.267,9	0,03	1.311,40	0,03	1.348,99	0,03	1.468,75	0,03	1.582,74	0,03
	PDRB	4.597.714,3	100,00	4.910.997,43	100,00	5.274.160,62	100,00	5.739.780,28	100,00	6.122.484,88	100,00

Sumber: BPS. PDRB Kabupaten Luwu Utara, 2011-2016

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2011 baik harga berlaku maupun harga konstan perkembangannya berfluktuasi. Namun jika dilihat dari laju pertumbuhan menurut lapangan usaha sangat bervariasi, dimana ada sektor yang terus mengalami perkembangan, bahkan terdapat sektor yang mengalami penurunan pada tahun terakhir (2015).



Tabel 2.25. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2011-2015

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,62	7,39	8,40	3,69	10,56	4,65	18,85	9,85	11,49	4,69
2	Pertambangan & Penggalian	31,32	18,64	29,17	34,50	21,39	13,55	27,11	17,59	22,27	15,73
3	Industri Pengolahan	14,14	5,04	12,88	7,00	11,19	4,99	15,66	8,27	13,25	6,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,70	4,86	14,58	21,57	2,52	12,07	7,08	11,91	-22,52	-7,93
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,30	12,95	10,74	8,99	9,70	6,92	8,04	4,21	4,43	2,11
6	Konstruksi	16,50	7,74	16,16	9,48	15,70	10,57	13,57	4,91	13,99	8,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,64	5,40	12,51	11,88	10,66	9,80	8,24	8,28	14,49	8,37
8	Transportasi dan Pergudangan	19,98	13,86	12,51	8,99	15,36	10,05	17,23	5,91	14,63	8,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,29	10,98	18,75	12,55	17,57	13,28	18,05	11,13	12,12	8,85
10	Informasi dan Komunikasi	22,26	20,87	14,74	15,77	20,62	22,47	8,19	6,41	8,43	12,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	27,28	24,21	22,00	17,67	11,01	6,92	8,95	3,69	10,83	7,35
12	Real Estate	22,33	10,55	17,98	12,38	16,85	10,58	17,52	8,86	15,14	8,44
13	Jasa Perusahaan	14,03	5,95	10,91	4,98	12,39	6,53	16,05	9,20	13,89	7,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,66	4,65	7,27	2,99	10,65	7,90	11,31	3,41	13,40	5,64
15	Jasa Pendidikan	22,86	9,98	13,77	10,53	14,10	9,98	19,70	15,15	12,56	10,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,57	1,12	4,30	1,12	14,58	10,26	18,69	11,22	14,70	9,30
17	Jasa Lainnya	7,22	5,68	9,54	3,43	10,37	2,87	16,49	8,88	15,59	7,76
	PDRB	16,31	7,77	11,17	6,81	12,27	7,39	16,50	8,83	12,56	6,67

Sumber: BPS. PDRB Kabupaten Luwu Utara, 2011-2016

Nilai PDRB Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2011 terus mengalami perkembangan, perkembangan nilai PDRB ini dibarengi pula dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian walaupun pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu Utara meningkat akan tetapi jika dilihat PDRB perkapita juga mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2014 PDRB perkapita peningkatannya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.26. Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan harga Konstan (Hk) Tahun 2011-2015 Kabupaten Luwu Utara.

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	53,61	53,49	51,98	51,92	50,99	50,60	52,46	51,07	51,83	50,13
2	Pertambangan & Penggalian	1,08	1,05	1,36	1,32	1,52	1,40	1,74	1,51	1,95	1,64
3	Industri Pengolahan	4,25	4,26	4,33	4,27	4,28	4,17	4,23	4,15	4,27	4,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,11	0,13	0,10	0,13	0,09	0,14	0,06	0,12
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	10,32	10,25	10,93	10,51	11,38	10,82	10,99	10,43	11,17	10,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,22	9,52	9,36	9,97	9,19	10,20	8,36	10,15	8,55	10,31
8	Transportasi dan Pergudangan	1,80	1,84	1,83	1,87	1,90	1,92	1,91	1,87	1,96	1,90
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,88	0,86	0,96	0,91	1,02	0,96	1,04	0,98	1,03	1,00



NO	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
10	Informasi dan Komunikasi	2,94	3,12	3,06	3,38	3,38	3,86	3,08	3,77	2,94	3,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,37	1,43	1,56	1,58	1,54	1,57	1,41	1,49	1,39	1,50
12	Real Estate	2,73	2,65	2,95	2,78	3,11	2,87	3,15	2,87	3,25	2,91
13	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,62	5,51	5,38	5,31	5,28	5,33	4,97	5,07	5,02	5,02
15	Jasa Pendidikan	5,20	5,00	5,36	5,17	5,47	5,30	5,69	5,61	5,69	5,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,86	0,78	0,82	0,80	0,84	0,82	0,86	0,84	0,88
17	Jasa Lainnya	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	PDRB	100,0	100,00	100,0	100,00	100,0	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS. PDRB Kabupaten Luwu Utara, 2011-2016

Sementara bila kita perhatikan PDRB Per Kecamatan yang juga menjadi landasan terhadap penghitungan Indeks Ketimpangan Regional (IKR) yang dibandingkan dengan jumlah penduduk per kecamatan, nampaknya juga menunjukkan peningkatan di setiap kecamatan setiap tahunnya.

Tabel 2.27. PDRB Perkapita Perkecamatan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sabbang	10.970.954	12.614.689	14.346.293	16.426.429	18.041.071
2	Baebunta	8.359.718	9.596.790	10.766.553	12.516.716	13.724.981
3	Malangke	15.580.724	17.903.074	20.834.876	23.328.477	25.604.328
4	Malangke Barat	11.354.076	13.036.388	14.859.948	17.000.064	18.644.170
5	Sukamaju	8.260.293	9.583.491	11.320.286	12.367.850	13.705.962
6	Bone-Bone	6.099.976	7.086.492	8.120.675	9.133.282	10.134.844
7	Tanalili	5.205.849	6.047.764	6.930.357	7.794.537	8.649.293
8	Masamba	30.869.525	34.912.635	39.261.287	46.219.868	49.930.786
9	Mappedeceng	5.621.201	6.523.847	7.578.082	8.416.429	9.330.170
10	Rampi	10.104.169	11.377.679	12.736.319	15.128.621	16.271.944
11	Limpong	10.141.947	11.819.062	14.007.781	15.185.185	16.903.194
12	Seko	6.631.429	7.568.118	8.648.467	9.929.008	10.823.648
Luwu Utara		17.046.213	17.046.213	19.355.233	21.937.501	25.522.703

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara terus mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan, hal tersebut terjadi disebabkan oleh antara lain terjadinya perubahan tahun dasar



2.2.1.2. PDRB perkapita

PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun

Tabel 2.28. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 sd 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB (Juta Rp)	4.597.714,3	4.910.997,43	5.274.160,62	5.739.780,28	6.122.484,88
Jumlah Penduduk (jiwa)	287.472	290.365	292.765	299.989	302.687
PDRB perkapita (Rp/jiwa)	16.993.607	18.913.187	21.314.997	25.333.302	28.687.115

Sumber: BPS. PDRB Kabupaten Luwu Utara, 2011-2016

2.2.1.3. Laju Inflasi

Hasil analisis nilai inflasi rata-rata, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29. Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara.

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi	3,24	5,82	6,31	6,93	5,17	5,49

Sumber: BPS. Kabupaten Luwu Utara, 2011-2015

2.2.1.4. Paritas Daya Beli (PDB)

Paritas Daya Beli (PDB) Kabupaten Luwu Utara selama periode 2011 hingga 2015 mempunyai kecenderungan yang terus meningkat hingga mencapai Rp. 655,380 perbulan perkapita. Pada tahun 2013 dengan metode penghitungan baru PDB kita berada pada kisaran Rp. 10.541.000 per tahun perkapita dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 10.697.000 per tahun perkapita.

Tabel 2.30. Paritas Daya Beli Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 -2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
PDB (Ribu Rp)	653,06	655,38	10.541	10.605	10.697

Sumber: BPS Kab. Luwu Utara. Ket: Thn 2011-2012 perbulan perkapita, 2013-2015 pertahun perkapita



2.2.1.5. Indeks Gini Ratio

Perbedaan pendapatan timbul dikarenakan adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi. Pihak/kelompok yang memiliki sumber daya dan faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh/menguasai pendapatan yang lebih banyak juga. Sejumlah alat atau media lain yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah/daerah salah satunya adalah Koefisien Gini atau Gini Ratio.

H.T. Oshima membagi tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan Gini Ratio dalam tiga tingkatan yaitu:

- 1). Pertama, apabila Gini Ratio lebih kecil dari 0,4 maka dikategorikan pada tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah.
- 2). Kedua apabila nilai Gini Ratio berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,5 dikategorikan tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang.
- 3). Ketiga, apabila nilai Gini Ratio lebih besar dari 0,5 maka dikategorikan tingkat ketimpangan tinggi.

Selama kurun waktu 2011 - 2015, Gini Rasio cenderung menurun dari 0,26 pada tahun 2011 menjadi 0,20 tahun 2014 dan diperkirakan akan menjadi 0,16 tahun 2015. Sementara Gini Rasio Sulawesi Selatan tahun 2010 sebesar 0,40 dan tahun 2012 mencapai 0,41. Angka Gini Rasio tersebut menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Luwu Utara masih Kategori Rendah.

Tabel 2.31. Indeks Gini Ratio Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 -2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Gini Ratio	0,257	0,257	0,203	0,203	0,157

Sumber: BPS Kab. Luwu Utara

2.2.1.6. Indeks Ketimpangan Regional (IKR)

Perbedaan Potensi (kekayaan) alam dan ketersediaan faktor-faktor produksi antar kecamatan menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dapat berbeda. Kecamatan dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar dan didukung dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM/Enterprenuer) yang memadai akan mampu tumbuh lebih cepat.

Investor akan banyak melirik kecamatan yang memiliki SDA dan SDM yang memadai, sementara kecamatan yang tidak memiliki daya tarik untuk investor akan semakin sulit untuk membangun wilayahnya.

Kondisi tersebut di atas memicu adanya kompetisi dalam meningkatkan perekonomian dan dimungkinkan yang terbelakang adalah kecamatan dengan SDA dan SDM yang rendah. Hal ini pula memungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi antar kecamatan.

Untuk melihat kecenderungan perbedaan pola dan struktur ekonomi antar kecamatan, kajian sederhana yang dapat menggambarkan maksud tersebut adalah pemanfaatan Indeks Ketimpangan Regional (Regional Inequality) yang semula dikembangkan oleh **Jeffrey G. Williamson**.

Indeks ini hanya membutuhkan data PDRB Kecamatan dan Jumlah Penduduk di masing-masing kecamatan yang dibandingkan. Perbandingan indeks ini dari tahun ke tahun akan menunjukkan apakah ada perubahan tingkat ketimpangan antar kecamatan. Nilai indeks yang semakin mendekati nilai satu berarti semakin tinggi ketimpangan yang terjadi. Indeks Ketimpangan Regional tersebut dapat dihitung dengan rumus: Indeks

$$\text{Ketimpangan Regional (IKR)} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^k (y_i - y)^2 \frac{f_i}{n}}}{y}, \quad 0 < \text{IKR} < 1$$

Keterangan:

- y_i = PDRB perkapita Kecamatan ke i
- y = PDRB perkapita rata-rata seluruh kecamatan
- f_i = Jumlah penduduk di kecamatan ke i
- n = Jumlah penduduk Luwu Utara
- k = Jumlah Kecamatan

Tabel 2.32. Indeks Ketimpangan Regional (IKR) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 -2015

Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
Indeks Ketimpangan Regional	0,598	0,596	0,664	-	0,570

Sumber: BPS Kab. Luwu Utara. *) tdk dihitung, **) Angka Perkiraan

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sehingga tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan dan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dilihat perkembangan kesejahteraan penduduk di wilayah dari tahun ke tahun dan keterbandingan dengan wilayah lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena menggambarkan kualitas penduduk berupa hidup sehat dan berumur panjang, intelektualitas berupa kemampuan memiliki ilmu pengetahuan dan standar hidup layak.

Secara umum manfaat data Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut :

- Mengetahui perkembangan hasil pembangunan SDM dalam berbagai aspek kehidupan
- Mengetahui capaian program-program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Mendapatkan "feedback" atas ketidak/kekurang keberhasilan pembangunan
- Sebagai variabel pendukung penyusunan DAU
- Mengukur keterkaitan dengan proses pembangunan dibidang lainnya (ekonomi, sosial, politik dan sebagainya)

Tabel 2.33. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Utara 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
IPM	65.57	65.99	66.40	66,90	67,52

Sumber: BPS Kab. Luwu Utara, 2011-2015

Klasifikasi Pembangunan Manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Klasifikasi	Capaian IPM
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM < 80$
Sedang	$60 \leq IPM < 70$
Rendah	$IPM < 60$

2.2.2.2. Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dibidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek huruf/angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

a. Angka Melek Huruf.

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Tabel 2.34. Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	177.395	178.550	186.194	193.140	203.090
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	191.035	192.010	199.973	202.730	205.516
3	Angka melek huruf	92,86	92,99	93,11	95,27	98,82

Sumber: BPS. Kabupaten Luwu Utara 2012-2016.

Tabel. 2.35. Angka Melek Huruf Tahun 2015 Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	Angka melek huruf
1	Sabbang	25.365	25.365	100,00
2	Baebunta	29.944	30.206	99,13
3	Malangke	18.388	18.388	100,00
4	Malangke Barat	15.307	15.738	97,26
5	Sukamaju	28.688	29.380	97,64
6	Bone-Bone	17.980	18.039	99,67
7	Tanalili	14.212	14.731	46,48
8	Masamba	24.375	24.375	100,00
9	Mappedeceng	16.279	16.311	49,80
10	Rampi	1.780	2.082	85,49
11	Rongkong	2.344	2.438	46,14
12	Seko	8.423	8.463	95,53
Luwu Utara		203.085	205.516	98.82

Sumber: BPS. Kabupaten Luwu Utara 2016.



b. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan pendorong (booster) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah.

Perkembangan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Luwu Utara mengalami perkembangan sejak tahun 2011. Pada tahun 2015 angka harapan lama sekolah di Kabupaten Luwu Utara sudah mencapai 12,11 (tamat SMA) dibandingkan dengan tahun 2011 hanya mencapai 11,60 (belum tamat SMA)

Tabel 2.36. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Luwu Utara 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
HLS (Tahun)	11,60	11,75	11,91	12,09	12,11

Sumber: BPS Kab. Luwu Utara. *) Angka Sementara
Ket. 2011-2012 metode lama (Melek Huruf), 2013-2015 metode baru

c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendidikan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu

muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi *kelebihan estimasi* atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Lamanya bersekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang, misalnya jika seseorang pendidikan tertingginya adalah SMP, maka ia memiliki jumlah tahun bersekolah sama dengan 9 tahun, yaitu 6 tahun bersekolah di tingkat SD ditambah dengan 3 tahun di SMP.

Tabel 2.37. Lamanya Bersekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas.

Jenjang	Kelas	Jumlah tahun bersekolah (kumulatif)
SD	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
SMP	1	7
	2	8
	3	9
SMA	1	10
	2	11
	3	12
Diploma	I	13
	II	14
	III	15
S1	I	13
	II	14
	III	15
	IV	16
S2	-	17 - 19
S3	-	20-24

Sumber: BPS. Kabupaten Luwu Utara 2015.

Untuk Diploma, S1, S2, dan S3, konversi lamanya bersekolah dapat berbeda untuk setiap individu karena asumsi yang digunakan dalam konversi diatas adalah sebagai berikut:

Seseorang yang masuk S1 adalah lulusan SMA, bukan melanjutkan dari diploma. Dalam kenyataannya, terdapat program S1 extension yang membuka kesempatan bagi lulusan Diploma untuk melanjutkan studi ke S1.

Asumsi menempuh pendidikan S2 maksimum adalah 3 tahun dan S3 maksimum adalah 4 tahun.

Nilai rata-rata lamanya bersekolah yang besar menunjukkan tingginya tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Jika didapat rata-rata lamanya sekolah sama dengan 9,33 artinya rata-rata penduduk di suatu wilayah bersekolah sampai 9 tahun 4 bulan atau setingkat SMP.

d. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Perkembangan angka partisipasi sekolah Murni (APM) di Kabupaten Luwu Utara dari semua jenjang pendidikan yaitu APM SD/MI, APM SMP/MTs serta APM SMA/SMK terus mengalami peningkatan, walaupun pada jumlah siswa kelompok usia tertentu seperti usia 7-12, 13-15 dan usia 16-18 pertumbuhannya berfluktuasi.

Tabel 2.38. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
	APM SD/MI	92,15	91,69	76,47	85,97	100,00
2	SMP/MTs					
	APM SMP/MTs	60,71	69,75	86,21	90,92	71,84
3	SMA/MA/SMK					
	APM SMA/MA/SMK	62,12	63,93	65,89	69,92	63,31

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Tabel 2.39. Angka Partisipasi Murni Tahun 2015 menurut kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18 th	APM
1	Sabbang	4480	5001	0,90	1914	2332	82,08	748	1138	65,73
2	Baebunta	5611	6300	0,89	2108	2646	79,67	1718	1963	87,52
3	Malangke	3315	3703	0,90	1495	1954	76,51	712	1309	54,39
4	Malangke Barat	2790	3239	0,86	1223	1431	85,46	815	825	98,79



NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18 th	APM
5	Sukamaju	4472	4976	0,90	1850	2334	79,26	1423	1745	81,55
6	Bone-Bone	3059	3334	0,92	1919	2311	83,04	1687	2503	67,40
7	Tanalili	2938	3272	0,90	674	874	77,12	293	339	86,43
8	Masamba	4204	4528	0,93	2568	2906	88,37	1025	3589	28,56
9	Mappedeceng	2172	2660	0,82	966	1157	83,49	1352	1620	83,46
10	Rampi	406	474	0,86	193	255	75,69	107	144	74,31
11	Rongkong	547	728	0,75	297	362	82,04	140	184	76,09
12	Seko	1700	2183	0,76	741	757	97,89	259	363	71,35
Luwu Utara		39.398	39.398	100,0	17.298	18.778	71,84	11.483	16.791	63,31

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

e. Angka Partisipasi Kasar

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami perkembangan yang berfluktuasi pada semua jenjang pendidikan, baik pada tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun pada jenjang SMA/MA/SMK.

Tabel 2.40. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APK SD/MI	103,74	105,66	109,33	106,21	115,02
2.	APK SMP/MTs	90,63	93,71	87,40	85,22	83,39
3.3.	APK SMA/MA/SMK	87,70	85,90	71,78	94,14	81,93

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016



Tabel 2.41. Angka Partisipasi Kasar Tahun 2015 menurut kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		jumlah siswa bersekolah di SD/MI	jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	jumlah penduduk usia 16-18th	APK
1	Sabbang	4871	5001	97,4	2313	2332	99,1	922	1138	81,0
2	Baebunta	6113	6300	97,0	2539	2646	95,9	1960	1963	99,8
3	Malangke	3605	3703	97,3	1846	1954	94,4	998	1309	76,2
4	Malangke Barat	3085	3239	95,2	1430	1431	99,9	820	825	99,3
5	Sukamaju	4754	4976	95,5	2146	2334	91,9	1701	1745	97,4
6	Bone-Bone	3228	3334	96,8	2198	2311	95,1	2031	2503	81,1
7	Tanalili	3165	3272	96,7	863	874	98,7	330	339	97,3
8	Masamba	4486	4528	99,1	2903	2906	99,9	3586	3589	99,9
9	Mappedeceng	2332	2660	87,7	1132	1157	97,8	1618	1620	99,8
10	Rampi	458	474	96,6	254	255	99,6	140	144	97,2
11	Rongkong	634	728	87,1	360	362	99,4	180	184	97,8
12	Seko	2029	2183	92,9	750	757	99,0	355	363	97,8
Luwu Utara		21988	39398	115,02	15.881	18.778	83,39	13.417	16.791	81,93

Sumber: BPS. Kabupaten Luwu Utara 2016.

f. Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.42. Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	APT	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD	75.487	70.706	72.857	75.288	74.952
2.	SMP	38.647	40.001	36.344	44.897	43.809
3.	SMA	32.622	35.016	33.015	36.915	35.453
4.	Perguruan Tinggi	11.369	11.058	12.622	13.330	13.059

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa angka pendidikan yang ditamatkan (APT) di Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2011 sampai dengan

2015 terus mengalami Fluktuasi pada semua tingkat pendidikan, namun pada tahun 2015 pada semua tingkat pendidikan mengalami penurunan.

2.2.2.2. Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = $(1 - \text{angka kematian bayi})$. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Tabel 2.43. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2015 menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

No	Kecamatan	Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun pada tahun x	Jumlah Kelahiran Hidup pada tahun x	AKB	AKHB
1	Sabbang	0	670	0	100
2	Baebunta	11	748	14,71	85,29
3	Malangke	9	473	19,03	80,97
4	Malangke Barat	2	398	5,02	94,98
5	Sukamaju	15	767	19,56	80,44
6	Bone-Bone	6	438	13,69	86,31
7	Tanalili	8	448	17,86	82,14
8	Masamba	9	584	5,14	94,86
9	Mappedeceng	6	348	17,24	82,76
10	Rampi	2	49	46,81	53,19
11	Rongkong	4	51	78,43	21,57
12	Seko	0	149	0	100
Luwu Utara		66	5123	12,83	87,17

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

b. Angka usia harapan hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu

tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Tabel 2.44. Angka Harapan Hidup Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No.	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
1.	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
2.	66,91	66,95	66,98	69,6	67,05

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Angka harapan hidup di Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2011 terus mengalami perkembangan dimana pada tahun 2011 AHH Kabupaten Luwu Utara hanya 66,91 dan menjadi 69,6 pada tahun 2015

c. Persentase balita gizi buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur.

Tabel 2.45. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No.	Balita Gizi Buruk (%)				
1.	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
2.	4,79	2,26	2,01	2,21	2,17

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk.

2.2.2.3. Kemiskinan.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tabel 2.46. Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
Jumlah Penduduk Miskin (000)	42.622	41.416	46.236	43.020	41.89
Persentase Penduduk Miskin (%)	14,64	14,03	15,52	14,31	13,87
P1	2,63	2,68	2,06	1,68	2,83
P2	0,64	0,75	0,43	0,32	0,80
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kap/Bulan)	215.419	224.241	240.721	251.627	265.822

Sumber: BPS Kab. Luwu Utara, Ket: *) Angka Sementara

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
2. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
3. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain:

1. Kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.
2. Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US \$ 1 atau US \$ 2 per hari.
3. Kemiskinan Struktural (contoh; kemiskinan karena lokasi yg terisolasi, misal orang seko, orang rampi dsb).
4. Kemiskinan kultural (karena faktor adat) seperti suku konjo di kajang (Bulukumba), dan sebagainya.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (survei paket komoditi kebutuhan dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

2.2.2.4. Kepemilikan tanah (Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan)

Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100. Gambaran kepemilikan tanah di Kabupaten Luwu Utara diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.47. Kepemilikan Tanah Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

No.	Kecamatan	Luas Tanah	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki tanah	Persentase penduduk memiliki tanah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Sabbang	525,08	36.914	7.650	20,72
2	Baebunta	295,25	44.790	11.692	26,10
3	Malangke	229,70	27.467	4.188	15,25
4	Malangke Barat	214,05	24.043	5.014	20,85
5	Sukamaju	255,48	41.511	10.468	25,22
6	Bone-Bone	127,92	25.911	6.494	25,06
7	Tanalili	149,41	22.113	1.250	5,65



No.	Kecamatan	Luas Tanah	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk yang memiliki tanah	Persentase penduduk memiliki tanah
8	Masamba	1.068,85	34.455	8.835	25,64
9	Mappedeceng	275,50	22.884	4.870	21,28
10	Rampi	1.565,65	3.082	1	0,03
11	Rongkong	686,50	3.882	329	8,48
12	Seko	2.109,19	12.937	1,87	1,87
Luwu Utara		7.502,58	299.989	61.033	20,35

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

2.2.2.5. Kesempatan kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Luwu Utara sebesar 184.283, dari jumlah tersebut yang sedang mencari pekerjaan masih sekitar 26.811 jiwa. Golongan umur yang terbanyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan yaitu pada umur 25-29 tahun kemudian diikuti dengan umur 30-34 tahun, sedangkan umur 65 ke atas sebesar 15.545 lebih besar dari umur 15-19 tahun hanya sebesar 11.998.

Tabel 2.48. Jumlah Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

Golongan umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
15-19	10.053	1.895	11.998
20-24	17.363	4.341	21.704
25-29	18.787	4.697	23.484
30-34	16.492	6.771	23.263
35-39	19.803	2.774	22.577
40-44	17.064	1.897	18.861
45-49	14.329	1.593	15.922
50-54	12.040	634	12.679
55-59	9.317	1.036	10.353
60-64	7.502	395	7.897
65+	14.767	778	15.545
Jumlah	157.517	26.811	184.283

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.



2.2.2.6. Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah.

Tabel 2.49. Angka Kriminalitas Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

Kasus	Kejadian	Tertangani
Pembunuhan	3	3
Penganiayaan Berat	2	1
Penculikan	1	0
Pencurian dengan Kekerasan	2	2
Pencurian dengan Pemberatan	8	6
Pencurian Ranmor	59	11
Pencurian Kawat Telepon	0	0
Pemerksaan	0	0
Pembakaran	9	4
Senpi/Handak	3	3
Pemerasan	2	1
Penyelundupan	0	0
Kejahatan Terhadap Kepala Negara	0	0
Jumlah		

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas yang terbanyak terjadi di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 adalah kejadian dengan kasus pencurian kendaraan bermotor yaitu sebanyak 59 kejadian, sedangkan kasus-kasus lainnya dibawah 10 kejadian. Dari jumlah kriminalitas kejadian yang terjadi belum semua kasusnya tertangani kecuali pencurian dengan kekerasan dan Senpi/Handak dimana kasusnya semuanya telah tertangani.

2.2.2.7. Agama

Pada tahun 2015 penduduk yang beragama Islam 248.160 orang, beragama Katolik 4.096 orang, beragama Protestan sebanyak 41.697 orang, beragama Hindu sebanyak 8.722 orang, dan beragama Budha sebanyak 12 orang.



Pada tahun 2015 jumlah sarana ibadah Mesjid sebanyak 598 buah, Mushola sebanyak 187 buah, Gereja Katolik sebanyak 30 buah, Gereja Protestan sebanyak 257 buah, dan Pura sebanyak 72 buah.

Tabel 2.50. Jumlah tempat ibadah menurut jenis Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

No	Kecamatan	Mesjid	Musholla	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
1	Sabbang	68	14	8	41	0	0
2	Baebunta	89	4	5	39	4	0
3	Malangke	63	7	3	4	6	0
4	Malangke Barat	60	11	1	15	0	0
5	Sukamaju	61	64	5	17	32	0
6	Bone-Bone	63	45	4	24	9	0
7	Tanalili	28	2	2	20	1	0
8	Masamba	87	18	1	4	0	0
9	Mappedeceng	53	19	1	14	20	0
10	Rampi	4	1	0	15	0	0
11	Rongkong	11	1	0	5	0	0
12	Seko	11	1	0	59	0	0
Luwu Utara		598	187	30	257	72	0

Sumber: BPS, Luwu Utara dalam Angka 2016.

2.2.2.8. Pengarus utamaan Gender

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara secara bertahap berupaya untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi Wanita, baik Sosial, Profesi maupun Kemasyarakatan serta Keagamaan, diantaranya : Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Wanita Bhayangkari, dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat Organisasi Wanita di Bidang Kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Posyandu, dan Penyuluh kesehatan. Organisasi Wanita Profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan.

2.2.2.9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2015 meliputi: Anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak nakal, anak cacat, wanita rawan sosial ekonomi, wanita korban tindak kekerasan atau diperlakukan, lanjut usia terlantar, lanjut usia korban tindak

kekerasan atau diperlakukan salah, penyandang cacat, penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis, pengemis, gelandangan, bekas narapidana, korban penyalahgunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, masyarakat yang tinggal di daerah rawan, dan pekerja migrant.

Pada tahun 2015 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain Panti asuhan, panti sosial lanjut usia, panti sosial penyandang cacat, dan Karang Taruna.

Dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, Kabupaten Luwu Utara akan mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup pesat. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 302.687 jiwa dan diperkirakan pada tahun 2021 akan mencapai sekitar 317.600 jiwa. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan, meningkatnya kemampuan membaca dan menulis, menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, menurunnya tindak kekerasan, berkurangnya eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Namun demikian, pengendalian terhadap kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk tetap perlu diperhatikan untuk menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut perlu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, memiliki daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Rendahnya kualitas SDM yang diukur dengan IPM mengakibatkan rendahnya produktifitas dan daya saing perekonomian daerah. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM.

Dibidang kependudukan tantangan yang dihadapi adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk, menekan angka kelahiran, mengendalikan mobilitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk.

Dibidang pendidikan, tantangan yang dihadapi dalam bidang pendidikan, antara lain penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; penurunan penduduk yang buta aksara; menurunnya kesenjangan pendidikan antara yang kaya dan miskin, desa dan perkotaan serta antara jenis kelamin. Tantangan lain adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga pendidikan dapat mendorong dan berperan dalam pembangunan daerah termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan moral.

Dalam bidang kesehatan tantangan yang dihadapi antara lain mengurangi kesejangan status kesehatan masyarakat, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pemerataan jumlah tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan.

Tantangan dibidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga. Semetara itu tantangan yang dihadapi dalam bidang seni dan budaya adalah meningkatkan pemahaman, mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai seni dan budaya sebagai jatidiri.

Dalam pembangunan agama tantangan yang dihadapi adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat dalam melaksanakan ajaran agamanya.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan; mengurangi tindak kekerasan; eksploitasi; meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan diskriminasi serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tantangan yang dihadapi dalam bidang kesejahteraan sosial adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan bantuan sosial, meningkatkan antisipasi terhadap berbagai krisis sosial dan bencana alam, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat serta meningkatkan cakupan jaminan sosial masyarakat.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga menggambarkan kondisi daerah terhadap perkembangan pada kebudayaan dan olahraga, dengan menghitung komponen budaya dan olahraga pada variable tertentu.

1. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.
2. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
3. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
4. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.

Pengembangan budaya dalam menunjang potensi pariwisata guna meningkatkan perekonomian dan pelestarian budaya lokal sangat dibutuhkan, atraksi seni budaya dan pentas tari-tarian secara rutin sangatlah diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Pengembangan pusat kebudayaan yang unik dan spesifik perlu memperhatikan keberagaman suku yang ada di Kabupaten Luwu Utara, pengembangan sanggar seni dan budaya perlu didasari oleh keberadaan suku atau kelompok adat masyarakat bugis.

Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki.

Pembangunan pemuda dan olahraga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga telah memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga. Adapun pembangunan kepemudaan dan olahraga ditujukan untuk (a) meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat provinsi dan nasional; (b) menyelenggarakan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi; (c) membina dan mengembangkan olahraga sebagai sarana penyaluran bakat agar lebih profesional; (d) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan olahraga.

Kepemudaan merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda



sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan kebutuhan, tantangan, dan persaingan di era global.

Di Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa organisasi yang menaungi aktivitas kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, diantaranya KNPI, Karang Taruna, Remaja Mesjid, dll.

Tabel 2.51. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

No	Kecamatan	Jumlah Klup Olahraga
1	Sabbang	30
2	Baebunta	30
3	Malangke	8
4	Malangke Barat	10
5	Sukamaju	16
6	Bone-Bone	13
7	Tanalili	12
8	Masamba	42
9	Mappedeceng	23
10	Rampi	4
11	Rongkong	3
12	Seko	2
Luwu Utara		193

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu 2016

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 3 (tiga) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya pada misi ke-3 yaitu (i) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan, (ii) Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan dan (III) Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

1). Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah sama dengan jumlah siswa dalam satu kelompok usia yang bersekolah di tingkat pendidikan sesuai dengan kelompok usia pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut.

Perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) di Kabupaten Luwu Utara sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2012 APS mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia masing-masing dimana besaran jumlah penduduk kelompok usia sama dengan besaran jumlah partisipasi sekolah kecuali jumlah penduduk kelompok 13-15 tahun dimana jumlah murid usia tersebut lebih kecil.

Tabel 2.52. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	APS SD/MI	97.99	97.77	98.45	109.8	115.3
2.	APS SMP/MTs	87.69	86.12	100.43	111.38	83.39

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Jumlah murid sekolah baik SD/MI maupun SMP/MTs sejak tahun 2011 terus mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah penduduk usia kelompok 7-12 untuk tingkat SD/MI sejak tahun 2013 mengalami penurunan dimana pada tahun 2012 jumlahnya sekitar 45.240 menjadi hanya 44.368 pada tahun 2015. Sedangkan untuk penduduk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu dari 19.519 tahun 2014 menjadi 20.593 pada tahun 2015.

Tabel 2.53. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Sabbang	4586	4.791	91,7	2191	2.286	94,0
2	Baebunta	5718	6.000	90,8	2456	2.683	92,8



3	Malangke	3369	3.634	91,0	1751	1.906	89,6
4	Malangke Barat	2848	3.051	87,9	1428	1.464	99,8
5	Sukamaju	4531	4.878	91,1	2121	2.148	90,9
6	Bone-Bone	3148	3.220	94,4	2074	2.405	89,7
7	Tanalili	2976	3.155	91,0	875	835	99,8
8	Masamba	4314	4.422	95,3	2765	2.726	95,1
9	Mappedeceng	2214	2.602	83,2	1114	1.102	96,3
10	Rampi	415	459	87,6	239	275	93,7
11	Rongkong	599	641	82,3	331	370	91,4
12	Seko	1723	2.021	78,9	1048	968	99,1

Sumber: BPS. Kabupaten Luwu Utara, 2016

Tabel. 2.54. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/MA/SMK					
1.1.	jumlah murid usia 16-19 thn	12.976	14.088	13.960	16.547	11.483
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun	24.764	25.494	27.493	27.765	16.791
1.3.	APS SMA/MA/SMK	56.29	62.45	59.42	65.11	63.31

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

Tabel. 2.55. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	SMA/M/SMK		
		jumlah murid usia 16-19 thn	jumlah penduduk usia 16-19 th	APS
1	Sabbang	748	1138	0,66
2	Baebunta	1718	1963	0,88
3	Malangke	712	1309	0,54
4	Malangke Barat	815	825	0,99
5	Sukamaju	1423	1745	0,82
6	Bone-Bone	1687	2503	0,67
7	Tanalili	293	339	0,86
8	Masamba	1025	3589	0,29
9	Mappedeceng	1352	1620	0,83
10	Rampi	107	144	0,74
11	Rongkong	140	184	0,76
12	Seko	259	363	0,71

Sumber: BPS. Kabupaten Luwu Utara, 2016

2). Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini



mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel 2.56. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah sekolah	257	261	269	271	271
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	42.515	45.811	39.696	40.057	39.398
1.3.	Rasio	60,45	56,97	67,77	67,65	68,79
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah sekolah	87	93	102	108	108
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	20.760	19.475	18.948	19.119	18.778
2.3.	Rasio	41,91	47,75	53,83	56,49	57,51

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Tabel 2.57. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah sekolah	Jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sabbang	28	4.791	58,44	14	2.286	61,24
2	Baebunta	37	6.000	61,67	14	2.683	52,18
3	Malangke	27	3.634	74,30	15	1.906	78,70
4	Malangke Barat	24	3.051	78,66	11	1.464	75,14
5	Sukamaju	30	4.878	61,50	7	2.148	32,59
6	Bone-Bone	19	3.220	59,01	9	2.405	37,42
7	Tanalili	20	3.155	63,39	4	835	47,90
8	Masamba	26	4.422	58,80	13	2.726	47,69
9	Mappedeceng	17	2.602	65,33	7	1.102	63,52
10	Rampi	6	459	130,72	3	275	109,09
11	Rongkong	10	641	156,01	4	370	108,11
12	Seko	27	2.021	133,60	8	968	82,64
	Luwu Utara	271	39.398	68,79	108	18.778	57,51

Sumber: BPS. Kabupaten :uwu Utara, 2016

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.



Tabel. 2.58. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/MA/SMK					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	23	23	27	47	29
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun	43.815	45.240	42.348	40.398	17.720
1.3.	Rasio	1.905,00	1.966,96	1.568,44	859,53	611,03

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Tabel 2.59. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2015 Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

No	Kecamatan	SMA/MA/SMK		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 16-19 th	Rasio
1	Sabbang	3	1138	0,0026
2	Baebunta	4	1963	0,0020
3	Malangke	4	1309	0,0031
4	Malangke Barat	1	825	0,0012
5	Sukamaju	3	1745	0,0017
6	Bone-Bone	2	2503	0,0008
7	Tanalili	3	339	0,0088
8	Masamba	5	3589	0,0014
9	Mappedeceng	1	1620	0,0006
10	Rampi	1	144	0,0069
11	Rongkong	1	184	0,0054
12	Seko	1	363	0,0028
Luwu Utara		29	17722	0,0018

Sumber: BPS. Kabupaten :uwu Utara, 2016

3). Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Jumlah guru SD/MI di Kabupaten Luwu Utara terus mengalami peningkatan kecuali tahun 2012 yang mengalami penurunan dari 3.314 menjadi 2.059, namun pada tahun 2013 jumlah guru SD/MI mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015. Sedangkan untuk guru SMP/MTs jumlah guru berfluktuasi bahkan pada tahun 2015 jumlah guru SMP/MTs mengalami penurunan dimana jumlahnya hanya 1.089 dari 2.020 pada tahun 2013.



Tabel 2.60. Jumlah Guru dan Murid Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.314	2.059	3.676	3.178	3.183
1.2.	Jumlah Murid	43.815	45.240	42.348	40.398	35.770
1.3.	Rasio	75,64	45,51	86,80	78,67	88,99
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.176	2.188	2.020	1.613	1.089
2.2.	Jumlah Murid	18.258	19.475	18.545	19.519	15.678
2.3.	Rasio	64,41	112,35	108,92	82,64	69,46

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

Rasio terbaik antara jumlah guru dan murid di kabupaten Luwu Utara baik pada tingkat SD/MI maupun pada tingkat SMP/MTs, dimana pada tingkat SD/MI rasio terbaiknya terdapat pada tahun 2015 sedangkan pada tingkat SMP/MTs rasio terbaiknya terdapat pada tahun 2013.

Tabel. 2.61. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sabbang	410	4698	0,09	146	2332	0,06
2	Baebunta	426	5662	0,08	167	2646	0,06
3	Malangke	205	2887	0,07	83	1954	0,04
4	Malangke Barat	254	2544	0,10	67	1431	0,05
5	Sukamaju	304	4787	0,06	120	2334	0,05
6	Bone-Bone	249	2712	0,09	120	2311	0,05
7	Tanalili	173	2847	0,06	20	874	0,02
8	Masamba	387	4213	0,09	170	2906	0,06
9	Mappedeceng	162	2299	0,07	77	1157	0,07
10	Rampi	58	459	0,13	27	255	0,11
11	Rongkong	99	641	0,15	36	362	0,10
12	Seko	170	2021	0,08	36	957	0,06
	Luwu Utara	2897	35770	0,08	1069	19519	0,05

Sumber: BPS. Kabupaten Luwu Utara, 2016

Tabel 2.62. Jumlah Guru dan Siswa Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2011-2015

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/MA/SMK					
1.1.	Jumlah Guru	766	1026	919	1.091	745
1.2.	Jumlah Siswa	12.004	12.899	12.933	14.690	13.681
1.3.	Rasio	0,064	0,080	0,071	0,074	0,054

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Tabel 2.63. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.

No	Kecamatan	SMA/MA/SMK		
		Jumlah Guru	Jumlah Siswa	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Sabbang	43	1129	0,04
2	Baebunta	66	1847	0,04
3	Malangke	18	999	0,02
4	Malangke Barat	20	944	0,02
5	Sukamaju	54	1675	0,03
6	Bone-Bone	83	2098	0,04
7	Tanalili	13	382	0,03
8	Masamba	88	2252	0,04
9	Mappedeceng	82	1618	0,05
10	Rampi	8	170	0,05
11	Rongkong	9	175	0,05
12	Seko	8	393	0,02
Luwu Utara		492	13682	0,04

Sumber: BPS. Kabupaten Luwu Utara, 2016

2.3.1.2. Kesehatan

1). Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
- Membudayakan NKKBS.



- c. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- d. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Jumlah balita sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2012 mengalami penurunan. Perkembangan jumlah balita di Kabupaten Luwu utara diiringi pula dengan perkembangan jumlah posyandu dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2015 jumlah posyandu sudah mencapai 360 dibandingkan dengan 2011 yang hanya 340 posyandu.

Tabel 2.64. Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah posyandu	340	350	355	358	360
2.	Jumlah balita	19.748	18.524	19.188	23.969	24.529
3.	Rasio	17,22	18,89	18,50	14,94	14,68

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Jumlah posyandu pada tingkat kecamatan di Kabupaten Luwu Utara bervariasi antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Perbedaan jumlah posyandu ini karena pada setiap kecamatan memiliki jumlah balita berbeda. Kecamatan yang memiliki Jumlah posyandu yang terbanyak adalah Kecamatan Baebunta 55 posyandu dengan jumlah balita sebanyak 3.775. Namun jika dilihat dari rasio antara jumlah posyandu dan jumlah balita dari

setiap kecamatan, maka kecamatan yang paling tinggi rasionya adalah kecamatan Mappadeceng (82,23), sedangkan rasio yang paling rendah adalah Kecamatan Rongkong (22,31).

Tabel 2.65. Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kecamatan Sabbang	42	3.085	73.45
2	Kecamatan Baebunta	55	3.775	68.64
3	Kecamatan Malangke	31	1.989	64.16
4	Kecamatan Malangke Barat	27	1.919	71.07
5	Kecamatan Sukamaju	44	3.421	77.75
6	Kecamatan Bone-bone	27	2.160	80.00
7	Kecamatan Tanalili	28	2.014	71.93
8	Kecamatan Masamba	37	2.870	77.57
9	Kecamatan Mappadeceng	22	1.809	82.23
10	Kecamatan Rampi	8	296	37.00
11	Kecamatan Rongkong	13	290	22.31
12	Kacamatan Seko	26	901	34.65
Jumlah		360	24.529	68.14

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

2). Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Antara 2011 sampai dengan 2015 hanya terdapat penambahan puskesmas sebanyak 2 buah, sedangkan pustu hanya bertambah 4 buah. Penambahan puskesmas dan pustu ini karena terdapat peningkatan jumlah penduduk kabupaten Luwu Utara.

Tabel 2.66. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas	12	12	13	14	14
2.	Jumlah Poliklinik	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Pustu	160	160	160	164	164
4.	Jumlah Penduduk	287.472	290.365	292.765	299.989	302.687
5.	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	23.956	24.197	22.520	21.428	21.621
6.	Rasio Poliklinik persatuan penduduk	-	-	-	-	-
7.	Rasio Pustu persatuan penduduk	1,797	1,815	1,830	1,829	1,846

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016



Setiap kecamatan di kabupaten Luwu Utara sudah memiliki puskesmas, bahkan terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Sukamaju memiliki masing-masing 2 puskesmas. Kedua Kecamatan ini yaitu Baebunta dan Sukamaju memiliki 2 puskesmas karena memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibanding dengan kecamatan lainnya. Begitu pula dengan jumlah pustu dimana kedua kecamatan tersebut memiliki jumlah pustu lebih banyak. Sedangkan untuk poliklinik semua kecamatan di Kabupaten Luwu Utara belum ada yang memiliki.

Tabel 2.67. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sabbang	37.384	1	0,0267	-	0	20	0,535
2	Baebunta	45.150	2	0,0443	-	0	21	0,465
3	Malangke	27.535	1	0,0363	-	0	14	0,508
4	Malangke Barat	24.135	1	0,0414	-	0	13	0,539
5	Sukamaju	41.620	2	0,0481	-	0	23	0,553
6	Bone-bone	26.249	1	0,0381	-	0	11	0,419
7	Tanah lili	22.245	1	0,0450	-	0	9	0,405
8	Masaba	35.247	1	0,0284	-	0	17	0,482
9	Mappadeceng	23.089	1	0,0433	-	0	14	0,606
10	Rampi	3.134	1	0,3191	-	0	5	1,595
11	Rongkong	3.894	1	0,2568	-	0	11	2,825
12	Seko	13.005	1	0,0769	-	0	6	0,461
Luwu Utara		302.687	14	0,0463	-	0	164	0,542

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

Bila melihat rasio jumlah puskesmas dengan jumlah penduduk, maka Kecamatan Rampi memiliki rasio yang paling baik karena Kecamatan Rampi jumlah penduduknya tidak terlalu besar atau hanya sekitar 3.134 jiwa. Sedangkan untuk rasio jumlah pustu dengan jumlah penduduk dimana kecamatan Rongkong memiliki rasio yang paling baik diantara semua kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

3). Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang diselenggarakan melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan

yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Tabel 2.68. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara.

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	2	2
6.	Jumlah Penduduk	290.365	292.765	297.313	299.989	302.687
7.	Rasio	0,0069	0,0068	0,0067	0,0067	0,0066

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016

4). Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.69. Jumlah Dokter Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter	46	45	48	56	67
2	Jumlah Penduduk	287.472	290.365	292.765	299.989	302.687
3	Rasio	0,160	0,155	0,164	0,187	0,221

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012- 2016

Jumlah dokter di Kabupaten Luwu Utara sampai pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan dari hanya 45 dokter pada tahun 2011 terus bertambah menjadi 67 dokter pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 287.472 jiwa menjadi 302.687 jiwa pada tahun 2015 namun rasio dokter terhadap jumlah penduduk tetap mengalami peningkatan sampai pada tahun 2015. Pada tahun 2011 rasio dokter per jumlah penduduk hanya 0,157 yang artinya setiap satu dokter terdapat sebanyak 6.388 jiwa penduduk, dan pada tahun 2015 rasio



dokter per jumlah penduduk meningkat menjadi 0,221 yang mana setiap satu dokter terdapat sebanyak 4.518 jiwa penduduk.

Tabel 2.70. Jumlah Dokter Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015.

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sabbang	37.384	3	0,080
2	Baebunta	45.150	6	0,133
3	Malangke	27.535	3	0,109
4	Malangke Barat	24.135	3	0,124
5	Sukamaju	41.620	5	0,120
6	Bone-bone	26.249	4	0,152
7	Tanalili	22.245	3	0,135
8	Masamba	35.247	28	0,794
9	Mappedeceng	23.089	4	0,173
10	Rampi	3.134	2	0,638
11	Rongkong	3.894	3	0,770
12	Seko	13.005	3	0,231
Luwu Utara		302.687	67	0,221

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

Konsentrasi jumlah dokter di Kabupaten Luwu Utara masih terdapat di Kecamatan Masamba yaitu sebanyak 36 dokter dengan jumlah penduduk 35.247 jiwa. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya maka Kecamatan Masamba yang memiliki rasio yang paling baik diantara sejumlah kecamatan lainnya, bahkan ada kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yang tidak memiliki dokter yaitu Kecamatan Rongkong sedangkan kecamatan lainnya paling banyak memiliki 28 dokter.

5). Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.71. Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Tenaga Medis	46	45	48	56	67
2	Jumlah Penduduk	287.472	290.365	292.765	299.989	302.687
3	Rasio	0,160	0,155	0,164	0,187	0,221

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015



Jumlah tenaga medis di kabupaten Luwu Utara sejak 2013 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 2.72. Jumlah Tenaga Medis Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015.

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
1	Sabbang	37.384	3	0,080
2	Baebunta	45.150	6	0,133
3	Malangke	27.535	3	0,109
4	Malangke Barat	24.135	3	0,124
5	Sukamaju	41.620	5	0,120
6	Bone-bone	26.249	4	0,152
7	Tanalili	22.245	3	0,135
8	Masamba	35.247	28	0,794
9	Mappadeceng	23.089	4	0,173
10	Rampi	3.134	2	0,638
11	Rongkong	3.894	3	0,770
12	Seko	13.005	3	0,231
Luwu Utara		302.687	67	0,221

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

Kecamatan yang memiliki jumlah tenaga medis terbanyak adalah Kecamatan Masamba yaitu sebanyak 28 tenaga medis dengan jumlah penduduk hanya 35.247 jiwa. Jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya seperti Baebunta dengan jumlah penduduk 45.150 yang hanya memiliki sebanyak 6 tenaga medis, sehingga rasio antara tenaga medis dan jumlah penduduk maka kecamatan Masamba yang memiliki rasio yang paling baik diantara kecamatan lainnya di Kabupaten Luwu Utara yang hanya memiliki 3 sampai 5 tenaga medis.

2.3.1.3. Lingkungan Hidup

1). Persentase penanganan sampah

Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah tentang persampahan. Dalam lima tahun terakhir jumlah volume sampah di Kabupaten Luwu Utara terus meningkat, dimana pada tahun 2011 hanya 17.658,7 m³ dan yang ditangani sebesar 14.738,7 m³ atau sekitar 83,46 persen, namun pada tahun 2015 bertambah menjadi 23.451,25 m³ dan yang ditangani sebesar 22.265 m³ atau sekitar 94,94 persen



Tabel 2.73. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah sampah yang ditangani	14.738,7	16.487,05	19.549,4	21.118,9	22.265
2.	Jumlah volume produksi sampah	17.658,7	18.695,3	21.462	22.400,05	23.451,25
3.	Persentase	83,46	88,19	91,09	94,28	94,94

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara tahun 2016

Tabel 2.74. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sabbang	-	-	-
2	Baebunta	-	-	-
3	Malangke	-	-	-
4	Malangke Barat	-	-	-
5	Sukamaju	730	839,5	86,75
6	Bone-bone	467,2	620,5	75,3
7	Tanalili	-	-	-
8	Masamba	21.283,15	21.991,25	96,7
9	Mappadeceng	-	-	-
10	Rampi	-	-	-
11	Rongkong	-	-	-
12	Seko	-	-	-
	Luwu Utara	22.480,35	23.451,25	258,75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara tahun 2016.

2). Persentase penduduk berakses air minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung Logam berat. Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum sejak 2011 terus mengalami perkembangan. Perkembangan proporsi mendapatkan akses air minum seiring dengan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Utara, dan bahkan pada tahun 2015 proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum sudah mencapai 93,12 persen.

Tabel 2.75. Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	203.144	220.636	224.772	255.846	279.351
2	Jumlah penduduk	287.472	290.365	292.765	299.989	302.687
3	Persentase penduduk berakses air bersih	70.67	76,75	76.78	85,29	93,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara tahun 2016

Jika dilihat dari Proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum perkecamatan dimana semua kecamatan sudah mencapai diatas 70 %, walaupun masih ada kecamatan yang jumlah penduduknya dapat mengakses air minum baru mencapai 75 % yaitu Kecamatan Seko. Bahkan di Kabupaten Luwu Utara ada 2 kecamatan yang jumlah penduduknya sudah 100 % dapat mengakses air minum.

Tabel 2.76. Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan Tahun 2015

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air minum	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sabbang	36.914	34.915	94,58
2	Baebunta	44.790	41.739	93,19
3	Malangke	27.467	26.348	95,93
4	Malangke Barat	24.043	19.674	81,83
5	Sukamaju	41.511	41.164	90,16
6	Bone-bone	25.911	24.725	95,42
7	Tanalili	22.113	19.075	86,26
8	Masamba	34.455	32.837	95,22
9	Mappedeceng	22.884	22.223	97,11
10	Rampi	3.082	3.082	100,00
11	Rongkong	3.852	3.882	100,00
12	Seko	12.937	9.717	75,11
Luwu Utara		299.989	279.351	93,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara tahun 2016.

3). Persentase luas permukiman yang tertata

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.



Persentase Luas Permukiman yang Tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan

Untuk menghitung persentase luas permukiman yang tertata dapat disusun tabel sebagai berikut:

Tabel 2.77. Persentase Luas Permukiman yang Tertata Tahun 2011. s.d 2015 KabupatenLuwu Utara.

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	luas area permukiman tertata (Ha)	16.382	16.832	17.232	17.717	23.110
2.	luas area permukiman keseluruhan (Ha)	292.298	295.365	297.313	299.989	302.687
3.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata	5,60	5,70	5,80	5,91	7,63

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara tahun 2016,

2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

1). Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya bottle neck (jaringan jalan yang menyempit) di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi

mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan.

2). Kinerja Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2011 proporsi jalan kondisi baik mencapai 54,07 % dan pada tahun 2015 kondisi tersebut meningkat menjadi 57,92%. Namun disisi lain proporsi jalan kondisi rusak berat juga mengalami peningkatan, yaitu dari 14,10 % pada tahun 2011 menjadi 15,25 % pada 2015. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai panjang jaringan jalan di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan kondisi selama kurun waktu 2011 s.d. 2015.

Tabel 2.78. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kondisi Baik	1.211,98	1.263,12	1.272,08	1.290,45	1.298,09
	Proporsi Kondisi Baik (%)	54,07	56,35	56,75	57,57	57,92
2.	Kondisi Sedang Rusak	395,11	454,21	494,31	538,88	420,18
	Proporsi Kondisi Sedang Rusak (%)	17,63	20,26	22,05	24,04	18,75
3.	Kondisi Rusak	318,15	218,40	193,87	130,64	181,27
	Proporsi Kondisi Rusak (%)	14,19	9,74	8,65	5,83	8,09
4.	Kondisi Rusak Berat	316,13	305,64	281,11	281,40	341,83
	proporsi Kondisi Rusak berat (%)	14,10	13,64	12,54	12,55	15,25
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)	2.241,37	2.241,37	2.241,37	2.241,37	2.241,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara tahun 2016

Kecamatan Sukamaju merupakan wilayah yang paling panjang jalannya yaitu 350 km atau 17,29 % dari total panjang jalan di Kabupaten Luwu Utara namun demikian proporsi jalan rusaknya tergolong kecil (7,02 %). Kecamatan Baebunta, Masamba dan Mappedeceng juga merupakan kecamatan yang memiliki ruas jalan yang panjang. Kecamatan yang memiliki proporsi kerusakan yang besar adalah kecamatan Rampi dan Seko masing-masing 25,61 % dan 32,36 % dari panjang jalan masing-masing kecamatan.

Tabel 2.79. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015

NO	Kecamatan	Kondisi Baik	Kondisi Sedang Rusak	Kondisi Rusak	Kondisi Rusak Berat	Jalan secara keseluruhan
1	Sabbang	66,36	27,19	11,95	14,84	120,34
2	Baebunta	147,15	44,17	16,45	17,10	224,87
3	Malangke	119,96	31,61	11,18	17,37	180,12
4	Malangke Barat	114,27	31,12	12,76	20,14	178,29
5	Sukamaju	241,86	56,32	27,27	24,56	350,01
6	Bone-bone	68,33	20,91	7,63	12,49	109,36
7	Tana Lili	99,63	28,05	10,98	14,25	152,91
8	Masamba	134,54	41,00	14,15	12,70	202,39
9	Mappadeceng	140,93	34,78	16,77	11,29	203,77
10	Rampi	14,80	30,95	15,07	20,94	81,76
11	Rongkong	18,17	11,13	9,06	8,37	46,73
12	Seko	56,41	41,05	20,17	56,28	173,91
Jumlah		1.222,41	398,28	173,44	230,33	2.024,46

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu Utara tahun 2016.

3). Rasio Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Tabel 2.80. Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (KM)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jaringan primer	44,06	44,06	44,06	44,06	44,06
2.	Jaringan Sekunder	32,05	32,05	32,05	32,05	32,05
3.	Jaringan Tersier	32,14	32,14	32,14	32,14	32,14
4.	Panjang Total Jaringan irigasi	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25
5.	Luas lahan budidaya	9.221,00	9.221,00	9.221,00	9.221,00	9.221,00
6.	Rasio (%)	1:85	1:85	1:85	1:85	1:85

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

Panjang jaringan irigasi Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2011 sepanjang 108,25 km. Angka ini tidak meningkat selama 5 tahun yakni pada tahun 2015 tetap 108,2 km. Adapun luas lahan budidaya pada tahun 2011 seluas 9.221,00 km² juga tidak meningkat yakni tetap 9.221,00 Ha pada tahun 2015. Adapun rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya mencapai 1,17 pada tahun 2011 tidak mengalami peningkatan pada tahun 2015. Ini artinya bahwa setiap 1 km jaringan irigasi harus mengairi lahan budidaya seluas 85 km² pada tahun 2011 dan tidak mengalami peningkatan sampai pada tahun 2015. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai gambaran jaringan irigasi di Kabupaten Luwu Utara selama kurun waktu tahun 2011 sd 2015

Tabel 2.81. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Pasokan Irigasi	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pasok Irigasi per Area	15,00	15,00	16,50	16,50	16,50
2.	Pasok Irigasi Relatif	10,47	9,14	10,64	10,64	10,06
3.	Pasok Air Relatif	16,50	9,70	11,25	11,25	10,67
4.	Indek Luas Areal	6,98	6,10	7,01	7,09	6,71
5.	Rancangan Luas Areal	24.977,00	27.757,00	28.142,00	28.020,00	27.709,00

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Pasokan air irigasi di Kabupaten Luwu Utara cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 2.82. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk)	Total Pasok Air (lt/ dtk)	PIA (lt/ dtk/ha)	PIR (lt/ dtk/ha)	PAR (lt/ dtk/ha)	IA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sabbang	3.527,00	2.091,00	3.527,00	3.136,50	3.136,50	5.290,50	1,50	0,89	1,50	0,59
2	Baebunta	3.485,00	1.138,00	3.485,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1,50	0,49	0,49	0,33
3	Malangke	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Malangke Barat	1.020,00	312,00	1.020,00	468,00	468,00	468,00	1,50	0,46	0,46	0,31
5	Sukamaju	4.520,00	3.273,00	4.520,00	4.909,50	4.909,50	4.909,50	1,50	1,09	1,09	0,72
6	Bone-bone	1.897,00	1.794,00	1.897,00	2.691,00	2.691,00	2.691,00	1,50	1,42	1,42	0,95
7	Tana Lili	1.816,00	1.745,00	1.816,00	2.617,50	2.617,50	2.617,50	1,50	1,44	1,44	0,96
8	Masamba	2.876,00	1.500,00	2.876,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1,50	0,78	0,78	0,52
9	Mappadeceng	1.225,00	154,00	1.225,00	231,00	231,00	231,00	1,50	0,19	0,19	0,13
10	Rampi	452,00	452,00	452,00	678,00	678,00	678,00	1,50	1,50	1,50	1,00
11	Rongkong	1.024,00	787,00	1.024,00	1.180,50	1.180,50	1.180,50	1,50	1,15	1,15	0,77
12	Seko	4.173,00	1.811,00	4.173,00	2.716,50	2.716,50	2.716,50	1,50	0,65	0,65	0,43
Jumlah		27.709,00	15.057,00	27.709,00	22.585,50	22.585,50	24.739,50	16,50	10,06	10,67	6,71

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

4). Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Tabel 2.83. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Bangunan tempat Ibadah	Thn 2011			Thn 2015		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mesjid	514	237.838	2,16	598	248.160	2,41
2.	Gereja Katolik	22	4.014	5,48	30	4.096	7,32
3.	Gereja Protestan	227	40.006	5,67	257	41.697	6,16
4.	Pura	39	8.498	4,59	71	8.722	8,14
5.	Vihara	0	9	0,00	0	12	0,00
6.	Kelenteng	0	0	0,00	0	0	0,00
7.	Lain-Lain	0	0	0,00	0	0	0,00
Luwu Utara		802	290.365	2,76	956	302.687	3,16

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.



Tabel 2.84. Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Kecamatan	Mesjid			Gereja Katolik			Gereja Protestan			Pura			Vihara			Lain-lain		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	Sabbang	68	25.996	2,62	8	2.038	3,93	41	9.350	4,39	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
2	Baebunta	89	37.317	2,38	5	660	7,58	39	7.002	5,57	4	171	23,39	0	0	0,00	0	0	0,00
3	Malangke	63	26.424	2,38	3	251	11,95	4	520	7,69	6	340	17,65	0	0	0,00	0	0	0,00
4	Malangke Barat	60	22.700	2,64	1	50	20,00	15	1.365	10,99	0	20	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5	Sukamaju	61	35.445	1,72	5	290	17,24	17	2.275	7,47	32	3.610	8,86	0	0	0,00	0	0	0,00
6	Bone-bone	63	23.445	2,69	4	350	11,43	24	1.882	12,75	9	560	16,07	0	12	0,00	0	0	0,00
7	Tanalili	28	18.106	1,55	2	330	6,06	20	3.409	5,87	1	400	2,50	0	0	0,00	0	0	0,00
8	Masamba	87	34.540	2,52	1	74	13,51	4	592	6,76	0	41	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
9	Mappadeceng	53	17.657	3,00	1	53	18,87	14	1.804	7,76	20	3.575	5,59	0	0	0,00	0	0	0,00
10	Rampi	4	441	9,07	0	0	0,00	15	2.693	5,57	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11	Rongkong	11	3.339	3,29	0	0	0,00	5	555	9,01	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12	Seko	11	2.750	4,00	0	0	0,00	59	10.250	5,76	0	5	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jumlah		598	248.160	2,41	30	4.096	7,32	257	41.697	6,16	72	8.722	8,25	0	12	0,00	0	0	0,00

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

5). Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

1. Fasilitas Air bersih
2. Pembuangan Tinja
3. Pembuangan air limbah (air bekas)
4. Pembuangan sampah

Hasil analisis data rumah tinggal berakses sanitasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.85. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	23.264,00	25.013,00	26.864,00	44.225,00	47.355,00
2	Jumlah rumah tinggal	67.328,00	68.991,00	67.537,00	70.795,00	67.854,00
3	Persentase	34,55	36,26	39,78	62,47	69,79

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

Tabel 2.86. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sabbang	8.259	4.948	59,91
2	Baebunta	9.821	6.597	67,17
3	Malangke	5.853	3.896	66,56
4	Malangke Barat	5.122	4.222	82,43



No	Kecamatan	Jumlah rumah tinggal	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Persentase
5	Sukamaju	10.396	7.669	73,77
6	Bone-bone	5.670	4.484	79,08
7	Tana Lili	5.495	3.312	60,27
8	Masamba	7.575	5.627	74,28
9	Mappadeceng	5.546	4.093	73,80
10	Rampi	628	380	60,51
11	Rongkong	845	325	38,46
12	Seko	2.644	1.802	68,15
Jumlah		67.854	47.355	69,79

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

6). Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Tabel 2.87. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara.

No	Uraian	Tahun 2011			Tahun 2015		
		Jumlah	Luas	Daya Tampung	Jumlah	Luas	Daya Tampung
1.	Tempat pemakaman umum (TPU)	342	342 ha	342.000	342	342 ha	342.000
2.	Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	-	-	-	-	-	-
3.	Tempat pemakaman khusus (TPK)	-	2.632	196	2.632	2.632	196
4.	Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Tempat Pemakaman	-	342 ha	342.000	342	342 ha	342.000
6.	Jumlah penduduk (jiwa)	-	-	290.365	-	-	302.687
7.	Rasio TPU persatuan penduduk	-	-	1,17	-	-	1,17

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

7). Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah

penduduk, dengan menggunakan rumus jumlah daya tampung TPS berbanding jumlah penduduk dikalikan 1000

Tabel 2.88. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara.

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah TPS	342	392	474	559	656
2.	Jumlah Daya Tampung TPS(M ³)	75	80	95	120,5	130,2
3.	Jumlah Penduduk	287.472	290.365	292.765	299.989	302.687
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,026	0,027	0,032	0,040	0,043

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016

Tabel 2.89. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung(Ton)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sabbang	37.384	-	-	-
2	Baebunta	45.150	1	4	0,000088
3	Malangke	27.535	-	-	-
4	Malangke Barat	24.135	-	-	-
5	Sukamaju	41.620	2	7,00	0,000168
6	Bone-bone	26.249	1	3,50	0,000133
7	Tana Lili	22.245	-	-	-
8	Masamba	35.247	-	-	-
9	Mappadeceng	23.089	653	119,70	0,005184
10	Rampi	3.134	-	-	-
11	Rongkong	3.894	-	-	-
12	Seko	13.005	-	-	-
Jumlah		302.687	656,00	130,20	0,000430

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

8). Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, dengan menggunakan rumus jumlah rumah layak huni dibanding dengan jumlah penduduk.

Pada tahun 2015, jumlah rumah layak huni telah mencapai 99.995 rumah dengan jumlah penduduk sebanyak 302.687 jiwa, sehingga rasio rumah layak huni Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 mencapai 30,27%. Hal tersebut tergolong masih rendah, dan akan menjadi perhatian dalam peningkatan rasio tersebut dari tahun ketahun.



2.3.1.5. Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- c. didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Tabel 2.90. Kondisi RTH Publik, Eksisting dan Rencana Untuk Seluruh Kabupaten Luwu Utara

No	Jenis RTH	Eksisting		Rencana (Sesuai RTRW)	
		Luas (Ha)	Persentase	Luas (Ha)	Persentase
RTH Publik					
1.	Taman dan Hutan Kota	75,89	0,01	-	-
2.	RTH Jalur Hijau Jalan	1.634,45	0,21	-	-
3.	RTH Fungsi Tertentu	55,76	0,07	-	-
RTH Alami					
1.	Hutan Lindung	527.225	70,27	362.214,91	48,27
2.	Kawasan Bergambut	-	-	-	-
3.	Kawasan Resapan Air	6.470	0,86	-	-
4.	Kawasan Suaka Alam	-	-	-	-
5.	Cagar Budaya	-	-	-	-
6.	Lainnya	-	-	-	-
Total		535.405	71,363	362.241,91	48,27

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 2016

2.3.1.6. Perhubungan

Peran dan fungsi transportasi terhadap proses transformasi wilayah yang menghubungkan wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya merupakan kebutuhan aksesibilitas yang sangat penting guna menunjang pertumbuhan wilayah/kawasan. Keterkaitan tersebut terutama merupakan prasarana utama dalam hal mobilisasi barang, dan penumpang, sehingga sirkulasi pola aliran sangat ditentukan oleh sistem transportasi tersebut. Aspek-aspek yang erat kaitannya dalam sistem transportasi adalah kemudahan hubungan (*aksesibilitas*) dan ketersediaan sarana angkutan.

Dalam pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Utara, transportasi memegang peran yang sangat penting. Peran tersebut adalah memudahkan interaksi antara wilayah. Semakin mudah interaksi wilayah maka akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial dan kewilayahan (membuka keterisolasian dengan wilayah lain). Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan mudah akan merangsang dan membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial. Akhirnya diharapkan dengan adanya hubungan antar wilayah akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Luwu Utara.

1). Jumlah arus penumpang angkutan umum

Tabel 2.91. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara.

No	Kecamatan	Jumlah penumpang				Total Jumlah Penumpang
		Bis	Kereta Api	Kapal Laut	Pesawat Udara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sabbang	388.800	-	-	-	388.800
2	Baebunta	489.600	-	-	-	489.600
3	Malangke	158.400	-	-	-	158.400
4	Malangke Barat	351.000	-	-	-	351.000
5	Sukamaju	576.000	-	-	-	576.000
6	Bone-bone	108.000	-	-	-	108.000
7	Tanalili	1.193.400	-	-	-	1.193.400
8	Masamba	48.600	-	-	8.546	57.146
9	Mappadeceng	631.800	-	-	-	631.800
10	Rampi	-	-	-	6.155	6.155
11	Rongkong	-	-	-	-	-
12	Seko	-	-	-	5.979	5.979
Jumlah		3.945.600	0	0	20.680	3.966.280

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.



2). Jumlah Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

Jaringan trayek terdiri atas:

- a. jaringan trayek lintas batas negara;
- b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
- c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
- d. jaringan trayek perkotaan; dan
- e. jaringan trayek perdesaan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Tabel 2.92. Rasio Ijin Trayek Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Izin Trayek perkotaan	3	3	4	5	5
2.	Izin Trayek perdesaan	120	130	140	135	140
3.	Jumlah Izin Trayek	123	133	144	140	145
4.	Jumlah penduduk	290365	292765	297313	299989	302267
5.	Rasio Izin Trayek	0,042	0,045	0,048	0,046	0,047

Sumber: Dinas Perhubungan 2016.

Tabel 2.93. Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Izin Trayek		Total Jumlah Izin Trayek	Rasio Izin Trayek
			Perkotaan	Perdesaan		
1	Sabbang	37384	-	75	75	0,0020
2	Baebunta	45150	-	-	-	-
3	Malangke	27535	-	-	-	-
4	Malangke Barat	24135	-	-	-	-
5	Sukamaju	41620	-	50	50	0,0012
6	Bone-bone	26249	-	30	30	0,0011
7	Tanalili	22245	-	-	-	-
8	Masamba	35247	5	-	5	0,00014
9	Mappadeceng	23089	-	-	-	-
10	Rampi	3134	-	-	-	-
11	Rongkong	3894	-	-	-	-
12	Seko	13005	-	-	-	-
Luwu Utara		302267	5	155	160	0,00052

Sumber: Dinas Perhubungan 2016.



3). Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- a. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.94. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

No	Angkutan Umum	2011			2012			2013			2014			2015		
		Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%	Jmlh	Jmlh KIR	%
1.	Mobil penumpang umum	144	144	100	135	135	100	56	56	100	219	219	100	159	159	100
2.	Mobil bus	156	156	100	133	133	100	54	54	100	137	137	100	114	114	100
3.	Mobil barang	2168	2168	100	1368	1368	100	117	117	100	1650	1650	100	1803	1803	100
4.	Kereta gandengan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kereta tempelan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2468	2468	100	1636	1636	100	227	227	100	2006	2006	100	2076	2076	100

Sumber: Dinas Perhubungan 2016.

4). Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

a. Pelabuhan Laut.

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Di Kabupaten Luwu Utara yang perairan lautnya (Teluk Bone) merupakan teluk dalam dengan muara sungai yang rawan pendangkalan sangat sulit untuk dibuat pelabuhan laut. Diperlukan biaya besar untuk pembuatan dan pemeliharaan pelabuhan. Selain itu, ketiadaan aliran air laut akan menjadikan pencemaran laut akibat limbah bahan-bakar kapal sulit



terhapus dari kawasan teluk. Selain itu, pembangunan pelabuhan laut telah memiliki masterplan sendiri di tingkat nasional yang perencanaannya ditentukan oleh permintaan pasar sehingga penyediaannya tidak dapat dilakukan sembarangan demi alasan efisiensi.

Kecenderungan yang terjadi selama ini dimana berbagai daerah berlomba-lomba membangun pelabuhan laut skala regional-nasional dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian wilayah tidak perlu ditiru oleh Kabupaten Luwu Utara. Yang perlu dikembangkan adalah membangun dermaga-dermaga pelabuhan rakyat yang diperlukan sebagai alat transportasi membawa hasil bumi ke daerah-daerah terdekat, misalnya Palopo.

Keberadaan dermaga kecil untuk tambatan perahu juga diperlukan untuk kelancaran transportasi antar kawasan yang saat ini masih tergantung pada transportasi laut karena tidak dimungkinkan untuk membangun transportasi darat yang memadai di kawasan tersebut.

b. Pelabuhan Udara

Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya.

Pelabuhan udara yang sekarang ada di Kabupaten Luwu Utara adalah Bandara Andi Djemma di Masamba dan Bandara perintis di Seko dan di Rampi yang telah beroperasi dengan baik, namun perlu adanya peningkatan landasan pacu di ketiga Bandara yang ada agar aksesibilitas ke seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara dapat merata pelayanannya.

Dengan semakin bertambahnya kapasitas pelayanan bandara, ditambah dengan semakin banyaknya jalur penerbangan dari/ke Luwu Utara oleh berbagai maskapai penerbangan, lalu-lintas kegiatan bisnis dari/ke Luwu Utara yang membutuhkan gerak cepat akan semakin terbuka.

b. Terminal Angkutan Darat/Bis

Terminal bis dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum

Terminal angkutan darat regional antar kota dikembangkan di Kecamatan Masamba. Saat ini telah ada terminal sementara di dekat Pasar

Sentral Masamba. Sementara itu, beberapa bus malam yang merupakan angkutan antar kota antar propinsi berhenti mengambil penumpang di dekat Bandara. Kondisi ini menjadikan terjadinya tidak tertib ruang. Pembangunan terminal biasanya diikuti dengan pembangunan prasarana lain yang merupakan swakarsa dan swadaya masyarakat. Hal ini berarti pembangunan terminal akan berakibat pada perkembangan kawasan di sekitarnya. Saat ini kawasan terbangun di sekitar ruas Jalan Poros Trans Sulawesi tempat terminal sementara dibangun sudah mulai rumit dengan telah adanya konflik lalu lintas antara kendaraan keluar masuk terminal dan pasar dengan arus lalu lintas menerus. Perlu dicarikan lahan pengganti sebagai terminal angkutan umum yang permanen. Arah lokasi terminal adalah di sekitar ringroad selatan Kota Masamba.

Tabel 2.95. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 sd 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
2	Jumlah pelabuhan udara	3	3	3	3	3
3	Jumlah terminal bis	1	1	1	1	1
Jumlah		4	4	4	4	4

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Penanaman Modal

1). Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Salah satu Faktor berjalannya pembangunan adalah tersedianya modal. Hal ini yang menjadikan pengelolaan Penanaman modal menjadi salah satu bidang penting pelayanan publik dalam menjaring datangnya modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang



dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya Kabupaten Luwu Utara.

Upaya pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam mencari modal dalam negeri dan modal asing agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu Utara meningkat dari 698 investor pada tahun 2013 menjadi 832 investor pada tahun 2015. Data tahun 2013 sampai dengan 2015 juga menunjukkan bahwa sesungguhnya peningkatan signifikan jumlah investor adalah dari dalam negeri. Adapun investor asing belum terdata pada tahun 2013, baru pada tahun 2014 masuk sebanyak 3 PMA dan tahun 2015 hanya satu PMA yang berinvestasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.96. Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	Jumlah Investor	22	0	22
2012	Jumlah Investor	29	0	29
2013	Jumlah Investor	698	0	698
2014	Jumlah Investor	686	3	689
2015	Jumlah Investor	831	1	832

Sumber: Dinas Koperindag 2016.

2). Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Dan semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah realisasi proyek PMDN/PMA yang berinvestasi di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 sebanyak 831 proyek (sesuai dengan jumlah investor), dengan jumlah investasi sebesar Rp 222.852.003.554. Jumlah realisasi ini lebih kecil prosesntase realisasinya bila dibandingkan dengan jumlah investasi yang disetujui, yaitu 831 proyek sebesar Rp 2.630.730.213.554, termasuk rencana investasi dalam dollar senilai \$ 585.000.000

Tabel 2.97. Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013-2015

Tahun	Persetujuan				Realisasi			
	JumlahProyek		Nilai Investasi		JumlahProyek		Nilai Investasi	
	PMA	PMDN	PMA (\$)	PMDN (Rp)	PMA	PMDN	PMA	PMDN (Rp)
2013	0	698	0	895.076.919.481	0	698	0	126.531.019.481
2014	3	686	44.250.000	376.685.446.021	3	686	0	142.280.946.021
2015	1	831	585.000.000	2.630.730.213.554	1	831	0	222.852.003.554

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2014-2016.

2.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1). Persentase koperasi aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Tabel 2.98. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi aktif	96	129	164	166	230
2	Jumlah koperasi	213	232	208	251	250
3	Persentase koperasi aktif	45,07	55,60	65,56	66,13	92

Sumber: Dinas Koperindag 2016.

2). Jumlah UKM non BPR

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Tabel 2.99. Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah seluruh UKM	3.355	3.691	4.060	4.466	12.807
2	Jumlah BPR/LKM	-	-	366	366	-
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Koperindag 2016.

3). Jumlah BPR/LKM

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

2.3.2.3. Kependudukan

1). Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Tabel 2.100. Fertilitas dan Mortalitas Penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

No	Fertilitas/mortalitas	Jumlah
1	Angka kelahiran kasar (CBR)	2.950
2	Angka kematian kasar (CDR)	1.885
3	Angka kematian bayi (IMR)	66

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.



2). Pengelompokan Penduduk

2.1). Pengelompokan Penduduk Berdasarkan jenis Kelamin dan Umur

Tabel 2.101. Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015*
0-4	14.628	13.887	16.277	16.314	16.283
5-9	18.285	20.115	16.626	16.622	16.652
10-14	16.823	17.695	16.826	16.647	16.548
15-19	13.239	13.415	14.405	14.592	14.685
20-24	10.372	11.585	10.764	10.910	11.067
25-29	10.386	9.903	11.214	11.299	11.407
30-34	10.649	12.677	11.265	11.228	11.185
35-39	13.560	10.360	11.425	11.397	11.390
40-44	10.518	9.430	9.674	9.801	9.875
45-49	5.530	7.040	8.047	8.312	8.552
50-54	6.802	5.918	6.203	6.411	6.646
55-59	4.081	4.664	5.283	5.456	5.630
60-64	4.037	3.645	3.931	4.063	4.194
65+	7.402	7.247	7.455	7.650	7.879
Jumlah	148.323	147.581	149.395	150.702	151.993

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016 *) Angka Sementara

Tabel 2.102. Penduduk Perempuan Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011-2015

Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015
0-4	13.657	13.168	15.755	15.817	15.841
5-9	17.763	18.642	15.681	15.739	15.817
10-14	18.354	17.248	16.275	16.120	16.030
15-19	11.525	12.079	13.088	13.173	13.206
20-24	11.641	8.246	10.940	11.027	11.124
25-29	15.646	14.925	12.270	12.295	12.378
30-34	11.194	10.860	11.998	11.992	11.951
35-39	10.445	12.079	11.152	11.223	11.315
40-44	9.206	9.248	9.287	9.428	9.540
45-49	6.858	6.737	7.875	8.111	8.335
50-54	5.676	5.590	6.471	6.710	6.961
55-59	3.328	4.733	5.070	5.284	5.484
60-64	3.141	3.281	3.966	4.066	4.213
65+	5.619	8.348	8.090	8.302	8.499
Jumlah	144.053	145.184	147.918	149.287	150.694

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016



Tabel 2.103. Penduduk Kabupaten Luwu Utara Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2015

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
Sabbang	18.719	18.665	37.384	100
Baebunta	22.671	22.479	45.150	101
Malangke	13.833	13.702	27.535	101
Malangke Barat	12.094	12.041	24.135	100
Sukamaju	20.881	20.739	41.620	101
Bone-bone	13.322	12.927	26.249	103
Tanalili	11.254	10.991	22.245	102
Masamba	17.277	17.970	35.247	96
Mappadeceng	11.580	11.509	23.089	101
Rampi	1.672	1.462	3.134	114
Rongkong	2.031	1.863	3.894	109
Seko	6.659	6.346	13.005	105
Jumlah Total	151.993	150.694	302.687	101

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

2.2). Pengelompokan penduduk berdasarkan Persebaran Penduduk/Geografis

Tabel 2. 104. Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (%)
1	Sabbang	37.384	525,08	71
2	Baebunta	45.150	295,25	153
3	Malangke	27.535	229,70	120
4	Malangke Barat	24.135	214,05	113
5	Sukamaju	41.620	255,48	163
6	Bone-bone	26.249	127,92	205
7	Tana Lili	22.245	149,41	149
8	Masamba	35.247	1.068,85	33
9	Mappadeceng	23.089	275,50	84
10	Rampi	3.134	1.565,65	2
11	Rongkong	3.894	686,50	6
12	Seko	13.005	2.109,19	6
Luwu Utara		302.687	7.502,58	40

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

2.3). Pengelompokan penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.105. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara

No	Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP	SMA	JUMLAH
1	Sabbang	4.791	2.286	1.298	8.375
2	Baebunta	6.000	2.683	2.044	10.727
3	Malangke	3.634	1.906	1.266	6.806
4	Malangke Barat	3.051	1.464	944	5.459
5	Sukamaju	4.878	2.148	1.791	8.817
6	Bone-bone	3.220	2.405	2.250	7.875
7	Tana Lili	3.155	835	382	4.372
8	Masamba	4.422	2.726	2.597	9.745
9	Mappadeceng	2.602	1.102	1.647	5.351
10	Rampi	459	275	170	904
11	Rongkong	641	370	175	1.186
12	Seko	2.021	968	393	3.382
Luwu Utara		38.874	19.168	14.957	72.999

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

Tabel 2.106. Penduduk 5 Tahun Keatas Kabupaten Luwu Utara Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2015

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak punya ijazah SD	41.889	41.963	83.852	99,82
2	SD/MI sederajat	23.270	22.773	46.043	102,18
3	SMP	8.938	9.748	18.686	91,69
4	SMA	7.172	6.958	14.130	103,08
5	Perguruan tinggi	2.508	2.484	4.992	100,97
Jumlah		83.777	83.926	167.703	99,82

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

3). Penduduk Menurut Kepemilikan KTP

Tabel 2.107. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
		Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
1	Sabbang	19.253	14.358	10.200	3.366	13.352	35.050	14.714	5.240
2	Baebunta	23.978	10.018	11.064	2.854	13.321	38.195	18.198	3.047
3	Malangke	14.475	11.074	7.118	2.687	8.513	27.947	14.961	402
4	Malangke Barat	12.677	7.301	5.900	1.997	8.220	21.296	11.413	570



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
		Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
5	Sukamaju	24.787	9.874	11.492	3.302	11.242	38.167	20.408	2.670
6	Bone-bone	14.171	7.125	6.659	2.184	7.423	23.269	12.346	1.166
7	Tanalili	12.193	4.492	5.882	1.069	6.960	18.643	8.978	1.793
8	Masamba	18.580	9.953	8.945	2.830	11.607	29.575	16.604	286
9	Mappadeceng	13.721	4.819	5.550	2.151	5.479	20.813	9.528	2.597
10	Rampi	1.385	1.063	689	245	1.200	2.337	360	1.153
11	Rongkong	1.878	1.068	774	368	1.534	2.940	1.499	152
12	Seko	1.933	8.278	2.787	1.259	4.728	10.332	2.616	3.989
Luwu Utara		159.031	89.423	77.060	24.317	93.579	268.564	131.625	23.065

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2016

4). Jumlah Penduduk Peserta KB

Tabel 2.108. Jumlah Penduduk Peserta KB Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Peserta KB		
		PUS	Peserta KB	Tidak KB
1	Sabbang	5.727	4.187	1.540
2	Baebunta	8.173	5.930	2.243
3	Malangke	5 187	3.451	1.736
4	Malangke Barat	3.981	2.730	1.251
5	Sukamaju	8.410	6.868	1.542
6	Bone-bone	4.331	2.973	1.358
7	Tanalili	3.790	2.856	934
8	Masamba	4.471	3.554	917
9	Mappadeceng	4.631	3.528	1.085
10	Rampi	571	456	115
11	Rongkong	669	408	261
12	Seko	2.380	1.415	965
Jumlah		52.303	38.356	13.947

Sumber : Dinas Kesehatan 2016

2.3.2.4. Ketenagakerjaan

1). Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun.



Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

Tabel 2.109. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Luwu Utara Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Serta Jenis Kelamin Tahun 2015

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	a. Bekerja	84.471	48.506	132.977
	b. Pengangguran	1.400	1.059	2.459
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	85.871	49.565	135.436
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	15.421	52.261	67.682
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	101.292	101.826	203.118
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	84,78	48,68	66,68
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	1,63	2,14	1,82

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.

Tabel 2.110. Penduduk Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
1	2	3	(4)
15-19	10.053	1895	11.948
20-24	17.363	4341	21.704
25-29	18.787	4697	23.484
30-34	16.492	6.771	23.263
35-39	19.803	2.774	22.577
40-44	17.064	1.897	18.961
45-49	14.329	1.593	15.922
50-54	12.040	634	12.674
55-59	9.317	1036	10.353
60-64	7.502	395	7.897
65+	14.767	778	15.545
Total	157.517	26.811	184.328

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016.



2). Produktifitas Kerja

Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja.

$$\text{Produktivitas kerja} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah pekerja}}$$

Tabel 2.111. Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
PDRB (Juta Rp)	3.570.912	4.155.914	4.851.431	5.274.634	8.421.996
Angkatan Kerja	126.624	128.024	120.412	135.436	138.040
Produktivitas	39,089,144	44,261,504	54,164,196	56,532,460	61,011,269

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016. *) Angka Sementara

3). Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja (permintaan atas tenaga kerja) merupakan peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

Tabel 2.112. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 Kabupaten Luwu Utara

No	Kabupaten /Kota	Lapangan Usaha					Jumlah
		Pertanian	Industri pengolahan	Perdagangan, Restoran dan Hotel	Jasa Kemasyarakatan	Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum)	
	Luwu Utara	79.066	6.463	21.893	15.845	9.710	132.977

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Utara 2016

2.3.2.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1). Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Tabel 2.113. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	7	5	5	6	6
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	20	22	24	26	27
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	154	173	180	202	207
4	Pekerja perempuan di pemerintah	2.839	2.767	2.695	2.918	2.901
5	Jumlah pekerja perempuan	3.024	2.972	2.909	3.167	3.155
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	93,88	93,10	92,64	92,14	91,95

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

2). Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel 2.114. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Tahun 2011 sd 2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta	185	205	214	249	254
2	Jumlah pekerja perempuan	3.024	2.972	2.909	3.167	3.155
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta	6.12	6.9	7.36	7.86	8.05

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara 2012 sd 2016

3). Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

2.3.2.6. Keluarga Berencana

1). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga.

Tabel 2.115. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah anak	35.872	34.784	35.852	37.829	43.967
2	Jumlah keluarga	75.710	69.083	71.637	73.982	73.002
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,11	1,98	1,99	1,95	1,66

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara 2012 - 2016

Tabel 2.116. Rasio Akseptor KB Tahun 2011 sd 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah akseptor KB	41.953	42.060	42.474	40.159	38.346
2	Jumlah pasangan usia subur	53.086	53.492	53.736	52.537	52.303
3	Rasio akseptor KB	79,02	78,62	79,04	76,43	73,31

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara 2012 - 2016

2.3.2.7. Komunikasi dan Informasi

1). Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintahan daerah.

2). Rasio Wartel / Warnet

Tabel 2.117. Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2011 sd 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Kecamatan	2011					2015				
		Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio Wartel	Rasio warnet	Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio Warnet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Sabbang	35.327	2	1	0,000057	0,000028	37.384	0	2	-	0,000053
2	Baebunta	43.468	2	2	0,000046	0,000046	45.150	0	2	-	0,000044
3	Malangke	27.105	1	0	0,000037	-	27.535	0	1	-	0,000036
4	Malangke Barat	23.631	1	0	0,000042	-	24.135	0	1	-	0,000041
5	Sukamaju	40.939	2	4	0,000049	0,000098	41.620	0	4	-	0,000096
6	Bone-bone	46.364	3	3	0,000065	0,000065	26.249	0	5	-	0,000190
7	Tanalili	-	-	-	-	-	22.245	0	1	-	0,000045
8	Masamba	31.988	4	6	0,000125	0,000188	35.247	1	11	0,000028	0,000312
9	Mappedeceng	22.142	2	1	0,000090	0,000045	23.089	0	2	-	0,000087
10	Rampi	2.912	0	0	-	-	3.134	0	0	-	-
11	Rongkong	3.826	0	0	-	-	3.894	0	0	-	-
12	Seko	12.663	0	0	-	-	13.005	0	0	-	-
	Jumlah	290.365	17	17	0,000059	0,000059	302.687	1	29	0,000003	0,000096

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara 2012 - 2016



3). Jumlah surat kabar nasional/lokal

Tabel 2.118. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 sd 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2015
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	4	6
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	2	4
3	Total jenis surat kabar	6	10

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara 2012 - 2016

3). Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah.

Tabel 2.119. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 sd 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2015
1	Jumlah penyiaran radio lokal	1	3
2	Jumlah penyiaran radio nasional	2	4
3	Jumlah penyiaran TV lokal	1	1
4	Jumlah penyiaran TV nasional	11	14
5	Total penyiaran radio/TV lokal	15	22

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara 2012 - 2016

2.3.2.8. Pertanahan

Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan.

Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang "terkuat dan terpenuh", maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Tabel 2.120. Banyaknya Sertifikat Tanah Yang dikeluarkan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2011-2015

No	Hak Atas Tanah	2011	2012	2013	2014	2015
1	Hak Milik (HM)	1.696	2.702	2.226	3.051	3.550
2	Hak Guna Bangunan	6	1	3	10	88
3	Hak Guna Usaha	0	0	0	0	0
4	Hak Pakai	9	11	291	4	14
J u m l a h		1.711	2.714	2.520	3.065	3.652

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka 2016

2.3.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di Kabupaten Luwu Utara merupakan suatu lembaga atau wadah yang terbentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Adapun jumlah LPM ditahun 2011 berjumlah 139 yang terbagi pada 12 kecamatan dengan jumlah LPM yang terbanyak ada di Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Baebunta sebanyak masing-masing 20 LPM dan Kecamatan yang paling sedikit jumlah LPM nya adalah Kecamatan Sukkamaju sebanyak 2 kelompok LPM dan juga terdapat satu Kecamatan yang tidak mempunyai Kelompok binaan LPM yakni Kecamatan Tanalili.

Tabel 2.121. Jumlah Kelompok Binaan LPM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Kecamatan	2011			2012			2013			2014			2015		
		Jml	Jml	Rata 2	Jml	Jml	Rata2	Jml	Jml	Rata 2	Jm l	Jml	Rata 2	Jm l	Jml	Rata2
		LPM	Klp Binaan	Jml LPM	LPM	Klp Binaan	Jml LPM	LPM	Klp Binaan	Jml LPM	LP M	Klp Binaan	Jml LPM	LP M	Klp Binaan	Jml LPM
1	Sabbang	20	55	35	20	50	35	20	150	85	20	203	111,5	20	203	111,5
2	Baebunta	20	60	40	21	60	40,5	21	190	105,5	21	335	178	21	335	178
3	Malangke	14	55	34,5	14	55	34,5	14	158	86	14	197	105,5	14	197	105,5
4	Malangke Barat	13	50	31,5	13	50	31,5	13	150	81,5	13	187	100	13	187	100
5	Sukamaju	2	40	21	25	40	32,5	25	280	152,5	25	401	213	25	401	213
6	Bone-bone	11	91	51	11	50	30,5	11	120	65,5	11	180	95,5	11	180	95,5
7	Tanalili	-	-	-	10	41	25,5	10	115	62,5	10	151	80,5	10	151	80,5
8	Masamba	19	70	44,5	19	70	44,5	19	175	97	19	294	156,5	19	294	156,5
9	Mappedeceng	15	45	30	15	45	30	15	160	87,5	15	219	117	15	219	117
10	Rampi	6	17	11,5	6	15	10,5	6	40	23	6	50	32,5	6	50	32,5
11	Rongkong	7	20	13,5	7	21	14	7	45	26	7	69	38	7	69	38
12	Seko	12	15	13,5	12	20	16	12	50	31	2	81	41,5	2	81	41,5
Jumlah		139	518	326	173	517	345	173	1633	903	163	2367	1269,5	163	2367	1269,5

Sumber: BPMPDK 2016



Jika dilihat dari perkembangan setiap tahunnya secara menyeluruh di Kabupaten Luwu Utara terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2012 yakni sebesar 173 LPM dan stagnan sampai dengan tahun 2014, tetapi di tahun 2015 terjadi penurunan yang drastis menjadi 163 jumlah LPM. Jika dilihat sebarannya di setiap kecamatan maka kecamatan yang terbanyak jumlah LPM nya adalah Kecamatan Sukamaju sebanyak 25 jumlah LPM dan yang terkecil adalah Kecamatan Seko sebanyak 2 LPM. Sedangkan jumlah kelompok Binaan terjadi penurunan dari tahun 2012 sebanyak 37 Kelompok binaan menjadi 28 Kelompok binaan di tahun 2014.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Utara yang secara sukarela atas kehendak sendiri untuk bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah LSM yang aktif dan terdaftar di Kabupaten Luwu Utara terjadi peningkatan sedikit yakni pada tahun 2011 terdapat 7 LSM dan meningkat pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 1 LSM. Namun di tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 4 LSM dan meningkat lagi menjadi 5 LSM di tahun 2015 menjadi 5 LSM yang terdaftar dan aktif. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.122. Jumlah LSM Aktif Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah LSM terdaftar	7	8	1	4	5
2	Jumlah LSM tidak aktif	0	0	0	0	0
3	Jumlah LSM aktif	7	8	1	4	5

Sumber: BPMPDK 2016.

2.3.2.10. Perpustakaan

Secara umum jumlah Perpustakaan di Kabupaten Luwu Utara tidak mengalami perkembangan sama sekali karena dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Luwu Utara hanya memiliki satu perpustakaan saja. Padahal Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Satu-satunya perpustakaan ini adalah milik Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.123. Jumlah Perpustakaan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015.

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3	Total Perpustakaan	1	1	1	1	1

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip 2016

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Perpustakaan umum Daerah Luwu Utara dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Dari data yang tersedia sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terjadi peningkatan setiap tahunnya yaitu di tahun 2011 terdapat jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 1769 Orang dan meningkat drastis menjadi 6233 Orang pada tahun 2012, dan di tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 8551 Orang, namun terjadi penurunan lagi di tahun 2014, akan tetapi di tahun 2015 terjadi lagi peningkatan sebanya 9750 Orang. Untuk melihat jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.124. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1,769	6,233	8,551	8,095	9,750
2	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	0	0	0	0	0
3	Total pengunjung Perpustakaan	1,769	6,233	8,551	8,095	9,750

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip 2016

2.3.2.11. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara yang berbentuk lembaga teknis daerah yang melaksanakan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah

Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara dari tahun ketahun semakin berkurang dari tahun 2012 terdapat 75 Pamong Praja dan terus berkurang di tahun 2013 menjadi 63 Pamong Praja. Di tahun 2014 terjadi peningkatan menjadi 67 Pamong Praja namun di tahun 2015 terjadi penurunan lagi jumlahnya yakni sebanyak 64 Pamong Praja. Jika dilihat Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja dan dibandingkan dengan jumlah penduduk maka terlihat adanya penurunan jumlah rasio yakni pada tahun 2011 jumlah rasio Pamong Praja dengan jumlah penduduk terdapat sebesar 2,55 stagnan di tahun 2012 yakni 2,56 dan turun di tahun 2013 menjadi 2,12 di tahun 2014 naik menjadi 2,23, namun di tahun 2015 rasionya turun lagi menjadi 2,11. hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.125. Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah polisi pamong praja	74	75	63	67	64
2	Jumlah penduduk	290.365	292.765	297.313	299.989	302.687
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	2,55	2,56	2,12	2,23	2,11

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Adapun jumlah Linmas yang ada di Kabupaten Luwu Utara jumlahnya stagnan dan tidak mengalami peningkatan yaitu di tahun 2011 jumlahnya ada 1.710 orang dan sampai tahun 2015 masih tetap jumlahnya sebesar 1.710. Dengan jumlah Linmas yang tidak pernah bertambah setiap tahunnya menyebabkan rasio Jumlah linmas terhadap jumlah penduduk semakin kecil dan menurun setiap tahunnya. Data tahun 2011 rasionya sebesar 58,89 menurun menjadi 58,43 di tahun 2012, menurun lagi di tahun 2014 menjadi 57,52 yang akhirnya di tahun 2015 rasio linmas per penduduk menjadi 47,22. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.126. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Linnmas	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
2	Jumlah penduduk	290.365	292.675	297.313	299.989	302.687
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	58,89	58,43	57,52	57,00	47,22

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Jumlah pos siskamling di Kabupaten Luwu Utara menggambarkan adanya peran Pemda dalam ikut serta menjaga ketentraman lingkungan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan akan semakin besar kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Secara keseluruhan jumlah Pos Siskamling terjadi peningkatan setiap tahunnya. Terlihat sejak tahun 2011 jumlah Pos Siskamling sebanyak 307 untuk Kabupaten Luwu Utara, berkembang menjadi 473 di tahun 2012 dan terus berkembang menjadi 639 di tahun 2013. Di tahun 2014 perkembangannya sangat besar menjadi 805 Pos Siskamling dan di Tahun 2015 menjadi 971 Pos Siskamling.

Jika dibandingkan dengan jumlah Desa terhadap jumlah Pos Siskamling juga menggambarkan rasio yang setiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2011 rasio jumlah Pos Siskamling dengan Jumlah Desa mencapai 21, dan ditahun 2012 rasionya menjadi 33, dan terus meningkat di tahun 2013 menjadi 46, ditahun 2014 menjadi 57, sampai pada tahun 2015 rasionya menjadi 69. Untuk rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.127. Rasio Jumlah Pos Siskamling Kabupaten Luwu Utara Menurut Kecamatan Tahun 2011-2015.

NO	Kecamatan	2011			2012			2013			2014			2015*		
		Jmlh	Jmlh	Rasio	Jmlh	Jmlh	Rasio	Jmlh	Jmlh	Rasio	Jmlh	Jmlh	Rasio	Jmlh	Jmlh	Rasio
		siskamling	Desa		siskamling	Desa		siskamling	Desa		Siskamling	Desa		Siskamling	Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Sabbang	38	19	2	57	19	3	76	19	4	95	19	5	114	19	6
2	Baebunta	40	20	2	60	20	3	80	20	4	100	20	5	120	20	6
3	Malangke	28	14	2	42	14	3	56	14	4	70	14	5	84	14	6
4	Malangke Barat	26	13	2	39	13	3	52	13	4	65	13	5	78	13	6
5	Sukamaju	50	25	2	75	25	3	100	25	4	125	25	5	150	25	6
6	Bone-bone	20	10	2	30	10	3	40	10	4	50	10	5	60	10	6
7	Tanalili	20	10	2	30	10	3	40	10	4	50	10	5	60	10	6



NO	Kecamatan	2011			2012			2013			2014			2015*		
		Jmlh	Jmlh	Rasio	Jmlh	Jmlh	Rasio	Jmlh	Jmlh	Rasio	Jmlh	Jmlh	Rasio	Jmlh	Jmlh	Rasio
		siskamling	Desa		siskamling	Desa		siskamling	Desa		Siskamling	Desa		Siskamling	Desa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Masamba	30	15	2	45	15	3	60	15	4	75	15	5	90	15	6
9	Mappedeeng	30	15	2	45	15	3	60	15	4	75	15	5	90	15	6
10	Rampi	6	6	1	12	6	2	18	6	3	24	6	4	30	6	5
11	Rongkong	7	7	1	14	7	2	21	7	3	28	7	4	35	7	5
12	Seko	12	12	1	24	12	2	36	12	3	48	12	4	60	12	5
	Jumlah	307	166	21	473	166	33	639	166	45	805	166	57	971	166	69

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

*) Badan Kesbang Politik dan Linmas 2016

2.3.2.12. Pemuda dan olah raga

Jumlah Organisasi Pemuda dan Olah Raga dapat mendukung tercapainya kinerja urusan pemuda dan olah raga. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi Pemuda di Kabupaten Luwu Utara tidak mengalami perkembangan jumlah sama sekali. Karena sejak tahun 2012 sesuai data yang tersedia sebanyak 172 Organisasi Pemuda tidak mengalami pertambahan sampai dengan tahun 2015 yaitu 172 Organisasi Pemuda yang tersebar diseluruh kabupaten Luwu Utara.

Jika dilihat dari persebaran jumlah organisai pemuda disetiap kecamatan cenderung terlihat tidak merata dan bahkan ada satu kecamatan yang nanti di tahun 2015 baru mempunyai organisasi pemuda sebanyak 9 Organisasi Pemuda. Perkembangan jumlah organisasi disetiap kecamatan juga tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi jumlah organisasi pemuda yang terbanyak berada di Kecamatan Sukamaju sebanyak 25 Organisasi Pemuda, kemudian disusul kecamatan Sabbang dan Baebunta masing masing sebanyak 21 Organisasi Pemuda. Adapun Kecamatan yang paling sedikit jumlah organisasi Pemudanya adalah Kecamatan Rampi dan Kecamatan Rongkong masing-masing 6 dan 7 Organisasi Pemuda. Adapaun gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.128. Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sabbang	-	21	21	21	21
2	Baebunta	-	21	21	21	21
3	Malangke	-	14	14	14	14
4	Malangke Barat	-	13	13	13	13
5	Sukamaju	-	25	25	25	25
6	Bone-bone	-	20	20	20	11
7	Tanalili	-	-	-	-	9
8	Masamba	-	19	19	19	19
9	Mappadeceng	-	14	14	14	14
10	Rampi	-	6	6	6	6
11	Rongkong	-	7	7	7	7
12	Seko	-	12	12	12	12
Jumlah		-	172	172	172	172

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

*) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2016

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Luwu Utara menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Jumlah Organisasi Olah Raga di Kabupaten Luwu Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun, di Tahun 2012 terdapat 151 Organisasi Olah raga, meningkat di tahun 2013 menjadi 189 Organisasi dan meningkat lagi di tahun 2014 sebanyak 189 organisasi dan di Tahun 2015 Peningkatannya mencapai 193 Organisasi Olah Raga.

Adapun persebaran Organisasi Olah Raga di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara sangat bervariasi. Kecamatan yang terbanyak Organisasi Olah Raganya adalah Kecamatan Masamba yakni 42 Organisasi, kemudian disusul lagi Kecamatan Sabbang dan Kecamatan Baebunta masing-masing sebanyak 30 Organisasi Olah Raga. Kecamatan yang berada pada level tingkat Organisasi Olahraganya yang masih kurang yakni Kecamatan Seko dan Kecamatan Rongkong masing-masing hanya memiliki 2 dan 3 Organisasi Olahraga. Namun ada Satu Kecamatan yang memiliki Organisasi Olahraga di Tahun 2015 yakni Kecamatan Tanalili yakni 12 Organisasi.

Tabel 2.129. Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sabbang	27	27	27	29	30
2	Baebunta	25	25	25	28	30
3	Malangke	7	7	7	8	8
4	Malangke Barat	8	8	8	10	10
5	Sukamaju	14	14	14	16	16
6	Bone-bone	22	23	23	25	13
7	Tanralili	-	-	-	-	12
8	Masamba	39	39	19	41	42
9	Mappadeceng	21	21	21	23	23
10	Rampi	3	3	3	4	4
11	Rongkong	2	2	2	3	3
12	Seko	2	2	2	2	2
Jumlah		170	171	151	189	193

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2016

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kabupaten Luwu Utara menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Jumlah kegiatan Kepemudaan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Di Tahun 2012 terdapat 9 Kegiatan kepemudaan, dan tahun 2013 menjadi 15 Kegiatan Kepemudaan. Tahun 2014 meningkat lagi menjadi 19 Kegiatan Kepemudaan dan meningkat secara drastis di tahun 2015 menjadi 25 Organisasi Kepemudaan.

Tabel 2.130. Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sabbang	-	1	-	1	2
2	Baebunta	-	1	1	2	3
3	Malangke	-	1	2	2	2
4	Malangke Barat	-	1	2	2	2
5	Sukamaju	-	1	2	2	3
6	Bone-bone	-	1	2	2	4
7	Tanralili	-	-	-	-	-
8	Masamba	-	2	5	7	7
9	Mappadeceng	-	1	1	1	2
10	Rampi	-	-	-	-	-
11	Rongkong	-	-	-	-	-
12	Seko	-	-	-	-	-
Jumlah		-	9	15	19	25

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2016



Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektivitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dalam persebaran kegiatan kepemudaan di masing masing Kecamatan tidaklah merata karena ada beberapa Kecamatan yang tidak mempunyai Kegiatan Kepemudaan yakni Kecamatan Tanalili, kecamatan Rampi, dan Kecamatan Seko. Adapun kecamatan yang terbanyak kegiatan kepemudaannya adalah Kecamatan Masamba sebanyak 7 Kegiatan dan sisanya setiap kecamatan hanya mempunyai 2 dan 3 kegiatan saja.

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau "*event*" olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga setiap tahunnya di Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan. Tahun 2012 Jumlah kegiatan olah raga sebanyak 46 event, meningkat menjadi 50 kegiatan di tahun 2013. Tahun 2014 meningkat menjadi 64 event dan terakhir di tahun 2015 menjadi 72 Event.

Adapun persebaran kegiatan dan event di masing masing kecamatan tidaklah berbeda jauh karena jumlah kegiatan yang terbanyak ada di Kecamatan Tanalili sebanyak 9 kegiatan dan disusul oleh Kecamatan Baebunta, Kecamatan Sukamaju, dan Kecamatan Bone-bone masing-masing 8 Kegiatan. Dan Kecamatan yang paling sedikit kegiatannya adalah Kecamatan Seko sebanyak 2 Kegiatan dan Kecamatan Rampi dan Rongkong masing-masing 3 Kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.131. Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sabbang	-	4	4	5	6
2	Baebunta	-	6	7	8	8
3	Malangke	-	4	5	6	6
4	Malangke Barat	-	4	5	6	6
5	Sukamaju	-	4	5	8	8
6	Bone-bone	-	6	6	8	8
7	Tanralili	-	-	-	-	6
8	Masamba	-	7	7	8	9
9	Mappadeceng	-	5	5	7	7
10	Rampi	-	2	2	3	3
11	Rongkong	-	2	2	3	3
12	Seko	-	2	2	2	2
	Jumlah	-	46	50	64	72

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2016



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Jumlah Angka pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Luwu Utara sudah menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga dan pengeluaran rumah tangga. Dari gambaran rasio angka Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 5,95 di tahun 2011 menjadi 7,59 di tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 7,55 di tahun 2013, dan tahun 2014 mencapai angka 9,21 poin. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.132. Angka Konsumsi RT per Kapita Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Total Pengeluaran RT	406,297	523,511	525,595	646,934	-
2	Jumlah RT	68,250	68,950	69,632	70,259	-
3	Rasio	5.95	7.59	7.55	9.21	-

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

*) Data belum tersedia

Tabel 2.133. Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Indeks yang diterima petani (It)	151,77	160,19	178,22	197,71	-
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	139,05	145,00	155,28	165,68	-
3.	NTP	109,16	110,48	114,77	119,33	-

Sumber: BPS. NTP Luwu Utara 2015-2016

*) Data belum tersedia

2.4.1.1. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (Persentase Konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran masyarakat dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Perbandingan antara pengeluaran untuk konsumsi makanan dengan non makanan yang besar menandakan dana masyarakat sebagian besar hanya dikeluarkan untuk kebutuhan primer yang berarti kesejahteraan penduduk belum terlalu baik.

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.134. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok makanan dan non makanan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Total Pengeluaran non Pangan (Rp)	191.693	276.642	271.011	346.346	-
2.	Total Pengeluaran (Rp)	406.297	523.511	535.595	646.934	-
3.	Rasio	0,47	0,53	0,51	0,54	-

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2015

*) Data Belum tersedia

2.4.1.2. Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 17 (tujuhbelas) sektor.

Produktivitas per sektor yang ada di Kabupaten Luwu Utara menggambarkan secara keseluruhan adanya peningkatan dari tahun-ketahun untuk semua Produktivitas Per sektor yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Untuk produktivitas pada masing-masing tahun untuk semua sektor cenderung dimonopoli oleh sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian setiap tahunnya mengalami penurunan hal ini tergambar pada tahun 2011 mencapai 63,20 %, namun di tahun 2012 terjadi penurunan menjadi 60,48%, tahun 2013 menurun lagi menjadi 59,48%, dan di tahun 2014 menjadi 58,28%.

Tabel 2.135. Produktivitas Per Sektor Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	PDRB	3.491.747,27	100	4,155,914.76	100	4,851,431.13	100	5,747,729.05	100
1.1	Pertanian	2.206.782,02	63,20	2,513,510.93	60.48	2,885,441.13	59.48	3,407,140.50	59.28
1.2	Pertambangan & Penggalian	19.916,41	0,57	36,575.43	0.88	47,870.00	0.99	50,946.38	0.89
1.3	Industri Pengolahan	96.003,06	2,75	112,728.55	2.71	126,006.93	2.6	141,700.71	2.47
1.4	Listrik, Gas & Air bersih	19.985,62	0,57	23,842.94	0.57	30,320.95	0.62	30,814.19	0.54
1.5	Konstruksi	168.469,43	4,82	175,882.72	4.23	220,846.32	4.55	285,919.90	4.97
1.6	Perdagangan, Hotel & Restoran	254.262,26	7,28	308,186.96	7.42	368,382.71	7.59	371,660.45	6.47
1.7	Pengangkutan & Komunikasi	87.143,50	2,50	113,772.31	2.74	141,224.28	2.91	148,679.24	2.59



NO	Sektor	2011		2012		2013		2014	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1.8	Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	186.352,69	5,34	262,334.65	6.31	320,012.36	6.6	379,141.32	6.6
1.9	Jasa-jasa	452.832,28	12,97	609,080.28	14.66	711,326.45	14.66	931,726.34	16.21

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

Untuk sektor yang paling sedikit jumlah kontribusi dalam produktivitas PDRB adalah sektor Listrik, gas dan Air Bersih yakni di tahun 2011 dan 2012 masing-masing hanya 0,57% dan ditahun 2013 terjadi peningkatan lagi menjadi 0,62 dan kembali turun ditahun 2014 menjadi 0,54. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Aksesibilitas daerah

1). Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Luwu Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan Jumlah kendaraan namun jumlah panjang jalan cenderung tidak berkembang dan tidak bertambah sehingga mempengaruhi jumlah rasio antara jumlah jalan dan jumlah kendaraan akan semakin besar data di tahun 2011 sampai dengan 2015 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.136. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1	Panjang Jalan	2.241	2.241	2.241	2.241	2.024,19
2	Jumlah Kendaraan	46.128	51.799	56.834	59,892	59.892
3	Rasio	0,049	0,043	0,039	0,037	0,034

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

*) Dinas Pekerjaan Umum 2016

2). Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Tabel 2.137. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah orang	Orang	7.224	10.280	10.500	11.100	11.700
2.	Jumlah Barang	Ton	1.200	1.305	1.700	2.300	2.800

Sumber: Dinas Perhubungan 2016



3). Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Tabel 2.138. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
1	Dermaga	-	-	-	-	-	-	Belum berfungsi			
2	Bandara	3.287	-	1.732	-	6.192	30.794	11.567	125.890	20.680	284.049
3	Terminal	-	-	-	-	Belum berfungsi sebagaimana mestinya					
Jumlah		3.287	-	1.732	-	6.192	30.794	11.567	125.890	20.680	284.049

Sumber: Dinas Perhubungan 1016

2.4.2.2. Penataan wilayah

1). Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tabel 2.139. Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Realisasi RTRW	1	1	1	1	1
2.	Rencana Peruntukan RTRW	1	1	1	1	1
3.	Rasio	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 1016

2). Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.140. Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Luas Wilayah produktif (Ha)	418.325,75	418.698,22	424.734,43	426.929,55	426.929,55
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	525.179	525.753	527.638	533.732	533.732
3.	Rasio	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016

*) Angka Sementara

3). Luas Wilayah Industri

Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.141. Rasio Luas Wilayah Kawan Industri Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas Wilayah Industri	Belum ada Kawasan Industri di Kab. Luwu Utara				
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	-	-	-	-	-
3.	Rasio	-	-	-	-	-

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016

4). Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.142. Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Luas Wilayah Kebanjiran (Ha)	25	75	3.135	2.100	1.075
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	525.179	525.753	527.638	533.732	533.732
3.	Rasio	0,00005	0,00014	0,00594	0,00393	0,00201

Sumber: BPBD Tahun 2015

*) Data Sementara

5). Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.143. Rasio Luas Wilayah Perkotaan Tahun 2011 s.d 2015 Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Luas Wilayah Perkotaan	172.365	190.354	195.948	197.737	197.737
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	525.179	525.753	527.638	533.732	533.732
3.	Rasio	0,32	0,36	0,37	0,37	0,37

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2015

*) Angka Sementara

2.4.2.3. Fasilitas bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

1). Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Tabel 2.144. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kabupaten Luwu Utara

NO	Sektor	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Bank Umum					
1.1.	Konvensional	4	4	5	6	6
1.2.	Syariah	0	0	0	0	0



2.	BPR					
2.1.	Konvensional	0	0	1	2	2
2.2.	Syariah	0	0	0	0	0
Jumlah		4	4	6	8	8

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016

2). Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi resiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

2.4.2.4. Ketersediaan Air Bersih

Persentase penduduk berakses air bersih di Kabupaten Luwu Utara adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Jumlah persentase yang menggunakan Air Bersih setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak tahun 2011-2015. Di Tahun 2012, Jumlah rumah tangga yang menggunakan Air bersih sebanyak 1.553 meningkat menjadi 1.975 di tahun 2013, dan tahun 2014 menjadi 2.413. Air bersih yang ada di Kabupaten Luwu Utara meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Adapun rincian setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.145. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No	Sumber Air Bersih	2011	2012	2013	2014	2015
1	Leding (Perpipaan)	-	507,922	537,323	744,838	
2	Sumur Lindung	-	-	-	-	
3	Sumur Tidak Terlindung	-	-	-	-	
4	Mata Air Terlindung	-	-	-	-	
5	Mata Air Tidak Terlindung	-	-	-	-	
6	Sungai	-	-	-	-	



No	Sumber Air Bersih	2011	2012	2013	2014	2015
7	Danau/Waduk	-	-	-	-	
8	Air Hujan	-	-	-	-	
9	Air Kemasan	-	-	-	-	
10	Lainnya	-	-	-	-	
11	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	-	1,553	1,975	2,413	47,652
12	Jumlah Rumah Tangga	68,904	69,192	69,632	70,259	70,890
13	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	-	44,55	35,26	29,12	67,22

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

2.4.2.5. Fasilitas listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Adapun total kapasitas system yang terpasang dikabupaten Luwu Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Terlihat di tahun 2011 total kapasitas listrik yang terpasang sebesar 40,966,539 dan meningkat di tahun 2012 menjadi 36,170,500 serta di tahun 2013 peningkatannya menjadi 44,830,850. Adapun rincian dari prakiraan kebutuhan listrik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.146. Prakiraan Kebutuhan Beban Tenaga Listrik Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

NO	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kebutuhan	GWH	-	-	-	-	-
	- rumah tangga	GWH	52,201	22,976	46,494	49,832	53,143
	- Komersial	GWH	-	846	958	1,021	1,128
	- Public	GWH	-	205	226	247	258
	- Industri	GWH	-	4	5	7	11
2.	Susut & Losses (T&D)	%	-	-	-	8,370,768	17,909,143
3.	Susut Pemakaian Sendiri	%	-	-	-	-	-
4.	Total Susut & Losses	%	-	-	-	-	-
5.	Faktor Beban	%	-	-	-	-	-
6.	Produksi	GWH	-	-	-	82,765,296	89,932,220
7.	Beban Puncak	MW	-	-	-		23.5
8.	Kapasitas Terpasang (Existing)	MW	32,686,800	36,170,500	44,830,850	-	30
9.	Cummulated Committed Projects	MW	-	-	-	-	-
10.	TOTAL KAPASITAS SISTEM	MW	40,966,539	43,142,261	59,264,361	-	70



NO	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
11.	DAYA YANG DIBUTUHKAN*	MW	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan energi 2016

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat tidak mampu dan daerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

Tabel 2.147. Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kabupaten Luwu Utara

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	RT dengan daya 450 watt	-	-	12,871	12,789	13,206
2.	RT dengan daya 900 watt	-	-	32.548	34.619	38,836
3.	RT dengan daya 1.300 watt	-	-	2,337	2,405	2,340
4.	RT dengan daya 2.200 watt	-	-	1,019	1,042	921
5.	RT dengan daya > 2.200 watt	-	-	261	276	457
6.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	-	-	49,036	51,131	55,760
7.	Jumlah Rumah Tangga	-	-	104,629	106,396	101,377
8.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	-	-	46,87 %	48,06%	60,22%

Sumber: PT PLN Cabang Masamba 2016

2.4.2.6. Ketersediaan restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Pengertian restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Sedangkan perusahaan usaha restoran dan rumah makan adalah penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok

Tabel 2.148. Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Luwu Utara

No	Uraian	2011		2015	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1.	Jenis Usaha Restoran	-	-	-	-
2.	Jenis Usaha Rumah Makan	631	7.572	660	7.920

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016

2.4.2.7. Ketersediaan dan Jenis penginapan/hotel

1). Ketersediaan Penginapan/hotel

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

2). Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel

2).1. Hotel Berbintang

Hotel berbintang adalah suatu usaha jasanya yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan, dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang telah ditentukan. Ciri khusus dari hotel berbintang adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di bawah manajemen hotel tersebut.

Untuk Hotel Berbintang, kriteria penggolongannya didasarkan pada persyaratan dasar dan penilaian teknis operasional. Persyaratan Dasar : Perijinan (persetujuan Prinsip, Ijin Usaha). Persyaratan Teknis : Unsur Fisik, Unsur Pengelolaan, Unsur Pelayanan. Penetapan penilaian golongan kelas hotel bintang dilakukan dengan penggabungan dari nilai persyaratan dasar dan persyaratan teknis. Penilaian penggolongan Hotel Bintang dilaksanakan oleh PHRI.

2).2. Hotel Melati

Hotel Melati adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, di mana setiap orang dapat menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, dan belum memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang.

Tabel 2.149. Jumlah Penginapan/Hotel Berbintang dan Non Berbintang Kabupaten Luwu Utara

No	Jenis Penginapan/Hotel	2011			2015		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Berbintang	-	-	-	-	-	-
2.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	9	-	-	12	222	378
3.	Total Jumlah penginapan/Hotel	9	-	-	12	222	378

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016

2.4.3. Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban

Angka Kriminalitas yang ada di Kabupaten Luwu Utara merupakan gambaran rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun yang berjalan. Ini menggambarkan rata-rata dalam satu bulan terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Angka kriminalitas di Luwu Utara sangat berfluktuasi karena di tahun 2011 rasio angka kriminalitasnya sebesar 11,19 dan meningkat di tahun 2012 sebesar 13,53. Tapi di tahun 2013 terjadi penurunan lagi sebesar 9,87 dan terus menurun sampai 2014 sebesar 7,63, namun di tahun 2015 meningkat lagi menjadi 8,78.

Indikator kriminalitas ini menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Adapun total tingkat kriminalitas setiap tahun juga berfluktuasi kadang meningkat dan kadang menurun. Di Tahun 2011 jumlah kriminalitas sebesar 325 kejadian dari berbagai kasus seperti Narkoba, Pembunuhan, Kejahatan Seksual, Penganiayaan, Pencurian dan Penipuan. Dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 396 kasus. Namun di tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 288 kasus, tahun berikutnya menurun lagi menjadi 229



kasus, tetapi di tahun 2015 meningkat menjadi 318 kasus. Hal ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.150. Angka Kriminalitas Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No	Jenis Kriminal	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kasus Narkoba	3	0	0		26
2	Jumlah kasus Pembunuhan	7	4	8	2	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	6	6	14	3	12
4	Jumlah kasus Penganiayaan	240	268	213	170	163
5	Jumlah kasus Pencurian	28	67	23	38	103
6	Jumlah kasus Penipuan	40	51	30	16	10
7	Jumlah kasus Pemalsuan uang	1	0	0	0	1
8	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	325	396	288	229	318
9	Jumlah Penduduk	290,365	292,675	297,313	299,989	362,143
10	Angka Kriminalitas	11.19	13.53	9.87	7.63	8.78

Sumber: Kesbang 2016

2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa di Kabupaten Luwu Utara biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok untuk menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pemerintah daerah atau sering dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Jumlah Unjuk rasa yang ada di Kabupaten Luwu Utara tidak banyak maksimal hanya dua kali setiap tahunnya. Itupun hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, dan hanya satu kali terjadi unjuk rasa bidang politik yakni hanya di tahun 2014. Adapun gambaran jumlah demonstrasi setiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.151. Jumlah Demonstrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Bidang Politik	0	0	0	1	0
2	Ekonomi	1	2	2	2	1
3	Kasus pemogokan kerja	0	0	0	0	0
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	1	2	2	3	1

Sumber: Kesbang 2016

2.4.3.3. Kemudahan perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya



saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Jenis perijinan yang dianalisis antara lain:

1. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
2. TDP : Tanda Daftar Perusahaan
3. IUI : Izin Usaha Industri
4. TDI : Tanda Daftar Industri
5. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
6. HO : Izin Gangguan

Tabel 2.152. Lama Proses Perijinan Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rp)
1.	SIUP	10	3	0
2.	TDP	3	3	0
3.	IUI	10	1	0
4.	TDI	5	0	0
5.	IMB	14	4	Rp. 800.000
6.	HO	10	3	Rp. 405.000

Sumber: BPPTSPPM 2016

2.4.3.4. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar

milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

Tabel 2.153. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	7	7	7	8	8
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi (Juta Rp)	183,724	232,919	290,840	520,078	565,324
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	18	19	19	17	17
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	6	6	6	6	6

Sumber: DPPKAD 2016

2.4.3.5. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Tabel 2.154. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Luwu Utara

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Perda terkait perijinan	-	-	-	-	1
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	-	-	-	-	-

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2012-2016

2.4.3.6. Status Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pertumbuhan desa menjadi desa swasembada memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Jumlah Desa Swasembada di Kabupaten Luwu Utara hanya dapat digambarkan dari tahun 2014 sebanyak 44 Desa dan meningkat menjadi 72 Desa swasembada di tahun 2015.

Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni desa swadaya (tradisional); desa swakarya (transisional); dan desa swasembada (berkembang). Jumlah persentase desa bersatus swasembada meningkat signifikan setiap tahunnya yaitu di tahun 2012 hanya 1,80 % meningkat di tahun 2013 menjadi 5,30%, dan di tahun 2014 peningkatannya sangat drastis menjadi 26%, demikian juga peningkatannya di tahun 2015 menjadi 42%. Adapau gambaran desa secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.155. Jumlah Desa Swasembada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya/Tradisional	-	3	9	42	159
2	Jumlah Desa/Keluarahan Swakarya/Transisional	-	-	-	-	7
3	Jumlah Desa/Keluarahan Swasembada/Berkembang	-	-	-	161	163
4	Jumlah Desa/Kelurahan	166/7	166/7	166/7	166/7	166/7
5	Persentase Desa berstatus swasemda dibagi jumlah desa/kelurahan	0%	0%	0%	93%	94%

Sumber: BPMPDK Kab. Luwu Utara 2016

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.4.4.1. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia



(SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3.

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja, karena salah satu syarat dari ketenagakerjaan ditentukan oleh tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik kualitas tenaganya. Adapun rasio lulusan di Kabupaten Luwu Utara perkembangan sangat fluktuatif karena di tahun 2011 rasio lulusannya sebesar 228,23 di tahun 2012 peningkatan rasionya menjadi 211,81, namun di tahun 2013 peningkatannya menjadi 217,35 dan sampai akhirnya di tahun 2014 menjadi 218,57.

Tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3 di Kabupaten Luwu Utara cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu di tahun 2012 terdapat 6.201 Lulusan meningkat menjadi 6.557 di tahun 2015. Jika dirinci lebih detail maka jumlah lulusan S1 setiap tahun perkembangannya meningkat mulai dari tahun 2011 hanya 6.147 meningkat di tahun 2012 menjadi 5.752, dan meningkat lagi di tahun 2013 menjadi 5.994 dan akhirnya di tahun 2014 menjadi 6.082. Adapun lulusan untuk S2 perkembangannya tidak terlalu besar karena di tahun 2012 terdapat 433 lulusan kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 451, dan 458 lulusan di tahun 2014. Sedangkan untuk lulusan S3 cenderung tidak mengalami peningkatan karena di tahun 2011 sampai 2014 hanya bertahan di 17 lulusan saja walaupun ada penurunan sedikit di tahun 2012 yakni 16 lulusan. Untuk rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.156. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2014

NO	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah lulusan S1	6.147	5.752	5.994	6.082
2	Jumlah lulusan S2	464	433	451	458
3	Jumlah lulusan S3	17	16	17	17
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	6.627	6.201	6.462	6.557
5	Jumlah penduduk	290.365	292.765	297.313	299.989
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	228,23	211,81	217,35	218,57

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2015

2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Luwu Utara merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi Daerah Kabupaten apakah tergolong Kabupaten yang maju atau Kabupaten yang masih berkembang. Adapun rasio ketergantungan Kabupaten Luwu Utara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 Rasio ketergantungan sebesar 64,86 meningkat di tahun 2013 menjadi 65,19 dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 66,23.

Tabel 2.157. Rasio Ketergantungan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	112,102	112,443	113,049	94,955	97,376
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	16,480	16,766	17,119	20,965	21,023
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	128,581	129,208	130,169	115,920	119,299
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	198,002	199,211	199,672	237,175	242,844
5	Rasio ketergantungan	0,65	0,66	0,67	0,488	0,491

Sumber: BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah mengacu pada dokumen APBD dan laporan keuangan lainnya termasuk neraca daerah.

Analisis keuangan daerah di dalam dokumen RPJMD periode 2016-2021 menggunakan struktur APBD yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan regulasi perubahan yang kedua yaitu Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Struktur APBD yang dimaksud adalah: (i) Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. (ii) Belanja Daerah meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, (iii) Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 khususnya terkait dengan Bab III Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perlu digarisbawahi bahwa struktur APBD saat ini telah mengikuti Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah daerah yang berbeda dengan Struktur APBD sebagaimana Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Arahkan penyusunan dokumen RPJMD khususnya bab keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, oleh karena itu untuk analisis keuangan daerah dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Analisis data realisasi belanja daerah di Kabupaten Luwu Utara bersumber dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD karena konsisten dengan Permendagri 54 tahun 2010 untuk analisis belanja daerah yang membedakan antara belanja langsung dan



tidak langsung. Sementara analisis Pendapatan Daerah mengacu pada Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang relatif lebih mudah untuk penyesuaiannya dengan arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

3.1. Kinerja Keuangan 2011-2015

Kinerja keuangan daerah masa lalu yang tercermin dari realisasi pelaksanaan APBD dan laporan keuangan lainnya memegang peran penting dalam penyelenggaraan program pembangunan jangka menengah daerah pada periode 2016-2021. Olehnya itu, analisis realisasi APBD dan laporan keuangan lainnya seperti Neraca pada periode sebelumnya perlu dilakukan. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dicermati pada 2 (dua) komponen utama yaitu (i) Analisis Kinerja Pendapatan Daerah dan (ii) Analisis Kinerja Belanja Daerah. Sementara kinerja neraca daerah meliputi analisis perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Selama periode 2011-2015, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan dari Rp 646,4 milyar menjadi Rp 1.047,7 milyar atau bertumbuh dengan rata-rata 15,0 persen per tahun. Perolehan pendapatan daerah selama periode tersebut berasal dari tiga sumber yaitu pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Perkembangan Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD mengalami peningkatan setiap tahun kecuali pada tahun 2013. Pada tahun 2011, pendapatan dari PAD sebesar Rp 35 miliar meningkat drastis menjadi Rp 147,6 miliar di tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 60 persen. Peningkatan tajam PAD mulai terjadi pada tahun 2014-



2015. Hal ini menunjukkan bahwa peran PAD sebagai sumber pendapatan semakin membaik terutama dalam dua tahun terakhir.

Dari struktur PAD terlihat bahwa sebelum tahun 2014, sumber PAD terbesar adalah retribusi daerah dengan sumbangannya diatas dari 60 persen, namun sejak tahun 2014, peran retribusi daerah telah bergeser dan digantikan oleh peran lain-lain PAD yang sah. Sejak tahun 2014, pendapatan yang berasal dari retribusi daerah menurun drastis dari Rp 25,6 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp 6,4 milyar di tahun 2015. Penurunan drastis dalam dua tahun terakhir menyebabkan rata-rata pertumbuhannya mencapai angka negatif dalam kurun waktu 2011-2014. Hal ini disebabkan karena adanya Pergeseran pengalokasian Target BLUD yang sedianya ditargetkan di Retribusi pada Tahun 2014 dialihkan ke pendapatan lain lain. Sementara pajak daerah meskipun secara absolut nilai nominalnya relatif kecil dibandingkan dengan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, namun kinerjanya memperlihatkan trend yang positif sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 30,3 persen per tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan dari pajak cukup potensial untuk dikembangkan ke depan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Pendapatan yang berasal dari Lain-Lain PAD yang sah memegang peran penting terhadap kinerja PAD terutama dua tahun terakhir. Nilai Lain-lain PAD mengalami lonjakan tajam dari tahun 2013 yaitu Rp 4,3 miliar menjadi Rp 109,4 miliar pada tahun 2014 dan meningkat terus di tahun 2015 menjadi Rp 128,5 miliar. Besarnya kontribusi Lain-lain PAD yang sah sejak tahun 2014 mempengaruhi kinerja PAD secara keseluruhan sehingga PAD mampu bertumbuh secara rata-rata 15,04 persen pertahun selama lima tahun terakhir. Tingginya rata-rata pertumbuhan PAD dalam lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa kinerja PAD telah memperlihatkan tanda-tanda positif sebagai sumber pendapatan daerah.

Seiring dengan kemajuan perekonomian di Kabupaten Luwu Utara, maka peluang untuk meningkatkan sumber-sumber PAD terutama yang berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah masih cukup besar.



Tabel 3.1. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara

No	Uraian	2011 Rp M	2012 Rp M	2013 Rp M	2014 Rp M	2015* Rp M	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
I	Pendapatan Daerah	646.4	681.2	729.4	893.5	1051.7	15.05
1.1	PAD	35.0	37.9	36.7	130.5	147.6	60.00
1.1.1	Pendapatan Pajak	3.7	4.7	5.8	10.5	11.3	30.25
1.1.2	Pendapatan retribusi	23.9	25.6	25.6	9.5	6.4	-13.35
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	9.28
1.1.4	Lain2 Pendapatan daerah yang sah	6.3	6.5	4.3	109.4	128.5	501.62
1.2	DANA PERIMBANGAN	471.8	537.6	599.6	650.9	709.2	10.96
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	38.5	36.8	33.7	25.9	23.3	-7.50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	377.6	457.3	512.6	573.1	601.5	12.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	55.7	43.5	53.2	51.9	84.5	19.60
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	139.7	105.7	93.1	112.1	194.9	27.54
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.032	-	0.554	0.733	0.500	292.5
1.3.2	Pendapatan Dana darurat	13.6	-	-	-	-	13.6
1.3.3	Pendapatan Lainnya	.1	14.2	16.3	13.0	50.9	5314.29
1.3.4	Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	0.053	-	-	-	-	0.053
1.3.5	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	84.6	74.2	57.3	71.0	103.0	20.05
1.3.6	Dana bagi hasil pajak dari Prov. dan pemerintah lainnya	15.5	17.3	18.9	27.3	13.7	-2.32

Sumber: Perda/Perbup APBD Kabupaten Luwu berbagai series

• Dana Perimbangan

Dana perimbangan sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara memperlihatkan trend yang meningkat setiap tahun. Akan tetapi pertumbuhannya cukup lambat dan cenderung stagnan pada angka kisaran 11-13 persen. Dalam lima tahun terakhir, Dana perimbangan bertumbuh rata-rata sebesar 10,96 persen pertahun. Komponen dana perimbangan terdiri atas tiga yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Aloksi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun sehingga pertumbuhannya selama lima tahun negatif. Sedangkan DAU mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhannya 12 persen per tahun. DAK meskipun bertumbuh cukup tinggi, namun nilainya relatif berfluktuasi setiap tahun.

Dengan mengamati ketiga komponen pembentuk Dana Perimbangan tampak bahwa kontributor utama Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi



Umum (DAU) rata-rata 84,3 persen dari total dana perimbangan. Selebihnya terdistribusi pada Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus.

- **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah**

Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berfluktuasi dalam kurun waktu 2011-2015. Akan tetapi dalam dua tahun terakhir, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya yang disumbang oleh pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah yang dicatat ke dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Jika dicermati struktur pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara, nampak bahwa pendapatan yang berasal dari dana perimbangan masih mendominasi total pendapatan daerah. Ini berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan cukup besar. Selama periode tersebut, kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah secara rata-rata berkisar 74,88 persen, PAD sebesar 8,93 persen, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah rata-rata 16,19 persen (Tabel 3.2). Hal ini berarti sumber pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah pada periode sebelumnya lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. Meskipun dana perimbangan merupakan penyumbang besar, namun jika ditelusuri trend kontribusinya per tahun, cenderung menurun dalam dua tahun terakhir.

Tabel 3.2. Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara (%)

	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan Daerah	100	100	100	100	100	100
PAD	5.41	5.56	5.04	14.61	14.03	8.93
Pendapatan Pajak	0.57	0.68	0.80	1.17	1.08	0.86
Pendapatan retirbusi	3.70	3.76	3.51	1.07	0.61	2.53
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.17	0.16	0.15	0.13	0.13	0.14
Lain2 Pendapatan Asli daerah yang sah	0.97	0.96	0.59	12.24	12.22	5.40
DANA PERIMBANGAN	72.98	78.93	82.20	72.85	67.44	74.88
Dana Bagi Hasil Pajak	5.95	5.41	4.63	2.90	2.21	4.22
Dana Alokasi Umum	58.41	67.13	70.28	64.14	57.19	63.43
Dana Alokasi Khusus	8.62	6.39	7.29	5.81	8.03	7.23



	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	21.61	15.52	12.76	12.54	18.53	16.19
Pendapatan Hibah	4.02	0.00	0.08	0.08	0.09	0.85
Pendapatan Dana darurat	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
Pendapatan Lainnya	0.01	2.08	2.24	1.45	4.84	2.12
Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	1.96
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.26

Sumber: Perda/Perbup APBD Kabupaten Luwu Utara berbagai series

Pada tahun yang sama porsi PAD mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya namun sumbangannya masih tergolong rendah. Hal ini berarti pemerintah daerah masih perlu melakukan upaya untuk menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Selama ini, kinerja pencapaian pendapatan daerah khususnya yang berasal dari PAD belum optimal. Beberapa faktor penyebab antara lain: (i) aktivitas ekonomi belum bergerak secara optimal sehingga potensi pajak dan retribusi daerah masih terbatas, (ii) sarana dan prasarana pendukung masih terbatas, (iii) layanan belum optimal, (iii) dukungan kelembagaan belum maksimal, (iv) pendataan perpajakan belum optimal, dan (v) partisipasi masyarakat membayar pajak masih rendah, (vii) pengelolaan kekayaan daerah dan asset daerah belum optimal.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan total pendapatan daerah dalam kurun waktu 2011-2015. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan antara belanja daerah dan pendapatan daerah terlihat bahwa belanja daerah bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pendapatan daerah. Selama periode tersebut, rata-rata pertumbuhan belanja daerah mencapai 17.3 persen pertahun sementara pendapatan daerah bertumbuh hanya rata-rata 15,05 persen per tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara menghadapi tantangan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah masih perlu terus ditingkatkan mengingat kebutuhan masyarakat terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu.



Dari struktur belanja daerah, alokasi belanja terbesar Kabupaten Luwu Utara adalah belanja tidak langsung. Pada tahun 2011, belanja tidak langsung sebesar Rp 321,1 milyar meningkat hampir dua kali lipat di tahun 2015 atau secara rata-rata bertumbuh 14,6 persen pertahun. Hampir seluruh belanja tidak langsung dikontribusi oleh belanja pegawai yang mencapai 87 persen rata-rata pertahun atau bertumbuh 13,8 persen per tahun selama periode 2011-2015. Urutan terbesar kedua belanja tidak langsung adalah belanja bantuan keuangan kepada pemerintah prov/kab/kota, dan pemerintah desa dengan rata-rata pertumbuhannya 56,1 persen. Tingginya angka pertumbuhan ini disebabkan oleh realisasi bantuan keuangan kepada desa pada tahun 2015 yang mencapai Rp 110,6 miliar. Jenis alokasi belanja tidak langsung lainnya terdistribusi kepada belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja subsidi, dan belanja tidak terduga. Untuk realisasi belanja langsung juga memperlihatkan peningkatan setiap tahun dengan rata-rata bertumbuh sebesar 21,6 persen. Jika dibandingkan antara rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung terlihat bahwa tingkat pertumbuhan belanja langsung lebih cepat dibandingkan dengan belanja tidak langsung (14,6 persen). Hal ini berarti perhatian pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara terhadap pelayanan publik semakin membaik.

Berdasarkan struktur belanja langsung, realisasi belanja langsung terbesar adalah belanja barang dan jasa dengan proporsi terhadap belanja langsung berada pada kisaran 53-66 persen atau rata-rata 58,4 persen per tahun dan proporsinya terhadap total belanja rata-rata 28,60 persen. Sementara proporsi belanja modal terhadap belanja langsung 31-37 persen atau rata-rata 35,4 persen dan proporsinya terhadap total belanja sebesar 17,35 persen per tahun.

Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara, 2011-2015

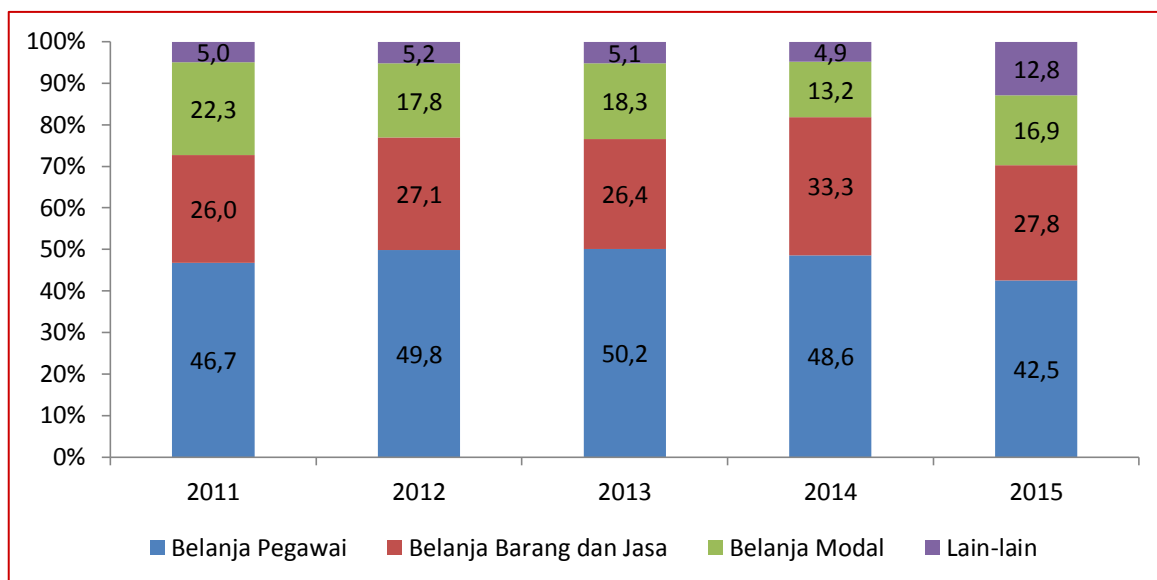
	2011 Rp M	2012 Rp M	2013 Rp M	2014 Rp M	2015 Rp M	Rata-rata Pertumbuhan
BELANJA DAERAH	651.0	689.0	723.7	848.1	1078.6	17.3
BELANJA TIDAK LANGSUNG	321.1	357.2	373.1	425.9	563.4	14.6
Belanja Pegawai	288.9	321.1	336.0	384.6	423.0	13.8
Belanja Subsidi	.0	.0	.0	.0	.04	16.3
Belanja Hibah	4.1	5.3	5.1	7.8	27.7	49.3
Belanja Bantuan Sosial	3.3	.0	1.2	.6	-	1315.6
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	.6	.7	.7	1.2	1.4	22.8
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan pemerintah Desa	23.7	29.3	30.1	31.4	110.6	56.1
Belanja Tidak Terduga	.6	.7	.1	.3	.6	91.0
BELANJA LANGSUNG	329.9	331.8	350.6	422.2	515.1	21.6
Belanja Pegawai	15.4	22.3	27.1	27.4	26.8	5.3
Belanja Barang dan Jasa	169.4	186.6	191.2	282.5	325.28	22.1
Belanja Modal	145.1	123.0	132.3	112.3	163.0	36.1

Sumber: Perda/Perbud APBD Kabupaten Luwu berbagai series

Proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap total belanja daerah mendekati angka yang seimbang selama periode tersebut. Proporsi belanja tidak langsung rata-rata 51,19 persen sementara belanja langsung rata-rata 48,81 persen. Meskipun demikian, jika dicermati alokasi belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi tergambar bahwa alokasi belanja pegawai menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan belanja barang dan jasa dan belanja modal. Proporsi alokasi belanja pegawai terhadap total belanja daerah dalam lima tahun terakhir rata-rata 47 persen per tahun, meskipun dalam dua tahun terakhir cenderung menurun dan digantikan oleh belanja modal dan belanja barang dan jasa (Gambar 3.1.).

Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik baik secara kuantitas maupun kualitas layanan, maka kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Oleh karena itu, penggalan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari PAD, Dana Transfer, maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah perlu dioptimalkan.

Gambar 3.1. Proporsi Belanja menurut klasifikasi jenis Belanja



Beberapa hal masih menjadi tantangan terkait dengan pelaksanaan APBD yang berimplikasi terhadap pendanaan penyelenggaraan program pembangunan jangka menengah di masa mendatang antara lain: (i) Aspek pendapatan daerah terkait dengan: realisasi pendapatan daerah belum bertumbuh cepat, pertumbuhan PAD sangat berfluktuasi dan beberapa objek PAD seperti retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah belum maksimal. Kondisi tersebut menandakan bahwa program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah masih perlu terus dilakukan, (ii) Aspek belanja daerah terkait dengan: alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai dan proporsi terkecil adalah belanja modal sehingga mempengaruhi percepatan pembangunan, daya serap belanja belum optimal, dan tuntutan kuantitas dan kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

3.1.2. Neraca Daerah

Analisis Neraca bertujuan untuk memberikan gambaran tentang posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi: besarnya asset yang dimiliki oleh daerah, kewajiban yang harus dibayar atau ditunaikan, dan ekuitas selama periode 2011-2014.

3.1.2.1. Asset

Aset terdiri atas 4 komponen yaitu (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) Aset tetap, dan (iv) Aset lainnya. Dalam periode 2011-2013, nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan dari Rp 1.362 milyar menjadi Rp 1.556,7 milyar, namun pada tahun 2014 menurun drastis hingga mencapai Rp 931,1 milyar. Perkembangan aset lancar cukup drastis dari Rp 27, 67 miliar meningkat menjadi Rp 71,49 miliar atau bertumbuh dengan rata-rata 47,85 persen per tahun. Kas merupakan komponen pembentuk aset lancar terbesar. Nilai Kas mengalami perkembangan cukup tinggi dari Rp 17,62 miliar meningkat hampir empat kali lipat menjadi Rp 60,75 miliar di tahun 2014. Dari keempat komponen pembentuk Aset Lancar, Kas merupakan penyumbang terbesar. Selebihnya berasal dari piutang, persediaan, dan belanja bayar di muka.

Selain Aset lancar, di dalam Neraca juga tergambar investasi jangka panjang, namun nilainya relatif kecil dan perkembangannya relatif stabil dari tahun ke tahun. Investasi jangka panjang pada umumnya didominasi oleh penyertaan modal pemerintah daerah dan disusul oleh investasi dana bergulir. Sementara untuk aset tetap, nilainya cukup tinggi dan meningkat hingga tahun 2013, tetapi pada tahun 2014 menurun drastis. Penurunan terjadi karena proses penilaian terhadap aset tetap yang sebelumnya tidak diperhitungkan penyusutan dari tahun 2011-2013. Mulai tahun 2014, penyusutan telah diperhitungkan sehingga mengurangi nilai aset bruto. Jenis aset tetap yang bernilai cukup tinggi adalah jalan, irigasi, dan jaringan. Selanjutnya diikuti oleh gedung dan bangunan.

Dari keempat jenis aset daerah, tampak bahwa aset tetap merupakan penyumbang terbesar terhadap total aset daerah. Selama periode 2011-2014, rata-rata sumbangan aset tetap sebesar 95,17 per tahun.

3.1.2.2. Kewajiban

Kewajiban dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam Neraca memberi gambaran tentang besar kecilnya utang pemerintah terhadap pihak ke tiga atau kepada klaim, dan jenis-jenis utang lainnya. Semua jenis utang pemerintah yang dilakukan atas kegiatan yang lalu adalah menjadi kewajiban

pemerintah. Dalam periode sebelumnya, terlihat kewajiban pemerintah hanya meliputi kewajiban jangka pendek.

Kewajiban pemerintah daerah selama lima tahun terakhir nilainya relatif masih rendah dibandingkan dengan nilai seluruh asset yang dimiliki, walaupun mengalami peningkatan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan kewajiban dari periode 2011-2014 sebesar 20 kali atau 2000%. Komponen kewajiban yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah kewajiban pada pihak ketiga. Pada tahun 2013, nilai kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 14,49 miliar meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya Rp 0.23 miliar.

3.1.2.3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana terbagi atas tiga yaitu (i) ekuitas dana lancar, (ii) ekuitas dana investasi, dan (iii) ekuitas dana cadangan.

Tabel 3.4. Perkembangan Neraca Kabupaten Luwu Utara, 2011-2014

No.	Uraian	2011 Rp M	2012 Rp M	2013 Rp M	2014 Rp M	2015 Rp M	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET	1361.98	1452.46	1556.74	931.08	1.118	-8.79
1.1.	ASET LANCAR	27.67	23.71	32.18	71.49	60.88	47.85
1.1.1.	Kas	17.62	11.03	15.27	60.75	30.238	99.63
1.1.2.	Piutang	4.75	6.82	10.69	4.51	22.91	14.15
1.1.3.	Persediaan	5.08	5.58	5.93	6.22	7.74	7.05
1.1.4.	Belanja dibayar dimuka	.23	.29	.29	-	-	-24.02
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	8.12	6.60	6.43	6.74	6.86	-5.49
1.2.1.	pinjaman kepada perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	pinjaman kepada perusahaan daerah	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	investasi dalam surat utang Negara	-	-	-	-	-	-
1.2.5.	investasi dana bergulir	1.36	1.21	1.14	1.08	1.06	-7.43
1.2.6.	investasi non permanen lainnya	2.13	-	-	-	-	2.13
1.2.7.	dana bergulir diragukan tertagih	-.22	-.33	-.81	-.78	-.98	63.03
1.2.8.	penyertaan modal pemerintah daerah	4.85	5.72	6.10	6.43	6.77	10.05
1.2.9.	penyertaan modal proyek pembangunan	-	-	-	-	-	-
1.2.10.	penyertaan modal perusahaan patungan	-	-	-	-	-	-
1.2.11.	investasi permanen lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.	ASET TETAP	1312.41	1414.49	1470.23	803.30	998.14	-11.21
1.3.1.	Tanah	121.76	119.90	116.79	116.79	158.69	-1.37
1.3.2.	Peralatan dan mesin	175.46	194.76	176.65	197.72	215.79	4.54

No.	Uraian	2011 Rp M	2012 Rp M	2013 Rp M	2014 Rp M	2015 Rp M	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.3.	Gedung dan bangunan	310.39	323.39	394.16	420.60	485.96	10.93
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	619.27	661.83	689.18	762.45	864.47	7.21
1.3.5.	Aset tetap lainnya	7.16	7.30	2.32	2.71	1.69	-16.60
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	78.37	107.31	91.13	77.91	6.38	2.45
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-	-774.88	-734.84	40.04
1.4.	ASET LAINNYA	13.78	7.67	47.90	49.56		161.20
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	.05	-	-	5.89	.65	240
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak ketiga	2.61	2.61	2.61	2.61	2.60	0.00
1.4.4.	Aset tak berwujud	3.11	3.64	2.40	2.51	.73	-4.22
1.4.5.	Aset lainnya	8.00	1.42	42.89	38.55	48.15	943.80
	JUMLAH ASET DAERAH	1361.98	1452.46	1556.74	931.08	1.118	-8.79
2	KEWAJIBAN	.26	16.54	10.14	14.51	14.79	2070.09
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	.26	16.54	10.14	14.51	14.79	2070.09
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	-	1.51	-	-	1.19	-.31
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Utang pada pihak ketiga	.23	15.01	3.49	14.49	13.63	2239.51
2.1.5.	Utang bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	Utang pajak	.03	.02	.02	.02	.051	-12.36
2.1.7.	Utang jangka pendek lainnya	-	-	6.64	-	-	-
3	EKUITAS DANA	1361.71	1435.93	1546.60	916.56	1.103	(9.19)
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	27.41	7.17	22.04	56.97	-	97.34
3.1.1.	SILPA	17.51	9.50	15.25	60.69	-	104.28
3.1.2.	Cadangan piutang	4.98	7.10	10.98	4.51	-	12.78
3.1.3.	Cadangan persediaan	5.08	5.58	5.93	6.22	-	7.05
3.1.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-.23	-15.01	-10.13	-14.49	-	2,163.53
3.1.5.	pendapatan yang ditangguhkan	.07	-	.01	.04	-	-20
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	1334.30	1428.76	1524.56	859.59	-	-9.94
3.2.1.	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	8.12	6.60	6.43	6.74	-	-5.49
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset tetap	1312.41	1414.49	1470.23	803.30	-	-11.21
3.2.3.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	13.78	7.67	47.90	49.56	-	161.20
3.2.4.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran jangka panjang	-	-	-	-	-	-
3.3	EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1361.98	1452.46	1556.74	931.08	1.118	-8.79

Sumber: Perda/Perbup Kabupaten Luwu Utara berbagai series

Total nilai ekuitas dana pada tahun 2013 sebesar Rp 1546,60 miliar meningkat dari Rp 1361,71 miliar pada tahun 2011. Tetapi pada tahun 2014 menurun drastis seiring dengan penurunan nilai asset di tahun 2014. Untuk



ekuitas dana lancar didominasi oleh SiLPA dengan nilai yang cenderung meningkat. Pada tahun 2011, SiLPA yang tercatat sebesar Rp 17,51 miliar meningkat lebih tiga kali lipat menjadi Rp 60,69 miliar atau bertumbuh secara rata-rata 104,28 persen. Nilai ekuitas dana investasi Rp 1524,26 miliar pada tahun 2013 menurun menjadi Rp 859,59 miliar di tahun 2014. Nilai ekuitas dana investasi didominasi oleh investasi asset tetap. Penyumbang terbesar untuk nilai ekuitas dana pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara adalah ekuitas dana investasi meskipun nilainya menurun di tahun 2014. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara tidak mempunyai ekuitas dana cadangan.

3.1.2.4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan memperhitungkan seluruh aktiva lancar. Rasio ini menghubungkan antara nilai aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin baik. Namun di sisi lain juga berarti banyak asset lancar pemerintah yang kurang produktif. Rasio yang cukup ideal hanya berkisar 2 kali (200%) sampai dengan 3 kali (300 persen). Rasio 2 artinya setiap Rp 1 kewajiban jangka pendek pemerintah kabupaten dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 2. Rasio likuiditas yang digunakan terdiri atas tiga jenis yaitu (i) Current Ratio, (ii) Quick ratio, dan Cash Ratio.

Current ratio diukur dari asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Quick ratio diukur dari selisih antara asset lancar dengan persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek, dan Cash Ratio diukur dari Kas dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.5. Rasio Likuiditas Kabupaten Luwu Utara, 2011-2015

Rasio Likuiditas			
Tahun	CR	QR	Cash Ratio
2011	105.5	86.17	67.18
2012	1.43	1.096	0.66
2013	3.17	2.58	1.5
2014	4.92	4.49	4.18
2015	4.11	3.59	2.04

Nilai Current Ratio pada tahun 2011 menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Itu berarti Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mempunyai kemampuan yang cukup tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara pada tahun tersebut dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya. Namun pada tahun berikutnya menurun drastis, tetapi dua tahun terakhir kembali mengalami peningkatan meskipun nilai rasionya jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Nilai rasio lancar yang semakin menurun menandakan tingkat kemampuan pemerintah untuk membayar kewajiban jangka pendeknya semakin berkurang.

Quick Ratio adalah rasio yang lebih lancar atau lebih cepat untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Sebagaimana dengan nilai Current Ratio, Nilai rasio quick pada tahun 2011 juga menunjukkan tingkat kemampuan asset lancar setelah dikurangi persediaan dalam membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya adalah terkategori baik. Meskipun pada tiga tahun berikutnya cenderung menurun namun rasionya masih diatas angka 1.

Jenis pengukuran yang paling lancar adalah adalah Cash Ratio karena diukur dari perbandingan nilai Kas dan setara kas dengan kewajiban Lancar. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka rasio yang lebih kecil dibandingkan nilai rasio yang diperoleh dari Current Ratio dan Quick Ratio. Namun angka yang diperoleh masih menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam membayar kewajiban jangka pendeknya adalah cukup lancar.

3.1.2.5. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin kecil nilai rasionya mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya akan semakin baik, demikian sebaliknya. Ada dua jenis rasio yang digunakan adalah (i) Rasio Hutang terhadap total asset, dan (ii) Rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio Hutang terhadap total asset menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan asset

yang dimiliki, sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas menunjukkan seberapa jauh asset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar (pinjaman), demikian pula sebaliknya.

Tabel 3.6. Rasio Solvabilitas Kabupaten Luwu Utara, 2011-2015

	Solvabilitas	
	Rasio Kewajiban terhadap Asset	Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas
2011	0.00019	0.00019
2012	0.01138	0.0115
2013	0.0065	0.0065
2014	0.01558	0.0158
2015	0.01322	0.0134

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rasio kewajiban terhadap asset yang nilainya sangat kecil terutama pada tahun 2011. Nilai pada tahun 2011 sebesar 0,00019 meningkat menjadi 0,01558 pada tahun 2014. Semakin kecil nilainya menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam membayar seluruh kewajibannya cukup kuat, sebaliknya semakin besar nilainya maka semakin kurang kuat dalam membayar kewajibannya. Meskipun ada kecenderungan nilai rasio meningkat pada tahun 2014 namun secara keseluruhan dalam lima tahun tersebut, Luwu Utara terhitung mampu untuk melunasi seluruh kewajibannya.

Dengan melihat angka rasio kewajiban terhadap ekuitas juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai kemampuan yang cukup kuat dalam melunasi seluruh kewajibannya. Nilai rasio pada tahun 2011 sebesar 0,00019 dan 2014 adalah 0,0158 meskipun sedikit meningkat dibandingkan tahun 2013.

3.1.2.6. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam penggunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengalokasian sumber-sumber dananya. Rasio aktivitas terdiri atas dua alat ukur yaitu: (i) rata-rata umur piutang, (ii) rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang diukur dari jumlah hari dalam setahun (365 hari) dibagi dengan perputaran piutang. Perputaran piutang

diperoleh dari pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang daerah per tahun. Rata-rata umur persediaan diukur dari jumlah hari dalam setahun (365 hari) dibagi dengan perputaran persediaan. Perputaran persediaan diperoleh dari persediaan dibagi dengan rata-rata persediaan per tahun.

Tabel 3.7. Rasio Aktivitas Kabupaten Luwu Utara, 2011-2015

Tahun	Rasio Aktivitas	
	Rata-rata Umur Piutang	Rata-rata Umur Persediaan
2011	2.68	365
2012	3.099	348.6
2013	4.37	354
2014	3.1	358
2015	3.9	349

Rata-rata umur piutang digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu digunakan/diperlukan pihak ketiga untuk melunasi utang kepada pemerintah daerah atau berapa waktu diperlukan agar piutang dapat menjadi kas. Semakin besar periode rata-rata semakin besar resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang, demikian sebaliknya. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh angka rasio berfluktuasi dari tahun ke tahun. Namun secara keseluruhan nilai rasionya rata-rata 3,3 hari. Hal ini berarti waktu yang digunakan agar piutang menjadi kas lebih cepat. Dengan kata lain, kemungkinan resiko untuk tidak tertagih piutang relatif kecil.

Rata-rata umur persediaan digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana tertanam dalam bentuk persediaan atau menggunakan persediaan untuk pelayanan publik. Semakin besar periode waktu, semakin besar resiko kemungkinan persediaan berada digudang, demikian sebaliknya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa resiko kemungkinan persediaan berada di gudang cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata 356 hari dana tertanam dalam bentuk persediaan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah meliputi kebijakan yang terkait dengan pendapatan daerah, kebijakan terkait dengan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah. Kebijakan pendapatan adalah kebijakan yang terkait dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap menjaga kestabilan aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan

belanja daerah yaitu kebijakan terkait dengan proporsi alokasi belanja dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kebijakan pembiayaan yaitu kebijakan yang terkait dengan sumber-sumber penutup defisit jika pada tahun anggaran terjadi defisit dan memanfaatkan anggaran jika keuangan daerah mengalami surplus.

3.2.1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJMD 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dengan seluruh rincian objek penerimaan tanpa memberatkan dunia bisnis dan masyarakat
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil
3. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

Berdasarkan kebijakan tersebut, kinerja pendapatan daerah pada periode sebelumnya tampak bahwa pendapatan yang berasal dari PAD mengalami peningkatan yang cukup tajam terutama dimulai pada tahun 2014. PAD bertumbuh dengan rata-rata 60 persen per tahun. Untuk pendapatan yang berasal dari dana perimbangan bertumbuh dengan rata-rata 10,96 persen setiap tahun, dan Lain Pendapatan Daerah yang sah rata-rata 27,54 persen per tahun. Akan tetapi dari struktur pendapatan, dana perimbangan masih mendominasi dengan proporsi secara rata-rata 74,88 persen per tahun dari total pendapatan daerah, sementara PAD hanya menyumbang sekitar rata-rata 8,93 per tahun, selebihnya oleh Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Secara umum, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah pada periode yang akan datang tetap melanjutkan kebijakan pendapatan sebelumnya dengan berbagai upaya penyempurnaan dalam implementasinya.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Analisis kebijakan belanja daerah pada masa lalu dapat dilihat dari proporsi penggunaan anggaran baik terhadap seluruh jenis belanja daerah maupun terhadap belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.



3.2.2.1. Proporsi penggunaan anggaran

Kebijakan belanja daerah pada periode masa lalu masih diarahkan pada belanja tidak langsung dengan pola kecenderungan yang meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Dalam kurun waktu 2011-2015, rata-rata proporsi belanja tidak langsung 51,0 persen per tahun. Selebihnya kebijakan dialokasikan ke belanja langsung sebesar 49 persen per tahun. Mencermati jenis pembentuk belanja, terlihat bahwa belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung memperoleh alokasi dana terbesar yakni 44,4 persen kemudian menyusul belanja barang dan jasa pada pos belanja langsung sebesar 28,6 persen dan selanjutnya belanja modal dengan proporsi 17,4 persen per tahun. Hal ini menandakan bahwa total belanja daerah pada periode sebelumnya masih lebih banyak diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Tabel 3.8. Proporsi realisasi belanja terhadap total belanja Kabupaten Luwu Utara (%)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
BELANJA DAERAH	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
BELANJA TIDAK LANGSUNG	49.3	51.8	51.6	50.2	53.0	51.0
Belanja Pegawai	44.4	46.6	46.4	45.3	40.1	44.4
Belanja Subsidi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Belanja Hibah	0.6	0.8	0.7	0.9	2.6	1.1
Belanja Bantuan Sosial	0.5	0.0	0.2	0.1	0.5	0.2
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	3.6	4.3	4.2	3.7	10.0	5.2
Belanja Tidak Terduga	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
BELANJA LANGSUNG	50.7	48.2	48.4	49.8	47.0	49.0
Belanja Pegawai	2.4	3.2	3.7	3.2	2.3	3.0
Belanja Barang dan Jasa	26.0	27.1	26.4	33.3	27.8	28.6
Belanja Modal	22.3	17.8	18.3	13.2	16.9	17.4

Sumber: Perda dan Peraturan bupati Kabupaten Luwu Utara berbagai series

Tabel 3.9 memperlihatkan perkembangan belanja yang telah diarahkan untuk kebutuhan aparatur baik yang termasuk pada pos belanja tidak langsung maupun pos belanja langsung. Sekitar 80 persen belanja pemenuhan kebutuhan aparatur teralokasi ke dalam pos belanja tidak langsung terutama untuk belanja gaji dan tunjangan, kemudian disusul oleh belanja tambahan penghasilan. Sementara untuk alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada pos belanja langsung hanya menyerap sebesar 20



persen dan daya serap terbesar adalah belanja perjalanan dinas, kemudian terbesar kedua adalah belanja honorarium PNS. Bahkan untuk pos belanja perjalanan dinas cenderung meningkat setiap tahun. Ke depan, alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terutama untuk perjalanan dinas dan tambahan penghasilan diharapkan mengalami penurunan.

Tabel 3.9. Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Luwu Utara, 2013-2015 dalam Rp Miliar

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	345.57	404.29	444.75	16.99
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	262.84	282.40	317.85	7.44
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	79.73	118.82	122.79	49.02
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.12	2.16	3.05	2.09
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	.87	.91	1.07	3.73
B	Belanja Langsung	85.92	93.85	114.39	9.23
1	Belanja Honorarium PNS**)	21.51	27.06	18.95	25.80
2	Belanja Uang Lembur**)	.98	.88	1.30	(9.82)
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	.19	.18	.14	(7.22)
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	3.08	3.29	4.71	6.92
5	Belanja premi asuransi kesehatan	.35	.35	.01	-
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	.00	.00	.00	.00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	.28	.29	.30	0.72
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	.28	.35	.44	25.35
9	Belanja perjalanan dinas**)	44.43	47.59	62.30	7.12
10	Belanja perjalanan pindah tugas	.00	.00	.00	.00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	.00	.00	.00	.00
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	14.82	13.87	26.23	(6.46)
13	kendaraan roda 2	.69	1.22	2.23	75.30
14	alat kantor	.26	.16	.47	(36.71)
15	alat rumah tangga	.44	.33	7.08	(25.71)
16	pengadaan komputer	3.05	3.57	6.79	16.92
17	pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat	1.64	2.81	.73	71.52
18	pengadaan bangunan gedung kantor	8.74	5.78	8.92	(33.88)
19	TOTAL BELANJA	431.49	498.15	559.14	15.45

Sumber: Perda dan Per bupati Kabupaten Luwu Utara berbagai series

Secara keseluruhan, selama periode 2011-2015 alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meningkat tajam dari Rp 431,49 milyar menjadi Rp 559,14 milyar atau bertumbuh sebesar 15,45 persen per tahun.



Proporsinya terhadap total pengeluaran (total belanja ditambah dengan pembiayaan pengeluaran) diatas 50 persen, namun cenderung menurun pada akhir periode rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara. Hal ini berarti kebijakan pemerintah pada masa yang lalu telah mengarah kepada efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja sesuai dengan skala prioritas.

Tabel 3.10. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Utara, 2013-2015

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	2013	431,490,386,808.00	724,026,336,187.34	59.60%
2	2014	498,146,744,629.00	848,082,385,049.49	58.74%
3	2015	559,137,952,376.00	1,108,408,443,011.70	50.45%

Sumber: Perda dan Per bupati Kabupaten Luwu Utara berbagai series

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Selama periode 2011-2015, APBD Kabupaten Luwu Utara mengalami tiga kali defisit riil yaitu pada tahun 2011, 2012, dan 2015, sementara kondisi surplus terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2011, 2012, dan 2015, defisit riil masing-masing sebesar Rp 4,6 milyar, Rp 8,13 miliar, dan Rp 26,83 milyar. Besaran surplus yang terjadi pada tahun 2013 adalah Rp 5,68 miliar dan Rp 45,39 miliar pada tahun 2014. Surplus tersebut diperuntukkan untuk pembayaran pokok hutang sebesar Rp 11,1 juta, sementara di tahun 2014 tidak ada pemanfaatan surplus.

Kebijakan pembiayaan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit riil dapat dicermati komponen penerimaan pembiayaan meliputi penggunaan SiLPA, penerimaan pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan piutang dana bergulir. Penerimaan pembiayaan yang terbesar adalah berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA). Kondisi SiLPA selama periode 2011-2015 meningkat pada dua tahun terakhir. Penerimaan pembiayaan lainnya untuk menutup defisit pada tahun 2015 adalah kebijakan penerimaan pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Total penerimaan pinjaman pada tahun 2015 sebesar Rp 33,86 miliar meningkat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.11. Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Kabupaten Luwu Utara, 2011-015 (Rp Milyar)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Realisasi Pendapatan Daerah	646.41	681.17	729.43	893.46	1051.72
Dikurangi:					
Belanja Daerah	651.01	689.01	723.74	848.07	1078.55
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	.00	.29	.01	.00	.00
Defisit Riil	-4.60	-8.13	5.68	45.39	-26.83
Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan:					
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	21.83	17.51	9.50	15.25	60.67
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-26.83
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Tagihan Tuntutan ganti Kerugian daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan piutang dana Bergulir	.28	.12	.07	.06	-
Penerimaan Utang dari Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Lain2	-	-	-	-	-
Total penerimaan Pembiayaan	22.11	17.63	9.57	15.30	33.86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (Defisit riil-total realisasi penerimaan pembiayaan)	17.51	9.50	15.25	60.69	7.03

Sumber: Perda/Perbup Kabupaten Luwu Utara berbagai series

Selama periode defisit, proporsi SiLPA terhadap total defisit pada tahun 2011 sebesar 474,67 persen, tahun 2012 sebesar 215,3 persen, dan 99,96 persen pada tahun 2015, sementara sumber-sumber lainnya belum dioptimalkan (Tabel 3.4.) Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menutup defisit masih bertumpu pada SiLPA yang diperoleh pada tahun sebelumnya.

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp 17,51 milyar pada tahun 2011 dan Rp 9,5 milyar pada tahun 2012, meningkat menjadi Rp 60,69 milyar pada tahun 2014. Pada tahun 2015 terjadi penurunan SiLPA tahun berkenaan menjadi Rp 7,03 miliar. Angka tersebut diperoleh dari selisih total penerimaan pembiayaan dengan defisit riil anggaran pada tahun berkenaan. Sisa lebih pembiayaan anggaran berkenaan pada tahun 2014 akan menjadi SiLPA pada tahun anggaran 2015. Proporsinya terhadap total defisit riil mencapai 380,7 persen pada tahun 2011 dan 116,77 persen di tahun 2012.

3.3. Kerangka Pendanaan

Menurut Permendagri No 54 tahun 2010, kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Bagian ini menganalisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Luwu Utara selama 5 (lima) tahun ke depan yakni 2016-2021. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah diperkurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kapasitas fiskal riil keuangan daerah dapat dihitung setelah analisis proyeksi berbagai data yang terkait. Adapun data yang diproyeksi adalah: (i) data variabel makro ekonomi daerah yang merupakan asumsi makro ekonomi yaitu data pertumbuhan ekonomi, data inflasi, data pengangguran. (2) Data belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama meliputi data belanja wajib langsung dan belanja wajib tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan yang sifatnya wajib dan mengikat. (iii) data pendapatan daerah meliputi PAD beserta rincian objeknya, dana perimbangan dan rinciannya, serta Lain Pendapatan daerah yang sah. (iv) data total belanja langsung dan tidak langsung. Proyeksi belanja langsung dan tidak langsung terutama digunakan untuk mengetahui rencana pengalokasian kapasitas riil fiskal Kabupaten Luwu Utara.

Variabel-variabel yang menjadi faktor dasar untuk menghitung besaran rata-rata pertumbuhan pendapatan, rata-rata pertumbuhan belanja, dan rata-rata pertumbuhan pembiayaan mengacu pada Permendagri 54 tahun 2010 yaitu asumsi makro ekonomi daerah, kebijakan pemerintah, dan kebijakan pemerintah daerah.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Salah satu jenis belanja yang cukup kuat memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah adalah besarnya belanja dan pengeluaran pembiayaan

yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus secara periodik dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran.

Menurut Permendagri 54 Tahun 2010 secara eksplisit mendefinisikan belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Belanja wajib dan pengeluaran wajib yang mengikat serta prioritas utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat dalam Tabel 3.12. Untuk jenis belanja tidak langsung, perkembangannya cukup pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, nilainya mencapai Rp 229,44 miliar kemudian meningkat menjadi Rp 322,55 persen di tahun 2015. Tingkat pertumbuhan belanja wajib tidak langsung ini tergolong cukup cepat selama lima tahun yang lalu yaitu sebesar 8,92 persen setiap tahunnya. Terdapat beberapa jenis belanja yang termasuk di dalam belanja wajib tidak langsung, namun yang paling banyak alokasi anggarannya adalah belanja gaji dan tunjangan. Percepatan pertumbuhan untuk belanja gaji dan tunjangan cukup besar yakni 8,84 persen per tahun. Untuk jenis belanja wajib tidak langsung lainnya relatif kecil meskipun tingkat pertumbuhannya cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan pengalokasian per tahun.

Belanja wajib langsung dalam tiga tahun terakhir cenderung konstan, namun di tahun 2015 terjadi loncatan alokasi anggaran mencapai Rp 36,04 miliar dibandingkan tahun 2014 hanya Rp 7.14 miliar. Kontributor utama kondisi ini adalah belanja jasa perkantoran yang bertumbuh secara rata-rata

108,64 persen per tahun. Hal ini terindikasi bahwa pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara pada periode sebelumnya termasuk kurang efisien, sehingga ke depan jenis belanja jasa perkantoran diharapkan berkurang melalui efisiensi pemakaiannya. Dalam lima tahun yang lalu, terlihat tidak ada pengeluaran wajib yang sifatnya mengikat harus dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian, total belanja belanja wajib oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bertumbu 10,37 persen per tahun atau meningkat dari Rp 239,13 miliar di tahun 2011 menjadi Rp 352,81 miliar di tahun 2015. Belanja wajib tidak langsung merupakan penyumbang tertinggi terhadap total belanja wajib dan mengikat yaitu di atas dari 95,35 persen per tahun.

Tabel 3.13. Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Luwu Utara, 2016-2021

No	Uraian	2011 Rp M	2012 Rp M	2013 Rp M	2014 Rp M	2015 Rp M	Rata-rata- Pertumbuh an (%)
A	Belanja Tidak Langsung	229.44	250.98	265.68	285.84	318.67	8.58
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	226.75	248.17	262.84	282.40	314.20	8.51
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.06	2.06	2.12	2.16	3.03	11.24
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	.62	.75	.72	1.28	1.44	26.59
B	Belanja Langsung	9.69	9.89	9.04	7.14	34.14	87.65
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk :						
	1. Tenaga Guru	-	-	-	-	-	-
	2. Tenaga Medis	.64	.64	.40	.75	1.01	20.91
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	.58	.49	.32	.18	.14	(28.42)
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	8.47	8.76	8.31	6.21	32.98	100.96
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	-	-	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-



No	Uraian	2011 Rp M	2012 Rp M	2013 Rp M	2014 Rp M	2015 Rp M	Rata-rata- Pertumbuhan (%)
	TOTAL (A+B+C)	239.13	260.87	274.71	292.98	352.81	10.37

3.3.2. Analisis Proyeksi

3.3.2.1. Proyeksi Asumsi Makro Ekonomi

Analisis proyeksi dimaksudkan untuk menghitung kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan jangka menengah daerah dalam kurun waktu 2016-2021. Ketiga variabel makro daerah ini mempengaruhi kemampuan penerimaan daerah dan alokasi belanja daerah pada periode yang akan datang.

Dalam kurun waktu 2011-2014, perekonomian di Kabupaten Luwu Utara bertumbuh rata-rata 7,68 persen. Dengan melihat kecenderungannya dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, maka diprediksikan ke depan perekonomian dapat bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di dalam RKPD 2016, pertumbuhan ekonomi di targetkan sekitar 7,50 persen. Untuk periode RPJMD 2016-2021, diperkirakan perekonomian bertumbuh \pm 8-9 persen. Pertumbuhan ini diprediksikan akan tercapai dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya pembangunan Kabupaten Luwu Utara. Kebijakan belanja pemerintah yang diarahkan kepada sektor-sektor produktif diharapkan mampu mendorong percepatan pergerakan perekonomian sehingga tercipta nilai tambah produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tambah yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

Asumsi makro yang lain adalah tingkat pengangguran terbuka dan tingkat inflasi. Berdasarkan hasil analisis ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Utara, tingkat pengangguran terlihat cukup kecil bahkan cenderung menurun setiap tahun yang mencapai angka 1,82 persen di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai telah mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Ke depan, perkembangan angkatan kerja diharapkan akan selalu terserap lebih banyak sehingga angka dan tingkat pengangguran dapat terkendali ke tingkat yang lebih rendah. Tingkat pengangguran dalam periode RPJMD ini diprediksi berkisar antara 1-2 persen per tahun.



Akan tetapi yang menarik untuk dianalisis adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Kabupaten Luwu Utara terlihat cukup tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2011, laju peningkatan harga sebesar 3,23 persen dan meningkat tajam menjadi 6,93 persen di tahun 2014. Penyebab kenaikan harga-harga tersebut diharapkan akan tertangani di periode mendatang sehingga tingkat inflasi diprediksikan akan menurun hingga mencapai angka 3-4 persen setiap tahun. Ketiga asumsi makro tersebut diprediksikan akan memberi kontribusi terhadap rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah pada periode 2016-2021.

3.3.2.2. Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan asumsi makro tersebut dan kebijakan-kebijakan pemerintah baik kebijakan pemerintah pusat terkait dengan dana transfer dan kebijakan lainnya maupun kebijakan pemerintah daerah terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, maka dalam periode lima tahun ke depan, pendapatan daerah diproyeksikan akan bertumbuh dengan rata-rata 8,52 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan pendapatan tersebut didasarkan atas asumsi makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai $\pm 9-10$ persen, inflasi 3-4 persen. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah terkait intensifikasi dan ekstensifikasi. Kesemuanya ini akan diprediksikan mempengaruhi angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan. Secara absolut pendapatan diprediksikan meningkat dari Rp.1,18 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp 1,78 Triliun pada tahun 2021. Rata-rata proyeksi pendapatan tersebut selama lima tahun ke depan dianalisis berdasarkan trend realisasi 3 (tiga) tahun terakhir serta adanya upaya pemerintah dalam melakukan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Utara yang dapat menghasilkan pendapatan khususnya PAD, serta memperhatikan kebijakan pemerintah dalam hal pengalokasian dana bagi hasil dan DAK.

Besaran proyeksi pendapatan daerah diperoleh dari besaran proyeksi masing-masing sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Luwu Utara. PAD dengan mengacu pada asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, salah satunya yaitu kebijakan pemerintah terkait rencana penambahan

penyertaan modal pada BUMD/Perusda, maka PAD diprediksikan akan mencapai angka pada kisaran Rp.93,09 Milyar pada akhir periode RPJMD. Tingkat pertumbuhan diprediksikan sebesar 3,19 persen per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PAD pada periode sebelumnya terlihat proyeksi pendapatan dari PAD bertumbuh relative lebih lambat. Hal ini disebabkan oleh adanya sumbangan dana BOS yang dicatat ke dalam pos lain-lain PAD yang sah pada periode sebelumnya dengan jumlah yang cukup besar yaitu pada tahun dasar 2015 sebesar Rp. 62,1 miliar.

Dengan berlakunya regulasi bahwa dana BOS ditransfer ke pemerintah provinsi maka PAD secara drastis mengalami penurunan. Setelah pengurangan angka dana BOS dengan realisasi pada tahun 2015 adalah menjadi tahun awal untuk proyeksi ke depan. Dengan demikian, prediksi rata-rata pertumbuhan 3,76 persen pada periode lima tahun ke depan telah disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Meskipun pertumbuhannya cukup lambat namun kontribusinya terhadap pendapatan daerah meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini diprediksikan akan tercapai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi bertumbuh pada kisaran \pm 9-10 persen per tahun dan tingkat pengangguran menurun dan inflasi dapat terkendali pada kisaran 3-4 persen disertai dengan upaya pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber PAD. Sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan masih tetap menjadi sumber pendapatan daerah terbesar di Kabupaten Luwu Utara. Dana perimbangan diprediksikan akan bertumbuh dengan rata-rata per tahun 9,16 persen per tahun dengan angka berkisar pada Rp.948 Miliar di tahun 2016 hingga kisaran Rp 1,46 Triliun di akhir tahun periode RPJMD. Tingkat pertumbuhan 14,66 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya rata-rata 10,96 persen setiap tahun. Penyumbang terbesar untuk dana perimbangan diprediksikan tetap berasal dari dana alokasi umum (DAU) dengan pertumbuhan rata-rata 10 persen. Selanjutnya dana bagi hasil dari pemerintah masih tetap diharapkan mengalami peningkatan setiap tahun, demikian pula dengan dana alokasi khusus. Hanya saja DAK berdasarkan regulasi pemerintah terdapat pemotongan DAK 10 persen sehingga proyeksi DAK setiap tahun telah diperhitungkan pengurangan 10 persen. Namun secara nominal prediksinya



tetap mengalami peningkatan mengingat faktor inflasi yang terjadi setiap tahun.

Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah berdasarkan hasil perhitungan diprediksikan akan meningkat secara absolut dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,02 persen. Proyeksi ini diharapkan dapat dicapai dengan asumsi bahwa kebijakan dari pemerintah pusat tetap berlanjut sebagaimana kebijakan yang terjadi pada periode sebelumnya, termasuk kebijakan pemerintah terkait peningkatan Dana Desa dari APBN yang bertujuan untuk mensukseskan gerakan pembangunan Desa berdasarkan kebijakan pada RPJMN 2015-2019. Sumber pendapatan ini terutama diharapkan berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah lainnya, serta pendapatan lainnya. Gambaran proyeksi pendapatan Kab. Luwu Utara tahun 2016-2021 diuraikan dalam tabel 3.14 berikut:



Tabel 3.14. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, 2016-2021

Uraian	Proyeksi (Rp.)						Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN DAERAH	1.186.913.814.160,00	1.357.958.920.865,40	1.450.707.202.305,88	1.551.653.818.070,21	1.662.242.689.868,41	1.783.424.131.183,67	8,52%
Pendapatan Asli Daerah	79.658.721.360,00	78.839.771.440,00	82.763.218.056,40	86.155.310.140,56	89.597.446.140,75	93.091.882.645,88	3,19%
Pajak Daerah	10.757.581.000,00	11.295.460.050,00	11.860.233.052,50	12.453.244.705,13	13.075.906.940,38	13.729.702.287,40	5,00%
Retribusi Daerah	5.171.215.000,00	5.429.775.750,00	5.701.264.537,50	5.986.327.764,38	6.285.644.152,59	6.599.926.360,22	5,00%
Hasil Kekayaan Daerah	1.320.753.000,00	1.320.753.000,00	3.800.000.000,00	5.700.000.000,00	7.600.000.000,00	9.500.000.000,00	59,21%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.409.172.360,00	60.793.782.640,00	61.401.720.466,40	62.015.737.671,06	62.635.895.047,77	63.262.253.998,25	0,28%
Dana Perimbangan	948.693.123.000,00	1.118.966.966.525,40	1.193.571.110.509,48	1.275.571.826.624,14	1.365.704.303.123,70	1.464.776.934.260,79	9,16%
Dana Bagi Hasil	33.501.167.000,00	30.401.079.915,40	32.529.155.509,48	34.806.196.395,14	37.242.630.142,80	39.849.614.252,80	3,75%
DAU	658.873.349.000,00	724.760.683.900,00	797.236.752.290,00	876.960.427.519,00	964.656.470.270,90	1.061.122.117.297,99	10,00%
DAK	256.318.607.000,00	363.805.202.710,00	363.805.202.710,00	363.805.202.710,00	363.805.202.710,00	363.805.202.710,00	8,39%
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	158.561.969.800,00	160.152.182.900,00	174.372.873.740,00	189.926.681.305,50	206.940.940.603,96	225.555.314.277,01	7,35%
Pendapatan Hibah	343.323.400,00	343.323.400,00	343.323.400,00	343.323.400,00	343.323.400,00	343.323.400,00	0,00%
Pendapatan Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	103.838.899.000,00	114.222.788.900,00	125.645.067.790,00	138.209.574.569,00	152.030.532.025,90	167.233.585.228,49	10,00%
Sumbangan Pihak Ketiga (SPK)	-	-	-	-	-	-	-
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya	36.405.885.000,00	36.405.885.000,00	38.954.296.950,00	41.681.097.736,50	44.598.774.578,06	47.720.688.798,52	5,60%
Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	12.973.862.400,00	4.180.185.600,00	4.180.185.600,00	4.180.185.600,00	4.180.185.600,00	4.180.185.600,00	-13,56%
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.250.000.000,00	5.512.500.000,00	5.788.125.000,00	6.077.531.250,00	4,00%

Sumber: Data proyeksi, 2016



3.3.2.3. Proyeksi Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Berdasarkan hasil analisis pembangunan daerah pada periode sebelumnya, tampak masih banyak permasalahan-permasalahan pembangunan yang harus segera di atasi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan belanja daerah yang diarahkan kepada program-program pembangunan strategis berdasarkan kewenangan daerah, sehingga permasalahan-permasalahan pembangunan dapat dengan segera teratasi. Seiring dengan peningkatan proyeksi pendapatan daerah yang meningkat maka belanja daerah diproyeksikan juga akan mengalami peningkatan.

Dengan mencermati tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berdasarkan pada indikator yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, serta memperhatikan asumsi tingkat inflasi 3-4 persen, dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan efisiensi anggaran, maka belanja daerah di Kabupaten Luwu Utara diproyeksikan meningkat setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhannya 8,37 persen. Secara absolut total belanja daerah sebesar Rp 1.197,96 pada tahun 2016 diperkirakan meningkat menjadi Rp 1,78 Triliun pada tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 8,37% masih dibawah rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah 8,52% persen. Hal ini berarti kebijakan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara diarahkan pada efisiensi anggaran.

Proporsi belanja daerah yang paling besar pada tahun 2016 adalah belanja tidak langsung sebesar 55,06%, namun proporsinya diprediksikan cenderung menurun hingga lima tahun terakhir dengan kisaran 45,58% dan belanja langsung 54,42% pada akhir periode RPJMD. Dengan kebijakan tersebut diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat tercapai yang selanjutnya dapat mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Tabel 3.15. Target Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Luwu Utara, 2016-2021

URAIAN BELANJA	Target (Rp.)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BELANJA DAERAH	1.197.962.023.045,88	1.357.958.920.865,40	1.450.707.202.305,88	1.551.653.818.070,21	1.662.242.689.868,41	1.783.424.131.183,67
BELANJA TIDAK LANGSUNG	654.686.079.890,00	687.838.045.091,74	717.056.846.539,14	745.462.045.197,11	806.123.049.869,95	812.907.509.708,82
Belanja Pegawai	469.503.264.890,00	490.869.862.230,20	498.995.344.210,19	508.120.756.989,74	517.262.478.693,38	526.634.358.460,49
Belanja Subsidi	50.000.000,00	60.000.000,00	72.000.000,00	86.400.000,00	103.680.000,00	124.416.000,00
Belanja Hibah	7.893.000.000,00	3.515.000.000,00	3.515.000.000,00	3.515.000.000,00	31.745.000.000,00	3.515.000.000,00
Belanja Bantuan Soisal	-	-	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	1.381.770.000,00	1.672.523.580,00	1.756.149.759,00	1.843.957.246,95	1.936.155.109,30	2.032.962.864,76
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	174.858.045.000,00	190.520.659.281,54	211.278.352.569,95	230.167.930.960,41	253.002.136.067,27	278.112.452.383,57
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	1.728.000.000,00	2.073.600.000,00	2.488.320.000,00
BELANJA LANGSUNG	543.275.943.155,88	670.120.875.773,66	733.650.355.766,74	806.191.772.873,10	856.119.639.998,46	970.516.621.474,85
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.16. Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Dalam %), Kabupaten Luwu Utara, 2016-2021

Uraian Belanja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Belanja Tidak Langsung	55,06%	50,65%	49,43%	48,04%	48,55%	45,58%
Belanja Langsung	44,94%	49,35%	50,57%	51,96%	51,45%	54,42%

3.3.2.4. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Jenis belanja yang turut mempengaruhi kemampuan fiskal daerah adalah belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Jenis belanja terbagi atas dua yaitu belanja wajib tidak langsung dan belanja wajib langsung. Dalam lima tahun ke depan, total belanja wajib diproyeksikan meningkat dari Rp.608,80 Miliar menjadi Rp.776,43 Miliar pada tahun 2021. Peningkatan belanja wajib didasarkan pada salah satu kebijakan dalam hal penambahan secara berkala penyertaan modal pada BUMD, perkembangan asumsi inflasi yang berkisar 3-4 persen, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja wajib tidak langsung diprediksikan tetap mendominasi total belanja wajib. Besarnya belanja wajib tidak langsung dikontribusi oleh belanja gaji dan tunjangan. Kebijakan belanja ini tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Artinya bahwa kenaikan belanja gaji dan tunjangan hanya disesuaikan kenaikan harga-harga barang atau inflasi sehingga peningkatannya diprediksikan akan lebih lambat dari tahun ke tahun. Hal yang sama dengan jenis belanja wajib langsung diprediksikan akan terjadi efisiensi penggunaan jasa perkantoran sehingga peningkatannya didasarkan atas asumsi inflasi.

Dalam periode RPJMD, tidak ada rencana Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan pinjaman dalam rangka menutup defisit anggaran. Defisit anggaran direncanakan akan ditutupi dari SiLPA tahun sebelumnya. Hal ini berarti selama lima tahun ke depan tidak ada pembayaran bunga yang harus dibayar. Dengan demikian, total belanja wajib hanya dikontribusi oleh belanja wajib tidak langsung dan belanja wajib langsung. Uraian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung diuraikan dalam Tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.17. Proyeksi Belanja Wajib Tidak Langsung dan Belanja Langsung, 2016-2021

No	Uraian	Target (Rp.)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
A	Belanja Tidak Langsung	603.057.347.140,00	640.377.312.341,74	669.344.113.789,14	697.446.912.447,11	729.515.037.119,95	764.094.040.958,82
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	408.786.949.000,00	427.282.549.031,88	435.482.454.331,88	444.048.585.107,67	452.819.713.515,97	461.804.995.193,66
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	7.621.620.500,00	7.621.620.500,00	7.621.620.500,00	7.621.620.500,00	7.621.620.500,00	7.621.620.500,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	1.381.770.000,00	1.672.523.580,00	1.756.149.759,00	1.843.957.246,95	1.936.155.109,30	2.032.962.864,76
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	174.858.045.000,00	190.520.659.281,54	211.278.352.569,95	230.167.930.960,41	253.002.136.067,27	278.112.452.383,57
6	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	9.115.450.000,00	11.878.925.155,82	11.734.450.096,19	12.220.177.773,34	12.513.539.025,74	12.819.043.470,08
7	Belanja Insentif Pajak, Retribusi, dan PBB	1.293.512.640,00	1.401.034.792,50	1.471.086.532,13	1.544.640.858,73	1.621.872.901,67	1.702.966.546,75
B	Belanja Langsung	5.750.000.000,00	6.037.500.000,00	6.339.375.000,00	6.656.343.750,00	6.989.160.937,50	7.338.618.984,38
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk :	-	-	-	-	-	-
	1. Tenaga Guru	-	-	-	-	-	-
	2. Tenaga Medis	-	-	-	-	-	-
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	5.750.000.000,00	6.037.500.000,00	6.339.375.000,00	6.656.343.750,00	6.989.160.937,50	7.338.618.984,38
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	-	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
3	Penyertaan Modal pada BUMD	-	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	TOTAL (A+B+C)	608.807.347.140,00	652.914.812.341,74	680.683.488.789,14	709.103.256.197,11	741.504.198.057,45	776.432.659.943,19



3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Dengan berpedoman pada hasil proyeksi pendapatan daerah dan total belanja wajib, maka dapat dihitung kapasitas riil fiskal Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2016-2021. Pada periode RPJMD 2016-2021 diprediksikan sisa riil perhitungan anggaran konstan dengan berdasar pada angka realisasi pada tahun terakhir periode RPJMD sebelumnya. Sisa Lebih riil pembiayaan anggaran diperoleh dari selisih antara Saldo Kas Neraca dan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan dan kegiatan lanjutan. Dengan demikian SiLPA riil tersebut menambah total penerimaan daerah yang selanjutnya menambah kapasitas riil fiskal daerah.

Setelah memperkurangkan total pendapatan daerah dengan belanja wajib dan mengikat maka kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp.589,15 Miliar pada tahun 2016 dan meningkat setiap tahun menjadi Rp.1,01 Triliun pada tahun 2021 atau bertumbuh sebesar 11,9 persen. Angka proyeksi ini digunakan untuk mendanai program-program pembangunan daerah jangka menengah sesuai dengan kewenangan daerah. Kapasitas riil fiskal Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18. Kapasitas Riil Fiskal Kabupaten Luwu Utara, 2016-2021 (Rp.)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.186.913.814.160,00	1.357.958.920.865,40	1.450.707.202.305,88	1.551.653.818.070,21	1.662.242.689.868,41	1.783.424.131.183,67
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	11.048.208.885,88	-	-	-	-	-
4.	Total penerimaan	1.197.962.023.045,88	1.357.958.920.865,40	1.450.707.202.305,88	1.551.653.818.070,21	1.662.242.689.868,41	1.783.424.131.183,67
	Dikurangi:	-	-	-	-	-	-
5	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	608.807.347.140,00	652.914.812.341,74	680.683.488.789,14	709.103.256.197,11	741.504.198.057,45	776.432.659.943,19
6	Kapasitas riil kemampuan keuangan	589.154.675.905,88	705.044.108.523,66	770.023.713.516,74	842.550.561.873,10	920.738.491.810,96	1.006.991.471.240,48

Sumber: Data Proyeksi, 2016

Rencana penggunaan kapasitas riil fiskal adalah (i) alokasi belanja prioritas I dan (ii) alokasi belanja prioritas II. Alokasi belanja prioritas I yaitu belanja langsung setelah dikurangi dengan belanja wajib dan mengikat. Sementara alokasi belanja prioritas II adalah alokasi belanja wajib tidak langsung setelah diperkurangkan dengan belanja wajib dan mengikat tidak langsung.

Penggunaan kapasitas riil fiskal lebih diarahkan untuk mendanai lebih awal program-program pembangunan prioritas yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penggunaannya kepada program-program prioritas operasional oleh SKPD sebagai penyelenggara pemerintahan dalam mencapai kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 3.19 memperlihatkan bahwa dalam lima tahun mendatang, pelaksanaan program pembangunan didasarkan pada proyeksi pendapatan daerah, sehingga tidak terjadi surplus anggaran, yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.19. Penggunaan Kapasitas Riil Fiskal Kabupaten Luwu Utara, 2016-2021

No.	Uraian	Proyeksi (Rp.)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	Kapasitas riil kemampuan keuangan	589.154.675.905,88	705.044.108.523,66	770.023.713.516,74	842.550.561.873,10	920.738.491.810,96	1.006.991.471.240,48
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	543.275.943.155,88	670.120.875.773,66	733.650.355.766,74	806.191.772.873,10	856.119.639.998,46	970.516.621.474,85
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
	Dikurangi:						
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	5.750.000.000,00	6.037.500.000,00	6.339.375.000,00	6.656.343.750,00	6.989.160.937,50	7.338.618.984,38
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
II.	Total rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	537.525.943.155,88	657.583.375.773,66	722.310.980.766,74	794.535.429.123,10	844.130.479.060,96	958.178.002.490,48
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	51.628.732.750,00	47.460.732.750,00	47.712.732.750,00	48.015.132.750,00	76.608.012.750,00	48.813.468.750,00
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						
III.a	Belanja Tidak Langsung	654.686.079.890,00	687.838.045.091,74	717.056.846.539,14	745.462.045.197,11	806.123.049.869,95	812.907.509.708,82
	Dikurangi:						
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	603.057.347.140,00	640.377.312.341,74	669.344.113.789,14	697.446.912.447,11	729.515.037.119,95	764.094.040.958,82
III.	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	51.628.732.750,00	47.460.732.750,00	47.712.732.750,00	48.015.132.750,00	76.608.012.750,00	48.813.468.750,00
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dari total kapasitas riil fiskal yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 memberikan batasan pengertian untuk prioritas I, II, dan III yang dikutip sebagai berikut:

Tabel 3.20. Kelompok Prioritas Anggaran Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Kelompok Prioritas	Ketentuan Umum
PRIORITAS I	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (<i>dedicated</i>) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Program prioritas I terkait langsung dengan pelayanan ke masyarakat, harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Disamping itu, program prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PRIORITAS II	<ul style="list-style-type: none"> Program prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dan merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Program prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
PRIORITAS III (KP III)	<ul style="list-style-type: none"> Program prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada kelompok III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Sumber: Permendagri 54 tahun 2010

Dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, maka pengalokasian kapasitas riil fiskal ditetapkan pagu indikatif dengan presentase 55 persen untuk kelompok prioritas I, 35 persen untuk kelompok prioritas II, dan 10 persen untuk kelompok prioritas III. Besaran dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kelompok prioritas I, II, dan III dapat dilihat pada Tabel 3.18.

Tabel 3.21. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas riil Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara, 2016-2021

Jenis Dana	Alokasi											
	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
Prioritas I	55	426.51	55	465.91	55	514.65	55	573.79	55	638.97	55	730.37
Prioritas II	35	271.42	35	296.49	35	327.50	35	365.14	35	406.62	35	464.78
Prioritas III	10	77.55	10	84.71	10	93.57	10	104.33	10	116.18	10	132.79
	100	775.48	100	847.11	100	935.73	100	1043.26	100	1161.77	100	1327.95

Sumber: Data Diolah, 2016

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 dirumuskan terlebih dahulu dengan menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara, lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal. Isu strategis RPJMD tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang diharapkan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah. Analisa permasalahan pembangunan Kabupaten Luwu Utara dirinci menurut kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. Permasalahan pembangunan pada setiap urusan pemerintah tersebut diuraikan sebagai berikut :

4.1.1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kinerja pelayanan sektor pendidikan di Kabupaten Luwu Utara masih diperhadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan, hal ini didasarkan pada berbagai indikator kinerja yang patut mendapatkan perhatian serius. Rata-rata lama sekolah penduduk di daerah ini masih rendah. Pada tahun 2011 hanya sekitar 11,60 tahun dan sampai pada tahun 2015 hanya meningkat menjadi 12,20, namun demikian angka tersebut sudah lebih tinggi dari rata-rata provinsi Sulawesi Selatan, yang baru mencapai 7,49 tahun. Rendahnya rata-rata lama sekolah di daerah ini terutama disebabkan oleh rendahnya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini juga ditunjukkan oleh tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah keatas yang rendah. Selain itu di daerah ini masih terdapat penduduk sekitar 1,18% yang tidak dapat membaca dan menulis (angka melek huruf sekitar 98,82%), mereka ini umumnya adalah penduduk lansia.

Selanjutnya Angka partisipasi murni pada setiap jenjang sekolah juga masih rendah, kecuali pada tingkat SD/MI APM sudah mencapai 100,00% pada tahun 2015, yang berarti semua anak yang berada pada usia 7-12 tahun sudah sekolah. Pada jenjang lebih tinggi, tingkat partisipasinya lebih rendah. Pada tahun 2015 APM SMP/MTs hanya 71,84% dan APM SMA/SMK/MA sekitar 63,31% (BPS. Luwu Utara Dalam Angka 2016), Rendahnya angka partisipasi murni pada setiap jenjang sekolah ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, masih terdapat masyarakat yang kurang memahami pentingnya pendidikan terutama di wilayah pedesaan, serta beberapa lokasi pemukiman yang geografisnya sulit dijangkau sehingga beberapa anak usia sekolah pendidikan menengah tidak melanjutkan sekolah.

Secara rata-rata wilayah, ketersediaan sekolah dan guru pada jenjang pendidikan dasar relatif bagus, yang ditunjukkan oleh rasio ketersediaan Sekolah Dasar per penduduk usia sekolah dasar pada tahun 2015 adalah sebesar 145 siswa per sekolah dan rasio guru/murid sekitar 1 : 12 yang berarti memenuhi standar ideal 1 : 25. Akan tetapi kondisi tersebut tidak



merata pada semua wilayah, pada daerah-daerah pegunungan ketersediaan sekolah dan guru serta ruang kelas masih terbatas. Selain itu program pemerataan guru sesuai kualifikasi dan kompetensi pendidik belum optimal dan diperparah oleh animo guru untuk ditempatkan di daerah terpencil juga rendah.

Pada jenjang pendidikan menengah, ketersediaan sekolah dan guru juga relatif bagus, yang ditunjukkan oleh rasio ketersediaan sekolah menengah per penduduk usia sekolah menengah telah menurun dari 1 : 210 per tahun 2011 menjadi 1 : 174 pada tahun 2015 sedangkan rasio guru/murid sekitar 1 : 14 yang berarti memenuhi standar ideal 1 : 25. Permasalahan yang dihadapi pada jenjang pendidikan menengah ini selain keterbatasan ruang belajar, sebaran sekolah dan guru juga belum optimal, beberapa lokasi pemukiman penduduk usia sekolah menengah tidak melanjutkan sekolah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan utama yang dihadapi sektor pendidikan di Kabupaten Luwu Utara secara umum adalah sebagai berikut

- a. Animo masyarakat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi masih rendah
- b. Aksesibilitas masyarakat pada sarana pendidikan belum merata pada semua wilayah, terutama di daerah terpencil
- c. Terbatasnya ruang kelas untuk menambah rombongan belajar
- d. Pemerataan guru sesuai kualifikasi dan kompetensi di semua wilayah belum optimal

2. Kesehatan

Ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan di daerah ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Meski daerah ini memiliki fasilitas rumah sakit, namun fasilitas rumah sakit masih terbatas, demikian pula SDM rumah sakit juga masih kurang. Selain itu meski di semua Kecamatan sudah terdapat puskesmas dan Pustu, dengan rasio puskesmas/1.000 penduduk sebesar 0,0643 dan rasio Pustu/1.000 penduduk sebesar 0,542. Hanya saja keseluruhan puskesmas yang ada di daerah ini belum ada yang terakreditasi. Ketersediaan dokter dan tenaga medis juga masih terbatas. Rasio dokter/penduduk sebesar 1 : 4.517. Ketersediaan dokter dan tenaga medis



bukan hanya terbatas, tapi sebarannya juga tidak merata, khususnya di daerah terpencil. Selain itu angka kesakitan, termasuk penyakit TBC dan penyakit menular di daerah ini juga masih cukup tinggi.

Berbagai permasalahan yang masih menjadi tantangan sektor kesehatan di Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

- a. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagakerjaan kesehatan
- b. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan terhadap kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kesehatan.
- c. Belum optimalnya penyediaan jumlah fasilitas kesehatan yang didukung oleh ketersediaan tenaga medis
- d. Tidak meratanya persebaran dokter di seluruh wilayah
- e. Kurangnya minat tenaga medis pada daerah terpencil
- f. Tidak semua Bidan Desa menetap di wilayah kerjanya
- g. Belum meratanya akses dan kualitas cakupan pelayanan puskesmas
- h. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama kelompok rentan terutama di daerah terpencil
- i. Belum ada puskesmas yang terakreditasi
- j. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular
- k. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh
- l. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Kapasitas jaringan jalan di daerah ini masih terbatas, selama periode 2011-2015 tidak berubah yakni sepanjang 2.241 Km, namun proporsi jalan dalam kondisi baik meningkat dari 54,07% tahun 2011 menjadi 57,92% tahun 2015. Kondisi serupa juga terjadi pada jaringan irigasi, pada tahun 2015 panjang jaringan irigasi di daerah ini hanya 108,25 Km, dengan rasio jaringan irigasi 1 : 85. Selanjutnya pada tahun 2015 Persentase rumah tangga bersanitasi adalah 69,79 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih



dari 30% rumah tangga yang belum bersanitasi baik. Jumlah TPS di Luwu Utara tahun 2015 sebanyak 656 unit dengan daya tampung seluas 132,2 M³. Rasio tempat pembuangan sampah per 1000 penduduk sebesar 2,17 atau setiap 1 tempat sampah digunakan oleh 461 penduduk. Sedangkan rasio daya tampung TPS terhadap 1000 penduduk adalah 0,44. Berbagai permasalahan yang dihadapi sektor pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya kinerja jaringan dan kapasitas jalan dan jembatan termasuk tantangan untuk meningkatkan kapasitas jalan lingkar kota.
- b. Masih besarnya persentase lahan budidaya yang belum terairi dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya air
- c. Masih rendahnya cakupan sarana/prasarana dan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga
- d. Keberadaan sarana persampahan berupa TPS dan TPA serta institusi pengelola yang belum memadai.
- e. Rumah yang tidak layak huni masih banyak serta sarana dan utilitas lingkungan pemukiman belum memadai
- f. Pemenuhan komposisi ruang terbuka hijau belum memadai.

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Kinerja pelayanan sektor perumahan dan kawasan pemukiman diindikasikan oleh beberapa indikator. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih mencapai 93,12%, meski pengguna air leding baru sekitar 9.79%. Selanjutnya indikator elektrifikasi di daerah ini menunjukkan masih terdapat desa terpencil belum terkoneksi jaringan listrik, dengan persentase rumah tinggal mengakses listrik hanya sebesar 60,22%. Selanjutnya Persentase rumah tangga bersanitasi adalah 69,79 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 30% rumah tangga yang belum bersanitasi baik. Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah sebagai berikut :

- a. Rumah yang tidak layak huni masih banyak serta sarana dan utilitas lingkungan pemukiman belum memadai



- b. Pemukiman kumuh masih ada terutama saat terjadi gangguan ekologi berupa banjir
- c. Penggunaan sumber air minum PDAM masih terbatas
- d. Masih terjadi krisis air bersih di daerah pesisir
- e. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan air baku air minum
- f. Masih terjadi krisis listrik di daerah terpencil
- g. Pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah seperti PLTMH/PLTS
- h. Masih rendahnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya PHBS oleh masyarakat.

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Sarana dan SDM untuk menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat masih sangat terbatas. Hal ini ditunjukkan oleh Jumlah polisi pamong praja menurun dari 74 orang tahun 2011 menjadi 64 orang tahun 2015. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk tahun 2015 sebesar 2,11. Demikian pula ketersediaan linmas terbatas. Jumlah Linmas tahun 2015 sebanyak 1.710 yang berarti rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk tahun 2015 sebesar 56. Sementara Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015 adalah 69 per Desa/Kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan utama yang dihadapi pada aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Gangguan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan (K3) masyarakat sering terjadi
- b. Penegakan Perda dan kebijakan kepala daerah terkait ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan serta regulasi lainnya belum sepenuhnya efektif
- c. Masih terbatasnya jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas dibandingkan dengan jumlah penduduk
- d. Belum optimalnya pemanfaatan Pos Siskamling untuk pencegahan gangguan K3 berbasis partisipasi masyarakat

6. Sosial.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di daerah ini masih terbatas, namun jumlah pasti dari sarana tersebut belum tersedia. Selain itu masalah yang dihadapi oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) semakin kompleks, dan di lain pihak data total PMKS yang memperoleh bantuan dan penanganan belum tersedia. Karena itu permasalahan yang dihadapi sektor sosial adalah sebagai berikut

- a. Terbatasnya dana yang dialokasikan setiap tahun sehingga sarana dan prasarana pendukung sangat terbatas.
- b. Belum optimal dan akuratnya pendataan PMKS disebabkan oleh keterbatasan SDM pekerja sosial.
- c. Belum tersedianya kriteria PMKS yang akan mendapatkan bantuan.
- d. Kompleksitas penyandang masalah semakin bertambah

4.2.4.2. Urusan Pemerintah Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Penduduk Kabupaten Luwu Utara yang tergolong angkatan kerja pada tahun 2015 berjumlah 135.553 jiwa, jumlah tersebut setara dengan 66,68% dari penduduk usia kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja). Dari total penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja, terdapat sebanyak 132.030 jiwa diantaranya merupakan penduduk bekerja, sedangkan sisanya sebanyak 1.648 jiwa sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan angka tersebut, maka angka parsipasi kerja di daerah ini sebesar 65,81% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,60%. Meski tingkat pengangguran daerah ini rendah, namun berbagai permasalahan tenaga kerja yang dihadapi di daerah ini diantaranya terbatasnya keterampilan tenaga kerja, demikian pula tingkat pendidikan pekerja relatif rendah. Permasalahan lainnya adalah pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat secara tajam tanpa disertai perluasan kesempatan kerja yang memadai. Selain itu informasi mengenai pasar kerja juga terbatas sehingga selalu ada hambatan dalam menyesuaikan antara jenis pendidikan dan keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja. Data mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja, serta data mengenai perselisihan buruh dengan perusahaan serta data-data ketenaga kerjaan lainnya masih

terbatas. Berdasarkan uraian tersebut maka beberapa permasalahan ketenaga kerjaan di daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya keterampilan tenaga kerja
- b. Tingkat pendidikan tenaga kerja relatif masih rendah
- c. Ketidaksesuaian antara jenis pendidikan dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia
- d. Jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia.
- e. Informasi pasar kerja masih terbatas.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Keterlibatan penduduk usia kerja perempuan dalam lapangan kerja relatif rendah, hal ini tercermin dari tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk perempuan hanya sekitar 48,68%. Angka tersebut jauh lebih rendah dari angka partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki. Pada tahun 2015 jumlah penduduk yang bekerja di daerah ini mencapai 132.030 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk perempuan yang bekerja adalah sebanyak 47.529 jiwa. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk yang bekerja di instansi pemerintahan hanya sekitar 5,89%, sisanya mereka bekerja di berbagai lapangan kerja swasta. Dari total penduduk perempuan yang bekerja di instansi pemerintah tersebut hanya sekitar 8,27% yang menduduki jabatan eselon II-IV, dengan demikian jabatan-jabatan strategis di instansi pemerintah masih didominasi oleh penduduk laki-laki. Meski bupatinya perempuan, tapi keterlibatan penduduk perempuan dalam legislatif juga masih terbatas. Persoalan lain yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah ini adalah banyaknya keluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan belum optimalnya penanganan mengenai perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka berbagai permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Luwu Utara terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif
- b. Masih terjadi dominasi laki-laki pada jabatan struktural strategis di lembaga pemerintah (eksekutif)



- c. Rendahnya persentase perempuan di jabatan strategis pada lembaga swasta
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia (trafficking) dan banyaknya keluhan masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- e. Belum berjalan secara maksimal fungsi layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau (UU. No 7 Tahun 1996). Karena itu permasalahan pangan harus dilihat juga dari : i: Ketersediaan pangan; II: Akses terhadap pangan; III:Pemanfaatan pangan.

Secara agregat Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi produksi bahan pangan pokok yang cukup besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Hal ini tercermin dari pertumbuhan produksi padi sawah dalam lima tahun terakhir cukup besar yakni rata-rata tumbuh sekitar 13% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk (1,3%). Selain itu Luwu Utara merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap surplus beras di Sul-Sel. Meskipun demikian beberapa wilayah kecamatan di daerah ini tergolong rawan pangan. Kebiasaan masyarakat yang mengkonsumsi bahan pangan pokok beras dan sagu, serta terbatasnya SDM menyebabkan upaya untuk mensosialisasikan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan belum optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka beberapa masalah dalam ketahanan pangan di daerah ini adalah sebagai berikut

- a. Masih adanya tiga wilayah kecamatan yang tergolong daerah rawan pangan
- b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penganekaragaman pangan
- c. Distribusi pangan belum merata
- d. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat dalam penanganan ketahanan pangan



- e. Kebiasaan masyarakat yang hanya mengkonsumsi bahan makanan pokok berupa beras dan sagu
- f. Belum berfungsinya lumbung pangan sebagai penyedia cadangan pangan masyarakat
- g. Masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh jika dibandingkan dengan luas wilayah binaan dan jumlah petani yang memerlukan adopsi teknologi.
- h. Kurangnya pelatihan teknis kepada penyuluh terkait beragam komoditas dan latar belakang tingkat pendidikan
- i. Mudahnya tenaga penyuluh dialihkan menjadi tenaga struktural

4. Pertanahan

Sektor pertanahan di Kabupaten Luwu Utara menghadapi berbagai persoalan, diantaranya masih rendahnya lahan-lahan bersertifikat, dan banyak lahan-lahan yang sudah dikuasai masyarakat belum termanfaatkan (lahan tidur), juga di beberapa tempat, karena kurangnya pengawasan menyebabkan lahan-lahan negara banyak di invasi oleh masyarakat. Persoalan lainnya adalah adanya kecenderungan penggunaan lahan yang tidak terkontrol dan tidak terintegrasi dengan RTRW. Berdasarkan uraian tersebut maka persoalan utama mengenai sektor pertanahan di daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Lemahnya administrasi pendukung mengenai status penguasaan tanah masyarakat
- b. Belum terintegrasinya penggunaan tanah dengan RTRWK yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah

5. Lingkungan hidup

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Utara, tidak hanya berkaitan ancaman penurunan kualitas udara dan air, tetapi juga karena pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Ancaman penurunan kualitas udara dan peningkatan gas rumah kaca disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan deforestasi yang tinggi, di mana selama kurun waktu 2009-2014 luas kawasan hutan telah berkurang sekitar 20.916,66 Ha, disisi lain jumlah kendaraan penghasil emisi carbon terus meningkat. Tercatat selama kurun waktu 2013-2015 jumlah kendaraan bermotor, terutama roda dua meningkat dari 8.636 unit menjadi 61.301 unit.



Berdasarkan data persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Luwu Utara tahun 2015 yang mencapai 63%, masih rendah dari rata-rata provinsi Sulawesi Selatan yang telah mencapai 84,75%, namun beberapa daerah pesisir, terutama daerah yang sering banjir merupakan daerah yang krisis air bersih. Selain itu, beban pencemaran yang ditanggung oleh tanah dan air di daerah ini juga terus meningkat. Beban pencemaran dari sampah, maupun beban pencemaran yang ditimbulkan dari sektor pertanian dan perkebunan yang ditanggung oleh tanah dan air terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 beban pencemaran sampah diperkirakan sebesar 390.585,24 M3, sementara jumlah TPS pada tahun 2015 untuk menampung sampah di Luwu Utara hanya sebanyak 656 unit dengan daya tampung seluas 132,2 M3. Rasio tempat pembuangan sampah per 1000 penduduk sebesar 2,17 atau setiap 1 tempat sampah digunakan oleh 461 penduduk. Sedangkan rasio daya tampung TPS terhadap 1000 penduduk adalah 0,44. Beban pencemaran yang timbulkan oleh sekor pertanian dan perkebunan juga cukup besar. Pada tahun 2015 beban pencemaran yang harus ditanggung tanah dan air dari sekor ini diperkirakan sebesar 72.456,43 ton. Selain itu limbah ternak babi dan unggas yang terus meningkat, khususnya di Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Mappedeceng juga turut berkontribusi terhadap beban pencemaran yang ditanggung tanah dan air di daerah ini. Pengelolaan limbah pada tingkat masyarakat dan UMKM belum taat asas lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka beberapa permasalahan lingkungan hidup di daerah ini adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang disebabkan peningkatan potensi alih fungsi dan kebakaran hutan, serta peningkatan kendaraan roda dua sebagai penghasil emisi carbon yang tidak terkendali
- b. Peningkatan beban pencemaran sampah, yang tidak diikuti peningkatan kapasitas sarana pengelolaan sampah
- c. Kesadaran lingkungan bagi masyarakat serta pengelolaan limbah UMKM belum taat asas lingkungan
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana lingkungan serta terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola lingkungan



6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Utara yang mengurus KTP relatif rendah setiap tahunnya, pada tahun 2013 hanya sebanyak 6.486 KTP. Hingga awal tahun 2014 penduduk yang belum memiliki KTP masih sebanyak 154.822 jiwa. Tingkat kepengurusan akte nikah dan akte kelahiran juga relatif rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka masalah dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut.

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan seperti akte catatan sipil. KTP, kartu keluarga, surat nikah
- b. Terbatasnya kapasitas sarana/prasarana dalam menjangkau wilayah pelayanan tertentu di lokasi terpencil.

7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), termasuk jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Luwu Utara masih terbatas. Berdasarkan data tahun 2015, jumlah LPM di daerah ini hanya sebanyak 163 LPM, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan hanya 1 klp binaan per LPM. Selain itu pada tahun yang sama jumlah LSM yang aktif di daerah ini sebanyak 5 LSM. Rendahnya kelompok binaan LPM di daerah ini tidak terlepas dari rendahnya kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan kelurahan dalam melakukan pembinaan serta mendorong pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan sektor pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut

- a. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap, mental dan keterampilan) aparat pemerintah desa dan kelurahan
- b. Adanya penyelenggara pemerintahan yang tidak memahami Undang-Undang Desa.
- c. Adanya kebijakan pusat yang tidak sesuai kebutuhan desa
- d. Belum adanya juknis tingkat perkembangan desa (Desa swadaya, swakarsa, dan swasembada)
- e. Kemiskinan yang belum tersentuh dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta populasi penduduk miskin yang masih tinggi



- f. Masih rendahnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
- g. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa
- h. Penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan masih terbatas
- i. LSM aktif yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat desa masih terbatas
- j. Isu tata ruang perdesaan
- k. Isu tata batas desa dan tapal batas antar desa
- l. Meningkatnya usulan kelurahan menjadi desa
- m. Meningkatnya usulan terhadap rencana pemekaran desa

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Luwu Utara masih cukup tinggi yakni rata-rata 4 anak per keluarga. Selain itu cakupan peserta KB aktif masih rendah, sementara di lain jumlah keluarga yang tergolong keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I masih cukup tinggi. Tantangan yang dihadapi dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah ini tidak hanya terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana, tetapi juga terkait dengan terbatasnya sarana dan tenaga penyuluh KB. Secara umum permasalahan yang dihadapi sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas SDM aparatur PKB, PLKB dan PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BLK, dan UUPKS Badan KB
- b. Terbatasnya pengadaan alkon untuk peserta KB baru
- c. Terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB,
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keluarga berencana

9. Perhubungan

Kabupaten Luwu Utara memiliki tiga buah lapangan udara, meskipun ketiganya memiliki landasan pacu yang terbatas, sehingga hanya pesawat kecil yang dapat mendarat. Pada tahun 2014, jumlah penumpang yang menggunakan pesawat udara di Luwu Utara masing-masing berangkat 11.567 orang dan kedatangan : 11.492 orang. Selain itu daerah ini juga memiliki terminal bis sebanyak 4 unit. Armada angkutan darat yang melayani



penumpang angkutan bis di daerah ini terus meningkat dan terintegrasi ke berbagai rute perjalanan. Jumlah angkutan umum yang lolos KIR juga semakin meningkat. Permasalahan sektor perhubungan di daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelayanan publik dan pengoperasian sarana/prasarana perhubungan terkait angkutan penumpang dan lalu lintas angkutan jalan raya
- b. Belum terintegrasinya transportasi antar moda
- c. Belum optimalnya pengelolaan pelayanan pelabuhan udara
- d. Terbatasnya angkutan pedesaan

10. Komunikasi dan informatika

Jaringan komunikasi belum menjangkau seluruh wilayah, baik melalui jaringan telepon kabel maupun jaringan telepon seluler. Sarana komunikasi dan informasi seperti halnya wartel/warnet serta jenis surat kabar nasional dan lokal yang mudah diakses masyarakat masih terbatas. Karena itu permasalahan sektor komunikasi dan informasi di daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Jaringan komunikasi yang berkualitas belum menjangkau seluruh wilayah
- b. Akses masyarakat terhadap media massa, khususnya terkait dengan informasi pembangunan daerah, masih terbatas
- c. Belum optimalnya penerapan keterbukaan informasi dalam pemerintahan melalui penerapan e-government.

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2013 sebanyak 249 unit, sementara jumlah Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 12.500 unit. Tantangan UMKM di daerah ini untuk mampu menghasilkan produk layak ekspor masih menghadapi tantangan yang besar, permasalahannya adalah UMKM yang ada di daerah ini pada umumnya memiliki peralatan sederhana serta dan permodalan yang terbatas serta tidak didukung oleh SDM yang memiliki kapasitas manajerial yang handal. Permasalahan yang dihadapi sektor Koperasi dan UMKM di daerah ini adalah

- a. Terbatasnya kapasitas manajerial, teknologi dan permodalan koperasi untuk beroperasi secara aktif.



- b. Terbatasnya pengelola usaha yang memiliki kemampuan manajerial dan teknologi
- c. Wawasan kewirausahaan masih kurang
- d. Skim kredit khusus untuk UMK yang murah
- e. Kurangnya kemitraan usaha

12. Penanaman modal

Minat investasi di Kabupaten Luwu Utara terus mengalami peningkatan yang tercermin dari adanya peningkatan jumlah investor PMA/PMDN dari 698 investor pada tahun 2013 meningkat menjadi 832 investor tahun 2015 atau meningkat sekitar 19,19% selama kurun waktu tersebut. Realisasi investasi PMA/PMDN di daerah ini juga meningkat dari sebesar Rp.126.531.019.481,- tahun 2013 meningkat menjadi Rp.222.852.003.554,- Meskipun ada kecenderungan peningkatan dari segi jumlah investor maupun dari segi nilai investasi namun bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain serta dibandingkan banyaknya potensi yang dimiliki daerah ini, maka tingkat penanaman modal di daerah masih berpotensi untuk meningkat secara optimal. Tantangan yang dihadapi sektor permodalan di daerah ini :

- a. Penanaman modal asing (PMA) masih terbatas
- b. Proses perizinan masih perlu disederhanakan
- c. Dukungan infrastruktur daerah dan regulasi masih perlu
- d. Informasi peluang dan potensi investasi Luwu Utara yang masih kurang

13. Kepemudaan dan olah raga

Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2015 berjumlah 32 organisasi. Jenis organisasi pemuda yang ada di daerah ini beragam, diantaranya ada yang berbasis keagamaan, olah raga, forum komunikasi pemuda dan lain sebagainya. Jumlah kegiatan kepemudaan di daerah ini juga terus meningkat dan pada tahun 2015 berjumlah 24 kegiatan. Sementara itu organisasi olahraga di daerah ini pada tahun 2015 berjumlah 193 unit dengan jumlah kegiatan olahraga sebanyak 72 kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi sektor kepemudaan dan olah raga di daerah ini adalah sebagai berikut

- a. Sarana lapangan olah raga masih terbatas



- b. Belum adanya pola pembinaan dan pembibitan setiap cabang olah raga penting
- c. Belum optimalnya koordinasi antara organisasi pemuda dan kegiatan pemberdayaan organisasi pemuda
- d. Terbatasnya anggaran untuk pembinaan pemuda dan olah raga

14. Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Luwu Utara masih terbatas, dan tidak dilakukan secara reguler. Sarana penyelenggaraan seni budaya di daerah ini juga terbatas, karena belum ada gedung kesenian yang representatif. Selain itu meskipun daerah ini memiliki situs dan cagar budaya yang sangat banyak, seperti situs patung megalitik dari zaman prasejarah, makam bersejarah dan lain-lainnya, namun pelestarian dari berbagai cagar budaya tersebut masih terbatas. Permasalahan yang dihadapi bidang kebudayaan di Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut. .

- a. Belum adanya gedung kesenian yang representatif
- b. Terbatasnya event daerah, pagelaran seni atau festival yang tidak teragendakan
- c. Pelestarian warisan budaya khususnya Benda Cagar Budaya (BCB) masih terbatas

15. Perpustakaan

Ketersediaan perpustakaan di Kabupaten Luwu Utara masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun dari segi kelengkapan sarana dan prasarannya. Perpustakaan yang ada umumnya berbasis perpustakaan sekolah. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah juga masih terbatas, disisi lain jumlah pengunjung perpustakaan juga masih rendah. Permasalahan yang dihadapi sektor perpustakaan di daerah ini adalah :

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat
- b. Kurangnya promosi dan motivasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat
- c. Terbatasnya buku pustaka
- d. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan termasuk prasarana tempat baca yang nyaman belum memadai;
- e. Belum optimalnya pengelolaan Perpustakaan.



- f. Terbatasnya tenaga fungsional perpustakaan (Pustakawan).

16. Kearsipan

Tata kelola kearsipan di Kabupaten Luwu Utara belum memiliki sistem pengelolaan yang sesuai standar baku tata kelola kearsipan, kondisi ini menyebabkan integrasi kearsipan pada lingkungan SKPD belum bisa diwujudkan. Tantangan utama yang dihadapi daerah ini dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang bermutu adalah terbatasnya sarana kearsipan berbasis teknologi serta kurangnya SDM pada setiap SKPD yang memahami tata kelola kearsipan yang benar. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan dalam bidang kearsipan adalah sebagai berikut.

- a. Tata kelola kearsipan belum sesuai standar kearsipan
- b. Kurang tertibnya kearsipan SKPD
- c. Belum terintegrasinya kearsipan SKPD yang berbasis teknologi
- d. Ketersediaan dan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana kearsipan belum memadai

17. Kepegawaian

- a. Pegawai Negeri Sipil ditengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik
- b. PNS tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi).
- c. PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas fungsi jabatan yang diduduki (mismatch).
- d. PNS yang ada tidak terdayagunakan secara optimal (under employment)
- e. Kinerja rendah (under performance)
- f. Pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karier PNS yang jelas.
- g. Evaluasi kinerja PNS belum berdasarkan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai



sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem remunerasi berbasis kinerja), serta belum diterapkannya system reward and punishment.

- h. Belum terbangunnya system perencanaan dan rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai secara tidak merata.
- i. Dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (database) kepegawaian yang memadai hal ini karena tidak sinkronnya SIMPEG BKDD dengan SIMPEG di SKPD Kab. Luwu Utara.
- j. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4.2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Jumlah produksi ikan dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Luwu Utara menurun. Pada 2011, jumlah produksi ikan mencapai 9.712 ton turun menjadi 9.045 ton tahun 2015. Produktivitas nelayan pada sektor perikanan tangkap juga masih rendah, yang disebabkan oleh sarana dan prasarana tangkap kurang memadai serta terbatasnya SDM nelayan. Jumlah kelompok nelayan yang dibina dan mendapatkan bantuan juga masih terbatas. Disisi lain beberapa tempat terjadi kerusakan ekosistem laut dan terjadi pencemaran air laut. Produksi ikan dari hasil budidaya juga masih rendah. Dari total produksi ikan di daerah ini pada tahun 2015 hanya sekitar 19,21% berasal dari perikanan budidaya, sisanya 80,79% berasal dari sektor perikanan tangkap. Rendahnya produksi ikan budidaya di daerah ini, selain disebabkan oleh produktivitas petani rendah, ketersediaan tambak air payau di daerah ini juga masih rendah, yakni hanya seluas seluas 8.212 Ha.

Persoalan lain yang dihadapi sektor perikanan dan kelautan di daerah adalah masih seringnya terjadi illegal fishing, terutama di wilayah Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Bone-bone dan Kecamatan Tana lili. Masih maraknya illegal fishing di daerah ini selain disebabkan oleh terbatasnya

sarana dan prasarana pengawasan, juga karena pemahaman masyarakat masih rendah serta kurangnya optimalnya sosialisasi regulasi. Berdasarkan uraian tersebut maka berbagai permasalahan sektor perikanan dan kelautan di daerah ini adalah sebagai berikut.

- a. Produksi perikanan tangkap menurun
- b. Perikanan budidaya belum optimal
- c. Terjadinya pencemaran laut serta rusaknya ekosistem laut
- d. Armada kapal penangkap ikan belum memadai
- e. Kualitas SDM nelayan masih rendah
- f. Masih maraknya Illegal Fishing
- g. Manajemen kelembagaan kelompok nelayan belum optimal
- h. Keterbatasan infrastruktur perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan hasil

2. Pariwisata

Kabupaten Luwu Utara memiliki 47 objek wisata, Objek wisata tersebut diantaranya objek wisata sejarah dan budaya seperti makam datok patimang sebagai sosok pembawa ajaran islam pertama di tanah Luwu, kemudian menyebar di wilayah Sulawesi. Objek wisata alam seperti air panas pincara sepakat, air terjun sarambu alla dan lain-lainnya. Hanya saja kunjungan wisata masih minim. Objek wisata hanya dikunjungi pada momen-momen tertentu. Selain itu pada tahun 2014 sektor pariwisata hanya berkontribusi sekitar 1,04% terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara. Permasalahan yang dihadapi sektor wisata di daerah ini adalah sebagai berikut

- a. Objek wisata belum dikenal luas
- b. Masih banyak DTW baru yang belum terjangkau.
- c. Masih rendahnya promosi wisata pada segmen luar wilayah.

3. Pertanian

Produktifitas padi meningkat dari 4,7 ton per Ha tahun 2011 menjadi 5,69 ton per Ha tahun 2015 atau tumbuh sekitar 5,7% per tahun. Selain itu luas panen padi juga meningkat sebesar 6,7% per tahun. Produksi padi di daerah ini masih bisa dioptimalkan hanya saja masih menghadapi tantangan seperti masih rendahnya indeks pertanaman, jaringan irigasi yang ada belum mampu mendukung seluruh lahan-lahan sawah yang ada. Selain



itu penerapan teknologi pada usaha tani padi masih terbatas, seperti dukungan benih unggul, pupuk, serta alat dan mesin pertanian.

Sektor pertanian berkontribusi paling besar terhadap PDRB, namun sharenya merosot dari 53,49% tahun 2011 menjadi 50,98% tahun 2014. Khusus untuk sub sektor tanaman pangan, pada tahun 2014, sub sektor ini berkontribusi sekitar 11,95% terhadap PDRB Luwu Utara, sementara sub sektor Perkebunan berkontribusi sekitar 26,15% terhadap PDRB wilayah. Meskipun sub sektor perkebunan berkontribusi besar terhadap PDRB wilayah, namun sub sektor ini menghadapi persoalan yang perlu dicermati secara serius, yakni menurunnya luas lahan tanaman kakao serta maraknya organisme pengganggu pada tanaman perkebunan. Selain itu produktivitas berbagai tanaman perkebunan di daerah ini juga belum mencapai produktivitas optimalnya.

Produksi daging ternak di daerah ini terus meningkat, seiring meningkatnya populasi ternak, baik dari ternak besar maupun ternak unggas. Pada tahun 2013 jumlah populasi ternak sapi di daerah ini mencapai 23.131 ekor meningkat menjadi 26.456 ekor tahun 2015. Populasi ternak besar lainnya seperti kerbau, kuda, kambing dan babi juga mengalami peningkatan populasi. Pada tahun 2015 jumlah produksi daging dari ternak besar sebanyak 807.833 Kg, di mana sekitar 78,06% berasal dari ternak sapi. Namun sub sektor peternakan di daerah ini masih menghadapi tantangan, terutama mengenai keterbatasan dalam pengendalian penyakit hewan, terbatasnya inseminasi buatan (IB) serta masih tingginya pemotongan ternak betina produktif. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Masih rendahnya produksi dan produktivitas pertanian
- b. Rendahnya indeks pertanaman padi
- c. Penerapan teknologi usahatani masih rendah, seperti benih unggul, pupuk dll
- d. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, alat mesin pertanian, sarana pasca panen dan sarana perhubungan.
- e. Kontribusi sektor pertanian demikian pula sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB mengalami penurunan
- f. Nilai tambah dan mutu hasil pertanian belum optimal



- g. Menurunnya luas tanaman kakao
- h. Produktifitas tanaman Perkebunan masih di bawah produktifitas potensialnya
- i. Masih adanya organisme pengganggu pada tanaman perkebunan
- j. Terbasnya pengendalian penyakit hewan
- k. Masih tingginya pemotongan ternak betina produktif
- l. Belum optimalnya pelaksanaan Inseminasi Buatan

4. Kehutanan

Laju deforestasi di Kabupaten Luwu Utara sangat tinggi, selama kurun waktu 2009-2014, kerusakan kawasan hutan mencapai 20.916,66 Ha, di sisi lain lahan-lahan kritis meningkat dengan pesat. Tingginya laju deforestasi kawasan hutan di daerah ini sekaligus menandakan lemahnya pengawas hutan di daerah ini. Disisi lain keterlibatan para pihak dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan sektor kehutanan hanya berkontribusi sekitar 0,29% terhadap PDRB. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan sektor kehutanan adalah sebagai berikut

- a. Besarnya laju deforestasi dan degradasi hutan
- b. Meningkatnya lahan kritis
- c. Belum optimalnya produksi dan pemasaran produksi hutan non kayu
- d. Lemahnya pengawasan hutan

5. Energi dan sumber daya mineral

Kegiatan pertambangan tanpa izin di daerah ini terus meningkat, yang diindikasikan oleh luas pertambangan tanpa izin ini semakin meluas, terutama di wilayah Kecamatan Rampi, Seko, Rongkong, Sabbang, Baebunta, Masamba, Bone-bone dan Kecamatan Mappedeceng. Tingginya kegiatan penambangan tanpa izin ini terkait kurangnya pemahaman masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada serta proses perizinan pertambangan yang rumit. Kontribusi sektor pertambangan dan galian di daerah ini pada tahun 2014 sekitar 1,52% terhadap PDRB. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan sektor Energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut

- a. Meningkatnya pertambangan tanpa izin (PETI)
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pertambangan secara benar



- c. Rendahnya kepatuhan penambang terhadap peraturan pertambangan
- d. Belum terlaksananya pengawasan operasional pertambangan yang baik.
- e. Proses perizinan pertambangan berbelit-belit

6. Perdagangan

Kinerja pertumbuhan nilai tambah sektor perdagangan relatif rendah. Pada tahun 2014 pertumbuhan nilai tambah sektor ini hanya sebesar 8,28% lebih rendah dari pertumbuhan PDRB Luwu Utara. Akan tetapi sektor ini berkontribusi cukup besar dalam PDRB, pada tahun 2014 sektor perdagangan berkontribusi sekitar 10,81% terhadap PDRB Luwu Utara dan merupakan kontributor terbesar ketiga setelah pertanian dan konstruksi.

- a. Belum optimalnya peran sektor perdagangan terhadap peningkatan PDRB Luwu Utara
- b. Masih terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
- c. Belum optimalnya penataan pedagang kaki lima dan usaha informal lainnya
- d. Masih rendahnya tingkat keterampilan dan kapasitas pengelolaan usaha
- e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan

7. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2014 sebesar 4,16 persen, dengan tingkat pertumbuhan sekitar 8,23 persen per tahun, yang berarti sedikit lebih rendah dari pertumbuhan PDRB Luwu Utara. Jenis industri pengolahan yang ada di daerah ini umumnya dalam bentuk industri kecil yang berorientasi memenuhi kebutuhan dalam wilayah, seperti industri tahu, tempe, industri batu bata. Perkembangan industri pengolahan yang didukung oleh potensi utama wilayah belum banyak berkembang, seperti halnya industri pengolahan kakao dan lainnya.

- a. Jumlah dan nilai investasi sektor industri pengolahan masih terbatas
- b. Promosi penanaman modal untuk sektor industri masih rendah

8. Transmigrasi.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu Utara merupakan daerah ex-transmigrasi yang saat ini sudah menjadi desa definitif. Pengembangan kawasan transmigrasi di daerah ini terus dikembangkan, namun masih



menghadapi beberapa persoalan seperti adanya lahan-lahan UPT yang tumpang tindih serta kerumitan penerbitan HPL. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi sektor transmigrasi adalah sebagai berikut.

- a. Masih adanya UPT yang belum terbit Izin HPL
- b. Masih adanya lahan UPT yang tumpang tindih

4.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dulu isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional	Dinamika Regional (Sulawesi Selatan)	Lokal (RPJPD Luwu Utara)
<p>I. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakhiri kemiskinan di semua tempat 2. Menghapuskan kelaparan 3. Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia 4. Memastikan pendidikan berkualitas 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak 	<p>Prioritas Nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Iklim Investasi 2. Peningkatan Ekspor Non Migas 3. Reformasi Agraria 4. Reformasi Fiskal 5. Revolusi Mental 6. Pelayanan Pendidikan 7. Pelayanan Kesehatan 8. Perumahan Dan Permukiman 	<p>Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kehidupan religius masyarakat dan kerukunan intra dan antara umat beragama 2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi 3. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial 4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam 5. Meningkatkan akses dan 	<p>Isu-isu strategis RPJPD Kab. Luwu Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 2. Pengangguran dan Penduduk Miskin 3. Pelayanan Infrastruktur Wilayah 4. Bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan 5. Mitigasi bencana alam 6. Pemerataan



Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional	Dinamika Regional (Sulawesi Selatan)	Lokal (RPJPD Luwu Utara)
perempuan 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang 7. Energi yang bisa diperbarui dan terjangkau 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur yang baik 10. Mengurangi Kesenjangan 11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas 12. Penggunaan sumber-sumber daya yang bertanggung jawab 13. Aksi Terhadap Iklim 14. Lautan yang berkesinambungan 15. Penggunaan tanah yang berkesinambungan 16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian 17. Kemitraan untuk pengembangan yang berkesinambungan II. Penyatuan Ekonomi ASEAN (ASEAN <i>Economic Community</i>)	9. Kedaulatan Energi 10. Kelautan Dan Kemaritiman 11. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan 12. Daerah Perbatasan 13. Daerah Tertinggal 14. Desa Dan Kawasan Perdesaan 15. Perkotaan 16. Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban 17. Kepastian Dan Penegakan Hukum 18. Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi 19. Reformasi Birokrasi 20. Percepatan Pertumbuhan Industri Dan Kawasan Ekonomi (Kek) 21. Pembangunan Pariwisata	kualitas layanan pendidikan 6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan 7. Meningkatkan akses dan kualitas layanan infrastruktur 8. Meningkatkan daya saing daerah 9. Meningkatkan kerjasama antar kabupaten/kota serta sinergitas nasional dan global 10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum 11. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak 12. Memelihara ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat 13. Memelihara harmoni sosial dan kesatuan bangsa 14. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih 15. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa	pembangunan 7. Ketahanan pangan 8. Kepedulian sosial sektor industri (<i>Corporate Social Responsibility</i>) 9. Pengendalian pemanfaatan ruang 10. Posisi wilayah Kabupaten Luwu Utara yang Strategis 11. Ketersediaan Sumberdaya Alam yang Potensial 12. Jumlah penduduk Luwu Utara yang Religius 13. Stabilitas keamanan yang kondusif

4.2.1. Isu Strategis Global

4.2.1.1. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda dunia yang telah diratifikasi oleh 193 negara termasuk Indonesia pada tahun 2015. Agenda SDGs memiliki 17 tujuan yang pencapaiannya hingga 2030. Agenda ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan paradigma pembangunan global yang berkelanjutan, pembangunan yang memberdayakan dan membebaskan, lebih fokus pada pemenuhan hak-hak dan martabat manusia, keadilan dan kesetaraan gender, keberlanjutan bumi, keadilan ekologis antar generasi, mengharmoniskan kemajuan antara teknologi, ekonomi, sosial, dan alam, serta kemitraan antar pemangku kepentingan pembangunan di semua tingkatan.

Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang saling terintegrasi. Tujuan SDGs tidak berbeda jauh dari



Millennium Development Goals (MDGs) yang di antaranya mengakhiri kemiskinan, menjamin kehidupan sehat, mempromosikan pendidikan dan memerangi perubahan iklim. Terdapat beberapa alasan sehingga tujuan SDG's dan target-targetnya perlu di masukkan dalam proses perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Utara : (1) Pemerintah RI telah meratifikasi dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan global ini; (2) Tujuan SDG's memiliki relevansi dengan Nawacita dan agenda prioritas pembangunan nasional; (3) Tujuan SDG's juga memiliki relevansi dengan permasalahan di Kabupaten Luwu Utara; (4) Mengintegrasikan tujuan SDG's kedalam perencanaan pembangunan daerah akan memberikan peluang bagi daerah untuk memperoleh mobilisasi sumberdaya global nasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang bersesuaian dengan tujuan SDG's. Adapun tujuan SDG's adalah sebagai berikut.

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara.



11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Utara serta agenda-agenda prioritas dari Bupati Terpilih Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2021, maka 17 tujuan SDG's keseluruhannya memiliki relevansi dengan agenda pembangunan daerah ini. Selain itu Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berkomitmen pada pencapaian sasaran pembangunan yang lebih fokus pada penurunan kemiskinan dan pemerataan, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan yang bermutu, penanganan lingkungan, pemenuhan rumah layak huni dan bersanitasi baik, kesetaraan gender, pemenuhan air bersih dan energi, penguatan kapasitas pelaku ekonomi serta peningkatan daya saing investasi, pengembangan kemitraan antar pemangku kepentingan.

4.2.1.2. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*) merupakan kerjasama pengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Tujuan yang ingin dicapai MEA adalah adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas. Terdapat empat hal yang menjadi fokus MEA yakni *Pertama*, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. *Kedua*, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; *Ketiga*, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). *Keempat*, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global, dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota.

Berdasarkan tujuan pembentukannya, maka berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menciptakan tiga jenis integrasi pasar di ASEAN, yakni (1) integrasi pasar barang dan jasa (perdagangan bebas), (2) integrasi pasar tenaga kerja, dan (3) integrasi pasar modal. Peluang dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Luwu Utara dari penyatuan ketiga pasar tersebut diuraikan sebagai berikut.

1). Integrasi Pasar Barang dan Jasa ASEAN

Penyatuan pasar barang dan jasa di kawasan negara-negara Asean akan berdampak pada meningkatnya mobilitas barang dan jasa tanpa hambatan antar negara-negara Asean. Integrasi perdagangan ini akan memberikan peluang bagi peningkatan ekspor bagi produk-produk unggulan Kabupaten Luwu Utara, terutama komoditi pertanian yang memiliki daya saing ekspor. Namun integrasi pasar ini juga memberikan tantangan berupa peningkatan daya saing yang sesuai standar kualitas ASEAN, selain itu untuk

menunjang daya saing daerah, maka optimalisasi promosi dagdalam memenuhi sarana dan prasarana penunjang diperlukan guna menciptakan sistem pemasaran yang efisien. Tantangan lainnya adalah perlunya upaya promosi dagang untuk meningkatkan citra komoditas unggulan daerah dipasar ASEAN

2). Integrasi Pasar Tenaga Kerja Terdidik ASEAN

Integrasi pasar tenaga kerja ASEAN akan memberikan implikasi terhadap pasar tenaga kerja di daerah. Dengan penyatuan pasar tenaga kerja ini, maka mobilitas tenaga kerja terdidik antar negara-negara Asean akan semakin meningkat. Berbagai jenis lapangan pekerjaan di daerah nantiya dapat diisi oleh para tenaga-tenaga terdidik Asean, sebaliknya tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi daerah memiliki peluang untuk bisa berkompetisi memperebutkan pasar kerja di berbagai negara Asean. Tantangan yang dihadapi daerah dalam menghadapi penyatuan pasar tenaga kerja ini adalah perlunya menciptakan tenaga-tenaga terdidik, terampil dan terlatih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Asean.

3) Integrasi Pasar Modal ASEAN

Penyatuan pasar modal ASEAN akan memberikan peluang dan tantangan pembangunan daerah di Luwu Utara. Berlakunya penyatuan pasar modal ini memberi peluang meningkatnya kegiatan penanaman modal Asing (PMA) di Luwu Utara dari negara-negara Asean. Namun dengan kondisi ini para pengusaha (investor) lokal akan menghadapi tantangan kompetisi mengingat para pengusaha di beberapa Asean, khususnya di negara kaya seperti Singapore dan Malaysia disokong oleh sumber modal dengan bunga rendah. Tantangan lainnya adalah daerah harus berupaya menciptakan iklim investasi yang semakin baik, gencar melakukan promosi potensi penanaman modal, penyederhaanaan perizinan penanaman modal dan pemenuhan prasarana penunjang investasi.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu nasional yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam merumuskan agenda pembangunannya adalah selain terkait dengan agenda Nawa Cita yang digagas oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, juga terkait dengan agenda-agenda yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari 22 program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Iklim Investasi
2. Peningkatan Ekspor Non Migas
3. Reformasi Agraria
4. Reformasi Fiskal
5. Revolusi Mental
6. Pelayanan Pendidikan
7. Pelayanan Kesehatan
8. Perumahan Dan Permukiman
9. Kedaulatan Pangan
10. Kedaulatan Energi
11. Kelautan Dan Kemaritiman
12. Pemerataan Antar kelompok Pendapatan
13. Daerah Perbatasan
14. Daerah Tertinggal
15. Desa Dan Kawasan Perdesaan
16. Perkotaan
17. Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban
18. Kepastian Dan Penegakan Hukum
19. Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi
20. Reformasi Birokrasi
21. Percepatan Pertumbuhan Industri Dan Kawasan Ekonomi (KEK)
22. Pembangunan Pariwisata

Berdasarkan analisa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara yang telah diuraikan serta penjabaran visi dan misi Bupati Luwu Utara terpilih periode 2016-2021, maka terdapat beberapa isu strategis terkait dengan prioritas nasional yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangun daerah di Luwu Utara adalah sebagai berikut



1) Peningkatan Iklim Investasi

Prioritas nasional mengenai iklim investasi memiliki relevansi dengan pembangunan Kabupaten Luwu Utara mengingat daerah ini berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan iklim investasi sesuai dengan misi 4 Bupati Luwu Utara terpilih periode 2016-2021 "*Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata*". Isu strategis yang terkait prioritas nasional ini adalah:

- a. Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan pusat dan daerah
- b. Pengembangan layanan perizinan terpadu
- c. Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi
- d. Perencanaan investasi sektor strategis
- e. Peningkatan kemudahan berusaha

2) Peningkatan Ekspor Non-Migas

Prioritas nasional mengenai peningkatan ekspor Non-Migas memiliki relevansi dengan pembangunan Kabupaten Luwu Utara mengingat daerah ini memiliki potensi komoditi ekspor, terutama komoditi pertanian seperti komoditi kelapa sawit, Kakao, kopi dan lainnya. Isu strategis yang terkait prioritas nasional ini adalah:

- a. Peningkatan realisasi investasi berorientasi ekspor
- b. Peningkatan ekspor produk KUMKM
- c. Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor
- d. Penguatan market intelligence, promosi dan asistensi ekspor

3) Reformasi Agraria

Berbagai isu terkait dengan prioritas nasional mengenai "reformasi agraria" relevan dengan pembangunan Kabupaten Luwu Utara mengingat luas wilayahnya terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, selain itu persoalan pertanahan di daerah ini masih besar seperti rendahnya lahan bersertifikat, alih fungsi kawasan hutan serta keberadaan tanah adat. Isu strategis yang terkait prioritas nasional ini adalah:

- a. Identifikasi dan penyiapan tanah objek reformasi agraria (TORA), terutama fokus pada isu-isu berikut

- Identifikasi dan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T)
 - Identifikasi HGU yang habis masa berlakunya dan identifikasi tanah terlantar
- b. Kepastian hukum hak atas tanah dengan fokus pada
- Peningkatan cakupan bidang tanah bersertifikat
 - Publikasi tata batas kawasan hutan
 - Sosialisasi peraturan terkait tanah adat/ulayat

4) Revolusi Mental

Berbagai isu yang terkait dengan prioritas nasional “revolusi Mental” relevan dengan permasalahan daerah serta sejalan dengan visi dan misi Bupati Luwu Utara terpilih periode 2016-2021 sehingga perlu dipertimbangkan kedalam agenda pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara. Dalam prioritas nasional revolusi mental setidaknya terdapat 4 isu yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah Luwu Utara masing-masing sebagai berikut:

- a. Program reformasi birokrasi pemerintahan dengan fokus pada berupa
- Penyederhanaan sistem perizinan,
 - Promosi layanan elektronik menuju E-budgeting, E-reporting dan Complaint Centre;
- b. Program kemandirian ekonomi dan daya saing daerah, yang difokuskan pada:
- Penguatan etos kerja dan jiwa kewirausahaan
 - Internalisasi nilai – nilai dan prinsip persaingan usaha yang sehat;
- c. Peneguhan jati diri dan karakter bangsa dengan fokus pada hal
- Pendidikan berbasis karakter,
 - Pendidikan agama yang mengajarkan keragaman dan toleransi, serta
 - Apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
- d. Program daya rekat sosial dalam kemajemukan dengan fokus pada kegiatan
- toleransi dan hidup rukun,
 - Peranan lembaga Agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai pekerti



- Gotong royong, kesukarelawan dan solidaritas.

5) Pelayanan Pendidikan

Dalam prioritas nasional untuk pelayanan pendidikan, isu-isu strategis yang relevan dan patut di pertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Utara adalah:

- a. Penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata dengan fokus pada kegiatan peningkatan profesionalisme guru serta distribusi dan pemerataan guru;
- b. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan yang difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM sekolah dan assessment mutu satuan pendidikan;
- c. Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif dengan fokus pada bantuan afirmasi pendidikan untuk penduduk tidak mampu dan bantuan peningkatan prestasi;
- d. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan SPM sarana-prasarana pendidikan;
- e. Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter dengan fokus kegiatan peningkatan kualitas pendidikan agama dan kewarganegaraan dan penciptaan lingkungan pendidikan berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan
- f. Peningkatan relevansi pendidikan dengan fokus pada pendidikan vokasi, pendidikan kewirausahaan dan penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.

6) Pelayanan Kesehatan

Berbagai isu strategis yang terkait prioritas nasional untuk “pelayanan kesehatan” yang relevan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Utara adalah:

- a. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dengan kegiatan utama berupa perluasan kepesertaan dalam sistem jaminan sosial kesehatan (BPJS kesehatan), penyediaan, distribusi, dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan; penyediaan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan

yang berkualitas serta penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan;

- b. Penguatan promotif dan preventif kesehatan dengan “Gerakan Masyarakat Sehat” dengan kegiatan utama berupa Kampanye Hidup Sehat, Aktivitas Fisik dan Konektivitas AntarModa Transportasi, Konsumsi Pangan Sehat, Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini, Lingkungan Sehat
- c. Percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan utama berupa Ketersediaan pangan beragam, akses ekonomi, dan pemanfaatan pangan, Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini, Peningkatan sanitasi dan akses air bersih dan Pelayanan kesehatan dan keluarga berencana
- d. Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, terutama isu Peningkatan pelayanan KB, Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB, Pembinaan Remaja dan Pembangunan Keluarga

7) Perumahan dan Pemukiman

Untuk prioritas nasional perumahan dan pemukiman, isu strategis yang relevan dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara adalah :

- a. fasilitasi penyediaan rumah layak huni baru,
- b. peningkatan kualitas hunian dan permukiman kumuh,
- c. penyediaan akses air minum dan sanitasi serta
- d. peningkatan ketersediaan air baku.

8) Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan menjadi isu strategis bagi Kabupaten Luwu Utara karena daerah ini merupakan salah satu daerah penyumbang surplus produksi beras di Sulawesi Selatan. Isu strategis yang terkait dengan prioritas nasional “kedaulatan pangan” terdiri dari

- a. peningkatan produksi padi dan pangan lain dengan fokus pada pencetakan sawah baru, rehabilitasi irigasi dan pembangunan embung; Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa Mandiri Benih, Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian



- b. peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; yang difokuskan pada Peningkatan ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi, Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) dan Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi
- c. penanganan gangguan terhadap produksi pangan dengan fokus pada penanganan dampak organisme pengganggu tanaman (OPT) serta pengembangan budidaya padi yang adaptif terhadap kekucuran air dan hama.

9) Kemaritiman dan Kelautan

Dalam prioritas nasional untuk pelayanan kemaritiman dan kelautan, memiliki relevansi dengan Luwu Utara, mengingat daerah ini memiliki wilayah-wilayah pesisir. isu-isu strategis yang terkait prioritas nasional mengenai pelayanan kemaritiman dan kelautan yang patut di pertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Utara adalah;

- a. pengembangan konektivitas laut dengan fokus pada pengembangan pelabuhan umum, Iklim Investasi dan Penguatan SDM Perkapalan
- b. pengembangan industri perikanan dan hasil laut,
- c. Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut dengan fokus pada isu pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan, Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan serta pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan
- d. Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari dengan fokus pada isu strategis mengenai Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir, konservasi pesisir dan laut, rehabilitasi pesisir dan sumberdaya perairan, serta
- e. perbaikan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, dengan fokus pada isu. Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur sentra nelayan, Peningkatan akses terhadap bantuan/stimulan, akses modal dan bantuan sarana produksi, Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan dan Sistem informasi kelautan dan perikanan

10) Pemerataan antar kelompok pendapatan

Prioritas nasional pemerataan antar kelompok pendapatan memiliki relevansi di Luwu Utara mengingat daerah sebagai eks-transmigrasi sehingga karakteristik penduduknya sangat heterogen baik secara suku maupun agama. Kondisi ini sangat mudah menyulut konflik sosial apabila persoalan pemerataan antar kelompok tidak tertangani. Isu strategis yang terkait dengan pemerataan antar kelompok pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. penciptaan lapangan kerja, terutama pada isu iklim ketenagakerjaan, keahlian pekerja, layanan informasi pasar kerja, iklim investasi
- b. perkuatan basis perekonomian perdesaan terutama pada lembaga keuangan berbasis komunitas, penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan ekonomi, pendampingan Masyarakat Desa
- c. Pengembangan kewirausahaan

11) Desa dan Kawasan Perdesaan

Prioritas nasional desa dan perdesaan memiliki relevansi yang kuat dengan isu pembangunan Luwu Utara, mengingat daerah ini memiliki desa-desa terpencil serta kawasan-kawasan pemukiman transmigrasi yang infrastruktur desanya masih terbatas. Isu strategis yang terkait dengan prioritas nasional ini terdiri dari :

- a. Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk permukiman transmigrasi
- b. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa,
- c. pengembangan ekonomi kawasan termasuk transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota,
- d. pengelolaan sumberdaya alam desa,
- e. Penguatan pemerintahan desa
- f. Pembangunan SDM, keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi
- g. Pengawasan implementasi UU Desa.

12) Pengembangan Perkotaan

Prioritas nasional pengembangan perkotaan memiliki relevansi pembangunan Kabupaten Luwu Utara, khususnya pada pengembangan ibu



kota kabupaten dan ibu kota kecamatan. Isu strategis yang terkait dengan prioritas nasional ini terutama fokus pada :

- a. Mewujudkan sistem perkotaan dengan fokus pada peningkatan konektivitas
- b. Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan layak huni, serta tertata baik, dengan fokus pada
 - tersedianya sarana permukiman
 - Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan
 - Tersedianya sistem transportasi publik
 - Penanggulangan kemiskinan perkotaan

13) Reformasi Birokrasi

Prioritas nasional tentang reformasi birokrasi relevan dengan pembangunan Kabupaten Luwu Utara, mengingat pemerintahan Luwu Utara saat ini berkomitmen untuk mendorong reformasi birokrasi sesuai dengan misi “Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya”. Isu yang menjadi fokus pada prioritas ini adalah :

- a. Peningkatan disiplin serta pengawasan kinerja dan administrasi keuangan, terutama pada penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi dan peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja
- b. Pelaksanaan road-map reformasi birokrasi,
- c. Penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perizinan.

14) Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

Prioritas nasional tentang percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi relevan dengan pembangunan Kabupaten Luwu Utara, mengingat pemerintahan Luwu Utara saat ini berkomitmen untuk mendorong pengembangan produktivitas usaha, dan pengembangan industri yang berdaya saing. Isu yang menjadi fokus pada prioritas ini adalah :

- a. Peningkatan populasi, dengan fokus pada
 - Fasilitasi tumbuhnya industri baru
 - Promosi investasi
 - Kemudahan memulai usaha



- Pertumbuhan IKM
- Penumbuhan industri kreatif
- b. Produktivitas dan daya saing industri dengan fokus pada
 - Pengembangan Industri Hijau
 - Fasilitasi dan Insentif
 - Peningkatan Kemampuan Desain Produk
 - SDM yang Kompetitif
- c. Hubungan Industrial yang bersahabat, khususnya implementasi norma kesehatan dan keselamatan kerja
- d. Ketersediaan dan kualitas bahan baku industri dengan fokus pada
 - Jaminan ketersediaan dan kualitas bahan baku industri hasil hutan
 - Jaminan ketersediaan dan kualitas bahan baku industri hasil pertanian
- e. Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif

15) Pembangunan Pariwisata

Prioritas nasional pembangunan pariwisata memiliki isu-isu strategis yang sangat relevan dengan Kabupaten Luwu Utara mengingat daerah ini memiliki potensi wisata yang banyak, baik berupa objek wisata alam seperti air terjun, permandian air panas maupun destinasi wisata budaya dan religius, seperti objek wisata makam datuk Patimang, berbagai situs dan benda budaya juga terdapat di daerah ini. Isu strategis yang terkait dengan prioritas nasional ini adalah

- a. Promosi wisata dengan fokus pada promosi produk wisata, peningkatan citra pariwisata dan promosi melalui media sosial, elektronik dan cetak
- b. Pengembangan destinasi wisata dengan fokus pada penyiapan daya tarik wisata serta pembangunan prasarana dan penguatan kelembagaan destinasi.

4.2.3. Isu Strategis Regional Sulawesi Selatan

Isu regional Sulawesi Selatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam merumuskan agenda pembangunannya adalah terkait dengan 11 program/kegiatan prioritas dalam visi-misi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018. Adapun program/kegiatan prioritas tersebut adalah:



1. Gratis SPP bagi mahasiswa baru baik PTN maupun PTS
2. Gratis Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan
3. Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil
4. Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa
5. Membangun industri baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh Kab/Kota
6. Membuka 500 ribu lapangan kerja baru
7. Gratis Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin
8. Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA
9. Melanjutkan kesehatan gratis
10. Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan melanjutkan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3
11. Gratis peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama

Dari sebelas program prioritas pemerintah Sulawsi Selatan terdapat beberapa program yang memiliki relevansi erat dengan kondisi serta arahan visi misi Bupati Terpilih Kabupaten Luwu Utara periode 2016-2021, masing-masing adalah sebagai berikut.

1. Bantuan bibit untuk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan bibit tanaman hutan
2. Pengembangan Usaha Mikro Kecil
3. Pengembangan wirausaha pedesaan
4. Membangun industri daerah
5. Bantuan peningkatan kualitas rumah rakyat miskin
6. Bantuan biaya pendidikan
7. Bantuan biaya kesehatan

4.2.4. Isu Strategis Daerah Kab. Luwu Utara

Menentukan skala prioritas terhadap isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 didasarkan pada hasil identifikasi permasalahan daerah yang dirinci menurut urusan, identifikasi isu spesifik daerah yang tidak termuat dalam indikator kinerja pada permasalahan daerah seperti isu masyarakat adat dan isu spiritual-keagamaan, serta hasil identifikasi berbagai isu eksternal, baik yang berasal dari isu global, isu nasional maupun dari isu regional provinsi Sulawesi Selatan yang relevan dengan pembangunan Kabupaten Luwu Utara. Kriteria yang digunakan dalam menyusun prioritas didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan visi-misi kepala daerah, tingkat kompleksitas dan kepentingan masalah, tingkat kemendesakan masalah untuk diatasi, dan kriteria lainnya. Adapun isu strategis prioritas Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut.

- 1) Akses dan kualitas layanan pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat.
- 2) Akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat.
- 3) Kualitas permukiman serta pemenuhan rumah layak huni.
- 4) Pemenuhan kebutuhan rumah tangga terhadap sarana dan prasarana energi dan air bersih.
- 5) Kapasitas infrastruktur perhubungan wilayah untuk mendukung interkoneksi daerah dan kelancaran perdagangan barang dan jasa.
- 6) Kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat baik antar lapisan maupun antar sub-wilayah.
- 7) Tantangan peningkatan produksi dan keberlanjutan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan serta agribisnis dan agroindustri dalam mendukung kedaulatan pangan.
- 8) Kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah serta lembaga ekonomi pedesaan.
- 9) Kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh.
- 10) Daya saing investasi serta daya tarik dan daya saing pariwisata.
- 11) Perlindungan sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta perhatian terhadap perubahan iklim
- 12) Daya saing tenaga kerja dan pengembangan lapangan pekerjaan



- 13) Ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat serta peningkatan perlindungan masyarakat dari kerentanan bencana.
- 14) Pembinaan pemuda dan olahraga.
- 15) Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
- 16) Revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya.
- 17) Peran dan partisipasi lembaga/komunitas adat dalam pembangunan.
- 18) Reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 19) Penguatan nilai-nilai keagamaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

4.2.5. Isu Strategis yang Berkaitan dengan KLHS dan RTRW

Selain isu global, isu strategis nasional, isu strategis regional Sulawesi Selatan, isu strategis daerah, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program yang akan dilaksanakan, seperti yang telah diamahkan oleh Permendagri No. 67 Tahun 2012 tentang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Pada proses kajian KLHS tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif dengan:

1. Memperhatikan RTRWP dan RTRWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap pelaksanaan pembangunan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL/RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku.
2. Pada sektor pertanian, penerapan pertanian ramah lingkungan antara lain dengan pemakaian pupuk berimbang, pemanfaatan pupuk organik, pemakaian benih rendah emisi, dan pengolahan lahan tanpa bakar serta memperhatikan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan dalam setiap kegiatan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan secara terintegrasi dalam masing-masing program atau dengan membuat kegiatan berupa Sosialisasi dan Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan. Disamping itu disarankan pula dengan menerapkan pertanian dengan menggunakan sistem SRI Sistem og Rice Intensification (SRI) yaitu pengembangan padi dengan air berimbang serta mengembangkan pengelolaan sistem irigasi yang partisipatif.

3. Pada sektor peternakan, pengintegrasian program dengan usaha memberikan akses terhadap sistem pengkandangan yang layak dan sesuai dengan kaidah lingkungan harus dilakukan. Agar hasil ternak lebih bermanfaat maka direkomendasikan untuk mempertahankan mangrove yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem wilayah pesisir.
4. Dalam kaitannya dengan isu kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya, maka direkomendasikan untuk mempertahankan mangrove yang ada sekaligus mengembangkannya sebagai usaha perlindungan dan pemulihan ekosistem wilayah pesisir.
5. Hal lain yang sangat penting adalah pemantapan moral dan akhlak masyarakat dalam menjamin keseimbangan pembangunan.

Disamping berbagai pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan penyelarasan dengan resiko dampak lingkungan, penyusunan program pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek pengembangan kewilayahan dalam bentuk perencanaan kegiatan sosial ekonomi, pusat-pusat pelayanan, infrastruktur serta perumahan rakyat yang akan saling mendukung dan memperkuat wilayah satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah diupayakan untuk dapat mengisi, mengembangkan dan memelihara ruang beserta sumber daya yang ada didalamnya, sehingga pencapaian target RTRW dapat didukung secara nyata oleh RPJMD, dengan memperhatikan arahan struktur ruang dan pola ruang serta program pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang relevan dengan Kabupaten Luwu Utara pada periode berkenaan dengan RPJMD Luwu Utara 2016-2021. Untuk mencapai hal tersebut selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap rencana tata ruang sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RTRW Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009

RPJMD Kabupaten Luwu Utara memperhatikan arahan struktur ruang dan pola ruang serta program pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang relevan dengan Kabupaten Luwu Utara pada periode berkenaan dengan RPJMD Luwu Utara 2016-2021. Dalam RTRW Propinsi Sulawesi Selatan terdapat Kawasan Strategis Propinsi (KSP) di wilayah Kab. Luwu Utara berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :

- a. kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya beras dan jagung tersebar di semua kecamatan di kabupaten.
- b. kawasan budidaya pengembangan alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi robusta, jambu mete, di kabupaten terletak di Kecamatan Sukamaju, Bone-bone, Sabbang, Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Malangke, Malangke Barat, Seko, Limbong, dan Rampi.
- c. kawasan pengembangan budidaya rumput laut meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak di kabupaten terdapat di Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, dan Kecamatan Bone-Bone.

Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan padi dan lumbung pangan jagung nasional di Sulawesi-Selatan meliputi:

- a. Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan padi dan jagung yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional; dan
- b. Pemeliharaan kawasan peruntukkan pertanian pangan berkelanjutan.
- c. Kebijakan untuk mewujudkan pusat perkebunan kakao, kelapa sawit, kopi robusta berbasis bisnis dan pengembangan budidaya rumput laut di Kab. Luwu Utara

2. RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RTRW Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011

RPJMD Kabupaten Luwu Utara memperhatikan struktur dan pola penataan ruang dalam RTRW sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah. Poin utama yang menjadi perhatian adalah kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, dan penetapan kawasan strategis. Selain itu juga diperhatikan arahan program pemanfaatan ruang.

Perkembangan wilayah yang sedemikian pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari segala sektor yang ada secara sinergis, berkesinambungan dan prolingkungan. Perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan-tekanan eksternalitas maupun internal yang mempengaruhi terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Luwu Utara ke arah yang semakin terkendali.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Utara meliputi :

- a. penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten;
- c. perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup;
- e. perwujudan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
- f. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- g. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional;
- h. pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- i. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara.

3. RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RTRW Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011

RPJMD Kabupaten Luwu Utara memperhatikan struktur dan pola penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah perbatasan dengan Kab. Luwu. Poin utama yang menjadi perhatian adalah kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah dalam RTRW Kabupaten Luwu yang menetapkan Kec. Walenrang sebagai Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kab. Luwu Utara menjadi Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Dalam RTRW Kab. Luwu, Kec. Walenrang juga ditetapkan sebagai salah satu pusat kawasan industri menengah, kawasan peruntukan pertambangan logam & batubara, Kawasan Pengembangan Agropolitan, Kawasan pengembangan budidaya perkebunan kelapa sawit dan kawasan rawan tanah longsor & banjir. Penetapan struktur dan pola penataan ruang tersebut dapat menjadi potensi dan hambatan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kab. Luwu Utara, olehnya itu kebijakan dan strategi perencanaan dalam RPJMD Kab. Luwu Utara mempertimbangkan struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara.

4. RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RTRW Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012

RPJMD Kabupaten Luwu Utara memperhatikan struktur dan pola penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah perbatasan dengan Kab. Toraja Utara. Poin utama yang menjadi perhatian adalah kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara terhadap Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kab. Luwu Utara meliputi Kec. Sa'dan, Kec. Baruppu dan Kec. Sesean.

Dalam RTRW Kab. Toraja Utara, Kec. Sa'dan merupakan kawasan peruntukan pertambangan mineral logam biji besi, emas & tembaga. Ketiga Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kec. Seko & Kec. Rongkong tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan perkebunan komoditas kopi arabika, Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi dan kerbau serta ditetapkan sebagai kawasan rawan tanah longsor. Penetapan struktur dan pola penataan ruang tersebut dapat menjadi potensi dan hambatan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kab. Luwu Utara, olehnya itu kebijakan dan strategi perencanaan dalam RPJMD Kab. Luwu Utara mempertimbangkan struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Toraja Utara.

5. RPJMD Kabupaten Luwu Utara dengan RTRW Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011

RPJMD Kabupaten Luwu Utara memperhatikan struktur dan pola penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah perbatasan dengan Kab. Luwu Timur. Poin utama yang menjadi perhatian adalah kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur yang menetapkan Kec. Burau sebagai Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kab. Luwu Utara menjadi Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Dalam RTRW Kab. Luwu Timur, Kec. Burau merupakan salah satu kawasan peruntukan pertambangan emas. Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kec. Tanalili tersebut juga ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan potensi padi sawah dan kawasan minapolitan dengan potensi



rumput laut, bandeng dan udang, Kawasan peruntukan wisata bahari, pantai & wisata alam serta ditetapkan sebagai kawasan rawan banjir. Penetapan struktur dan pola penataan ruang tersebut dapat menjadi potensi dan hambatan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kab. Luwu Utara, olehnya itu kebijakan dan strategi perencanaan dalam RPJMD Kab. Luwu Utara mempertimbangkan struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan menyatupadukan langkah seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Luwu Utara dalam berkontribusi kepada pembangunan lima tahun kedepan.

Dengan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Luwu Utara tahun 2005-2025 tahapan ketiga, memperhatikan 11 prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, dan memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJMNasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 adalah:

“Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni “Luwu Utara yang Religius”, “Pembangunan yang Berkualitas dan Merata”, dan “Berlandaskan Kearifan Lokal”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) **“Luwu Utara yang religius”**, dapat dimaknakan sebagai masyarakat yang sangat memegang teguh, menjunjung tinggi, tunduk dan patuh pada nilai-nilai agama. Dengan terwujudnya masyarakat yang religius, diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.
- (2) **“Pembangunan berkualitas dan merata”**, dapat diartikan sebagai tekad yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik dari waktu ke waktu, pelayanan publik yang sanggup menjangkau seluruh warga, dan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kecamatan.



- (3) **"Berlandaskan kearifan lokal"**, lebih dimaksudkan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dan kearifan yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten Luwu Utara.

5.2. Misi

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan fungsional dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut.

(1) Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya

Misi ini mengaitkan tiga pilar Kabupaten Luwu Utara masyarakat, pemerintah dan lembaga adat yang akan didorong perubahannya menuju arah yang lebih baik. Upaya perubahan tersebut menuju masyarakat yang lebih religius, tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta komunitas adat dan berdaya. Misi ini mengandung tiga upaya utama yakni mendorong pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat, mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong keberdayaan komunitas adat.

(2) Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni

Misi ini mengaitkan dua masalah utama yang dihadapi masyarakat Kabupaten Luwu Utara yakni derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan masih terbatasnya pemenuhan rumah layak huni serta pemukiman bersanitasi baik. Dengan demikian misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mendorong pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat, mendorong pemenuhan rumah layak huni, serta mendorong kesejahteraan keluarga.

(3) Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya

Misi ini mengaitkan dimensi pendidikan, aktivitas kepemudaan dan revitalisasi kebudayaan sebagai elemen penting bagi kemajuan Kabupaten Luwu Utara. Misi ini mengandung upaya utama dalam hal meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, mengembangkan sistem inovasi daerah dan kreativitas masyarakat, membina kegiatan kepemudaan dan olah raga, serta membina kebudayaan daerah.

(4) Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata

Misi ini mengaitkan tiga aspek dalam kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Luwu Utara yakni mendorong kemandirian dalam mengelola sumberdaya perekonomian di satu sisi dan mengembangkan iklim investasi di sisi lain sambil memprioritaskan pengembangan pariwisata untuk semakin menggairahkan perekonomian tersebut. Misi ini mencakup upaya umum meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, usaha kecil dan menengah, serta jasa dan industri, mengembangkan iklim investasi dan meningkatkan daya tarik pariwisata.

(5) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Misi ini terfokus pada keberlanjutan pembangunan secara ekologis, dimana Kabupaten Luwu Utara memiliki kerentanan yang signifikan dihubungkan dengan masalah lingkungan. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara kualitas lingkungan hidup, mendorong kebersihan dan keindahan lingkungan perkotaan dan perdesaan, serta mengendalikan dampak lingkungan dari berbagai aktivitas pembangunan.

(6) Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah

Misi ini mengaitkan masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat, ketimpangan kemajuan antar wilayah/kecamatan dan jangkauan infrastruktur wilayah. Jangkauan infrastruktur wilayah menjadi persoalan krusial mengingat masih adanya kecamatan yang belum terjangkau kendaraan roda empat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran terbuka, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, perhubungan, dan sumberdaya air.

(7) Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat.

Misi ini menjawab keterpenuhan kondisi prasyarat bagi pelaksanaan pembangunan yakni ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tanpa jaminan keamanan dan ketertiban umum maka pembangunan pada berbagai aspek lain sulit berjalan lancar. Misi ini mencakup upaya umum dalam penanganan gangguan ketertiban umum dan keamanan masyarakat serta pemeliharaan harmoni sosial. Misi ini menjadi penting karena tatanan masyarakat Kabupaten Luwu Utara terdiri dari etnis yang beragam.

Tabel 5.1 Keterkaitan misi dengan pokok visi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya	Luwu Utara yang religious
2.	Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni	Pembangunan berkualitas dan merata
3.	Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya	Pembangunan berkualitas dan merata Berlandaskan kearifan local
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata	Pembangunan berkualitas dan merata
5.	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	Pembangunan berkualitas dan merata
6.	Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	Pembangunan berkualitas dan merata
7.	Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat	Pembangunan berkualitas dan merata

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam RPJMD ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Rumusan tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

No.	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintah-an yang baik, dan komunitas adat yang berdaya	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius 2. Meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan
2.	Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni	3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat 4. Meningkatkan kua-litas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu
3.	Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya	5. Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat 6. Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan 7. Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata	8. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah 9. Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa 10. Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang refresentatif
5	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	11. Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan
6.	Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	12. Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan,

No.	Misi	Tujuan
		dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan
		13. Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke per-kotaan.
7.	Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat	14. Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana

Selanjutnya untuk melihat keselarasan antara visi dan misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kab. Luwu Utara maka dapat dilihat dalam uraian tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3 Penyelarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

RPJMN 2015-2019	RPJMD KAB. LUWU UTARA 2016-2021	RPJMD PROV. SULSEL 2013-2018
VISI	VISI	VISI
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong	Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Berlandaskan Kearifan Lokal	Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018
MISI	MISI	MISI
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia	1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya	1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama
2. Mewujudkan masyarakat yang maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni	2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya	3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan kesejahteraan	4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata	4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas, regional, nasional, dan global



RPJMN 2015-2019	RPJMD KAB. LUWU UTARA 2016-2021	RPJMD PROV. SULSEL 2013-2018
VISI	VISI	VISI
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	5. Meningkatkan kualitas demokratis kepastian hukum
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah	6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, dan kesatuan bangsa
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	7. Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat	7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik

Untuk memastikan konsistensi antara perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dengan perencanaan pembangunan jangka menengah maka perlu dilakukan penyelarasan antara misi dalam RPJPD Kab. Luwu Utara Tahun 2005-2025 dengan misi RPJMD Kab. Luwu Utara Tahun 2016-2021, yang diuraikan dalam tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4 Penyelarasan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

RPJPD KABUPATEN LUWU UTARA 2005-2025	RPJMD KABUPATEN LUWU UTARA 2016-2021
1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)	(2). Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni (3). Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan	(4). Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata
3. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi yang proporsional dan berkelanjutan	(6). Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Demokratis Berlandaskan Hukum.	(7). Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat
	(1). Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya
5. Mewujudkan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat Dengan Mempertimbangkan Kelestarian Lingkungan (Pembangunan Berkelanjutan)	(5). Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup

Sasaran dalam RPJMD ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.5. berikut:

Tabel 5.5. Sasaran, indicator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1. Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius	1. Terimplementasi kannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks persepsi korupsi	39,5	40	45	50	55	60	60	
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			IKM	81,70	82	85	88	90	93	95	
			Predikat SAKIP Kabupaten	CC	CC	CC	B	B	B	B	
			Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)	2,0	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,0	
	2. Meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan	2. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan	Kasus konflik antar umat beragama	0	0	0	0	0	0	0	
			Rasio pemuka agama yang mendapatkan insentif pemerintah	25%	27%	33%	38%	44%	48%	50%	
2. Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni	3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat	3. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan	% Lembaga adat yang dibina	40%	43%	48%	54%	61%	68%	75%	
	4. Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu	4. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat	Angka harapan hidup (thn)	67,40	67,60	67,80	68,00	68,20	68,50	68,70	
			Rasio rumah layak huni (%)	30,27	33,17	35,07	36,97	38,87	40,77	42,70	
			Luas permukiman tidak layak huni/permukiman kumuh (Ha)	39,41	35,30	30,25	25,80	20,73	15,91	10,13	
			Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	78,14	83,67	89,53	95,18	100,00	100,00	100,00	
3. Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan,	5. Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat	6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	Angka harapan lama sekolah (tahun)	7,56	7,60	7,70	7,75	7,85	7,90	8,00	
			Angka Partisipasi Sekolah								
			-SD/MI	108,43	100	100	100	100	100	100	



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
ketahanan budaya			-SMP/MTs	80,47	81,00	82,00	82,75	83,50	84,25	85,00	
			Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	
			Angka kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	
			Angka Kelulusan SMA/SMK/	99,27	100	100	100	100	100	100	
			Angka melanjutkan dari SD ke SMP	110,33	100	100	100	100	100	100	
			Angka melanjutkan dari SMP ke SMA	62,33	66,50	70,75	75,00	79,50	83,75	88,00	
			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	45,82	48,00	50,55	52,50	55,00	57,50	60,00	
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	88.624	90.000	95.000	100.000	110.000	120.000	125.000	
	6. Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan	7. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	% Peningkatan jumlah pemuda berprestasi (%)	10	10	20	25	30	35	35	
			Jumlah cabang olah raga berprestasi	12	12	12	13	13	14	14	
		8. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	88,55	90	92	95	97	99	99	
			Indeks Pemberdayaan Gender	66,90	70	75	80	85	90	90	
	7. Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya	9. Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya	Tingkat pembinaan tradisi dan kesenian daerah (persentase tradisi dan kebudayaan daerah yang dibina)	50	65	70	75	75	80	90	
			Jumlah penyelenggaraan festival budaya	1	1	1	1	1	2	2	
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata	8. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah	10. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	7,63	7,80	8,00	8,20	8,40	8,50	8,60	
			Kontribusi pertanian tanaman pangan, perkebunan,	51,83	51,70	51,65	51,60	51,55	51,50	51,50	



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
			peternakan, dan perikanan terhadap PDRB (%)								
		11. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM	Cakupan bina kelompok pengrajin	21,42%	23,50%	25,50%	27,50%	29,50%	31,50%	33,47%	
			Persentase koperasi aktif	61,02%	62,13%	64,55%	66,83%	67,51%	69,00%	69,60%	
		12. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh	Pertumbuhan industri	44,22%	44,50%	44,70%	44,80%	44,90%	45,00%	45,10%	
		13. Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	9,87%	9,95%	10,21%	10,54%	10,88	10,97	11,00%	
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	8,55%	8,75%	8,75%	8,88%	8,90%	9,12%	9,50%	
	9. Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa.	14. Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA	Jumlah investor PMDN	831	876	905	937	968	979	1.000	
			Jumlah investor PMA	1	1	2	2	3	4	5	
			Jumlah nilai investasi berskala nasional	Rp.218 Milyar	Rp.240 Milyar	Rp.264 Milyar	Rp.291 Milyar	Rp.320 Milyar	Rp.352 Milyar	Rp.387 Milyar	
	10. Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif	15. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata	Kunjungan wisata	24.752	25.123	27.154	30.204	40.255	45.305	50.305	
5. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup	11. Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan	16. Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	33,33%	40,00%	48,00%	56,00%	64,00%	71,00%	75,00%	
			Penegakan hukum lingkungan	0%	2%	4%	6%	8%	9%	10%	
6. Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan	12. Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan	17. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/ pantai, dataran rendah, pegunungan,	% penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional	14,32%	13,55%	12,37%	11,55%	9,50%	8,50%	8,00%	



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
infrastruktur wilayah	pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan	perdesaan dan perkotaan									
		18. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka Pencari kerja yang ditempatkan (%)	2,60 14,17%	2,60 19,75%	2,55 25,20%	2,40 31,44%	2,30 35,99%	2,22 46,71%	2,10 50,00%	
	13. Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke per-kota.	19. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota	Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik, (%)	59,67%	64%	67%	70%	73%	76%	76%	
		20. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa	Jumlah terminal yang difungsikan	1	1	1	2	2	3	3	
		21. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industri	% rumah tinggal mengakses listrik (rasio elektrifikasi)	60,22	62,98%	65,65%	68,85%	69,73%	70,79%	72,00%	
		22. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri	% rumah tangga yang akses air bersih (%)	63,00	73,00	83,00	93,00	100	100	100	
		23. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat	% rumah tangga yang akses telekomunikasi	75%	79%	82%	89%	90%	91%	93%	



Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7. Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat	14. Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana	24. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat	Jumlah konflik sosial	19	18	15	12	10	10	7
		25. Menurunnya jumlah pemakai narkoba	Jumlah pemakai narkoba	99	80	60	40	20	0	0
		26. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana	% korban bencana yang ditangani (%)	75%	78%	81%	85%	89%	93%	95%



BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 7 (tujuh) misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rumusan strategi diarahkan untuk masing-masing sasaran pada setiap misi sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 6.1. Strategi RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi-1 Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya		
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius	1. Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	Aplikasi sistem e-government dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi kepada publik diringi dengan pengembangan system pengaduan dan pelayanan yang cepat dan terpadu
	2. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan	Memelihara situasi kondusif bagi penghayatan dan pengamalan nilai/norma agama secara spiritual dan social serta perbaikan kerukunan dan harmoni social antar umat beragama
2. Meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan	3. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan	Kordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga adat dan civil society dalam mengefektifkan peran lembaga adat bagi penyelenggaraan pembangunan
Misi 2 Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni		
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat	4. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat	Pemenuhan dan pemerataan sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta ketersediaan obat secara proporsional dengan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat



Tujuan	Sasaran	Strategi
4. Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu	5. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik	Pembinaan pada komunitas/ kelompok pemukim tidak tetap pada sebaran lokasi kebun secara proporsional dengan penataan lingkungan dan rumah sehat pada pusat-pusat pemukiman perkotaan dan perdesaan
Misi 3 Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya		
5. Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat	6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	Penguatan akses pelayanan pendidikan dan perpustakaan yang bermutu dan terjangkau secara bersinergi dengan penguasaan iptek dan kompetensi guru serta pengembangan minat baca masyarakat
6. Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan	7. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	Pengembangan kapasitas sarana/ prasarana, pembinaan dan koordinasi kegiatan kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kebudayaan daerah
	8. Meningkatnya pengarus-utamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan	
7. Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya	9. Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya	
Misi 4 Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata		
8. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah	10. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Penguatan kapasitas pelaku ekonomi kerakyatan dalam mengelola sumberdaya ekonomi serta mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dengan berbasis pada akselerasi pusat-pusat pertumbuhan dan kreativitas
	11. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi, UMKM, perdagangan dan jasa	
	12. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh	
	13. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa	
9. Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa.	14. Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA	Harmonisasi regulasi perizinan serta perwujudan kemudahan berusaha dan persaingan usaha yang sehat secara bersinergi dengan perbaikan layanan perizinan terpadu
10. Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif	15. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata	Pengembangan kualitas daya tarik wisata dan mengembangkan destinasi wisata baru berbasis budaya, ekologi dan produk lokal



Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 5 Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup		
11. Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan	16. Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan	Pengembangan kesadaran serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian dan keindahan lingkungan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan kepatuhan kepada hukum lingkungan
Misi 6 Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah		
12. Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan	17. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan, perdesaan dan perkotaan 18. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat	Penguatan koordinasi penanggulangan kemiskinan secara bersinergi dengan pengembangan jalur pemerataan lapangan kerja dan lapangan usaha berbasis data akurat dan karakteristik spasial
13. Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan.	19. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota	Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dan perhubungan pada wilayah pinggiran-tertinggal dan lingkaran kota
	20. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa	
	21. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri	Pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam pemenuhan infrastruktur sumberdaya air dan kemandirian desa
	22. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumber daya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri	
	23. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat	Peningkatan dan penguatan kapasitas sarana telekomunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
Misi 7 Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat		
14. Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana	24. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan terpadu gangguan K3 serta konflik sosial
	25. Menurunnya jumlah pemakai narkoba	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat
	26. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana	Pengembangan sistem terpadu penanganan bencana untuk mewujudkan daerah tangguh bencana



6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, antara lain: memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan mengarahkan pemilihan strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan untuk lebih mengoperasionalkan setiap strategi yang kemudian ditetapkan kebijakan umum tahunan untuk lima tahun periode RPJMD. Penjabaran kebijakan umum tersebut diuraikan dalam Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2. Rumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi-1 Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya			
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religius	1. Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	Aplikasi sistem e-government dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi kepada publik diringi dengan pengembangan sistem pengaduan dan pelayanan yang cepat dan terpadu	Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan
	2. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan	Memelihara situasi kondusif bagi penghayatan dan pengamalan nilai/norma agama secara spiritual dan social serta perbaikan kerukunan dan harmoni social antar umat beragama	Pengembangan mental spiritual dan kerukunan beragama
2. Meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan	3. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan	Kordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga adat dan civil society dalam mengefektifkan peran lembaga adat bagi penyelenggaraan pembangunan	Pengembangan lembaga dan masyarakat adat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni			
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat	4. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat	Pemenuhan dan pemerataan sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta ketersediaan obat secara proporsional dengan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta kualitas pelayanan kesehatan
4. Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu	5. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik	Pembinaan pada komunitas/ kelompok pemukim tidak tetap pada sebaran lokasi kebun secara proporsional dengan penataan lingkungan dan rumah sehat pada pusat-pusat pemukiman perkotaan dan perdesaan.	Pembangunan perumahan dan pemukiman
Misi 3 Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya			
5. Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat	6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	Penguatan akses pelayanan pendidikan dan perpustakaan yang bermutu dan terjangkau secara bersinergi dengan penguasaan iptek dan kompetensi guru serta pengembangan minat baca masyarakat	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
			Pengembangan literasi masyarakat
6. Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan	7. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	Pengembangan kapasitas sarana/ prasarana, pembinaan dan kordinasi kegiatan kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kebudayaan daerah	Pengembangan kompetensi dan ruang kreativitas bagi pemuda
	8. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan		Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
7. Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya	9. Meningkatnya ruang apreasiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya		Pengelolaan kebudayaan daerah
Misi 4 Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata			
8. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan	10. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Penguatan kapasitas pelaku ekonomi kerakyatan dalam mengelola sumberdaya ekonomi serta mengembangkan iklim usaha yang kondusif	Penguatan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan
			Pembangunan pertanian dan perkanan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
wilayah	11. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi, UMKM, perdagangan dan jasa	bagi masyarakat dengan berbasis pada akselerasi pusat-pusat pertumbuhan dan kreativitas	Pengembangan koperasi dan UMKM
	12. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh		Pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah
	13. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa		
9. Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa	14. Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA	Harmonisasi regulasi perizinan serta perwujudan kemudahan berusaha dan persaingan usaha yang sehat secara bersinergi dengan perbaikan layanan perizinan terpadu	Pengembangan iklim usaha dan investasi
			Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu
10. Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif	15. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata	Pengembangan kualitas daya tarik wisata dan mengembangkan destinasi wisata baru berbasis budaya, ekologi dan produk lokal	Pengembangan wisata berbasis budaya, ekologi dan produk lokal
Misi 5 Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup			
11. Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan	16. Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan	Pengembangan kesadaran serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian dan keindahan lingkungan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan kepatuhan kepada hukum lingkungan	Pengelolaan lingkungan hidup daerah
Misi 6 Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah			
12. Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan	17. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan, perdesaan dan perkotaan	Penguatan kordinasi penanggulangan kemiskinan secara bersinergi dengan pengembangan jalur pemerataan lapangan kerja dan lapangan usaha berbasis data akurat dan karakteristik spasial	Penanggulangan kemiskinan secara terpadu
	18. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat		Pengembangan dan pemerataan lapangan kerja dan lapangan usaha
13. Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah	19. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota	Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dan perhubungan pada wilayah pinggiran-tertinggal dan lingkaran	Pembangunan dan pemerataan infrastruktur transportasi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
dengan memperkuat desa-desa hingga ke perkotaan.	20. Terpenuhiya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa	kota	Pembangunan sarana/prasarana dan perbaikan pelayanan perhubungan
	21. Terpenuhiya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri	Pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan lokal dalam pemenuhan infrastruktur sumberdaya air dan kemandirian desa	Pengelolaan sumberdaya air
	22. Meningkatnya kemandirian desa dan kemajuan wilayah pinggiran		Pemberdayaan masyarakat dan penataan desa
	23. Terpenuhiya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat	Peningkatan dan penguatan kapasitas sarana telekomunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat	Pembangunan dan pengembangan sarana telekomunikasi dan penyediaan sistem informasi terpadu
Misi 7 Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat			
14. Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana	24. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan terpadu gangguan K3 serta konflik sosial	Pemeliharaan ketertiban umum dan penanganan konflik sosial
	25. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
	26. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana	Pengembangan sistem terpadu penanganan bencana untuk mewujudkan daerah tangguh bencana	Penanganan bencana secara terpadu

Berdasarkan rumusan arah kebijakan dalam mengarahkan strategi untuk mencapai sasaran pada Tabel 6.2, maka prioritas kebijakan secara tahunan dapat dirumuskan sebagai berikut:

6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2016 masih mengacu kepada arah kebijakan yang dirumuskan pada tahun 2015. Tahun 2016 adalah tahun terakhir RPJMD periode kedua dan merupakan transisi ke RPJMD periode ketiga.

6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun pertama yang secara efektif mengacu pada RPJMD ini. Konteks tahun 2017 diwarnai oleh pemberlakuan penuh UU no.23 tahun 2014 terutama dalam hal kelembagaan dan kewenangan urusan pemerintahan daerah. Tema pembangunan pada tahun ini adalah **"Pemantapan reformasi birokrasi dan penguatan basis ekonomi kerakyatan dalam mendukung pembangunan berkualitas"**.

Penyelenggaraan pembangunan pada tahun ini diprioritas kepada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan;
- Penguatan mental spiritual dan kerukunan beragama;
- Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
- Pembangunan dan pelayanan kesehatan;
- Pembangunan dan pemerataan infrastruktur transportasi;
- Pemberdayaan masyarakat dan penataan desa;
- Pengembangan iklim usaha dan investasi.
- Penanggulangan kemiskinan secara terpadu;
- Pengembangan dan pemerataan lapangan kerja dan lapangan usaha.
- Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan potensi tambang.
- Mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam pengelolaan asset-aset daerah.

6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

Pada tahun 2018 akselerasi dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sudah mulai didorong. Pada tahun ini berlangsung pemilihan gubernur dan perubahan konteks kebijakan pembangunan pada level provinsi. Tema pembangunan pada tahun ini adalah **"Akselerasi pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kerakyatan dan penguatan kualitas manusia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan"**.

Penyelenggaraan pembangunan pada tahun ini diprioritaskan kepada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Pembangunan dan pemerataan infrastruktur transportasi;
- Pembangunan dan pelayanan pendidikan;



- Pembangunan dan pelayanan kesehatan;
- Penguatan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan;
- Pembangunan pertanian dan perikanan;
- Pengembangan koperasi dan UMKM;
- Pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah;
- Pengembangan kompetensi dan ruang kreativitas bagi pemuda;
- Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- Pengelolaan kebudayaan daerah.
- Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan potensi tambang.
- Mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam pengelolaan asset-aset daerah.

6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019

Pada tahun 2019, akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD semakin didorong. Pada tahun ini berlangsung pemilihan presiden dan terjadi perubahan konteks kebijakan nasional. Pada konteks provinsi arah kebijakan dengan RPJMD baru mulai berlaku. Tema pembangunan pada tahun ini adalah **"Akselerasi pengembangan ekonomi kerakyatan dan penguatan kualitas manusia dalam peningkatan daya saing daerah"**

Penyelenggaraan pembangunan pada tahun ini diprioritaskan kepada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah;
- Pengembangan koperasi dan UMKM;
- Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
- Pembangunan dan pelayanan kesehatan;
- Pengembangan wisata berbasis budaya, ekologi dan produk lokal;
- Pengelolaan sumberdaya air;
- Pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- Pembangunan sarana/prasarana dan perbaikan pelayanan perhubungan;
- Pengembangan lembaga dan masyarakat adat;
- Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan potensi tambang.



- Mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam pengelolaan asset-aset daerah.

6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

Pada tahun 2020 upaya pencapaian tujuan dan sasaran dimantapkan. Pada tahun ini, RPJMN dengan pemerintahan baru sudah efektif berjalan, demikian pula dengan RPJMD level provinsi. Dampak pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya diharapkan sudah terlihat pada tahun ini. Tema pembangunan pada tahun ini adalah: **"Pemantapan dalam pemerataan infrastruktur wilayah, pengembangan ekonomi kerakyatan dan penyelenggaraan pelayanan umum"**.

Penyelenggaraan pembangunan pada tahun ini diprioritaskan kepada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Penataan perumahan dan pemukiman;
- Penanggulangan kemiskinan secara terpadu;
- Modernisasi pelayanan terpadu satu pintu;
- Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- Pembangunan pertanian dan perikanan;
- Pengembangan koperasi dan UMKM;
- Pengembangan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah;
- Pemeliharaan ketertiban umum dan penanganan konflik social.
- Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan potensi tambang.
- Mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam pengelolaan asset-aset daerah.

6.2.6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021

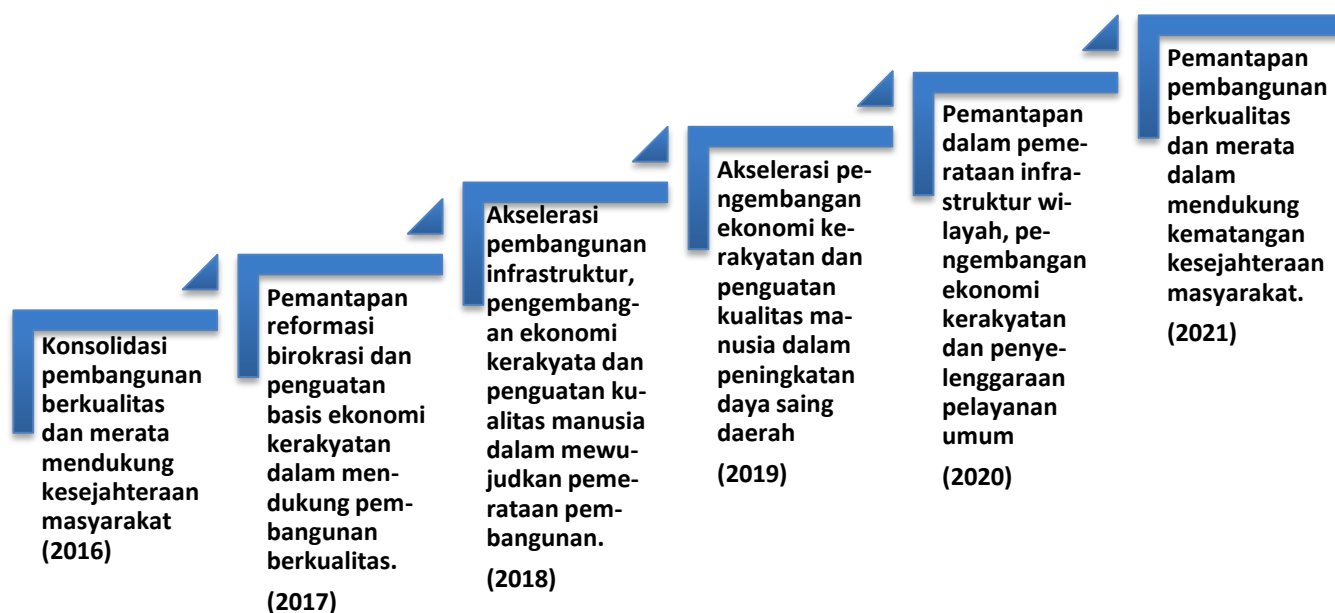
Tahun 2021 merupakan tahun penutup RPJMD ini. Pada tahun ini berlangsung pergantian kepala daerah. Namun demikian, prioritas kebijakan masih didasarkan pada RPJMD ini. Tema pembangunan pada tahun ini adalah **"Pemantapan pembangunan berkualitas dan merata dalam mendukung kematangan kesejahteraan masyarakat"**.



Penyelenggaraan pembangunan pada tahun ini diprioritaskan kepada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- Pembangunan dan pemerataan infrastruktur transportasi;
- Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
- Pembangunan dan pelayanan kesehatan;
- Penguatan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan;
- Penanggulangan kemiskinan secara terpadu
- Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan potensi tambang.
- Mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam pengelolaan asset-aset daerah.

Tahapan tema-tema prioritas pembangunan tahunan tersebut dalam mencapai keseluruhan sasaran dapat digambarkan pada gambar berikut:





BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain: 1. Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; 2. Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan 3. Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut: 1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan; 2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai; 3. Kebijakan

pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah; 4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan kerangka-konseptual demikian maka rumusan kebijakan umum RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1 Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
1. Terimplementasikannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	Akselerasi reformasi birokrasi secara terpadu berbasis komponen pengungkit dan komponen hasil	Penguatan sistem perencanaan dan informasi pembangunan daerah
		Penataan peraturan perundang-undangan
		Penataan organisasi dan kordinasi SKPD
		Peningkatan kualitas dan manajemen SDM-ASN dan pemerintahan desa
		Pengawasan administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah
		Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan
2. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan	Pengembangan sistem pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Pengembangan Pusat Pengaduan, Pelayanan dan Penyelamatan Cepat dan Terpadu (Carester=Care and Rescue Center) dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia
		Pembinaan mental-spiritual aparat sipil negara dan masyarakat
		Pemenuhan sarana/prasarana kegiatan keagamaan
		Pembinaan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan	Kordinasi dan sinkronisasi dengan lembaga adat dan civil society dalam mengefektifkan peran lembaga adat bagi penyelenggaraan pembangunan	Pengembangan wisata religi
		Pemberdayaan masyarakat adat



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
4. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat	Pemenuhan dan pemerataan sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta ketersediaan obat secara proporsional dengan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat	Penyelenggaraan upaya kesehatan
		Pengembangan SDM bidang kesehatan
		Pengembangan sarana/prasarana kesehatan
		Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Pengelolaan dan pengawasan obat dan makanan
		Pemenuhan SPM dan SDGs
5. Terpenuhi kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik	Pembinaan pada komunitas /kelompok pemukim tidak tetap secara proporsional dengan penataan lingkungan dan rumah sehat pada pusat-pusat pemukiman perkotaan dan perdesaan.	Penataan perumahan rumah tangga miskin dan pemukiman kumuh
		Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan/pemukiman
6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	Penguatan akses pelayanan pendidikan dan perpustakaan yang bermutu dan terjangkau secara bersinergi dengan penguasaan iptek dan kompetensi guru serta pengembangan minat baca masyarakat	Pengelolaan pendidikan anak usia dini
		Pengelolaan pendidikan dasar
		Pengelolaan pendidikan non formal
		<i>Pengelolaan pendidikan Menengah</i>
		Pemenuhan capaian SPM
		Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan
		Pembinaan bahasa dan sastra daerah
		Pengembangan minat baca masyarakat
7. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	Pengembangan kapasitas sarana/prasarana, pembinaan dan koordinasi kegiatan kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kebudayaan daerah	Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan
8. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan		Pembinaan cabang olah raga dan organisasi olah raga
9. Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan
		Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
10. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Penguatan kapasitas pelaku ekonomi kerakyatan dalam mengelola sumberdaya ekonomi serta mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dengan berbasis pada akselerasi pusat-pusat pertumbuhan dan kreativitas	Pembinaan kebudayaan daerah
		Peningkatan produksi pertanian TPH
		Peningkatan produksi peternakan
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan
		Peningkatan produksi perikanan
		Pemenuhan kedaulatan pangan
		Peningkatan kompetensi dan penguatan kelembagaan pelaku utama

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
11. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi, UMKM, perdagangan dan jasa		Pengembangan koperasi dan UMKM
		Pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen
12. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh		Pengembangan sistem inovasi daerah
		Pengembangan kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh
13. Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa		Pengamanan perdagangan barang dan jasa
14. Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA	Harmonisasi regulasi perizinan serta perwujudan kemudahan berusaha dan persaingan usaha yang sehat secara bersinergi dengan perbaikan layanan perizinan terpadu	Pengembangan iklim investasi dan penerimaan daerah
15. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata	Pengembangan kualitas daya tarik wisata dan mengembangkan destinasi wisata baru berbasis budaya, ekologi dan produk lokal	Pengembangan pariwisata
16. Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan	Pengembangan kesadaran serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian dan keindahan lingkungan, ketersediaan ruang terbuka hijau dan kepatuhan kepada hukum lingkungan	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup Penegakan hukum lingkungan Penanganan kebersihan/persampahan Penataan taman dan ruang terbuka hijau Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
17. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan, perdesaan dan perkotaan	Penguatan kordinasi penanggulangan kemiskinan secara bersinergi dengan pengembangan jalur pemerataan lapangan kerja dan lapangan usaha berbasis data akurat dan karakteristik spasial	Perlindungan social fakir miskin dan anak terlantar Pemberdayaan masyarakat rumah tangga miskin Penanganan PMKS secara terpadu Pengurangan beban rumah tangga miskin Kordinasi penanggulangan kemiskinan
18. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat		Peningkatan kompetensi tenaga kerja
19. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota	Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktu transportasi dan perhubungan pada wilayah pinggiran tertinggal dan lingkaran kota	Penuntasan pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Masamba Pemenuhan infrastruktur perdesaan (jalan desa, jaringan irigasi, dan pasar desa) Pemenuhan infrastruktur transportasi wilayah tertinggal Pembangunan infrastruktur jalan pada kawasan pesisir menggunakan konstruksi beton Pembangunan infrastruktur jalan perdesaaan menggunakan paving blok Penataan dan pemanfaatan ruang



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
20. Terpenuhiya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa		Pengembangan terminal dan sarana/prasarana lalu lintas
		Pengembangan terminal
21. Terpenuhiya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan dalam rumah tangga dan perkembangan industri	Pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan	Pengembangan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan
22. Terpenuhiya kebutuhan sarana/prasarana sumber daya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri	Pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan local dalam pemenuhan infrastruktur sumberdaya air dan kemandirian desa	Pengembangan sistem penyediaan air bersih
		Penanganan terpadu sumberdaya air
23. Terpenuhiya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat	Pembangunan komitmen untuk akses pelayanan telekomunikasi di setiap wilayah	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait khususnya pihak pengkajian dan pengembangan teknologi
24. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan terpadu gangguan K3 serta konflik sosial	Penanganan terpadu gangguan K3
		Penegakan Perda
		Penanganan terpadu konflik sosial
25. Menurunnya jumlah pemakai narkoba	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat	Koordinasi dan sinkronisasi program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
26. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana	Pengembangan sistem terpadu penanganan bencana untuk mewujudkan daerah tangguh bencana	Penanganan bencana secara terpadu

7.2. Program Pembangunan Daerah

Rumusan kebijakan umum pada Tabel 7.1 menjadi dasar untuk merumuskan program pembangunan daerah dengan indikator outcome yang diharapkan berkontribusi terhadap indikator impact pada sasaran. Adapun rumusan program pembangunan daerah berdasarkan kebijakan umum pada setiap sasaran dapat dilihat pada Tabel 7.2

Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu utara Tahun 2016-2021

Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
1. Terimplementasikan nya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan sistem perencanaan dan informasi pembangunan daerah	Ketersediaan RTRW, RPJPD, RPJMD, RKPD, SPKD dan dokumen perencanaan lainnya sesuai standard dan berbasis elektronik % Kecukup-an data dan informasi perencanaan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
	Penataan peraturan perundang-undangan	Jumlah perundang-undangan yang ditata	Program penataan peraturan perundang-undangan	Pemerintahan Umum
	Penataan organisasi dan kordinasi SKPD	Jumlah anggota legislative yang meningkat kapasitasnya % SKPD yang terkordinasikan melalui e-government system	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	
	Peningkatan kualitas dan manajemen SDM-ASN dan pemerintahan desa	Jumlah ASN yang mencapai peningkatan kompetensi kepemimpinan dan teknis	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kepegawaian
		% ASN yang menempati tugas dan fungsi sesuai persyaratan	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	
		% aparat pemerintah desa yang memiliki kompetensi pengelolaan keuangan desa	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengawasan administrasi dan keuangan	% rekomendasi LHP BPK, inspektorat provinsi dan inspektorat Kabupaten yang ditindaklanjuti	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pemerintahan Umum
	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan	% Jumlah SAKIP SKPD yang dibina	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Pemerintahan Umum
	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan Pusat Pengaduan, Pelayanan dan Penyelamatan Cepat dan Terpadu (Carester=Care and Rescue Center) dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia	% cakupan pengaduan masyarakat yang terlayani	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemerintahan Umum



Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
2. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan	Pembinaan mental-spiritual aparat sipil negara dan masyarakat	Peningkatan kompetensi kelembagaan dan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial untuk penguatan kelembagaan	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial
	Pemenuhan sarana/prasarana kegiatan keagamaan	Rasio rumah ibadah/satuan penduduk	Program Pembangunan Sarana Ibadah	Sosial
	Pembinaan kerukunan antar umat beragama	Jumlah kegiatan pembinaan hubungan antar umat beragama yang difasilitasi melalui Forum Antar Umat Beragama	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
			Program Bina Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra	Pemerintahan Umum
3. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan	Pemberdayaan masyarakat adat	Jumlah lembaga adat yang mendapatkan pembinaan (rumah adat)	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat	Penyelenggaraan upaya kesehatan	% jumlah penduduk yang menjadi peserta JKN/KIS (%)	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan
		% Jumlah penduduk miskin, bayi dan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan
		% penurunan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan
		% penurunan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit tidak menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Kesehatan
		% peningkatan jumlah lansia yang dilayani	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Kesehatan
		Jumlah temuan guzi kurang dan gizi buruk yang ditangani	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan



Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
		% masyarakat yang mendapatkan pelayanan dasar dan rujukan	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
		% Kecukupan dokter ahli; dokter umum; dan tenaga kesehatan lainnya)	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga kesehatan	Kesehatan
	Pengembangan SDM bidang kesehatan	% puskesmas terakreditasi	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Kesehatan
	Pengembangan sarana/prasarana kesehatan	% Desa yang menerapkan PHBS dan % Desa siaga aktif	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan
		% Desa yang menerapkan STBM	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan
	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	% ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan bermutu	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan
		% keterpenuhan belanja operasional UPTD	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan UPTD Puskesmas dan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan
		% penurunan Jumlah pelanggaran peredaran obat dan makanan	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kesehatan
		Jumlah obat asli/tradisinal yang dibina	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Kesehatan
		% penurunan jumlah pelanggaran kesehatan makanan	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Kesehatan
		% Rata-rata Capaian SPM Kesehatan; % Rata-rata capaian SDGs	Program Kebijakan dan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan	Kesehatan
	Pengelolaan dan pengawasan obat dan makanan			
	Pemenuhan SPM dan SDGs			



Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
5. Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik	Penataan perumahan rumah tangga miskin dan pemukiman Kumuh	Jumlah unit perumahan kumuh yang diperbaiki lingkungannya	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pekerjaan Umum
	Penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan/pemukiman	Panjang jaringan drainase yang terbangun dan terpelihara	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pekerjaan Umum
		Panjang pedestrian yang terbangun dan terpelihara	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum
6. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat	Pengelolaan pendidikan anak usia dini	APK PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan
	Pengelolaan pendidikan dasar	APM SD/SMP APK SD/SMP Angka Kelulusan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan
	Pembinaan bahasa dan sastra daerah	% SD/SMP yang mengajarkan sastra dan bahasa daerah		
	Pengelolaan Pendidikan Menengah		Program Pendidikan Menengah	Pendidikan
	Pengelolaan pendidikan non formal	Jumlah buta huruf 15 tahun keatas yang terentaskan	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan
	Pemenuhan capaian SPM	Cakupan pengelolaan pelayanan pendidikan yang terpenuhi (%)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan
		Cakupan jumlah cabang disdik/UPTD yang terpenuhi dalam pelayanan administrasi kedinasan	Program Pelayanan Administrasi Kedinasan pada Cabang Dinas dan UPTD	Pendidikan
	Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan	% Tenaga pendidik berpendidikan S1 dan tersertifikasi	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
	Pengembangan minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan	Program Peningkatan Minat Baca Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan
7. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda dan organisasi pemuda berprestasi	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan cabang olah raga dan organisasi olah raga	Jumlah atlet dan cabang olah raga berprestasi	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Pemuda dan Olahraga



Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
8. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	% SKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsive gender	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan
	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kelompok dan organisasi perempuan yang diberdayakan dalam aktivitas social-ekonomi	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan
		Cakupan Desa/Kelurahan Ramah Anak (%)	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Pemberdayaan Perempuan
		Cakupan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (%)	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan
9. Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya	Pembinaan kebudayaan daerah	Jumlah tradisi masyarakat dan aktivitas kesenian yang dibina	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan
		Jumlah benda budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan
10. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produksi pertanian TPH	% Peningkatan produksi pertanian TPH	Program Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Pertanian
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
			Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
		Luas sawah cetakan baru yang berfungsi	Program Peningkatan Produksi Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Pertanian
		Pendapatan petani TPH	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (TPH)	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian TPH	



Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	% Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Pertanian
		Pendapatan petani perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pertanian
			Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi perkebunan	
	Peningkatan Produksi Peternakan	% Peningkatan populasi ternak	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertanian
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian
	Peningkatan Produksi Perikanan	% Peningkatan produksi perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan	Kelautan Perikanan
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
			Program Pengembangan Prasarana Infrastruktur Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	
		Pendapatan Nelayan tangkap, nelayan budaya dan petani rumput laut	Program Optimalisasi pengelolaan & pemasaran produk perikanan	Perikanan
	Peningkatan kompetensi dan penguatan kelembagaan pelaku utama	Jumlah/% kelompok tani pemula, muda, madya dan lanjut	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Pertanian
11. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi, UMKM, perdagangan dan jasa	Pengembangan koperasi dan UMKM	% dan jumlah koperasi aktif;	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UKM
		% peningkatan nilai produksi UMKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Koperasi dan UKM
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi akses teknologi dan manajemen	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah dan Kondusif	Koperasi dan UKM
		Jumlah UMKM yang terfasilitasi	Program Pengembangan	Koperasi dan UKM



Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
		akses modal pemerintah	Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Perdagangan
	Pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen	Jumlah pelaksanaan pasar murah (PSO) Jumlah masalah konsumen yang ditangani	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	
12. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh	Pengembangan kawasan ekonomi dan industri kreatif cepat tumbuh	Jumlah unit industry kreatif yang berkembang	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian
	Pengembangan sistem inovasi daerah	Jumlah struktur industri yang dikembangkan	Program Penataan Struktur industri	
13. Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa	Pengamanan perdagangan barang dan jasa	Nilai Perdagangan Barang dan Jasa Jumlah pasar yang dibina	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan
14. Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA	Pengembangan iklim investasi dan penerimaan daerah	Cakupan ketersediaan data dan informasi potensi investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal
		% Izin usaha yang dikeluarkan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
15. Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata	Pengembangan pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		Jumlah daya tarik wisata dan produk wisata yang terpromosikan	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
16. Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Cakupan penanganan limbah	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
	Penegakan hukum lingkungan			
	Penanganan kebersihan/persampahan	% Volume sampah yang ditangani	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
	Penataan taman dan ruang terbuka hijau	Jumlah taman (unit) dan luas ruang terbuka hijau (Ha)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup
	Pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Luas lahan dan keanekaragaman hayati yang dilindungi	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup



Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
17. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan, perdesaan dan perkotaan	Perlindungan social fakir miskin dan anak terlantar	% Fakir miskin dan anak terlantar yang diberi perlindungan sosial	Program Pembinaan Anak terlantar	Sosial
	Pemberdayaan masyarakat rumah tangga miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial
	Penanganan PMKS secara terpadu	Jumlah PMKS berbagai kategori yang mendapatkan penanganan sosial	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial
	Pengurangan beban rumah tangga miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan bantuan pendidikan dan kesehatan	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Perencanaan
18. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat	Peningkatan kompetensi tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja terdidik yang mendapatkan TOT	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan
		Cakupan tenaga kerja terdidik (TOT) yang terserap diperusahaan dan TKI professional	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan
19. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota	Penuntasan pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Masamba	Panjang jalan dalam kondisi baik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum
	Pemenuhan infrastruktur transportasi wilayah tertinggal			
	Pembangunan infrastruktur jalan pada kawasan pesisir menggunakan konstruksi beton			
	Pembangunan infrastruktur jalan perdesaan menggunakan paving blok	Panjang jaringan irigasi desa dan irigasi usaha tani yang terbangun dan berfungsi	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pekerjaan Umum
	Pemenuhan infrastruktur perdesaan (jalan desa, jaringan irigasi, dan pasar desa)			



Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
20. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa	Penataan dan pemanfaatan ruang	Cakupan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dan RDTR	Program Pengendalian Pemamfaatan Ruang	Penataan Ruang
	Pengembangan terminal dan sarana/prasarana lalu lintas	Jumlah penumpang yang menggunakan terminal	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Perhubungan
		Jumlah jembatan timbang dan marka jalan yang berfungsi	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan
	Pengembangan terminal	Jumlah kendaraan umum yang mendapatkan uji kelayakan jalan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan
		Jumlah terminal yang dikembangkan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan
21. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan dalam rumah tangga dan perkembangan industri	Pengembangan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan	Potensi sumber-sumber energi yang dikembangkan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral
22. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumber daya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri	Pengembangan sistem penyediaan air bersih	Jumlah rumah tangga yang mendapatkkan akses air bersih	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum
	Penanganan terpadu sumber daya air	Jumlah sumber air dan aliran air yang dikendalikan	Program Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Air Lainnya	
23. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat	Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait khususnya pihak pengkajian dan pengembangan teknologi	Rasio masyarakat yang mengakses informasi	Program Kerjasama Informasi dan Mas Media Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Komunikasi Pemerintahan Umum



Sasaran	Kebijakan Umum	Indikator Kinerja (outcome)	Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan
24. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat	Penanganan terpadu gangguan K3	Jumlah kejadian K3 yang tertangani dengan tuntas	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketertiban dan Ketenteraman
	Penegakan Peraturan Daerah	Frekuensi patroli satpol PP	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Ketertiban dan Ketenteraman
	Penanganan terpadu konflik sosial	Jumlah kejadian konflik yang diselesaikan dengan damai	Program Pencegahan Dini Penanganan Konflik Sosial	Ketertiban dan Ketenteraman
25. Menurunnya jumlah pemakai narkoba	Koordinasi dan sinkronisasi program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba	Rasio masyarakat yang mendapatkan penyuluhan	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
26. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana	Penanganan bencana secara terpadu	Jumlah korban bencana yang tertangani sesuai standar	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Perlindungan masyarakat
		Jumlah kerusakan akibat bencana yang terpulihkan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perlindungan masyarakat
		Luas area kawasan banjir yang tertangani	Program Pengendalian banjir	Pekerjaan Umum
		Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani dengan baik	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Perlindungan masyarakat

7.3. Program Pembangunan Wilayah Kecamatan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031, maka pembangunan wilayah kecamatan didasarkan pada kecenderungan perkembangan wilayah dan kesesuaian kebijakan regional dan nasional. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD di Kabupaten Luwu Utara, sehingga program dan kegiatan seluruh SKPD mengacu pada pengembangan wilayah dalam lima tahun mendatang.

Penetapan kawasan strategis dibagi atas 2 (dua), yaitu :

7.3.1 Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi yang berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi :

- 1) Di seluruh kecamatan (Kec. Sabbang, Baebunta, Rongkong, Seko, Rampi, Bone-Bone, Tana Lili, Sukamaju, Mappedeceng, Masamba, Malangke dan Malangke Barat) ditetapkan sebagai kawasan lahan pangan berkelanjutan, khususnya beras dan jagung.
- 2) Begitu juga dengan kawasan budidaya pengembangan alternatif komoditi perkebunan unggulan, seperti Kakao, Kelapa Sawit, Kopi Robusta, Kopi Arabika, dan Nilam di kembangkan di seluruh kecamatan.
- 3) Kawasan pengembangan budidaya rumput laut, meliputi wilayah perairan pantai dan atau tambak. Penetapan kawasan ini berada di Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Bone-Bone dan Tana Lili.

7.3.2 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten dibagi menjadi 4 (empat) kawasan, yaitu:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi
Dari sudut kepentingan ekonomi, Kabupaten Luwu Utara dibagi menjadi 6 (enam) kawasan, yaitu :

- a) Kawasan Perkotaan Masamba.

Kota Masamba dalam system perkotaan Kabupaten Luwu Utara ditetapkan sebagai **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** pada wilayah kabupaten. Hal ini didasarkan pada potensi dan status yang diemban sebagai Ibukota Kabupaten Luwu Utara. Cakupan pelayanan Kota

Masamba ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara, serta wilayah nasional dan internasional yang lebih luas. Oleh karena itu Kota Masamba memiliki peran dan fungsi adalah sebagai Pusat Pengembangan Utama Wilayah Kabupaten.

- b) Kawasan Pesisir dan Minapolitan di Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Bone-Bone dan Tana Lili. Pengembangan kawasan ini disebut **Pusat Pengembangan Kawasan (PPK)**. Cakupan wilayah pelayanannya adalah di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Terkhusus untuk Kecamatan Malangke, Bone-Bone dan Tana Lili juga ditetapkan sebagai Kawasan Industri.
 - c) **Pusat Pengembangan Kawasan (PPK)** selanjutnya adalah Kawasan pengembangan Agropolitan Perkebunan yang diarahkan di Kecamatan Sabbang. Cakupan wilayah pelayanannya juga di seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.
 - d) Kawasan pengembangan Agropolitan Pertanian (Tanaman Pangan) diarahkan di Kecamatan Sukamaju. Kecamatan ini juga disebut sebagai **Pusat Pengembangan Kawasan (PPK)**. Cakupan wilayah pelayanannya juga di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Tetapi khusus untuk Kecamatan Rongkong ditetapkan menjadi kawasan hortikultura. Sedangkan untuk Kecamatan Sukamaju juga ditetapkan sebagai Kawasan Industri Tahu dan Tempe. Dan untuk kawasan industri pengrajin ditetapkan di Kecamatan Sukamaju dan Mappedeceng.
 - e) **Pusat Pengembangan Kawasan (PPK)** yang lainnya adalah Kawasan pengembangan Agroindustri di Kecamatan Sabbang. Cakupan wilayah pelayanannya meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara.
 - f) Kawasan khusus pengembangan sagu diarahkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yang lokasinya di sepanjang pinggiran sungai dan daerah genangan.
- 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. Dari segi sosial budaya, pada prinsipnya diarahkan di seluruh wilayah kecamatan.



- 3) Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi

Berdasarkan nilai strategis ini, maka Kabupaten Luwu Utara dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu :

- a) Kota Masamba, Kecamatan Sukamaju, Seko dan Rampi sebagai sentra peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan teknologi dirgantara.
 - b) Kawasan pertambangan mineral di Kecamatan Rampi, Seko, Sabbang dan Limbong.
- 4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, maka kawasan Kabupaten Luwu Utara dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a) Kawasan sepanjang pinggiran sungai dan daerah genangan, yaitu di Kecamatan Sabbang, Baebunta, Malangke, Malangke Barat, Mappedeceng, dan Masamba.
- b) Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Rongkong, Kanjiro, Masamba, dan Baliase
- c) Kawasan pesisir pantai dua muara sungai di Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Bone-Bone dan Tana Lili.
- d) Kawasan Minapolitan dengan komoditas unggulan yang akan dikembangkan adalah rumput laut jenis *Gracillaria* Sp dan *Euchema* Cottoni di Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Bone-Bone dan Tanalili.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana Program Prioritas Tahun 2016-2021 sebagaimana yang telah dirumuskan pada Bab. VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan. Selain program prioritas seperti penyajian pada tabel bab VII yang mendukung langsung pencapaian Visi, Misi pembangunan, pada bab ini juga ditampilkan program-program operasional pada semua SKPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan. Demikian pula dengan program-program pembangunan yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi urusan pemerintah kabupaten. Berikut penyajian indikasi rencana program pembangunan daerah dan kebutuhan pendanaannya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Utara selama kurun waktu Tahun 2016-2021 disajikan berdasarkan urusan.



Tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Dan Pendanaan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1.1	Pendidikan																
1.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio Ketersediaan RKB dan Murid PAUD maksimal 1:15	1:17	1:17	1.007.915.000,00	1:17	1.780.000.000,00	1:17	1.530.000.000,00	1:16	1.530.000.000,00	1:16	1.290.000.000,00	1:15	1.530.000.000,00	1:15	8.667.915.000,00
1.1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rasio Ketersediaan RKB dan Siswa SD/SMP maksimal 1:32	SD 1:24 SMP 1:31	SD 1:24 SMP 1:31	69.501.888.800,00	SD 1:24 SMP 1:31	78.057.000.000,00	SD 1:23 SMP 1:31	90.663.000.000,00	SD 1:22 SMP 1:30	90.780.000.000,00	SD 1:21 SMP 1:30	89.960.000.000,00	SD 1:20 SMP 1:30	89.960.000.000,00	SD 1:20 SMP 1:30	508.921.888.800,00
1.1.3	Program Pendidikan Menengah	Rasio Ketersediaan RKB dan Murid SMA/SMK	1:39	1:39	8.370.407.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.370.407.700,00
	Jumlah Warga Belajar yang Lulus Paket C		415	415		-		-		-		-		-		-	
1.1.4	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga/Kursus yang menyelenggarakan pendidikan Masyarakat	18	18	289.600.000,00	20	409.600.000,00	23	459.600.000,00	24	384.600.000,00	25	384.600.000,00	25	423.060.000,00	110	2.351.060.000,00
1.1.5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi	45,82%	48,00%	563.362.000,00	50,50%	575.000.000,00	52,50%	575.000.000,00	55,00%	575.000.000,00	57,50%	650.000.000,00	60,00%	715.000.000,00	60,00%	3.653.362.000,00
1.1.6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang dilayani	501	505	383.212.500,00	474	493.637.000,00	475	493.637.000,00	477	493.637.000,00	480	493.637.000,00	499	543.000.700,00	499	2.900.761.200,00
1.1.7	Program Pelayanan Administrasi Kedinasan Pada Cabang Dinas / UPTD Disdik	Jumlah UPTD yang di layani	12	12	652.000.000,00	12	749.800.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	860.000.000,00	12	946.000.000,00	12	4.927.800.000,00
1.2	Kesehatan																
1.2.1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan bermutu	95%	95%	4.837.752.340,00	0,95	6.167.300.000,00	0,95	6.199.000.000,00	0,95	6.734.000.000,00	0,95	7.144.000.000,00	0,95	8.215.600.000,00	0,95	39.297.652.340,00
1.2.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase PKM yang melaksanakan kesehatan bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil	100%	100%	1.510.260.000,00	100%	2.885.000.000,00	100%	3.458.000.000,00	100%	4.737.000.000,00	100%	5.533.000.000,00	100%	6.362.950.000,00	100%	24.486.210.000,00
1.2.3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya kualitas pengawasan obat dan makanan	90%	90%	270.000.000,00	0,95	695.000.000,00	0,95	730.000.000,00	0,95	845.000.000,00	0,95	1.070.000.000,00	0,95	1.230.500.000,00	0,95	4.840.500.000,00
1.2.4	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Meningkatnya dan mendorongnya pengembangan obat tradisional	80%	85%	290.000.000,00	0,90	639.400.000,00	0,95	415.000.000,00	0,95	490.000.000,00	0,95	830.000.000,00	0,95	954.500.000,00	0,95	3.618.900.000,00
1.2.5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	55,76%	56,00%	790.364.000,00	56,30%	1.434.600.000,00	56,60%	4.822.000.000,00	56,90%	5.722.000.000,00	57,20%	6.797.000.000,00	57,50%	7.756.550.000,00	57,50%	27.322.514.000,00
1.2.6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	persentase kecamatan bebas rawan gizi	75%	75%	591.800.000,00	76%	931.675.000,00	77%	3.748.000.000,00	78%	4.974.000.000,00	80%	5.106.000.000,00	82%	5.871.900.000,00	82%	21.223.375.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	jumlah tatanan kabupaten sehat yang diikuti	5 tatanan	5 tatanan	253.000.000,00	6 tatanan	660.825.000,00	6 tatanan	1.528.000.000,00	7 tatanan	1.748.000.000,00	8 tatanan	1.911.000.000,00	8 tatanan	2.135.400.000,00	8 tatanan	6.346.225.000,00
1.2.8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Incidence Rate DBD	52,49/100.000 Penduduk	<50 per 100.000 penduduk	1.409.750.000,00	<49 per 100.000 penduduk	1.553.100.000,00	<49 per 100.000 penduduk	5.233.000.000,00	<49 per 100.000 penduduk	5.905.000.000,00	<49 per 100.000 penduduk	8.298.000.000,00	<49 per 100.000 penduduk	9.542.700.000,00	<49 per 100.000 penduduk	31.941.550.000,00
1.2.9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan mutu manajemen pelayanan kesehatan	95%	96	1.330.400.000,00	96	2.910.000.000,00	96	2.280.000.000,00	98	2.005.000.000,00	98	2.400.000.000,00	98	2.670.000.000,00	98	13.595.400.000,00
1.2.10	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase gizi buruk sembuh	80%	80%	52.750.000,00	81%	138.000.000,00	82%	220.000.000,00	83%	300.000.000,00	85%	385.000.000,00	87%	442.750.000,00	87%	1.538.500.000,00
1.2.11	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	1:21.450	1:21.000	19.359.529.300,00	1:21.000	21.609.000.000,00	1:21.000	27.161.000.000,00	1:20.500	33.740.000.000,00	1:20.500	35.590.000.000,00	1:20.000	40.928.500.000,00	1:20.000	178.388.029.300,00
1.2.12	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase kunjungan pasien kerumah sakit	20,84%	20,73%	14.951.670.000,00	0,21	16.264.000.000,00	0,21	18.600.000.000,00	0,21	22.570.000.000,00	0,20	21.625.000.000,00	0,20	21.625.000.000,00	0,20	115.635.670.000,00
1.2.13	Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase Keluhan pasien di Rumah Sakit	0,00016	0,00024	250.000.000,00	0,00	390.000.000,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00	0,00	1.600.000.000,00	0,00	6.740.000.000,00
1.2.14	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta JKN/KIS	75%	80%	26.662.272.360,00	0,85	30.196.000.000,00	0,90	32.176.000.000,00	0,95	36.152.410.000,00	1,00	38.780.000.000,00	1,00	44.503.000.000,00	1,00	208.469.682.360,00
1.2.15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan pada lansia	35%	60%	97.300.000,00	0,70	896.500.000,00	0,80	839.000.000,00	0,90	1.049.500.000,00	1,00	1.076.000.000,00	1,00	1.237.400.000,00	1,00	5.195.700.000,00
1.2.16	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan tempat-tempat umum	70%	74%	186.000.000,00	0,77	790.000.000,00	0,79	925.000.000,00	0,80	1.080.000.000,00	0,81	1.225.000.000,00	0,81	1.408.750.000,00	0,81	5.614.750.000,00
1.2.17	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	81%	82%	690.500.000,00	83%	822.750.000,00	84%	3.525.000.000,00	85%	3.450.000.000,00	86%	4.260.000.000,00	87%	4.899.000.000,00	87%	17.647.250.000,00
1.2.18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular	50%	-	-	52%	116.200.000,00	55%	540.000.000,00	58%	678.000.000,00	61%	1.007.000.000,00	63%	1.158.050.000,00	63%	3.499.250.000,00
1.2.19	Program Kebijakan dan Manajemen dan Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya kualitas manajemen program pembangunan kesehatan	100%	100%	1.148.500.000,00	1,00	1.664.000.000,00	1,00	1.969.000.000,00	1,00	2.200.000.000,00	1,00	2.225.000.000,00	1,00	2.558.750.000,00	1,00	11.765.250.000,00
1.2.20	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan UPTD Puskesmas dan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan kesehatan	100%	100%	6.401.600.000,00	1,00	6.571.500.000,00	1,00	13.010.000.000,00	1,00	15.910.000.000,00	1,00	18.810.000.000,00	1,00	21.631.500.000,00	1,00	82.334.600.000,00
1.2.21	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan PPK-BLUD	Jumlah Pegawai RS dan Pasien penerima manfaat di Rumah Sakit	63.461	63.703	43.000.000.000,00	64.158,00	45.000.000.000,00	64.381,00	49.000.000.000,00	64.653,00	50.000.000.000,00	64.868,00	51.000.000.000,00	64.868,00	53.000.000.000,00	65.040,00	291.000.000.000,00
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1	Program pembangunan jalan dan jembatan	Prosentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	59,67%	59,7%	100.593.765.550	0,64	129.900.000.000	0,67	126.500.000.000	0,70	143.000.000.000	0,73	157.000.000.000	0,73	158.000.000.000	0,75	814.993.765.550
1.3.2	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	87,70%	10.880 M	6.117.700.000,00	12.000M	7.341.240.000,00	14.000 M	8.809.488.000,00	16.000 M	10.575.000.000,00	18.000 M	12.690.000.000,00	18.000 M	15.228.000.000,00	18.000 M	60.761.428.000,00
1.3.3	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Kebutuhan Talud	1000 m	1000 M	1.630.000.000,00	1017 M	2.700.000.000,00	1367 M	3.645.000.000,00	1192 M	3.172.500.000,00	675M	1.822.500.000,00	675M	3.822.500.000,00	5.701,00	16.792.500.000,00
1.3.4	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Prosentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	59,67%	64,00%	1.455.000.000,00	0,67	1.600.500.000,00	0,70	1.760.550.000,00	0,73	1.936.605.000,00	0,76	2.130.000.000,00	0,80	2.343.000.000,00	0,80	11.225.655.000,00
1.3.5	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Infrastruktur Ke-Pu-an	3 Dok	3 Dok	447.000.000,00	3 Dok	447.000.000,00	3 Dok	447.000.000,00	3 Dok	447.000.000,00	3 Dok	447.000.000,00	3 Dok	447.000.000,00	18 Dok	2.682.000.000,00
1.3.6	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan.	40 unit	10 Unit	1.890.500.000,00	11 Unit	2.079.550.000,00	12 Unit	2.287.505.000,00	12 Unit	2.200.000.000,00	12 Unit	2.200.000.000,00	12 Unit	2.760.000.000,00	12 Unit	13.417.555.000,00
1.3.7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Prosentase Luasan Sawah beririgasi Baik	43%	43%	12.028.531.400,00	0,46	13.990.000.000,00	0,49	16.000.000.000,00	0,52	22.455.000.000,00	0,55	27.479.000.000,00	0,55	33.289.800.000,00	0,55	125.242.331.400,00
1.3.8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentasi Penduduk Terlayani Air Bersih	63%	67%	6.565.750.000,00	0,70	7.222.325.000,00	0,73	8.000.000.000,00	0,75	8.800.000.000,00	0,78	9.680.000.000,00	0,78	12.000.000.000,00	0,78	52.268.075.000,00
1.3.9	Program Pengendalian Banjir	Berkurangnya Daerah Genangan	48%	50%	890.000.000,00	0,53	5.640.000.000,00	0,55	3.040.000.000,00	0,57	3.640.000.000,00	0,60	2.640.000.000,00	0,60	2.682.000.000,00	0,60	18.532.000.000,00
1.3.10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	1 KWS	1 KWS	1.153.000.000,00	1 KWS	1.153.000.000,00	1 KWS	1.153.000,00	1 KWS	1.153.000,00	1 KWS	1.153.000,00	1 KWS	1.153.000,00	1 KWS	2.310.612.000,00
1.3.11	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Penurunan Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah	31,26%	30,75	465.585.000,00	28,71	2.205.585.000,00	26,11	785.585.000,00	23,51	765.585.000,00	20,92	1.045.585.000,00	20,92	1.154.702.000,00	18,32	6.422.627.000,00
1.3.12	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Penurunan Pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah	31,26%	30,75	241.500.000,00	28,71	510.000.000,00	26,11	510.000.000,00	23,51	510.000.000,00	20,92	510.000.000,00	20,92	510.000.000,00	18,32	2.791.500.000,00
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
1.4.1	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	30,27%	33,17	217.172.000,00	35,07	8.462.000.000,00	36,97	10.762.000.000,00	38,87	7.662.000.000,00	40,77	7.662.000.000,00	42,67	8.428.200.000,00	42,67	43.193.372.000,00
1.4.2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase Penduduk bersanitasi Baik	60%	63%	3.543.725.000,00	0,66	4.243.725.000,00	0,69	7.070.000.000,00	0,72	4.212.000.000,00	0,75	4.762.000.000,00	0,75	5.162.000.000,00	0,78	28.993.450.000,00
1.4.3	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Prosentase Kasus Kebakaran yang ditangani	60%	70%	1.173.880.000,00	75%	1.273.000.000,00	80%	1.373.000.000,00	85%	1.473.000.000,00	90%	1.573.000.000,00	95%	2.044.900.000,00	95%	8.910.780.000,00
1.4.4	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah TMP	7 Lokasi	7 Lokasi	96.555.000,00	11 Lokasi	80.000.000,00	11 Lokasi	82.000.000,00	11 Lokasi	87.000.000,00	11 Lokasi	89.000.000,00	11 Lokasi	100.000.000,00	11 Lokasi	534.555.000,00
1.5	Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																
1.5.1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketertarikan dan keindahan (K3)	79,63%	81%	1.169.177.000,00	82%	1.540.000.000,00	83%	1.709.600.000,00	84%	1.745.950.000,00	85%	1.795.250.000,00	86%	1.942.900.000,00	86%	9.902.877.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5.2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase Penegakan Perda dan Perbup	61,85%	63%	1.506.817.755,88	65%	1.427.801.505,88	67%	1.575.000.000,00	69%	1.655.000.000,00	73%	1.655.000.000,00	75%	2.230.000.000,00	75%	10.049.619.261,76
1.5.3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	% Peningkatan wawasan kebangsaan pemuda	10%	-	-	12%	250.000.000,00	15%	250.000.000,00	18%	275.000.000,00	25%	285.000.000,00	30%	255.900.000,00	30%	1.315.900.000,00
1.5.4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Forum	2 Forum	2	393.850.000,00	12,00	375.000.000,00	-	502.500.000,00	-	700.000.000,00	-	495.250.000,00	-	619.062.500,00	-	3.085.662.500,00
1.5.5	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten / Kota	3	-	-	-	-	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	-	-	2	400.000.000,00	6	1.743.627.100,00
1.5.6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	rasio dibina terkait dengan penyakit Masyarakat (Pekak)	-	-	-	-	-	100	200.000.000,00	-	-	-	-	100	250.000.000,00	100	450.000.000,00
1.5.7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan Pembinaan Politik daerah	2 Kegiatan	1	228.652.000,00	1,00	235.000.000,00	2,00	455.000.000,00	2,00	605.000.000,00	1,00	485.000.000,00	1,00	606.250.000,00	2,00	2.614.902.000,00
1.5.8	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam	Jumlah Kecamatan Penerima informasi	12 Kec	12	2.190.415.000,00	12,00	250.000.000,00	12,00	5.090.000.000,00	12,00	5.415.000.000,00	12,00	5.695.000.000,00	12,00	7.363.500.000,00	12,00	26.003.915.000,00
1.5.9	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat	-	-	-	12 Kec	200.000.000,00	12 Kec	200.000.000,00	12 Kec	245.980.000,00	12 Kec	332.990.000,00	12 Kec	245.980.000,00	12 Kec	1.224.950.000,00
1.6	Sosial																
1.6.1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Masyarakat Miskin Yang Menerima Bantuan	535 jiwa	3 KLP	217.183.000,00	5 KLP	985.000.000,00	10 KLP	1.267.000.000,00	15 KLP	1.505.000.000,00	20 KLP	1.705.000.000,00	25 KLP	2.046.000.000,00	25 KLP	7.725.183.000,00
1.6.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Orang Yang Tertangani dari 26 Jenis PMKS	78,70	78,70	1.357.991.500,00	78,70	1.776.983.000,00	79	3.774.796.000,00	80	4.010.500.000,00	85	3.767.000.000,00	90	4.550.400.000,00	100	19.237.670.500,00
1.6.3	Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Yang Tertangani	110	16 orang	180.376.500,00	40 orang	214.990.500,00	40 orang	429.981.000,00	50 orang	614.304.000,00	55 orang	855.900.000,00	55 Orang	1.027.080.000,00	55 Orang	3.322.632.000,00
1.6.4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks trauma	Jumlah PMKS	47 penyandang cacat	6	107.154.000,00	15	244.808.000,00	20	325.500.000,00	25	445.000.000,00	30	510.000.000,00	35	612.000.000,00	35	2.244.462.000,00
1.6.5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Jumlah Panti	9 Panti	9 Panti	26.963.000,00	9 Panti	115.900.000,00	9 Panti	165.000.000,00	9 Panti	245.000.000,00	9 Panti	305.000.000,00	9 Panti	366.000.000,00	9 Panti	1.223.863.000,00
1.6.6	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PKS, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Lainnya	175	200	60.000.000,00	345	80.000.000,00	350	150.000.000,00	355	180.000.000,00	360	250.000.000,00	365	300.000.000,00	365	960.000.000,00
1.6.7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Presentase peningkatan kompetensi kelembagaan dan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial untuk penguatan kelembagaan	310 orang	318	1.595.806.000,00	455	1.705.000.000,00	455	1.936.000.000,00	455	2.056.000.000,00	455	2.176.000.000,00	455	2.611.200.000,00	455	12.080.006.000,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN																



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DENGAN PELAYANAN DASAR																
2.1	URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN																
2.1.1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang dibantu	90	90	1.979.394.000,00	90	3.200.000.000,00	90	3.300.000.000,00	90	3.410.000.000,00	90	2.200.000.000,00	90	4.390.000.000,00	90	18.479.394.000,00
2.1.2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap	90	90	269.922.000,00	90	325.420.000,00	90	325.420.000,00	90	375.420.000,00	90	375.420.000,00	90	458.000.000,00	90	2.129.602.000,00
2.1.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi	40	30	643.985.000,00	30	1.467.533.500,00	30	1.725.000.000,00	30	2.117.500.000,00	30	2.540.250.000,00	30	3.048.300.000,00	30	11.542.568.500,00
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
2.2.1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Kec/kota layak anak	0	-	-	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	100	1.274.400.000,00
2.2.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase institusi/lembaga yang dibudayakan	100	100%	74.900.000,00	100,00	275.000.000,00	100,00	350.000.000,00	100,00	575.000.000,00	100,00	575.000.000,00	100,00	575.000.000,00	100	2.424.900.000,00
2.2.3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Kecamatan/Desa yang menerapkan SPM Layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan	0%	5%	32.525.000,00	20,00	380.000.000,00	25,00	450.000.000,00	25,00	450.000.000,00	25,00	520.000.000,00	100	624.000.000,00	100	2.456.525.000,00
2.2.4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga Pemerintah	75%	-	-	80	410.000.000,00	85	520.000.000,00	90	600.000.000,00	95	600.000.000,00	95	610.000.000,00	95	2.740.000.000,00
2.3	Pangan																
2.3.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Perkebunan/Pertanian)	Ratio Desa bebas rawan pangan	28/44	32/44	1.524.846.700,00	85%	2.549.800.000,00	87%	3.097.500.000,00	89%	3.389.000.000,00	91 %	4.809.250.000,00	91 %	5.973.750.000,00	93%	21.344.146.700,00
2.4	Pertanahan																
2.4.1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	90	95	8.038.524.880,00	95	9.000.000.000,00	95	9.450.000.000,00	95	14.450.000.000,00	95	16.450.000.000,00	95	25.000.000.000,00	95	82.388.524.880,00
2.4.2	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Tertib Administrasi dan Legilitas Kepemilikan Tanah	95	100	358.150.000,00	100	370.000.000,00	100	421.000.000,00	100	422.050.000,00	100	430.000.000,00	100	517.500.000,00	100	2.518.700.000,00
2.5	URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP																
2.5.1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Cakupan Penanganan Sampah	5,6 %	5,62%	4.694.008.100,00	8%	4.655.000.000,00	12%	4.034.000.000,00	14%	4.140.700.000,00	16%	4.938.000.000,00	20%	5.250.000.000,00	20%	27.711.708.100,00
2.5.2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0	50%	1.841.540.000,00	60%	1.974.120.000,00	62%	2.985.000.000,00	64%	2.605.000.000,00	66%	2.843.000.000,00	68%	3.411.600.000,00	68%	15.660.260.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.5.3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Penurunan Emisi GRK	0%	0	-	2%	755.000.000,00	10%	1.207.000.000,00	15%	1.870.000.000,00	20%	1.880.000.000,00	25%	2.256.000.000,00	25%	7.968.000.000,00
2.5.4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Cakupan Informasi Lingkungan Hidup yang dapat diakses oleh publik	20%	20%	35.000.000,00	40%	165.000.000,00	60%	840.000.000,00	80%	185.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	870.000.000,00	100%	2.295.000.000,00
2.5.5	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Proporsi RTH Publik Perkotaan	16%	16%	425.000.000,00	16%	425.000.000,00	16%	577.500.000,00	18%	1.155.000.000,00	20%	1.315.000.000,00	20%	686.000.000,00	20%	4.583.500.000,00
2.6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																
2.6.1	Program penataan administrasi kependudukan.	Presentase pembangunan & pelaksanaan SIAK secara terpadu	95%	98%	1.733.811.000,00	98%	1.925.000.000,00	98%	2.033.740.000,00	98%	2.148.780.000,00	98%	2.255.600.000,00	98%	2.680.250.000,00	98%	12.777.181.000,00
2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2.7.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase LPM yang terbina	25%	10%	491.140.550,00	15%	1.036.450.000,00	25%	1.400.500.000,00	25%	1.427.800.000,00	25%	2.037.600.000,00	100%	1.437.600.000,00	100%	7.831.090.550,00
2.7.2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah lembaga ekonomi perdesaan yang difasilitasi	247	255	202.715.750,00	260	181.500.000,00	300	206.500.000,00	350	226.500.000,00	400	466.500.000,00	450	246.500.000,00	450	1.530.215.750,00
2.7.3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah desa kurang berkembang	9	9	261.995.550,00	7	396.900.000,00	6	456.000.000,00	4	470.000.000,00	2	594.000.000,00	0	595.000.000,00	0	2.773.895.550,00
		Jumlah desa berkembang	145	145		100		85		40		30		26		26	
		Jumlah desa cepat berkembang	12	12		50		85		100		125		140		140	
2.7.4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	45%	55%	1.125.168.000,00	70%	1.302.445.000,00	80%	2.625.500.000,00	90%	1.989.540.000,00	95%	4.917.150.000,00	100%	4.244.575.000,00	100%	16.204.378.000,00
2.7.5	Program Peningkatan Peran Perempuan di perdesaan	Jumlah PKK Aktif	173	0	0	30	750.000.000,00	70	750.000.000,00	100	825.000.000,00	140	825.000.000,00	173	850.000.000,00	173	4.000.000.000,00
2.7.6	Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	719	719	1.388.375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.388.375.000,00
2.7.7	Program Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah lembaga adat yang berfungsi	18	41	200.000.000,00	53	600.000.000,00	63	600.000.000,00	68	550.000.000,00	75	600.000.000,00	75	675.000.000,00	75	3.025.000.000,00
2.7.8	Program Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan SDA dan Sarana dan Prasarana Perdesaan	Jumlah kelompok pengelola SDA perdesaan yang berfungsi	0	-	-	35	374.000.000,00	50	385.000.000,00	65	385.000.000,00	80	400.000.000,00	95	400.000.000,00	95	1.944.000.000,00
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
2.8.1	Program Keluarga Berencana	Rasio Akseptor Kb baru (Jumlah akseptor KB / Jumlah pasangan usia subur)	68.31	70	924.610.800,00	75	1.400.000.000,00	80	960.000.000,00	85	960.000.000,00	85	960.000.000,00	85	1.152.000.000,00	85	6.356.610.800,00
2.8.2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase kelompok yang dilayani	0	-	-	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100	260.000.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.8.3	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan penyedia alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30	-	-	32	1.000.000.000,00	35	1.000.000.000,00	37	1.000.000.000,00	40	1.000.000.000,00	40	1.200.000.000,00	40	5.200.000.000,00
2.8.4	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD	1:1	1:1	2.331.961.600,00	,1;1	2.340.000.000,00	,1;1	2.340.000.000,00	,1;1	2.340.000.000,00	,1;1	2.340.000.000,00	,1;1	2.340.000.000,00	1:1	14.031.961.600,00
2.8.5	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling dan KRR	Jumlah kelompok KRR dalam sekolah	38 klp	klp	24.600.000,00	40	60.000.000,00	45	80.000.000,00	50	100.000.000,00	55	120.000.000,00	55	144.000.000,00	55	528.600.000,00
2.8.6	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	0	-	-	5	350.000.000,00	5	350.000.000,00	10	435.000.000,00	12	450.000.000,00	15	575.000.000,00	47	2.160.000.000,00
2.8.7	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase tenaga pendamping	0	-	-	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	92	100.000.000,00	92	100.000.000,00	92	120.000.000,00	92	520.000.000,00
2.8.8	Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu-PADU	Cakupan Anggota Bina Keluarga (BKB) ber KB	70%	%	86.300.000,00	75,00	95.000.000,00	80,00	100.000.000,00	85,00	100.000.000,00	95,00	100.000.000,00	95,00	120.000.000,00	95	601.300.000,00
2.9	Perhubungan																
2.9.1	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase penguatan pembangunan perhubungan udara dan laut	0 %	-	-	10,00	50.000.000,00	25,00	50.000.000,00	30,00	50.000.000,00	35,00	50.000.000,00	35,00	60.000.000,00	45,00	260.000.000,00
2.9.2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	459 unit	459	89.700.000,00	559,00	90.000.000,00	664,00	90.000.000,00	769,00	90.000.000,00	874,00	100.000.000,00	874,00	120.000.000,00	874,00	579.700.000,00
2.9.3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase kendaraan laik jalan	565,83 %	575,83	1.027.550.000,00	585,83	1.219.000.000,00	595,83	1.273.000.000,00	605,83	1.352.000.000,00	615,83	1.478.000.000,00	615,83	1.773.600.000,00	625,83	8.123.150.000,00
2.9.4	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah penumpang angkutan darat	1.580.040 orang	1.580.040 orang	3.251.735.000,00	1.580.040 orang	1.704.500.000,00	1.580.040 orang	1.100.000.000,00	1.580.040 orang	655.000.000,00	1.580.040 orang	435.000.000,00	1.580.040 orang	2.400.000.000,00	1.580.040 orang	9.546.235.000,00
2.9.5	Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas	Jumlah kecelakaan kendaraan lalu lintas	205 kasus	165	1.364.800.000,00	125,00	1.040.000.000,00	85,00	873.000.000,00	45,00	746.000.000,00	50,00	559.000.000,00	50,00	670.800.000,00	10,00	5.253.600.000,00
2.9.6	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kondisi kendaraan layak jalan	2467 unit	2.500	1.900.000.000,00	2.520	1.915.000.000,00	1.500	750.000.000,00	1.500	750.000.000,00	1.500	750.000.000,00	2.000	900.000.000,00	2.610,00	5.065.000.000,00
2.10	Komunikasi dan Informatika																
2.10.1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan e - government	1 aplikasi	1	1.170.739.600,00	2,00	2.705.150.000,00	1,00	2.222.000.000,00	1,00	2.222.000.000,00	1,00	2.322.000.000,00	1,00	3.420.600.000,00	1,00	14.062.489.600,00
2.10.2	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	3 %	5	45.950.000,00	15,00	285.000.000,00	20,00	185.000.000,00	25,00	185.000.000,00	30,00	185.000.000,00	30,00	222.000.000,00	35,00	1.107.950.000,00
2.10.3	Program Kerjasama Informasi dan Mas Media	Rasio masyarakat yang mengakses informasi	rasio	1:7	1.839.200.000,00	1:6	2.417.000.000,00	1:5	2.330.000.000,00	1:4	2.330.000.000,00	1:3	2.330.000.000,00	1:3	2.796.000.000,00	1:2	14.042.200.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
2.11.1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase Pertumbuhan UMKM	25%	26%	60.579.500,00	28%	165.000.000,00	30%	65.500.000,00	32%	66.000.000,00	35%	66.500.000,00	36%	67.000.000,00	36%	490.579.500,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.11.2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih	15,97%	16,10%	55.340.000,00	16,25%	116.000.000,00	16,75%	117.500.000,00	17,75%	118.500.000,00	17,50%	119.500.000,00	17,75%	120.700.000,00	17,75%	647.540.000,00
2.11.3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, BUMD dan BUMN	0%	5%	133.330.500,00	7%	132.000.000,00	10%	172.500.000,00	12%	177.000.000,00	15%	181.500.000,00	17%	189.750.000,00	17%	986.080.500,00
2.11.4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	67,83%	67,83%	113.750.000,00	68,70%	119.437.500,00	68,90%	125.000.000,00	69,00%	131.250.000,00	69,40%	138.000.000,00	69,50%	165.600.000,00	69,50%	793.037.500,00
2.12	Penanaman Modal																
2.12.1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN dan PMA	15 PMDN	5	2.373.800.000,00	5,00	1.753.400.000,00	5,00	1.773.000.000,00	5,00	1.805.000.000,00	5,00	1.810.000.000,00	5,00	2.282.000.000,00	45	11.797.200.000,00
			3 PMA	1		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		9	
2.12.2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase izin	96,80%	100%	1.160.200.000,00	100%	1.218.210.000,00	100%	110.000.000,00	100%	115.500.000,00	100%	121.275.000,00	100%	325.000.000,00	100%	3.050.185.000,00
2.13	Kepemudaan dan Olahraga																
2.13.1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jenis kegiatan kepemudaan yang di ikuti	70	75	2.142.611.000,00	75	1.450.000.000,00	75	1.450.000.000,00	75	1.450.000.000,00	75	1.450.000.000,00	75	1.885.000.000,00	450	9.827.611.000,00
2.13.2	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecapakan Hidup Pemuda	Jumlah Kelompok Pemuda Wirausaha Mandiri (Kerjasama dengan sosnakertrans)	0	-	-	35	125.000.000,00	35	125.000.000,00	35	135.000.000,00	35	145.000.000,00	35	188.500.000,00	175	793.500.000,00
2.13.3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti	2	2	224.400.000,00	2	800.000.000,00	2	910.000.000,00	2	910.000.000,00	2	894.000.000,00	2	1.156.200.000,00	12	4.894.600.000,00
2.13.4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2	2	2.073.200.000,00	7	2.067.800.000,00	2	750.000.000,00	2	3.416.000.000,00	2	690.000.000,00	2	897.000.000,00	17	9.894.000.000,00
2.13.5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan	90	95	1.555.000.000,00	95	1.600.000.000,00	95	1.200.000.000,00	95	1.700.000.000,00	95	1.700.000.000,00	95	2.210.000.000,00	95	9.965.000.000,00
2.14	Statistik																
2.14.1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase publikasi data/informasi/statistik daerah	95	100	149.750.000,00	100	169.750.000,00	100	199.750.000,00	100	229.750.000,00	100	259.750.000,00	100	311.700.000,00	100	1.320.450.000,00
2.15	Kebudayaan																
2.15.1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah lembaga Adat yang dilestarikan	0	1	65.700.000,00	1	560.000.000,00	2	520.000.000,00	2	1.520.000.000,00	2	570.000.000,00	2	734.000.000,00	10	3.969.700.000,00
2.15.2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Presentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	75	80	462.550.000,00	85	377.600.000,00	85	200.000.000,00	85	377.600.000,00	85	2.850.000.000,00	85	3.705.000.000,00	85	7.972.750.000,00
2.16	Perpustakaan																
2.16.1	Program Peningkatan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase jumlah pengunjung perpustakaan	35 %	36%	378.760.000,00	0,38	3.143.550.000,00	0,40	1.287.350.000,00	0,44	1.290.151.000,00	0,48	1.294.151.000,00	0,48	798.151.000,00	0,50	8.192.113.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.17	Kearsipan																
2.17.1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD dengan kearsipan berbasis TIK	0	-	-	-	-	100	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100	150.000.000,00
2.17.2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip	Prosentase Jumlah SKPD dan desa yang menerapkan arsip secara baku	23 %	23	-	38,00	60.000.000,00	53,00	720.000.000,00	69,00	505.000.000,00	85,00	570.000.000,00	85,00	635.000.000,00	100,00	2.490.000.000,00
2.17.3	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase SKPD yang dimonitoring	0 %	16	33.800.000,00	33,00	35.000.000,00	50,00	40.000.000,00	67,00	40.000.000,00	84,00	40.000.000,00	84,00	45.000.000,00	100,00	233.800.000,00
2.17.4	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Informasi	Prosentase Pengelola Kearsipan yang mendapatkan Bimbingan Teknis	0 SKPD	0	-	28	215.000.000,00	57	215.000.000,00	85	220.000.000,00	95	270.000.000,00	100	275.000.000,00	100	1.310.140.000,00
3.	URUSAN PILIHAN																
3.1	Kelautan Perikanan																
3.1.1	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Persentase peran serta masyarakat dalam pelestarian SDA Perikanan	100	100	216.250.000,00	100,00	227.000.000,00	100,00	238.350.000,00	100,00	250.500.000,00	100,00	263.000.000,00	100,00	315.600.000,00	100,00	1.510.700.000,00
3.1.2	Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Persentase tingkat kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya laut	100	100	107.421.000,00	100,00	685.000.000,00	100,00	970.000.000,00	100,00	770.000.000,00	100,00	760.000.000,00	100,00	1.260.000.000,00	100,00	4.552.421.000,00
3.1.3	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Budidaya Air tawar (Ton)	1.562	1.600	1.610.455.500,00	1.700	2.142.200.000,00	1.800	4.182.200.000,00	1.900	4.312.200.000,00	2.000	5.559.200.000,00	2.000	10.559.200.000,00	2.000	28.365.455.500,00
		Produksi Budidaya Laut (Ton)	31.441	31.500		31.600		31.700		31.800		31.900		32.000		32.000	
		Produksi Budidaya Ikan Air Payau (Ton)	152.352	152.400		152.500		152.600		152.700		152.800		153.000		153.000	
3.1.4	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap laut(Ton)	1.570	1.600	2.200.597.500,00	1.700	2.742.200.000,00	1.800	2.963.000.000,00	1.900	2.963.000.000,00	2.000	3.463.000.000,00	2.100	4.463.000.000,00	2.100	18.794.797.500,00
		Peningkatan produksi perikanan tangkap perairan umum(Ton)	175	180		190		200		210		220		230		240	
3.1.5	Prog. Optimalisasi pengelolaan & pemasaran produk perikanan	Jumlah Produksi Olahan terhadap Produksi Perikanan(Ton)	3,4	4,1	178.500.000,00	4,9	824.000.000,00	5,9	1.378.000.000,00	7,14	1.400.000.000,00	8,5	1.514.000.000,00	11	2.014.000.000,00	11	7.308.500.000,00
3.1.6	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Persentase kawasan budidaya yang terpadu	90	95	607.422.000,00	95	637.000.000,00	95	668.850.000,00	95	702.200.000,00	95	737.310.000,00	95	958.500.000,00	95	4.311.282.000,00
3.2	Pariwisata																
3.2.1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Presentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	25,00	25	75.200.000,00	50	885.200.000,00	75	310.200.000,00	80	110.200.000,00	90	110.200.000,00	95	143.260.000,00	95	1.634.260.000,00
3.2.2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	0	-	-	95	1.326.000.000,00	95	1.500.000.000,00	95	1.500.000.000,00	95	1.500.000.000,00	95	1.500.000.000,00	95	7.326.000.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.3	Pertanian																
3.3.1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	PDB Pertanian (%)	52,37	52,5	258.102.000,00	53,00	2.191.000.000,00	53,50	2.804.000.000,00	54,00	3.384.800.000,00	54,50	3.966.210.000,00	55,90	4.726.360.000,00	55,00	17.330.472.000,00
3.3.2	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Prosentase peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	5	5	345.200.000,00	5,00	1.225.000.000,00	5,00	1.251.250.000,00	5,00	1.278.812.500,00	5,00	1.350.000.000,00	5,00	1.480.000.000,00	5,00	6.930.262.500,00
3.3.3	Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Laju pertumbuhan produksi	5	5	1.264.600.000,00	5	2.731.260.000,00	5	3.027.500.000,00	5	3.229.996.000,00	5	7.418.690.000,00	5	8.730.000.000,00	25	26.402.046.000,00
3.1.4	Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan	Laju Pertumbuhan Produksi per tahun	10	10	6.277.336.900,00	10,00	8.104.000.000,00	10,00	9.139.864.584,00	10,00	9.806.124.685,40	10,00	10.400.000.000,00	10,00	14.850.000.000,00	10,00	58.577.326.169,40
3.1.5	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah jenis kegiatan penyuluhan	6	6	1.007.800.000,00	7	1.209.400.000,00	7	1.233.400.000,00	7	1.257.400.000,00	7	1.281.400.000,00	7	1.305.400.000,00	41	7.294.800.000,00
3.1.6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase penanganan penyakit ternak	95	100	654.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	767.000.000,00	100	805.350.000,00	100	875.000.000,00	100	4.501.350.000,00
3.1.7	Program Peningkatan Produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	5	5	250.800.000,00	5,00	676.000.000,00	5,00	875.000.000,00	5,00	1.230.000.000,00	5,00	1.548.000.000,00	5,00	2.200.000.000,00	5,00	6.779.800.000,00
3.1.8	Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	0	-	-	30	400.000.000,00	40	450.000.000,00	60	475.000.000,00	80	500.000.000,00	95	500.000.000,00	95	2.325.000.000,00
3.1.9	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase peningkatan penerapan teknologi peternakan	0	-	-	30	224.000.000,00	40	345.000.000,00	60	231.500.000,00	80	280.400.000,00	95	520.700.000,00	95	1.601.600.000,00
3.4	Kehutanan																
3.4.1	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase luasan rehabilitasi hutan dan lahan	95	100	719.828.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.219.828.000,00
3.4.2	Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase pengurangan kasus perambahan dan illegal logging	3 Kasus	0 Kasus	975.612.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		975.612.000,00
3.4.3	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase pengelolaan hutan berbasis masyarakat	100	100	568.860.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		568.860.000,00
3.5	Energi dan Sumber Daya Mineral																
3.5.1	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah pemilik IUP	43 IUP	43 IUP	855.627.000,00	30 IUP	645.000.000,00	30 IUP	650.000.000,00	30 IUP	655.000.000,00	30 IUP	660.000.000,00	30 IUP	515.000.000,00	30 IUP	3.980.627.000,00
3.5.2	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah KK yang terlayani PLTMH dan PLTS	5292 KK	200 KK	373.715.000,00	315 KK	2.755.000.000,00	200 KK	5.698.564.765,37	200 KK	8.750.000.000,00	200 KK	9.160.000.000,00	151 KK	8.255.000.000,00	6557 KK	34.992.279.765,37
3.5.3	Program Perencanaan Pengembangan Data dan Informasi Geologi	Jumlah dokumen potensi geologi	2 Dok	1 Dok	460.596.000,00	2 Dok	380.000.000,00	3 Dok	720.000.000,00	2 Dok	480.000.000,00	2 Dok	730.000.000,00	2 Dok	480.000.000,00	15 Dok	3.250.596.000,00
3.6	Perdagangan																
3.6.1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Peningkatan Perlindungan	15%	20%	299.864.000,00	25%	303.250.000,00	30%	304.610.000,00	40%	305.500.000,00	50%	306.550.000,00	55%	307.250.000,00	55%	1.827.024.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Konsumen dan Pengamanan Perdagangan															
3.6.2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,36%	-	-	9,39%	80.000.000,00	9,41%	85.250.000,00	9,45%	90.000.000,00	9,48%	100.650.000,00	9,49%	102.850.000,00	9,50%	458.750.000,00
3.6.3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal = Jumlah pedagang yang mendptkn binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang	9,87%	9,87%	3.858.824.700,00	10,00%	4.050.000.000,00	11,25%	4.252.500.000,00	11,85%	4.467.000.000,00	12,17%	4.690.350.000,00	12,18%	5.678.000.000,00	12,50%	26.996.674.700,00
3.7	Perindustrian																
3.7.1	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap Sektor Industri	2,38%	2,38%	132.372.500,00	2,38%	142.000.000,00	2,38%	144.000.000,00	2,38%	146.000.000,00	2,38%	148.000.000,00	2,38%	150.000.000,00	2,38%	862.372.500,00
3.7.2	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Cakupan bina kelompok pengrajin = Jumlah kelompok pengrajin yang difasilitasi pemerintah dibagi jumlah kelompok pengrajin x 100 %	33,33%	33,36%	494.087.500,00	33,38%	576.500.000,00	33,40%	585.750.500,00	33,43%	602.300.700,00	33,43%	610.675.000,00	33,47%	612.200.000,00	33,47%	3.481.513.700,00
3.7.3	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,55%	4,57%	159.089.300,00	4,60%	165.000.000,00	4,62%	173.250.000,00	4,65%	185.000.000,00	4,67%	194.250.000,00	4,69%	189.750.000,00	4,69%	1.066.339.300,00
3.7.4	Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan Industri	44,22%	44,22%	-	44,30%	5.000.000.000,00	44,30%	8.848.000.000,00	44,35%	4.000.000.000,00	44,40%	4.000.000.000,00	45%	4.000.000.000,00	45,00%	25.848.000.000,00
3.8	Transmigrasi																
3.8.1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi Yang Tertangani	24,60	58,48	350.840.000,00	51,02	700.000.000,00	51,02	550.000.000,00	48,94	1.600.000.000,00	45,25	1.500.000.000,00	10,12	1.800.000.000,00	10,12	6.500.840.000,00
4.	URUSAN FUNGSI PENUNJANG																
4.1	Perencanaan Pembangunan Daerah																
4.1.1	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi penyusunan dokumen perencanaan	90	95	939.900.000,00	95	2.075.000.000,00	95	1.580.000.000,00	95	1.985.000.000,00	95	1.715.000.000,00	95	2.930.000.000,00	95	11.224.900.000,00
4.1.2	Program Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Persentase keberhasilan kerjasama pembangunan	90	95	74.600.000,00	95	94.600.000,00	95	124.600.000,00	95	154.600.000,00	95	184.600.000,00	95	221.520.000,00	95	854.520.000,00
4.1.3	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikoordinasikan	95	95	50.000.000,00	95	70.000.000,00	95	100.000.000,00	95	130.000.000,00	95	160.000.000,00	95	192.000.000,00	95	702.000.000,00
4.1.4	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Cakupan wilayah pengembangan yang dikoordinasikan	95	95	564.350.000,00	95	584.350.000,00	95	614.350.000,00	95	644.350.000,00	95	674.350.000,00	95	809.220.000,00	95	3.890.970.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.5	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase pengembangan kapasitas perencanaan	-	-	-	90	525.000.000,00	90	90	90	375.690.000,00	90	375.690.000,00	90	535.000.000,00	90	2.187.070.000,00
4.1.6	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan	100	100	4.439.647.950,00	100	1.272.625.000,00	100	1.102.625.000,00	100	1.132.625.000,00	100	1.162.625.000,00	100	1.395.150.000,00	100	10.505.297.950,00
		Persentase ketepatan waktu dalam perencanaan	100	100		100		100		100		100		100		100	
4.1.7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	95	95	830.400.000,00	95	1.225.400.000,00	95	1.155.400.000,00	95	1.185.400.000,00	95	1.215.400.000,00	95	1.750.000.000,00	95	7.362.000.000,00
4.1.8	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya	95	95	1.609.950.000,00	95	1.254.950.000,00	95	944.950.000,00	95	974.950.000,00	95	1.004.950.000,00	95	1.205.940.000,00	95	6.995.690.000,00
4.1.9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	95	-	-	95	125.000.000,00	95	155.000.000,00	95	245.000.000,00	95	275.000.000,00	95	330.000.000,00	95	1.130.000.000,00
4.1.10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Persentase koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	95	-	-	95	350.000.000,00	95	350.000.000,00	95	475.000.000,00	95	400.000.000,00	95	450.000.000,00	95	2.025.000.000,00
4.1.11	Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana	Persentase koordinasi pembangunan fisik dan prasarana	95	95	105.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	105.000.000,00
4.2	Penelitian dan Pengembangan Daerah																
4.2.1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase kajian pengembangan lingkungan sehat	0	-	-	95	350.000.000,00	95	350.000.000,00	95	634.900.000,00	95	350.000.000,00	95	435.000.000,00	95	2.119.900.000,00
4.2.2	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase kajian penciptaan iklim UKM yang kondusif	0			95	275.000.000,00	95	275.000.000,00	95	525.000.000,00	95	275.000.000,00	95	275.000.000,00	95	1.625.000.000,00
4.2.3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	0	-	-	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	1.250.000.000,00
4.2.4	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah	Persentase kajian terhadap potensi Sumber daya	0	-	-	95	245.000.000,00	95	245.000.000,00	95	245.000.000,00	95	245.000.000,00	95	245.000.000,00	95	1.225.000.000,00
4.2.5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase kajian terhadap penataan peraturan perundang-undangan daerah	0	-	-	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	1.250.000.000,00
4.2.6	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Persentase kajian terhadap pengembangan komunikasi informasi dan media massa	0	-	-	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	1.250.000.000,00
4.2.7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pertanian/perkebunan	Persentase kajian terhadap peningkatan ketahanan pangan	0	-	-	95	1.000.000.000,00	95	1.000.000.000,00	95	1.000.000.000,00	95	1.000.000.000,00	95	1.000.000.000,00	95	5.000.000.000,00
4.2.8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase kajian terhadap peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan	0	-	-	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	1.250.000.000,00
4.2.9	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase kajian terhadap penerapan teknologi	0	-	-	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	1.250.000.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		pertanian/perkebunan															
4.2.10	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Persentase kajian terhadap peningkatan penerapan teknologi peternakan	0	-	-	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	1.250.000.000,00
4.2.11	Program optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan	Persentase kajian terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan	0	-	-	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	1.250.000.000,00
4.2.12	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau, dan Air Tawar	Persentase kajian terhadap pengembangan kawasan budidaya laut/air payau dan air tawar	0	-	-	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	250.000.000,00	95	1.250.000.000,00
4.2.13	Program Kajian dan Pengembangan Potensi PAD	Persentase kajian terhadap pengembangan potensi PAD	0	-	-	95	356.880.000,00	95	356.880.000,00	95	356.880.000,00	95	356.880.000,00	95	356.880.000,00	95	1.784.400.000,00
4.2.14	Program Pengkajian dan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase kajian terhadap peningkatan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	0	-	-	95	365.900.000,00	95	365.900.000,00	95	365.900.000,00	95	365.900.000,00	95	365.900.000,00	95	1.829.500.000,00
4.2.15	Program Pengkajian Pengendalian Kantrambimas	Persentase kajian terhadap pengendalian Kantrambimas	0	-	-	95	450.000.000,00	95	375.000.000,00	95	545.900.000,00	95	760.000.000,00	95	1.500.000.000,00	95	3.630.900.000,00
4.2.16	Program Pengkajian Seni dan Budaya Daerah	Persentase kajian terhadap seni dan budaya daerah	0	-	-	95	350.000.000,00	95	750.000.000,00	95	1.663.035.000,00	95	750.000.000,00	95	1.300.000.000,00	95	4.813.035.000,00
4.2.17	Program Pengkajian dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Persentase kajian terhadap system inovasi daerah	0	-	-	95	300.000.000,00	95	340.000.000,00	95	1.089.000.000,00	95	513.700.000,00	95	786.000.000,00	95	3.028.700.000,00
4.3	Pengelolaan Keuangan dan Aset																
4.3.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan berbasis akrual	95%	100%	6.267.591.059,00	100%	7.715.000.000,00	100%	8.100.750.000,00	100%	8.510.200.000,00	100%	8.795.150.000,00	100%	10.108.500.000,00	100%	49.497.191.059,00
4.4	Kepegawalan dan Diklat																
4.4.1	Program pendidikan kedinasan	Jumlah ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai tugas dan fungsinya	2.579 Orang	20 Orang	61.500.000,00	65 orang	141.750.000,00	75 orang	78.500.000,00	85 orang	83.000.000,00	57 orang	71.900.000,00	64 orang	73.300.000,00	348 orang	509.950.000,00
4.4.2	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan bersertifikat	452 Orang	196 Orang	3.867.687.600,00	218 Orang	3.406.505.000,00	745 Orang	3.600.000.000,00	545 Orang	3.560.000.000,00	495 Orang	3.467.000.000,00	395 Orang	2.750.000.000,00	2.594 Orang	20.651.192.600,00
4.4.3	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier aparatur Pemerintah Daerah	1.947 orang	2.952 orang	2.133.690.000,00	5.613 orang	3.952.402.000,00	5.663 orang	2.922.522.100,00	6.031 orang	2.943.648.205,00	6.508 orang	3.090.830.615,25	6.924 orang	4.358.996.738,30	33.691 orang	19.402.089.658,55
4.5	Pemerintahan Umum (Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Pelayanan Perizinan, Kecamatan,																



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kelurahan																
4.5.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	87%	90%	11.350.332.400,00	96%	11.910.000.000,00	97%	12.500.000.000,00	98%	13.125.000.000,00	98%	13.700.000.000,00	100%	16.440.000.000,00	100%	79.025.332.400,00
4.5.2	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah	95%	100%	2.387.350.000,00	100%	2.538.330.000,00	100%	2.500.000.000,00	100%	2.500.000.000,00	100%	2.500.000.000,00	100%	3.000.000.000,00	100%	15.425.680.000,00
4.5.3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah SKPD Memenuhi NSPK (Administratif =ringan, substantif = berat)	Berat= 22 Ringan = 19	Berat= 15 Ringan=10	2.457.099.000,00	Berat= 20 Ringan = 10	2.495.349.000,00	Berat= 10 Ringan = 10	2.555.349.000,00	Berat=5 Ringan = 5	2.555.349.000,00	Berat= 5 Ringan = 5	2.555.349.000,00	Berat= 5 Ringan = 5	2.672.349.000,00	Berat=0 Ringan =0	15.290.844.000,00
4.5.4	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawas	Jumlah Auditor, Auditor Kepegawaian, P2UPD pertama, Muda, madya dan Utama	17Auditor Kepegawaia	24	60.025.000,00	29	76.000.000,00	7	79.800.000,00	7	83.790.000,00	7	89.000.000,00	7	129.000.000,00	57	517.615.000,00
4.5.5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase capaian informasi publik	80%	83,33%	261.800.000,00	85%	1.408.000.000,00	90%	1.435.500.000,00	93,33%	1.458.000.000,00	95%	1.488.000.000,00	100%	1.738.000.000,00	100%	7.789.300.000,00
4.5.6	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100%	100%	450.000.000,00	100%	450.000.000,00	100%	475.000.000,00	100%	475.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	2.400.000.000,00
4.5.7	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Tersedianya Aturan Perundang-Undangan sebagai Payung Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan	95	96	1.644.910.000,00	96	2.395.475.000,00	96	2.429.000.000,00	96	2.452.525.000,00	96	2.456.470.000,00	96	2.522.625.000,00	96	13.901.005.000,00
4.5.8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase penataan daerah otonomi baru	95	97	1.124.097.120,00	97	1.300.000.000,00	97	1.550.000.000,00	97	1.550.000.000,00	97	1.550.000.000,00	97	1.860.000.000,00	97	8.934.097.120,00
4.5.9	Program Pelayanan Pemerintah Kecamatan / Kelurahan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pemerintahan di Kecamatan	95	97	94.000.000,00	97	150.000.000,00	97	200.000.000,00	97	200.000.000,00	97	200.000.000,00	97	240.000.000,00	97	1.084.000.000,00
4.5.10	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase terciptanya Proses Pengadaan Barang / Jasa yang Efektif, Efisien dan transparan	95	100	933.300.000,00	100	1.030.000.000,00	100	1.450.000.000,00	100	1.450.000.000,00	100	1.450.000.000,00	100	1.740.000.000,00	100	8.053.300.000,00
4.5.11	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Terpenuhi Legalitas Bagi Perorangan, Badan Usaha	90	95	314.300.000,00	95	345.000.000,00	95	410.000.000,00	95	410.000.000,00	95	410.000.000,00	95	492.000.000,00	95	2.381.300.000,00
4.5.12	Program Bina Administrasi Pemerintahan Umum	Persentase Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	95	100	784.000.000,00	100	1.162.100.000,00	100	1.246.305.000,00	100	1.246.305.000,00	100	1.246.305.000,00	100	1.495.566.000,00	100	7.180.581.000,00
4.5.13	Program Bina Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra	Persentase Tertib Administrasi Kemasyarakatan dan Kesra	95	100	842.800.000,00	100	1.324.500.000,00	100	1.539.500.000,00	100	1.539.500.000,00	100	1.539.500.000,00	100	1.847.400.000,00	100	8.633.200.000,00
4.5.14	Program Pemantauan dan Pengendalian Distribusi Kemasyarakatan	Persentase Pelayanan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	95	-	-	95	1.468.500.000,00	95	1.541.925.000,00	95	1.541.925.000,00	95	1.541.925.000,00	95	1.850.310.000,00	95	7.944.585.000,00
4.5.15	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase kinerja dan akuntabilitas SKPD	95	-	-	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	24.000.000,00	100	99.000.000,00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.5.16	Program Manajemen Perubahan	Persentase manajemen reformasi birokrasi	85	-	-	95	385.000.000,00	95	440.000.000,00	95	440.000.000,00	95	440.000.000,00	95	528.000.000,00	95	2.233.000.000,00
4.5.17	Program Penataan sistem Manajemen Aparatur	Persentase transparansi dan akuntabilitas penmgelolaan SDM aparatur	95	-	-	100	350.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	100	480.000.000,00	100	2.030.000.000,00
4.5.18	Program Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekretaris Daerah	Persentase Akuntabilitas Keuangan Sekretaris Daerah	95	-	-	100	1.000.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.440.000.000,00	100	6.040.000.000,00
5.	PROGRAM RUTIN SKPD																
5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	95%	95%	45.112.482.191,00	95%	48.120.000.000,00	95%	49.082.400.000,00	95%	50.065.000.000,00	95%	51.066.300.000,00	95%	52.000.000.000,00	95%	295.446.182.191,00
5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	95%	95%	19.455.831.350,00	95%	24.363.356.667,78	95%	24.453.411.817,37	95%	30.248.706.782,70	95%	29.396.854.383,21	95%	50.100.220.536,55	95%	178.018.381.537,61
5.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	95%	95%	566.750.000,00	95%	572.550.000,00	95%	689.203.000,00	95%	514.780.000,00	95%	666.000.000,00	95%	732.680.000,00	95%	3.741.963.000,00
5.4	Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS	Jumlah ASN terfasilitasi pindah/purna tugas	111 orang	-	-	218 orang	154.600.000,00	240 orang	175.600.000,00	286 orang	216.600.000,00	346 orang	257.600.000,00	302 orang	297.600.000,00	1.562 orang	1.102.000.000,00
5.5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	95%	95%	6.180.459.650,00	95%	6.190.000.000,00	95%	6.190.000.000,00	95%	6.190.000.000,00	95%	6.200.000.000,00	95%	6.300.000.000,00	95%	37.250.459.650,00
5.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95%	95%	715.271.500,00	95%	3.514.500.000,00	95%	3.950.000.000,00	95%	4.534.000.000,00	95%	4.579.340.000,00	95%	4.886.000.000,00	95%	22.179.111.500,00
5.7	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Persentase peningkatan pelayanan kedinasan	95%	95%	2.656.124.200,00	95%	2.788.000.000,00	95%	2.800.000.000,00	95%	2.800.000.000,00	95%	2.800.000.000,00	95%	2.900.000.000,00	95%	16.744.124.200,00
	TOTAL ANGGARAN				543.275.943.155,88		670.120.875.773,66		733.650.355.766,74		806.191.772.873,10		856.119.639.998,46		970.516.621.474,85		4.579.875.209.042,69



BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja pembangunan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD Kabupaten Luwu Utara. Penetapan indikator kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian.

9.1. INDIKATOR MAKRO DAERAH

Indikator makro daerah merupakan indikator ekonomi dan sosial budaya yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021)

Tabel 9.1 Indikator Makro Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA	Juta Rp	8.681.527,00	9.371.311,62	10.482.011,41	11.792.637,16	13.339.175,55	15.164.090,85	17.317.490,90
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rp	4.409.251,09	4.904.845,20	5.484.690,31	6.168.907,54	6.976.283,86	7.928.987,93	9.053.178,73
	Pertambangan dan Panggalian	Juta Rp	147.027,40	163.650,71	183.099,98	206.050,12	233.131,29	265.087,07	302.794,88
	Industri Pengolahan	Juta Rp	356.407,28	394.853,27	439.835,08	492.913,61	555.546,28	629.452,83	716.662,56
	Pengadaan Listrik dan Gas	Juta Rp	7.299,26	7.789,00	8.787,32	9.734,05	10.851,19	12.169,42	13.724,93
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Juta Rp	336,26	370,47	410,49	457,72	513,45	579,22	656,82
	Konstruksi	Juta Rp	929.429,31	1.034.188,47	1.156.756,69	1.301.387,19	1.472.051,17	1.673.434,68	1.911.067,21
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Juta Rp	677.957,56	725.275,60	780.637,71	845.964,99	923.051,19	1.014.012,90	1.121.347,73
	Transportasi dan Pergudangan	Juta Rp	167.804,92	191.354,38	218.907,25	251.419,64	289.784,25	335.054,49	388.473,38
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta Rp	88.687,26	99.554,27	112.268,67	127.271,67	144.975,20	165.865,37	190.515,77
	Informasi dan Komunikasi	Juta Rp	264.890,49	299.248,00	339.446,29	386.880,27	442.852,36	508.889,43	586.834,98
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Juta Rp	119.721,02	132.809,28	147.688,54	165.842,07	186.478,44	211.254,15	240.489,50
	Real Estate	Juta Rp	274.536,36	313.293,87	358.640,16	412.148,78	475.288,94	549.794,34	637.710,72
	Jasa Perusahaan	Juta Rp	1.509,28	1.681,76	1.883,56	2.121,69	2.402,67	2.734,24	3.125,49
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rp	400.224,46	436.410,39	478.747,93	528.706,22	587.657,01	657.218,94	739.302,02
	Jasa Pendidikan	Juta Rp	505.204,75	586.007,01	680.545,65	792.101,25	923.736,86	1.079.066,88	1.262.356,30
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta Rp	69.573,37	77.589,40	86.968,15	98.035,08	111.094,06	126.503,66	144.686,98
	Jasa Lainnya	Juta Rp	2.135,50	23.94,55	2.697,64	3.055,28	3.477,30	3.975,29	4.562,91
2	PDRB HARGA KONSTANT	Juta Rp	6.157.695,40	6.630.751,27	7.149.693,55	7.725.719,49	8.365.108,27	9.074.829,83	9.855.073,42



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	MENURUT LAPANGAN USAHA								
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Juta Rp	3.139.249,86	3.380.347,71	3.644.888,67	3.938.499,17	4.264.406,82	4.626.164,32	5.024.097,56
	Pertambangan dan Panggalian	Juta Rp	96.211,63	106.341,71	117.454,42	129.789,53	143.481,49	158.679,57	175.397,47
	Industri Pengolahan	Juta Rp	258.271,86	279.984,92	303.804,15	330.243,50	359.591,17	329.167,09	428.000,59
	Pengadaan Listrik dan Gas	Juta Rp	8.283,96	8.883,30	9.540,78	10.270,58	11.080,66	11.979,85	12.968,96
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Juta Rp	282,54	299,67	318,45	339,31	362,46	388,15	416,42
	Konstruksi	Juta Rp	634.323,96	673.204,00	715.856,24	763.200,23	815.752,06	874.084,59	938.250,37
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Juta Rp	618.152,99	656.964,20	699.540,10	746.799,35	799.257,11	857.485,23	921.536,16
	Transportasi dan Pergudangan	Juta Rp	113.314,67	119.884,90	127.092,45	135.092,82	143.973,24	153.830,50	164.673,49
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Juta Rp	61.723,47	67.848,94	74.568,58	82.027,38	90.306,64	99.496,63	109.605,61
	Informasi dan Komunikasi	Juta Rp	241.916,75	269.436,69	299.626,07	333.136,28	370.332,61	411.620,53	457.037,25
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Juta Rp	92.634,66	99.637,51	107.319,65	115.846,82	125.311,97	135.818,30	147.375,26
	Real Estate	Juta Rp	178.307,18	193.220,31	209.580,01	227.739,28	247.896,07	270.270,11	294.881,55
	Jasa Perusahaan	Juta Rp	1.039,92	1.077,10	1.117,89	1.163,16	1.213,42	1.269,20	1.330,56
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Juta Rp	302.088,98	318.868,32	337.275,26	357.706,97	380.386,16	405.560,06	433.251,35
	Jasa Pendidikan	Juta Rp	357.681,94	396.572,50	439.235,44	486.591,31	539.156,32	597.503,49	661.685,37
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Juta Rp	52.684,15	56.560,96	60.813,83	65.534,52	70.774,84	76.590,83	82.988,82
	Jasa Lainnya	Juta Rp	1.527,65	1.591,50	1.661,54	1.739,29	1.825,58	1.921,37	2.026,74
3	Kontribusi PDRB terhadap sector	Persen	100	100	100	100	100	100	100
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	7,63	7,68	7,82	8,06	8,27	8,48	8,60
	Pertambangan dan Panggalian	Persen	10,76	10,53	10,45	10,50	10,55	10,59	10,54
	Industri Pengolahan	Persen	8,41	8,41	8,51	8,70	8,89	9,06	9,14
	Pengadaan Listrik dan Gas	Persen	7,15	7,23	7,40	7,65	7,89	8,11	8,26
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Persen	5,92	6,06	6,27	6,55	6,82	7,09	7,28
	Konstruksi	Persen	5,99	6,13	6,34	6,61	6,89	7,15	7,34
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	6,15	6,28	6,48	6,76	7,02	7,29	7,47
	Transportasi dan Pergudangan	Persen	5,65	5,80	6,01	6,29	6,57	6,85	7,05
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	10,08	9,92	9,90	10,00	10,09	10,18	10,16
	Informasi dan Komunikasi	Persen	11,72	11,38	11,20	11,18	11,17	11,15	11,03
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	7,50	7,56	7,71	7,95	8,17	8,38	8,15
	Real Estate	Persen	8,36	8,36	8,47	8,66	8,85	9,03	9,11
	Jasa Perusahaan	Persen	3,41	3,58	3,79	4,05	4,32	4,60	4,83
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Persen	5,40	5,55	5,77	6,06	6,34	6,62	6,83
	Jasa Pendidikan	Persen	11,15	10,87	10,76	10,78	10,80	10,82	10,74
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Persen	7,28	7,36	7,52	7,76	8,00	8,22	8,35
	Jasa Lainnya	Persen	4,01	4,18	4,40	4,68	4,96	5,25	5,48



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	PDRB PERKAPITA	Rp/Jiwa	28.681.153	30.688,182	34.032.394	37.983.178	42.633.111	48.109.120	54.549.292
5	PERTUMBUHAN EKONOMI	Persen	6,25	7,50	7,80	8,00	8,20	8,30	8,50
6	Laju Inflasi	Persen	5,17	5,02	4,87	4,72	4,57	4,42	4,27
7	KEUANGAN								
	Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	147.571.457.186,02	79.658.721.360	78.839.771.440	82.763.218.056,40	86.155.310.140,56	89.597.446.140,75	93.091.882.645,88
	Dana Perimbangan	Rupiah	709.245.009.035,00	948.693.123.000,00	1.118.966.966.525,40	1.193.571.110.509,48	1.275.571.826.624,14	1.365.704.303.123,70	1.464.776.934.260,79
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rupiah	194.907.486.127,98	158.561.969.800,00	160.152.182.900,00	174.372.873.740,00	189.926.681.305,00	206.940.940.603,56	225.555.314.277,01
	Nilai Investasi	Juta Rp	1.026.937,16	1.066.705,96	1.179.509,09	1.321.878,62	1.495.996,65	1.863.650,36	2.298.833,24
8	Jumlah Penduduk	Jiwa	302.687	305.343	307.930	310.445	312.885	315.250	317.600
9	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,74
10	Angka Kemiskinan	Persen	14,32	13,55	12,37	11,55	9,50	8,50	8,00
11	Daya Beli	Rupiah	10.625	10,695	10,770	10,850	10,850	11,025	11,122

Sumber : Hasil Analisis 2016

9.2. INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah merupakan indikator dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2016-2021) sesuai dengan misi RPJMD.

(1) INDIKATOR KINERJA UNTUK MISI KESATU

Tabel 9.2 memuat indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi Kesatu: Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik, dan komunitas adat yang berdaya.

Tabel 9.2 Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Kesatu

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks persepsi korupsi		39,5	40	45	50	55	60	60
2	Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	81,70	82	85	88	90	93	95
4	Predikat SAKIP Kabupaten	Kategori	CC	CC	CC	B	B	B	B
5	Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI)	Persen	2,0	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,0
6	Kasus konflik antar umat beragama	persen	0	0	0	0	0	0	0
7	Rasio pemuka Agama yang mendapatkan insentif pemerintah	Persen	25	27	33	38	44	48	50
8	Lembaga adat yang dibina	Persen	40	43	48	54	61	68	75
9	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	3,09	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,40



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
10	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	Persen	90	92	94	96	97	98	98
14	Prosentase jumlah penduduk ber KK	Persen	90	92	94	96	97	98	98
15	Rasio bayi ber akte kelahiran	Persen	90	92	94	96	97	98	98
16	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
17	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menata dan Mengelolah Arsip secara Baku	Persen	23	28	38	53	69	85	100
18	Waktu pelayanan proses perizinan	hari	5	3	3	3	2	2	1
19	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	0	0	5,50	8,33	12,50	14,55	16,66
20	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi keahlian dalam jabatan	Persen	5,80	8,53	9,38	10,24	11,09	11,94	12,79
21	Persentase ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	Persen	76,77	76,77	80,18	85,30	88,71	93,82	95,53
22	Rasio ASN terhadap jumlah penduduk	Persen	1,62	1,62	1,53	1,60	1,66	1,67	1,68

Sumber : Hasil Analisis 2016

(2) INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MISI KEDUA

Indikator kinerja daerah (Tabel 9.3) digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi Kedua: Mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi dan pemenuhan rumah layak huni.

Tabel 9.3 Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Kedua

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	67,40	67,60	67,80	68,00	68,20	68,50	68,70
2	Rasio rumah layak huni	Persen	30,27	33,17	35,07	36,97	38,87	40,77	42,70
3	Luas permukiman tidak layak huni/permukiman kumuh	Ha	39,41	35,30	30,25	25,80	20,73	15,91	10,13
4	Rumah tinggal bersanitasi	Persen	78,14	83,67	89,53	95,18	100,00	100,00	100,00
5	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Persen	87,17	88,00	88,25	88,50	88,75	89,00	90,25
6	Persentase balita gizi buruk	Persen	2,17	2,15	2,13	2,10	2,08	2,04	2,00
7	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per 1000 Penduduk	14,68	14,60	14,40	14,20	14,00	14,00	14,00
8	Rasio Puskesmas, Pustu, Puskesmas, Polindes per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
9	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Persen	0,0066	0,0066	0,0070	0,0075	0,0090	0,0095	0,0125
10	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
11	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98,04	98,50	98,80	99,00	99,50	99,80	100
14	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	98,27	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif	Persen	45,44	50	60	70	80	90	100
17	Cakupan penderita DBD yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
18	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	jiwa	12.805	15.050	16.520	17.226	18.714	20.247	21.539
19	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
20	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Anak	2	2	2	2	2	2	2
21	Rasio Akseptor KB	Persen	72	73	75	78	80	85	85
22	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	70	75	80	83	85	90	90
23	Cakupan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I	Persen	80	82	85	87	90	95	95
24	Posyandu Aktif	Posyandu	360	359	365	365	365	365	365
25	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kelahiran Hidup	12,88	12,60	12,40	12,20	12,00	11,80	11,60
26	Jumlah Kematian Ibu	Kelahiran Hidup	6/5.123	6/KH	6/KH	6/KH	6/KH	6/KH	6/KH
27	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
28	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan normal sesuai standar di fasilitas kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
29	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas kesehatan tingkat pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
30	Persentase usia balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
31	Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
32	Persentase warga Negara usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	65	65	70	80	90	100	100
33	Persentase warga Negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
34	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
35	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	65	65	70	80	90	100	100
36	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
37	Persentase orang tuberkulosis paru mendapatkan pelayanan tuberkulosis paru sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
38	Persentase orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
39	Persentase satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene Sanitasi pangan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100
40	Rasio gedung terhadap pasien		46/63.066	50/63.311	53/63.749	55/63.960	56/64.216	57/64.407	57/64.553
41	Rasio ruangan terhadap pasien		514/63.066	556/63.311	622/63.749	678/63.960	698/64.216	698/64.407	698/64.553
42	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	65,7	80,20	82,00	82.50	83,00	83,70	83,70
43	Bed Turn Over (BTO)	Kali	55,9	56	56,5	57	57	57	57
44	Average Length Of Stay (ALOS)	Hari	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
45	Turn Over Interval (TOI)	Hari	2,3	2,3	2,3	3	3	3	3
46	Net Death Rate (NDR)	Persen	10,55	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
47	Gross Death Rate (GDR)	Persen	28,58	28,50	28,50	28,50	28,00	28,00	28,00
48	Persentase pengolahan limbah padat, limbah cair dan limbah medis rumah sakit	Persen	62,5	65	70	75	80	85	85
49	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	25,49	28,52	34,44	40,36	46,75	54,49	54,49
50	Penegakan hukum lingkungan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
51	Cakupan Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Persen	4	3,9	3,8	3,6	3,5	3,4	3,4
52	Cakupan Sasaran pasangan Usia subur menjadi Peserta KB aktif	Persen	75	80	85	87	90	95	95
53	Cakupan Penyediaan Alat dan Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Persen	28	29	30	31	32	35	35
54	Cakupan Penyediaan Informasi data mikro keluarga disetiap desa/Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
55	Ratio Petugas Lapangan keluarga Berencana/Penyuluh keluarga Berencana (PLKB/PKB)	Rasio	1:3	1:2	1:2	1:2	1:2	1:1	1:1
56	Ratio Pembantu Pembina keluarga Berencana (PPKBD)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
57	Cakupan anggota bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	80	83	85	87	90	95	95

Sumber : Hasil Analisis 2016

(3) INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MISI KETIGA

Tabel 9.4 memuat indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi Ketiga: Mewujudkan pendidikan berkualitas, prestasi kepemudaan, ketahanan budaya.

Tabel 9.4 Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Ketiga

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)	Tahun	7,56	7,60	7,70	7,75	7,85	7,90	8,00
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Persen	108,43	109,00	109,20	109,40	109,60	109,60	110,00
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	80,47	81,00	82,00	82,75	83,50	84,25	85,00
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen							
5	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Angka Kelulusan SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Persen	99,27	100	100	100	100	100	100
8	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33	110,33
9	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	62,33	66,50	70,75	75,00	79,50	83,75	88,00
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	Persen	45,82	48,00	50,55	52,50	55,00	57,50	60,00
11	Angka Melek Huruf	Persen	98,82	98,85	98,90	98,95	98,95	98,97	99,00
12	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Persen	7,29	7,40	7,53	7,68	7,68	8,04	8,26
13	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	Persen	115,02	110,20	110,50	110,90	111,20	111,60	112,00
14	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	Persen	83,39	111,95	112,60	113,10	113,75	114,40	115,00
15	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	81,93	75,23	76,62	76,01	79,40	80,79	82,18
16	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	Persen	71,84	93,85	93,90	94,10	94,50	94,80	95,0
18	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	63,31	72	74	76	78	80	82
19	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	1:24	1:24	1:23	1:23	1:22	1:21	1:20
20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	Rasio	1:31	1:31	1:31	1:30	1:30	1:30	1:30
21	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA	Rasio	1:39	1:38	1:36	1:35	1:34	1:33	1:32
22	Rasio Guru/murid SD/MI	Rasio	1:28	1:27	1:25	1:24	1:23	1:21	1:20



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
23	Rasio Guru/siswa SMP/MTs	Rasio	1:27	1:26	1:24	1:23	1:22	1:21	1:20
24	Rasio Guru/siswa SMA/SMK/MA	Rasio	1:29	1:28	1:27	1:25	1:23	1:21	1:20
25	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95.67	95.30	95.35	95.40	95.42	95.46	95.50
26	Jumlah perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional	Unit	1	1	2	2	2	2	2
28	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	88.624	90.000	95.000	100.000	110.000	120.000	125.000
29	Prosentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan terhadap populasi yang harus dilayani	Persen	35	36	38	40	44	48	50
30	Jumlah sekolah dan desa yang terlayani perpustakaan keliling	Sekolah/ Desa	0	133	140	147	155	165	175
31	Pemuda berprestasi	Persen	10	10	20	25	30	35	35
32	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi	32	32	32	36	38	38	40
33	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Kegiatan	8	8	10	12	13	13	14
34	Jumlah Klub Olahraga	Klub	209	209	210	210	212	212	212
35	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Cabang olahraga	12	12	12	13	13	14	14
36	Jumlah Kegiatan Olahraga	Kegiatan	3	6	6	6	7	7	7
37	Jumlah gedung kesenian	Unit	1	1	1	1	2	2	2
38	Jumlah grup kesenian (Pembinaan dan pembentukan Sanggar Seni/Tari/Budaya)	Kelompok	12	12	14	14	16	16	17
39	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	1	1	1	1	1	2	2
40	Jumlah pengunjung festival seni dan budaya	Orang	2.500	6.000	11.000	16.000	17.000	19.000	20.000
41	Indeks pembangunan gender	Persen	88,55	90	92	95	97	99	99
42	Indeks pemberdayaan gender	Persen	66,90	70	75	80	85	90	90
43	Proporsi jumlah perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif	Persen	5,71	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
44	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persen	65	70	75	80	85	90	90
45	Tingkat pembinaan tradisi dan kesenian daerah (persentase tradisi dan kebudayaan daerah yang dibina)	Persen	50	65	70	75	75	80	90
46	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	Persen	74	75	77	79	81	85	85
47	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	Persen	25	27	30	32	35	40	40
48	Rasio KDRT	Persen	0,04	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
49	Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	Persen	0	0	0	0	0	0	0
50	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
51	Jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1
52	Jumlah benda/situs dan	Unit	26	26	26	26	26	26	26



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	kawasan cagar budaya yang dilestarikan								
53	Jumlah kunjungan wisatawan local	Orang	24.649	25.000	27.000	30.000	40.000	45.000	50.000
54	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	100	120	150	200	250	300	300
55	Jumlah potensi ODTW baru yang terbuka	Objek	5	5	5	5	5	5	5
56	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
57	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100
58	cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	75	77	80	83	85	90	90
59	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	75	75	75	75	75	75	75
60	Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Hasil Analisis 2016

(4) INDIKATOR KINERJA UNTUK MISI KEEMPAT

Tabel 9.5 memuat indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi Keempat: Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata.

Tabel 9.5 Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Keempat

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertumbuhan sector pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Persen	7,63	7,80	8,00	8,20	8,40	8,50	8,60
2	Kontribusi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan terhadap PDRB (%)	Persen	51,83	51,70	51,65	51,60	51,55	51,50	51,50
3	Regulasi Ketahanan Pangan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Ketersediaan pangan utama	Ton	73.605	84.738	91.572	98.998	106.500	114.383	122.698



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Luas Areal Tanaman Padi	Ha	39.669,59	42.848,36	44.657,26	46.365,08	48.000	49.714,62	51.385,61
	Produksi padi	Ton	230.877	261.375	276.875	292.100	307.200	323.145	339.145
	Produktifitas Padi	Ton/ha	5,82	6,10	6,20	6,30	6,40	6,50	6,60
6	Luas Areal Tanam Jagung	Ha	7.035,53	7.000,00	7.429,24	7.925,23	8.421,29	8.917,43	9.413,63
	Produksi jagung	Ton	36.233	36.400	39.375	42.400	45.475	48.600	51.775
	Produktifitas jagung	Ton/ha	5,15	5,20	5,30	5,35	5,40	5,45	5,50
7	Luas Areal Tanaman Kakao	Ha	36.213	37.712	39.413	41.313	43.413	45.713	48.214
	Produksi Kakao	Ton	22.296,45	22.567,02	29.040,56	31.123,88	32.412,77	34.172,98	38.363,83
	Produktifitas Kakao	Ton/ha	0,99	1,13	1,18	1,19	1,2	1,22	1,3
8	Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit	Ha	17.194,45	17.269,45	17.347,45	17.427,45	17.517,45	17.617,45	17.707,45
	Produksi Kelapa Sawit	Ton	239.236	242.048	245.003	248.078	251.479	255.211	258.769
	Produktifitas Kelapa sawit	Ton/ha	0,24	0,25	0,251	0,252	0,253	0,255	0,256
9	Luas Areal Tanaman Kopi Robusta	Ha	1.209,08	1.234,08	1.259,08	1.284,08	1.309,08	1.334,08	1.359,08
	Produksi Kopi Robusta	Ton	769,15	785,07	801,33	817,91	834,84	852,13	869,76
	Produktifitas Kopi Robusta	Ton/ha	0,1013	0,1014	0,1015	0,1016	0,1017	0,1018	0,1019
10	Luas Areal Tanaman Kopi Arabika	Ha	194,25	214,25	234,25	254,25	274,25	294,25	314,25
	Produksi Kopi Arabika	Ton	139,75	154,14	170,02	187,53	206,85	228,15	251,65
	Produktifitas Kopi Arabika	Ton/ha	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	Luas Areal Tanaman Lada	Ha	285,40	335,40	385,40	435,40	485,40	535,40	585,40
	Produksi Lada	Ton	92,29	108,46	127,46	149,79	176,03	206,88	243,12
	Produktifitas Lada	Ton/ha	0,883	0,892	0,901	0,910	0,919	0,928	0,937
12	Luas Areal Tanaman Cengkeh	Ha	549,85	569,85	589,85	609,85	629,85	649,85	669,85
	Produksi Cengkeh	Ton	146,86	152,21	157,75	163,49	169,44	175,61	182
	Produktifitas Cengkeh	Ton/ha	0,643	0,645	0,647	0,649	0,651	0,653	0,655
13	Luas Areal Tanaman Sagu	Ha	1.759	1.779	1.799	1.819	1.839	1.859	1.879
	Produksi Sagu	Ton	1.388,23	1.757	1.807	1.900	2.000	2.050	2.100
	Produktifitas Sagu	Ton/ha	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
14	Luas Areal Kelapa Dalam	Ha	2.429,72	2.439,72	2.449,72	2.459,72	2.469,72	2.479,72	2.489,72
	Produksi Kelapa Dalam	Ton	2.699,27	2.710,33	2.721,45	2.732,60	2.743,81	2.755,06	2.766,35
	Produktifitas Kelapa Dalam	Ton/ha	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
15	Produksi Tanaman Buah-buahan								
	Produksi durian	Ton	17.929	18.018	18.919	20.244	21.660	23.177	24.799
	Produksi rambutan	Ton	6.723	6.790	7.130	7.487	7.861	8.254	8.667
	Produksi jeruk siam	Ton	1.424	1.495	1.645	1.809	1.990	2.189	2.408
16	Produksi Tanaman Sayur-Mayur								
	Produksi bawang merah	Ton	24	30	36	47	59	74	92
	Produksi cabai	Ton	507	522	537	554	570	587	605
	Produksi kentang	Ton	0	0	21	26	32	41	51



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Produksi wortel	Ton	0	0	4	4,8	5,7	7,2	9
	Produksi kubis	Ton	0	0	30	33	36	40	44
17	Populasi Ternak								
	Populasi sapi	ekor	26.455	27.427	28.927	30.247	31.927	33.427	35.098
	Populasi kerbau	ekor	14.218	14.645	15.084	15.536	16.002	16.483	16.977
	Populasi kambing	ekor	10.473	11.814	13.281	14.749	16.216	17.684	19.629
	Populasi babi	ekor	32.583	36.167	39.422	44.153	49.463	54.904	60.919
18	Populasi ayam buras	ekor	838.060	908.165	989.900	1.098.789	1.219.656	1.353.818	1.489.200
19	Populasi ayam ras pedaging	ekor	2.829.141	2.970.598	3.119.128	3.275.084	3.438.839	3.610.780	3.791.319
20	Populasi ayam ras petelur	ekor	93.626	97.371	101.266	105.317	109.529	113.910	118.466
21	Populasi itik	ekor	108.345	118.096	128.725	140.310	152.938	166.702	181.705
22	Produksi daging	Kg	726.062	760.455	803.132	848.280	896.047	946.585	991.700
23	Produksi telur	kg	1.687.195	1.780.427	1.845.372	1.913.826	1.986.023	2.062.207	2.178.402
24	Capaian bina kelompok tani	persen	18	20	22	24	26	28	30
25	Luas Lahan Kritis	ha	59.832.29	57.332.29	54.832	52.332	49.832	47.332	45.832
26	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	52,37	52,50	53,00	53,50	54,00	54,50	55,00
27	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	11,00	11,00	11,10	11,20	11,30	11,40	11,50
28	Produksi Perikanan Tangkap								
	- Tangkap Umum	Ton	155,10	157,43	159,79	162,18	164,62	167,09	169,59
	- Tangkap Laut	Ton	1.570,90	1.594,46	1.618,38	1.642,66	1.667,30	1.692,31	1.717,69
29	Produksi Perikanan Budidaya								
	- Budidaya Air Laut	Ton	31.441,60	32.542,06	33.681,03	34.859,87	36.079,96	37.342,76	38.649,76
	- Budidaya Air Payau	Ton	152.352,80	157.685,15	163.204,13	168.916,27	174.828,34	180.947,33	187.280,49
	- Budidaya Air tawar	Ton	1.562,00	1.616,67	1.673,25	1.731,81	1.792,52	1.855,26	1.920,19
30	Konsumsi Ikan	Kg/Org/Thn	56,61	57,18	57,75	58,33	58,91	59,50	60,09
31	Jumlah Produksi Olahan terhadap Produksi Perikanan	kg	3.445	4.134	4.960	5.952	7.143	8.572	10.286
32	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	21,42	23,50	25,50	27,50	29,50	31,50	33,47
33	Persentase Koperasi Aktif	Persen	61,02	62,00	64,00	66,00	68,00	69,00	69,60
34	Pertumbuhan industri	Persen	44,22	44,50	44,70	44,80	44,90	45,00	45,10
35	Kontribusi industry rumah tangga terhadap PDRB sector industri	Persen	2,38	2,30	2,15	2,00	1,85	1,70	1,65
36	Kontribusi sector industry terhadap PDRB	Persen	4,55	4,57	4,60	4,62	4,65	4,67	4,69
37	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	9,87	9,95	10,21	10,54	10,88	10,97	11,00
38	Cakupan bina kelompok pedagang usaha informal	Persen	9,57	10,00	10,50	11,25	11,55	12,17	12,50
39	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,36	9,37	9,39	9,41	9,45	9,48	9,50
40	Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB	Persen	1,75	1,85	1,95	2,50	2,15	2,27	2,35



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
41	Kontribusi sector industry terhadap PDRB	Persen	4,55	4,57	4,60	4,62	4,65	4,67	4,69
42	Jumlah Investor PMDN	Investor	831	876	905	937	968	979	1.000
43	Jumlah Investor PMA	Investor	1	1	2	2	3	4	5
44	Jumlah Nilai investasi PMDN berskala nasional	000.Rp	72.944.771	80.239.248	88.263.173	97.089.490	106.798.439	117.478.283	129.226.111
45	Jumlah Nilai investasi PMA berskala nasional	000.Rp	145.889.542	160.478.496	176.526.346	194.178.980	213.596.878	234.956.566	258.452.223
46	Jumlah kunjungan wisatawan lokal	Orang	24.649	25.000	27.000	30.000	40.000	45.000	50.000
47	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	100	120	150	200	250	300	300
48	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	3	3	4	4	5	5	5
49	Persentase UMK terhadap UMKM	Persen	98,87	98,90	98,97	99,50	99,75	99,98	100
50	Jumlah pasar tradisional/pasar moderen	Unit	4	2	2	2	2	2	10
51	Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN	000.Rp	72.944.771	7.294.477	14.588.954	15.318.402	16.777.297	18.309.138	19.986.867
52	Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMA	000.Rp	145.889.542	14.588.954	29.177.908	30.636.804	33.554.595	36.618.275	39.973.735
53	Kebutuhan Investasi	Rp. Miliar	506,86	573,56	605,83	715,48	837,59	863,47	864,00
54	Jumlah potensi ODTW baru yang terbuka	Objek	5	5	5	5	5	5	5
55	Pertambangan Tanpa Izin	Lokasi/ha	15/23	3/3	3/2,5	3/3	2/5	3/6	1/3,5
56	Jumlah pemilik IUP	IUP	43	43	30	30	30	30	30
57	Persentase KK dengan akses listrik	Persen	60,22	62,50	63,08	65,22	67,35	70,00	72,00
58	Rasio Desa Berlistrik	Persen	97,16	97,72	97,72	98,30	98,30	98,86	99,43
59	Jumlah KK yang terlayani PLTMH dan PLTS	KK	5292	200	315	200	200	200	150
60	Jumlah KK pengguna Biogas	KK	32	1	10	10	10	10	10
61	Jumlah Dok. Potensi Geologi	Dok.	2	1	2	3	2	3	2
62	Izin Usaha Pertambangan	Dok	0	0	1	1	1	2	2
63	Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	IPR	0	0	2	1	1	2	1
64	Persentase kemiskinan pengguna air tanah	Persen	29,79	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33

Sumber : Hasil Analisis 2016

(5) INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MISI KELIMA

Tabel 9.6 memuat indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi Kelima: Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

Tabel 9.6 Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Kelima

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan pengawasan terhadap AMDAL	Persen	33,33	40,00	48,00	56,00	64,00	71,00	75,00
2	Penegakan hukum lingkungan	Persen	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00	9,00	10,00
3	Pencemaran status mutu air	Persen	9,52	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	71,43



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	Persen	12,50	12,50	18,75	25,00	25,00	31,25	31,25
5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	Persen	33,33	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
6	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	25,49	28,52	34,44	40,36	46,75	54,49	54,49
7	Prosentase Penurunan Pelanggaran terhadap tata ruang bangunan dan lingkungan.	Persen	31,26	30,75	28,71	26,11	23,51	20,92	18,32

Sumber : Hasil Analisis 2016

(6) INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MISI KEENAM

Tabel 9.7 memuat indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi Keenam: Mewujudkan penurunan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur wilayah.

Tabel 9.7 Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Keenam

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan Nasional	Persen	14,32	13,55	12,37	11,55	9,50	8,50	8,00
2	Angka Pengangguran Terbuka	Persen	2,60	2,60	2,55	2,40	2,30	2,22	2,10
3	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Persen	14,17	19,75	25,20	31,44	35,99	46,71	50,00
4	Rasio Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	59,67	64,00	67,00	70,00	73,00	76,00	80,00
5	Jumlah terminal yang difungsikan	Buah	1	1	1	2	2	3	3
6	Rumah tinggal yang mengakses listrik (rasio elektrifikasi)	Persen	60,22	62,98	65,65	68,85	69,73	70,79	72,00
7	Rumah tangga yang mengakses air bersih	Persen	63,00	73,00	83,00	93,00	100	100	100
8	Persentase Rumah Tangga yang mengakses Telekomunikasi	Persen	75	79	82	89	90	91	93
9	Rasio Penduduk Yang Bekerja	Persen	85,47	86,50	87,00	87,50	88,00	88,50	89,00
10	Prosentase Luasan Sawah yang beririgasi baik	Persen	43	45	48	52	55	57	60
11	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	57,92	64,00	67,00	70,00	73,00	76,00	76,00
12	Jumlah Bandar Udara	Buah	3	3	3	3	3	4	4
13	Persentase kendaraan laik jalan	Persen	56,83	57,58	58,58	59,58	60,58	61,58	62,58
14	Jumlah Perusahaan Yang Menerapkan BPJS	Buah	235	235	240	245	245	250	255

Sumber : Hasil Analisis 2016



(7) INDIKATOR KINERJA DAERAH UNTUK MISI KETUJUH

Tabel 9.8 memuat indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi Ketujuh: Mewujudkan ketertiban umum, keamanan yang kondusif dan perlindungan masyarakat.

Tabel 9.8 Indikator Kinerja Daerah untuk Misi Ketujuh

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah konflik sosial	Kejadian	19	18	15	12	10	10	7
2	Rasio pemakai narkoba yang direhabilitasi	Persen		100	100	100	100	100	100
3	Korban bencana yang ditangani	Persen	75	78	81	85	89	93	95
4	Angka kriminalitas	Kejadian	89	79	69	59	49	39	29
5	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	31	40	45	50	35	25	29
6	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	2	1	1	2	1	2	1
7	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	2	1	2	2	2	1	2
8	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	Orang	36	34	32	30	28	26	24
9	Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Persen	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	60	70	75	80	85	90	100
11	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam penanganan Kebakaran	Waktu	30 menit s/d 2 jam	15 Menit s/d 1 Jam	15 Menit s/d 1 Jam	15 Menit s/d 1 Jam	15 Menit s/d 1 Jam	15 Menit s/d 1 Jam	15 Menit s/d 1 Jam
12	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Klp	-	156	264	368	489	594	594
13	Jumlah LSM	LSM	14	56	70	75	75	75	75
14	LPM berprestasi	Persen	-	-	30	60	77	94	112
15	PKK aktif	Persen	-	28,59	41,67	59,80	77,45	91,18	91,18
16	Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan	Persen	69	70	71	72	73	74	75
17	Cakupan petugas Perlindungan masyarakat di Kabupaten	Jumlah	2	-	-	2	2	-	2
18	Jumlah Demo	Kejadian	8	7	6	5	4	3	2
19	Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam Tanggap Darurat	Hari	4	3	3	2	2	1	1
20	Ratio Penurunan Resiko Bencana	Persen	70	60	50	40	30	20	10
21	Jumlah Kebutuhan dasar korban bencana alam dan Kebakaran yang dipenuhi	Janis	9	9	10	10	10	10	10
22	Jumlah Kawasan bencana yang direhabilitasi dan rekonstruksi	Kawasan	6	9	9	9	9	9	9
23	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Orang	2,11	2,53	3,37	4,21	5,05	5,89	6,73
24	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketertiban ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)	Persen	79,63	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2015	Capaian Sasaran					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
25	Cakupan patrol petugas Satpol PP	Jumlah	54	50	50	60	60	65	65
26	Persentase penegakan perda dan perbup.	Persen	61,84	63,00	65,00	67,00	69,00	73,00	75,00

Sumber : Hasil Analisis 2016



BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD dan RAPBD Kabupaten Luwu Utara sampai dengan tahun 2021. Khusus untuk tahun 2016, meskipun penyusunan RKPD dan RAPBD 2016 masih mengacu pada RPJMD periode sebelumnya, namun RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKPD Perubahan dan APBD Perubahan Tahun 2016.

Khusus untuk penyusunan RKPD tahun 2017, sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor No. 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, maka penyusunan rancangan awal berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, serta memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah.

Sedangkan untuk penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2021, tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan transisi sebelum disusunnya RPJMD Kabupaten Luwu Utara periode berikutnya tahun 2021-2026.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Luwu Utara periode 2016-2021 bertanggung-jawab atas seluruh pelaksanaan RPJMD dan berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dengan mengerahkan semua potensi dan sumber daya daerah, serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah;
2. Sekretaris Daerah berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 agar seluruh program-program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Luwu



Utara berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016-2021 kedalam RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja SKPD;

4. Seluruh SKPD dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu Utara berkewajiban menyusun Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD setiap tahunnya;
5. Pemerintah Daerah bersama seluruh masyarakat, termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya seluruh program pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021;
6. Evaluasi atas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dilakukan setiap tahun. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021, maka diperlukan: (i) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah oleh masing-masing Pimpinan SKPD; (ii) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya; (iii) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya; dan (iv) Kepala Bappeda menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan berkoordinasi dengan seluruh SKPD;
7. Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 hanya dapat dilakukan apabila: (i) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata-cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; (ii) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; (iii) terjadi perubahan yang mendasar (mencakup, antara lain, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional); dan (iv) merugikan kepentingan nasional (bertentangan dengan kepentingan nasional).



BAB XI PENUTUP

RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu Utara. RPJMD juga menjadi instrumen untuk melakukan sinergi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan provinsi dengan memperhatikan 11 prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, dan pembangunan nasional dengan memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJMN tahun 2014-2019 selama lima tahun mendatang.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 menjadi pendorong gerakan bersama membangun "Luwu Utara Yang Religius Dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata Yang Berlandaskan Kearifan Lokal". Oleh sebab itu, keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kelurahan/Desa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah, komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Luwu Utara, serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Utara juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta.

BUPATI



Hj. INDAH PUTRI INDRIANI, S.Ip., M.Si